

M. Rizki, Jhane Pebyana W.  
Moh. Ivan Riansa, dkk

Belajar Merawat Indonesia  
**MENAGIH  
JANJI  
NEGARAWAN**



DOMPET  
DHUafa  
BEASTUDI INDONESIA

Belajar Merawat Indonesia  
**MENAGIH JANJI NEGARAWAN**  
© BI-DD 2014

**Penulis**

M. Rizki, Jhane Pebyana Wilis, Moh. Ivan Riansa, dkk

**Penyunting**

Amirul Hasan

**Penata Letak**

Burhannudin

**Perwajahan Sampul**

Dwi Prasetyo

**Hak Cipta dilindungi undang-undang**

*All Rights Reserve*

**Cetakan I, Oktober 2014**

**Diterbitkan oleh :**

Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa  
Jln. Raya Parung Km. 42 Ds. Jampang Kec. Kemang  
Kab. Bogor, Jawa Barat 16310  
Telp. (0251) 8610817, 8610818, 8612044  
Faks. (0251) 8615016  
Website : [www.beastudiindonesia.net](http://www.beastudiindonesia.net)  
E-mail : [beastudi@beastudiindonesia.net](mailto:beastudi@beastudiindonesia.net)

**ISBN 978-602-7807-45-7**

# MENAGIH JANJI PRESIDEN (NEGARAWAN)

*Pengantar Direktur Beastudi Indonesia*

Pemilu presiden telah kelar. Hasilnya pun sudah keluar. Sebuah takdir yang harus diterima bersama seluruh rakyat Indonesia, pihak yang kalah maupun menang. Mereka yang terpilih adalah presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka adalah manusia biasa. Bukan tuhan atau pun malaikat. Pasti banyak celah dan kekurangan.

Ekspektasi terhadap capres dan cawapres sudah saatnya lebih realistis. Lima tahun bukan waktu yang lama. Enam puluh bulan dengan cepat akan terlewati. Terlalu banyak pekerjaan yang harus ditunaikan. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan— dan pada akhirnya detik terakhir di 60 bulan akan segera berlalu. Pemilu pun digelar kembali.

Kepada pemenang pilpres, saatnya Bapak bekerja. Bukan lagi tebar pesona, atau sekadar pencitraan lewat media. Cukuplah janji terucap saat berkampanye. Lekat dalam ingatan, senyum manis penuh harapan. Jutaan rakyat tak sabar menanti, setiap kerja untuk membayar janji. Kobaran semangat melakukan perubahan, untuk Indonesia yang lebih baik dan berdaya.

Indonesia adalah negara yang besar. Kaya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terbentang luas darat dan lautan. Dari Sabang hingga Merauke, 1,9 juta kilometer persegi luas wilayah, dan 250 juta-an jiwa jumlah penduduknya. Dengan jumlah kelas menengah meningkat pesat setiap tahunnya.

Pada masa kampanye, para capres dan cawapres telah mengikrarkan janji-janji politik mereka di depan calon pemilih.

Jika pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta, telah mengikrarkan janji politik untuk membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur; melaksanakan ekonomi kerakyatan; membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam; meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan; meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olah raga; mempercepat pembangunan infrastruktur; menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup; dan membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani.

Maka demikian juga pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang saat ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Dalam suatu kesempatan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga telah mengikrarkan janji politik dan menegaskan adanya 9 program nyata kepada masyarakat yang dikenal dengan Nawa Cita, yaitu: (1). Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri secara bertahap selama lima tahun. Program renumerasi PNS akan dituntaskan di tingkat pusat dan diperluas sampai level daerah; (2). Menyejahterakan desa dengan cara mengalokasikan dana desa rata-rata Rp1,4 miliar per desa dalam bentuk program bantuan khusus dan menjadikan perangkat desa sebagai PNS secara bertahap; (3). Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%. (4). Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta ha sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta ha lahan pertanian baru di luar Jawa dan pendirian bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog;

(5). Perbaiki 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan; (6). Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan

industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.(7). Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat. (8). Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa. (9). Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar.

Kini saatnya menghitung mundur 60 bulan yang dipercayakan. Saatnya Bapak presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla membayar hutang politik. Melalui kerja-kerja nyata pemerintahan. Para tim pendukung harus turut bertanggungjawab, mengawal dan memastikan presiden dan wakil presiden sampai tujuan. Selanjutnya rakyat berhak menilai dan menagih janji para negarawan.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini adalah wakaf gagasan yang ditulis para penerima manfaat Beastudi Indonesia, salah satu jejaring Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa yang sangat konsen mengembangkan SDM strategis. Para penulis adalah para aktivis mahasiswa. Berikhtiar memainkan peran sebagai agent of social control terhadap pemerintah. Bentuk dukungan terhadap visi mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan berdaya.

Mustahil, semua janji presiden dan wakil presiden yang baru dapat tertunaikan. Kecuali, semua turun tangan, bersama-sama mewujudkan. Bukan saatnya mengeluh, bukan saatnya mencari kambing hitam. Pilihan telah diberikan, tinta telah ditumpahkan, dan kertas terlanjur basah karena tulisan. Negarawan tak akan pernah ingkar janji. Karena, "Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna) agama orang yang tidak menunaikan janji". (HR. Ahmad).

Selamat membaca, selamat bekerja !!!

Parung, September 2014

**Budiyanto**

# DAFTAR ISI

Menagih Janji Presiden (Negarawan) <i>Pengantar Direktur Beastudi Indonesia</i>	iii
--	-----

## JANJI PERUBAHAN

Surat Terbuka Untuk Presidenku - [M. Rizki]	2
Bersatu, Damai dan Berdaya Indonesiaku - [Noor Muhammad Adriani]	6
Kecewa Negeri Ini - [Donny Fajar Ramadhan]	16
Negarawan Berjiwa Ksatria - [Fariz Abdullah]	20
Pelajaran 7 Negarawan - [Asya Fathya Nur Zakiah]	26
Membangun Mental Politik Humanis - [Ekamara Ananami Putra]	32
Melayani Rakyat atau Memenuhi Hasrat - [Kgs. M. Aditia]	40
Revolusi Mental Penjajah dan Koruptor - [Muhammad Isyraqi El Hakim]	44
Mengelola Kekuasaan - [Maman]	50
Berkaca Pada Turki - [Rizal Eko Kurniawan]	55
Pesan Rubi Untuk Negarawan - [Dhita Inawati Sam]	60
Korupsi Bobrokkan Moral Bangsa - [Irma Novikawati]	67
Berharap Happy Ending - [AR Haderani]	73

## JANJI KEDAULATAN

Merawat Isi Perut Bumi Pertiwi - [Hikmatyar Abdul Aziz]	80
Langkah Awal Menuju Kedaulatan Energi - [Aditya Pratama]	85
Negeri Kaya Energi (tapi) Merana - [Ahmad Yasin R]	93
Melunasi Utang Kemerdekaan - [Fadjar Mulya]	97
Menagih Janji Kedaulatan Energi - [Muhammad Rifki Ali]	102

## **JANJI KEMANDIRIAN**

Terasing di Negeri Agraris - [ <i>Jhane Pebyana Wilis</i> ]	110
Jeritan Penghuni Negeri Agraris - [ <i>Siti Nur Arifah</i> ]	115
Kedaulatan Pangan Berbasis kerakyatan - [ <i>Ayo Soraya</i> ]	122
Bank Petani dan Pupuk Murah - [ <i>Ibrahim Wahid</i> ]	128
Nasib Petani di Balik Pesta Demokrasi - [ <i>Zulaika</i> ]	132
Ekonomi Kerakyatan Negeri Paradoksial - [ <i>Dadan Hudanulhak</i> ]	137
Tiada Jera Perjuangan untuk Berdaulat - [ <i>Muhammad Ivan Riansa</i> ]	144

## **JANJI BERKEPRIBADIAN**

Revolusi Budaya Indonesia - [ <i>Ahsan Ramadhan</i> ]	152
Menagih Janji dari Tapal Batas- [ <i>Triana Rahmawati</i> ]	156
Guru Negerawan, Kunci Merawat Indonesia - [ <i>Alvian Novia Aroianto</i> ]	162
Sekolah Bhineka Tunggal Ika - [ <i>Amelia Sakinah</i> ]	168
Keluarga Basis Revolusi karakter - [ <i>Amroyanu Habib</i> ]	174
Catatan untuk Reformasi Pendidikan - [ <i>Ismi Nurillah</i> ]	180
Jangan Beri Harapan Palsu - [ <i>Rian Mantasa Salve Prastica</i> ]	185
Revolusi Inovasi - [ <i>Rafi Putra Arriyan</i> ]	191
Janji Mencerdaskan Negeri - [ <i>Shoim Mardiyah</i> ]	197

## **JANJI INDONESIA SEHAT**

Berharap (dari) Kartu Indonesia Sehat - [ <i>Dede Rohimah</i> ]	204
Meraba Konsep Kartu Indonesia Sehat - [ <i>Gisca Ajeng Widya Ninggar</i> ]	209
Janji Mengobati Indonesia - [ <i>Lisa N</i> ]	216
Sistem Kesehatan yang Tak Sehat - [ <i>M. Syukri Kurnia Rahman</i> ]	223
Opsi Pembatalan Kartu Indonesia Sehat - [ <i>Dwi Rendra Hadi</i> ]	228
Telaah Program Kesehatan Jokowi-JK - [ <i>Sicha Ramadhani</i> ]	233

## **JANJI DARI PINGGIRAN**

Poros Maritim Dunia : Antara Solusi dan Ilusi - <i>[Aa Habib Baihaqi]</i>	240
Daerah Perbatasan Yang Terlupa - <i>[Ariyanto Pamungkas]</i>	247
(Bukan) Desa Obralan - <i>[Nabella Rizki Al Fitri]</i>	253
Janji Pemantik Harapan Bangsa - <i>[Novianti Purnama Sari]</i>	260
<b>Profil Bakti Nusa</b>	267
<b>Tentang Penulis</b>	271



# **JANJI PERUBAHAN**

# SURAT TERBUKA UNTUK PRESIDENKU

*M. Rizki*

*Jangan biarkan janji itu  
Hanya tersimpan dalam lembaran kertas yang lusuh  
Jangan jadikan program hanya sebagai wacana pendulang suara  
Visi, misi, dan program aksi  
Telah diperdengarkan pada bangsa ini  
Akankah terealisasi?  
Atau kembali menjadi angan penduduk negeri*

Sudah 69 tahun bangsa ini berdiri. Sebuah usia yang bisa dikatakan cukup untuk membuat sebuah bangsa menjadi besar. Menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Namun kenyataannya, Indonesia saat ini masih berada di persimpangan jalan. Entah memilih untuk menjadi bangsa yang berdaya atau malah menjadi bangsa yang hanya dikenal dari sebuah peta.

Jika negara diibaratkan sebuah kapal, maka sang nahkodalah yang berperan penting di dalamnya. Bukan hanya berperan penting namun juga menjadi orang yang terpenting karena sekarang seluruh mata terpaku padanya. Sang nahkoda akan mengatur segala hal yang ada. Mengarahkan ke arah mana kapal tersebut akan berlayar. Menuju ke sebuah dermaga yang indah atau malah karam dan tenggelam di tengah lautan.

Sebelum kapal berlayar sang nahkoda harus memiliki rencana perjalanan. Mulai dari peta, kompas, hingga orang-orang yang

akan diajaknya berlayar. Sebuah rencana yang bukan hanya sekedar terucapkan namun terlaksana hingga kapal tersebut sampai pada tujuan. Nahkoda bagi bangsa Indonesia saat ini adalah Anda, sang presiden terpilih.

Sebelum duduk di singgasana tertinggi dan disumpah di bawah Kitab Suci, presiden terpilih telah banyak memberikan janji. Apa yang presiden janjikan tak lain merupakan bentuk kecintaan akan bangsa ini. Visi, misi, dan program aksi yang dijabarkan merupakan suatu upaya untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Saya menyakini itu. Begitu juga dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang hampir mencapai 255 juta jiwa ini. Terbukti dengan label presiden terpilih yang sekarang Anda bawa.

Tugas Anda untuk menyakinkan penduduk Indonesia mungkin telah usai. Namun tugas besar menanti anda untuk mempertahankan kepercayaan tersebut, mempertahankan kepercayaan rakyat Indonesia. Menepati dan merealisasikan janji untuk membawa Indonesia menjadi negara berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sesuai dengan apa yang Anda deklarasikan dalam setiap kesempatan saat berjumpa dengan rakyat Indonesia.

Wahai presidenku,

Anda berjanji menghadirkan kembali negara yang melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Hal itu bukan sebuah pekerjaan mudah, mengingat banyaknya permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hingga saat ini masih banyak tenaga kerja luar negeri yang pergi menyambung nyawa namun pulang dengan tak bernyawa. Masih banyak saudara-saudara sebangsa yang terkucilkan di daerah pinggiran Indonesia dan terpaksa menerima kebaikan dari negara tetangga.

Indonesia adalah negara yang besar. Untuk itu juga diperlukan keinginan serta tindakan yang besar untuk memajukannya. Keindahan Indonesia harus dirasakan dan dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan sekedar dinikmati oleh wakil rakyat saja. Kebijakan yang akan Anda ambil haruslah menyejahterakan. Anda telah benar dengan mengucapkan janji tersebut namun aksi nyata dan realisasilah yang akan membenarkan janji tersebut.

Wahai presidenku,

Anda berjanji membuat pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya serta bebas korupsi. Sekali lagi, ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Sangat banyak hal yang harus Anda benahi mulai dari pejabat di tingkat RT hingga mereka yang duduk di Mahkamah Konstitusi. Masih teringat di benak kita, kasus-kasus yang membuka potret gelap sistem pemerintahan Indonesia. Mulai dari pemegang kekuasaan konstitusional tertinggi yang terjerat kasus korupsi, hingga kasus dinasti gubernur dari salah satu provinsi. Sudah sering rasanya rakyat dibodohi dan ditipu oleh mereka. Penebar janji manis di saat kampanye namun kemudian hanya duduk manis di kursi jabatan.

Mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan tidaklah seperti membalikkan telapak tangan. Namun bukan berarti menjadi mustahil dilakukan. Anda tidak bekerja sendirian. Bangunlah pemerintahan seperti yang Anda janjikan. Jangan terpengaruh akan kepentingan-kepentingan yang dapat menghancurkan bangsa ini.

Wahai presidenku,

Anda berjanji meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia dengan program yang Anda bawa. Anda menjanjikan program wajib belajar 12 tahun tanpa pungutan biaya. Namun Anda harus tahu, pendidikan bukanlah sekedar masalah keterjangkauan biaya saja. Banyak hal yang harus diperhatikan. Akses pendidikan harus benar-benar merata dari ujung pelosok Sabang hingga Merauke. Sistem administrasi dan kurikulum juga perlu mendapatkan perbaikan besar-besaran. Karena saat ini pendidikan Indonesia hanya berbasis kompetensi. Tidak ada penanaman karakter yang menjadi pondasi utama dalam keilmuan. Menyebabkan lahirnya para calon-calon koruptor. Melahirkan para cendekiawan namun krisis moral. Berilmu namun tak berperan dalam kemajuan bangsa.

Indonesia sehat, Indonesia kerja hanya akan menjadi hiasan dalam museum sejarah kehidupan Anda jikalau tanpa realisasi. Untuk itu Anda harus benar-benar berkomitmen terhadap apa yang Anda janjikan. Tidak semua misi yang Anda jabarkan akan jadi kenyataan. Namun kenyataan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depan, berawal dari apa yang telah Anda janjikan. Maka berusahalah.

Wahai presidenku,

Anda berjanji untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Sebuah janji yang terlihat besar jika melihat perekonomian Indonesia di saat ini. Indonesia adalah negara yang kaya namun sampai saat ini kekayaannya belum dapat dinikmati sepenuhnya oleh bangsa ini. Kekayaan alam terus dieksploitasi bangsa asing, impor besar-besaran tetap dilakukan meskipun semestinya bisa dihasilkan di rumah sendiri.

Anda telah berjanji. Masa depan Indonesia kini ada pada Anda. Pastikan setiap pergerakan dan kebijakan yang diambil demi kepentingan rakyat Indonesia, bukan karena kepentingan individu atau partai semata. Banyak PR besar yang telah menanti Anda. Entah dari mana Anda akan memulainya, namun pastikan hal tersebut dapat direalisasikan pada akhirnya.

Wahai presidenku,

Janji Anda telah diperdengarkan hingga ke pelosok negeri ini. Visi dan misi Anda kini menjadi penuntun. Membawa bangsa ini menuju tangga kesejahteraan atau malah terpuruk dalam kemiskinan. Merealisasikan janji adalah harga mati, Anda siap atau tidak.

Mungkin kami telah bosan dengan kehidupan dan keterpurukan bangsa ini. Telah lelah melihat potret kelam para pemimpin negeri. Negeri ini terasa begitu gelap dan sunyi untuk dilalui. Namun dalam kegelapan itu, kami menyakini akan ada setitik cahaya yang menyinari. Menuntun bangsa ini untuk bangkit dan berdaya. Dan Anda, wahai presiden terpilih, kami titipkan harapan itu pada pundakmu. Bangsa ini akan dan bisa menjadi berdaulat, mandiri, berkepribadian sesuai dengan apa yang anda janjikan. Janji yang apabila direalisasikan. Dan akan kita lihat bersama Indonesia lima tahun mendatang, akankah telah menjadi bangsa yang membanggakan?

Wahai presidenku,

Kami hanya menagih apa yang anda janjikan. Dan tugas anda adalah merealisasikan apa yang telah anda janjikan. Jadilah pemimpin amanah yang mengukir cerita indah dalam sejarah Indonesia.[]

# BERSATU, DAMAI, DAN BERDAYA INDONESIAKU

*Noor Muhammad Adriani*

[1]

Saya atas nama diri pribadi mengucapkan syukur dan selamat tentunya atas kemenangan Saudara. Kemenangan apa? Buat saya, ada tiga kemenangan buat Saudara. Pertama, karena sudah dinyatakan menang dalam kontestasi akbar politik tingkat tinggi di negeri ini. Saudara kini tinggal menunggu waktu untuk memegang tampuk tertinggi kepemimpinan nasional—kedudukan yang orang banyak impikan dalam cita-citanya. Kedua, kemenangan partai dan koalisi yang mendukung Saudara untuk maju dalam perhelatan mahal nan menguras energi kita, anak bangsa dan senegara. Termasuk di dalamnya, tokoh-tokoh non-partisan; para ulama, intelektual, cerdas cendekia, insan media, yang berdiri rapat dan solid dalam barisan pengusung Anda.

Ketiga, kemenangan rakyat bangsa Indonesia yang jumlahnya 240 juta jiwa ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Rote, bahwa kita berhasil melewati masa-masa politik yang ekstrem dalam sejarah, di mana calon yang maju terpolarisasi hanya dua, menyebabkan setiap orang yang “waras” dihadapkan pada pilihan “pilih satu atau dua”. Bilangan satu dan dua menjadi sangat sensitif bahkan untuk dipakai dalam perbincangan sehari-hari atau sekedar berekspresi santai ketika berfoto, selama beberapa bulan ini.

Saudara capres terpilih, izinkan saya secara sederhana memaknai ketiga hal di atas seperti ini; kemenangan Saudara sebagai pribadi, menandai kesuksesan meraih puncak popularitas dan ranking tertinggi perpolitikan bangsa, sebab setelah itu tiada

lagi entitas administratif yang melebihinya, selain paguyuban-paguyuban negara antar bangsa. Bahwa Saudara, dalam usia yang cukup muda, berhasil memenangkan hati mayoritas rakyat Indonesia, untuk menjadi layaknya “manusia setengah dewa” dalam lirik lagu Iwan Fals yang terkenal.

Kemenangan kedua adalah kemenangan “kerabat dekat” Anda, orang-orang yang bakal memiliki peluang lebih besar dalam membantu Anda mengisi kemenangan secara keseluruhan. Percayalah, mereka orang paling bahagia dengan kemenangan ini, meski peluh dan perjuangan yang dilakukan juga tidak ringan. Kita saksikan, mereka berbotak ria bisa dianggap wujud kecintaan kepada Anda pribadi di samping luapan syukur bahwa perjuangannya tidak sia-sia.

Adapun kemenangan ketiga adalah kematangan nasionalisme kita dalam menghadapi kepentingan masing-masing. Begitu banyak perbedaan di antara kita dalam bangunan kebangsaan Indonesia ini, tapi ibarat fungsi tubuh, setiap organ juga berbeda, tapi justru dengan keberbedaan itulah ia disebut tubuh. Kalau sama semua, tentu itu bukan sebuah organisme tubuh bukan? Artinya, walau dengan segenap permasalahannya kita masih mampu menghadapi masa depan bersama dengan optimis sebagai Saudara sebangsa Indonesia.

Oleh sebab tiga kemenangan Saudara itu dan makna yang saya dapatkan darinya, ada tiga hal yang sederhana juga yang ingin saya pesankan pada Saudara. Pertama karena ini kesuksesan pribadi Saudara, janganlah lupa Saudara tetap seorang manusia. Kesuksesan Saudara ini hanyalah titipan lain dari Sang Pencipta. Jangan sekali-sekali ada rasa bangga berlebihan yang membawa pada kesombongan, sebab kehancuran bangsa-bangsa di dunia ini kebanyakannya bermula dari kesombongan pemimpinnya. Kesombongan membawa pada kekufuran, kekufuran membawa kepada kezaliman, dan kezaliman berarti kehancuran. Terus terang dalam pemilihan tahun ini saya jadi teringat falsafah Jawa, “*suro diro joyo ningrat lebur dening pangastuti.*” Kecerdasan, kejayaan, kewibawaan, kalah karena kesederhanaan dan ketulusan.

Saya percaya, Saudara mampu menjadi pribadi yang tetap sederhana dan lurus dalam jalan kesuksesan ini. Kedua,

berhati-hatilah memilih kepercayaan di antara kolega yang nanti membantu kepemimpinan Saudara dan hargailah saran-saran para tokoh, ulama, intelektual, cerdik cendekia, insan media, dan utamanya rakyat yang walaupun di masa pemilihan mereka tidak pro pada Saudara. Sungguh Imam Hasan Basri, salah seorang ulama masa awal Islam, menyurati Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, menyebutkan,

“...adapun pencari dunia, maka ia tidak akan menasehatimu. Sedangkan pencari akhirat maka ia tidak menyukaimu. Penguasa tidak boleh menyerahkan para menteri, juga pekerjaan atau tugas-tugas ke pemerintahannya kepada orang yang bukan ahlinya. Apa bila pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka ia akan merusak kerajaannya dan berbagai cacat dan kelemahan akan muncul dari setiap sisi...”

Ini menandakan, bertahannya kesuksesannya Saudara dalam kepemimpinan yang diemban kemudian, terutama sekali ditentukan langsung oleh para pembantu Saudara: menteri-menteri kabinet, staf-staf ahli, dan jajaran aparatur pemerintahan pusat. Sedangkan untuk kemenangan yang ketiga, ingatlah bahwa hanya 54 persen saja yang memilih Saudara dalam pemilihan lalu. Artinya hampir separuh juga yang tidak pro pada Saudara. Maka, tetaplh hargai mereka, muliakan mereka, dan layani mereka dengan baik. Kini Saudara bukan lagi calon golongan tertentu, melainkan pemimpin seluruh bangsa, tentu setelah Saudara mengucapkan sumpah sebagai presiden negara ini.

[2]

Saya ingin sedikit membawa tiga kisah sederhana yang merujuk pada semboyan hebat Saudara sewaktu maju dalam laga lalu: Revolusi Mental!

Kisah pertama, Senin, tanggal 4 Agustus 2014. Dalam kalender yang sudah jelas tercantum adalah hari kerja. Kita sudah cukup rasanya berlibur sejak tanggal 25 Juli, sudah sebelas hari. Belum lagi kita melakukan efisiensi waktu kerja normal selama lebih kurang sebulan. Semua kita lakukan atas nama menghormati bulan suci Ramadhan.

Itu tidak masalah, sebab memang mayoritas warga negara ini beragama Islam. Tapi, apakah tidak miris ketika tanggal empat, lima,

bahkan enam ini semua masih belum normal? Saya menyaksikan betapa kantor-kantor pemerintahan sudah lengang pada pukul sepuluh pagi. Ada di antaranya memasang pengumuman untuk kegiatan halal bihalal institusi beberapa hari kemudian.

Lantas, ke mana pelayanan publik selama itu? Memang hampir seratus persen pegawai pemerintah masuk kantor, tapi rata-rata pelayanan publik tidak berjalan. Mudah kita menjawab, "Sudah budaya." Saya hanya tidak bisa membayangkan berapa banyak pekerjaan yang ditumpuk berbelas hari selama libur, ditambah kemalas-malasan hari-hari pertama masuk kantor? Lebih tak terbayangkan lagi, semua mafhum ini adalah budaya!

Kisah kedua, cobalah Saudara sekali waktu datang ke kampus kami, di kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Berjalan kakilah sebagaimana yang orang kabarkan tentang legenda Saudara sebagai pemimpin blusukan. Tentu semua akan melihat, bahwa sepanjang pintu gerbang lama kampus kami, berderet di atas trotoar dan selokan, bedeng-bedeng kios mulai dari warung kelontong, makanan, toko buku, fotokopi, sampai pedagang kaos kaki dan suvenir.

Saya mengenal salah seorang di antara pedagang ini. Dan kalau kita tanyakan, "Mengapa Anda bisa berjualan di sini, padahal kantor kecamatan tak sampai 50 meter dari sana? Bukankah ada Perda melarang hal ini?" Jujur mereka menjawab, "Tinggal beri oknum pemerintah, ini bagian dari hasil dagangan, maka semua aman." Mereka tahu telah melanggar aturan, tapi lagi-lagi semua tentang mentalitas, pemerintah bisa 'memaklumi' masyarakat, asal bisa memahami satu sama lain. Ini sudah budaya.

Kisah ketiga, semua orang di Indonesia yang memiliki kendaraan bermotor agaknya pernah berurusan dengan polisi lalu lintas. Minimal ketahuan tidak pakai helm, lampu utama tidak dinyalakan, atau sialnya ditilang karena ada razia. Biasanya kita bangsa yang saling mengerti. "Damai saja ya, Pak!" jadi lelucon konyol nan basi karena semua sudah paham juga maknanya.

Tapi pengalaman saya lebih unik lagi. Suatu ketika, pulang dari Jakarta, saya mendapati razia di Jalur Pantura daerah Bekasi-Karawang. Saya tenang saja, sebab semua dokumen sudah lengkap dan tidak ada cacat apapun yang saya rasa. Memang, saya dicegat. Kebetulan posisi motor yang saya tumpangi di lajur kanan jalan,

kontan saya lambaikan tangan isyarat. Maksud saya adalah, “Sebentar ya, saya berhenti di depan, soalnya sedang di tengah jalan.” Mungkin polisinya salah mengira dia sangka saya *say good bye* dan tidak mau berhenti. Dan demikianlah, sang polisi menarik tangan saya, seketika motor terbalik. Saya bersama teman yang dibonceng jatuh di tengah jalan. Syukur semua selamat, hanya motor saya tersangkut di marka tengah jalan.

Singkat cerita, saya marah-marah sampai ke pinggir jalan, malu dan kaget utamanya. Polisi itu tenang saja, disangkanya saya mau kabur karena tidak punya dokumen perjalanan. Kontan dengan marah saya perlihatkan semua dokumen, SIM, STNK, kalau perlu BPKB. Agak bingung juga polisi ini, apalagi suara saya tambah tinggi memarahi dia karena hampir mencelakakan saya.

Seorang polisi yang lebih tinggi pangkatnya mendekat dan memberi isyarat polisi itu. Saya dibawa ke pinggir agak jauh dari jalan, polisi itu berkata “Adik nanti lagi hati-hati. Ini Pak Polisi kasih lima puluh ribu buat ganti spionnya.” Saya bingung, tapi tak ingin panjang lebar, saya ambil dan cabut tanpa terima kasih. Terima kasih? Karena lima puluh ribu?! Saya hampir saja celaka! Rasuah? Simpulkan sendiri, yang jelas haram buat saya makan uang itu, maka saya bagikan di jalan. Apa intinya? Jangan bawa sulit urusan, bawa mudah saja, tolong menolong, ini sudah budaya kita, Bung!

Saudara, terlalu lama kita berinvestasi mentalitas lewat pendidikan saja. Ya itu memang penting, tapi agaknya bukan hanya yang muda yang perlu dipupuk, tapi benalu dan parasit dalam pohon besar bangsa ini juga perlu secepatnya dihilangkan. Kalau tidak bisa diobati, tebas saja sampai akarnya. Tidak perlu jauh-jauh mencari contoh, indikator mentalitas yang Saudara ingin ubah sejatinya banyak harus dimulai pada institusi-institusi di bawah komando langsung Saudara: birokrasi dan aparatur negara.

Tiga kisah sederhana, yang mungkin setiap orang pernah mengalaminya itu adalah gambaran mentalitas inferior bangsa kita yang tumbuh dan salah kaprah disikapi sebagai tradisi. Setahu saya, setidaknya dalam teori, budaya tidak pernah bersifat negatif, Saudara. Tapi kalau sudah ada satu sifat negatif disebut budaya, maka itu ciri masyarakat yang sakit. Saya yakin, semboyan Saudara adalah upaya mencari obat untuk kesakitan itu.

Saya menunggu realisasi revolusi yang Saudara telah deklarasikan beberapa waktu ini. Tidak salah juga kalau kita bahasakan berperang melawan penyakit-penyakit budaya ini. Ada juga baiknya Saudara membaca buku Mochtar Lubis tentang Manusia Indonesia. Meski banyak ketidaksepakatan para ahli mengenai substansi buku, tapi saya bisa menangkap semangat tulus penulis untuk mengingatkan Saudara sebangsanya, meski dengan bahasa yang seolah memburuk-burukan rupa sendiri itu.

[3]

Seperti orang mengenal profesi saya kelak sebagai “tukang dongeng”, sudikah kiranya melalui tiga kisah berikutnya.

Saudara saya bawa lebih jauh ke masa-masa awal keberangkatan gerbong bangsa Indonesia memasuki alam kemerdekaannya, yang penting untuk Saudara ketahui. Mengingat jalannya pemerintahan Saudara akan juga terkait hubungan luar negara, sebagai bukti kedaulatan bangsa kita. Pertama, dapatkah kita bayangkan, dalam hiruk pikuk panggung sejarah terpusat pada persoalan perang dunia, siapa yang akan mengambil perhatian ke sebuah sudut benua Asia manakala ia diproklamasikan merdeka bernama Indonesia? Dalam sulitnya jarak dan masa komunikasi, serta sebagian besar dunia masih juga dijajah secara bersamaan?

Kita kemudian tahu, solidaritas awal bagi bayi Indonesia yang baru lahir itu datang dari negeri gurun Afrika Utara, Mesir. Ya, selang beberapa waktu, tepatnya Maret 1947, Mesir mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, disusul negara-negara Arab yang lain, Lebanon, Suriah, Irak, Afghanistan, Saudi Arabia, semua pada 1947. Tak ada satu pun negara di luar Asia mengakui kemerdekaan RI secepat dan setengahang bangsa-bangsa ini.

Kedua, adalah kisah Hari Pahlawan 10 November di Surabaya. Pernahkah Saudara berpikir mengapa Hari Pahlawan itu diperingati atas peristiwa di Surabaya? Atau sederhananya, mengapa momentum peperangan Surabaya menjadi momen patriotisme yang harus diperingati secara nasional? Singkat jawabannya, secara kasat mata saja pengorbanan perjuangan membela RI di sana sangat besar, lebih enam ribu jiwa pahlawan bangsa gugur dalam minggu berdarah perjuangan itu, sementara ribuan lain meninggalkan kota yang hampir luluh lantak. Peperangan tak berimbang dan heroik itu layak diperingati.

Tapi, tidak banyak juga yang (ingin) tahu, apa sebab ribuan orang itu mau turun padang berkorban jiwa raga harta membela tanah air, padahal tahu peperangan itu tidak imbang? Satu yang bisa membantu menjelaskan itu semua. Sejak akhir Oktober 1945, ulama-ulama Jawa Timur telah memberikan fatwa, bahwa Perang Kemerdekaan adalah Peperangan Sabil di jalan agama, sehingga wajib hukumnya orang yang mampu untuk turun ke medan pertempuran. Hal inilah yang kemudian menyebabkan ribuan pemuda yang kebanyakan santri-santri di sekitar Jawa Timur, masuk ke Surabaya dengan tekad satu, berjuang memerdekakan republik, atau mati syahid. Lantas muncul sosok Bung Tomo, ini juga yang dapat menjelaskan kenapa beliau memulai setiap pidatonya dengan pekik takbir dan merdeka.

Kisah ketiga, seolah kebetulan yang memang takdir Tuhan gariskan sejak semula, Agustus adalah bulan yang sakral bagi bangsa ini. Kita semua tahu, di hari ketujuhbelas bulan delapan enam puluh sembilan tahun lampau, kita berhasil menyatakan kebebasan dan kedaulatan kita, lepas dari kemahazaliman penjajah. Tapi jangan lupa, selang dua belas tahun kemudian, di seberang selat barat, lahir juga sebuah negara baru menyusul kita, tetangga baru. Tepat pada hari ketigapuluhsatu bulan yang sama tahun 1957, Malaysia namanya.

Dewasa ini, sulit orang membayangkan hubungan dua serumpun dengan objektif. Banyak di antara kita, tersulut emosi dan terbangunkan “patriotisme” ketika mendengar nama itu, seolah ialah musuh terbesar bangsa. Memang banyak masalah yang mendera di antara kita, mulai isu perbatasan, klaim budaya, sampai puncaknya masalah tenaga kerja Indonesia yang cenderung diperlakukan semena-mena di negara jiran itu. Yang mengemuka di antara kita adalah memori bersama sejak 1962 manakala Bapak Bangsa, Presiden Soekarno mendeklarasikan perang tertutup dengan semboyan “Ganyang Malaysia.” Memori sebelum 1962 seolah tertutup, padahal pada penyerahan kemerdekaan Malaysia dari Inggris, 31 Agustus 1957, di Stadion Merdeka Kuala Lumpur, delegasi Indonesia hadir di bangku kehormatan, menunjukkan dukungan atas saudara yang baru lahir itu.

Saudara, sebagai Presiden Indonesia, saya rasa perlulah Saudara memahami konteks ketiga peristiwa dan permasalahan ini secara jernih. Memang, isu kemiskinan dan kebodohan akan sangat menjadi prioritas, tapi hal ini agaknya tak banyak yang peduli, sementara dua hal itu (kemiskinan dan kebodohan) sudah cukup Saudara sadari sejak lama. Maka izinkanlah saya memaknai tiga kisah singkat tentang masa muda Republik kita tercinta ini, dari sudut pandang filosofi peristiwa.

Pertama, saya memaknai pengakuan kemerdekaan bangsa-bangsa Arab kepada bangsa kita ialah sebagai suatu hutang sejarah yang tersemat di pundak kita. Mereka hadir membantu kita sedaya upaya yang ada ketika Indonesia tak dipandang apapun oleh bangsa-bangsa maju, bahkan mereka semua berambisi menjajah kembali kepulauan ini. Pengakuan kedaulatan itu laksana pemenuhan satu dari tiga tanda daulat: pemerintah, wilayah dan rakyat, serta pengakuan. Maka dalam kebijakan internasional Saudara kelak, saya memohon, bawalah republik ini ikut serta dalam penyelesaian masalah di sana. Jangan lagi ada kata abai dan pura-pura, terutama menolong saudara-saudara di tanah Palestina. Bukankah Saudara juga sudah berjanji hendak mendukung kemerdekaan mereka? Ingatlah ini bukan masalah agama, ini masalah keadilan dan kemanusiaan, juga tanggung jawab konstitusi kita, demi hak segala bangsa.

Kedua, saya memaknai peristiwa *arek-arek* Suroboyo sebagai sebuah sumbangan besar para ulama dan kaum muslimin dalam mencintai Indonesia kita. Akhir-akhir ini banyak sekali tuduhan mendiskreditkan umat muslim dan mencitrakan seolah mereka orang-orang asing dalam bangunan negara ini. Kita tengok sejarah, nyatanya karya dan cinta mereka justru luar biasa.

Janganlah Saudara hanya mengunjungi, meminta nasihat, memohon doa para ulama ini ketika maju menjadi calon presiden saja, lakukanlah hal itu sebagai suatu keseharian Anda. Muliakan mereka, dan tempatkan mereka dengan penghargaan yang tulus. Adapun para ulama yang berseberangan dengan Anda dalam kontestasi politik kemarin, tetaplh hargai suara mereka, dan dengarkan nasihat mereka, sungguh kecintaan mereka terhadap bangsa ini tidak kalah dari cinta kita. Mereka ingin bangsa ini

maju dan berdaulat, lebih jauh lagi selamat sampai menuju Sang Penciptanya. Tahanlah para pendukung Anda dari mencela para ulama dan mengejek nasihat mereka. Perintahkan mereka menundukan suara dan berbaik sangka. Semoga dengannya Anda selalu mendapat petunjuk dalam masa kepemimpinan yang singkat di dunia ini.

Adapun yang ketiga, saya ingin mengingatkan Anda sebagai pemimpin dari sebuah kesatuan politik yang terpaut jauh menembus batas-batas administratif bernama Indonesia. Negara kita adalah “berkah” sebuah penindasan. Siapa orang menyangka, nama Indonesia akan menjadi sebuah bangsa dan negara yang berdaulat sementara pada 1900-an awal pun orang masih menyebut wilayah ini dengan sebutan Hindia Belanda? Bahkan baru pada dekade ke-2 abad ke-20, Aceh masuk dalam nama Hindia Belanda itu, menandakan bahwa Indonesia ini adalah sesuatu yang sama sekali baru.

Demikian pula dengan Malaysia, tidak ada entitas Federasi Malaysia sebelum 1960-an. Ia ada sebagai suatu penolakan atas usul Inggris membentuk Persatuan Melayu yang mengikis kekuasaan raja-raja di Semenanjung. Penolakan ini membawa pada kemerdekaan 1957, serta penggabungan Sabah, Serawak, dan Singapura pada 1962.

Artinya adalah bahwa dua entitas negara ini sesungguhnya adalah baru. Lantas apa yang lama? Ialah ikatan persaudaraan di antara kita. Maka jalinlah kerjasama yang erat dan saling bersinergi di antara kita. Tingkatkanlah persepahaman di antara kita yang terangkum dalam semangat nasihat-menasihati dalam kebaikan. Kemajuan yang mereka telah dapatkan padukanlah dengan potensi yang kita miliki. Lebih banyak persamaan kita daripada perbedaan yang memisahkan.

Kebangkitan Indonesia, melalui revolusi mental Saudara, mesti membalik semangat menjadikan jiran kita kambing hitam dari kemelaratan dan kegagalan pemerintahan di negeri ini. Kalaulah lebih jauh kita lihat mengenai isu TKI ini, sejatinya kalau kita merenung, apakah timbul masalah ini seandainya TKI itu tidak pernah kita kirim ke negeri tetangga? Mengapa TKI mesti bekerja di sana? Jawabannya, sebab di dalam negeri ekonomi kita

morat-marit dan banyak yang butuh menanggung hajat hidup yang tidak bisa negara sediakan. Berarti jika saja negara mampu membuka lapangan kerja dan memberikan jamina kehidupan yang layak bagi warganya, agaknya tak perlu kita mengirim TKI ke sana, dan masalah TKI ini tidak akan timbul sedikit pun bukan? Oleh sebab itu, saya mendorong Saudara untuk dapat meningkatkan hubungan dengan jiran-jiran serumpun kita dan memainkan peranan yang besar dalam peta regional Asia Tenggara ini.

Adalah harapan kita bersama untuk melihat kebangkitan bangsa Indonesia dalam masa hidup yang singkat ini. Sebagaimana Tun Dr Mahatir Mohammad, Bapak Modernisasi Malaysia yang sempat menyaksikan dan merasakan hasil karyanya memajukan negeri jiran sampai hari ini. Saya berharap semoga Saudara dapat menjalankan amanah sedemikian juga, setidaknya dalam lima tahun kepemimpinan yang akan dijalani.

Tinggalkan segala kontestasi yang telah berlalu dan simpanlah memori itu baik-baik dalam lembaran sejarah, saatnya merekonsiliasi diri demi Indonesia yang Bersatu. Tanggalkan semua atribut-atribut kelompok dan golongan, tanpa perlu membuang identitas diri Saudara, saatnya menenangkan semua pihak demi Indonesia yang damai. Kemudian akhirnya, dengan kesatuan dan kedamaian itu, kita langkahkan kaki menuju satu cita yang sama, demi Indonesia yang maju dan berdaya. Terima kasih.[]

# KECEWA NEGERI INI

*Donny Fajar Ramadhan*

*“Perampokan dengan sepeda motor terjadi di Condet”*

*“Gelandangan dan pengemis dirazia di lampu lalu lintas Dago Bandung”*

*“Kerugian negara akibat SDA Indonesia yang dikuasai asing mencapai Rp100 triliun”*

*“Pelecehan seksual anak di bawah umur melibatkan oknum guru”*

*“Korupsi Kementerian Agama mencoreng nama baik pelaku dan kemurnian agama”*

Rangkaian kalimat di atas hanya sebagian kecil judul-judul berita yang disajikan baik melalui cetak atau elektronik. Semua berita itu membuat merah telinga kita. Miris sudah tentu, karena negara ini bak parodi dimana kekayaan sumber daya alam dan manusianya tak mampu kemudian membuat sejahtera dan menjadi negara yang unggul sejajar dengan Singapura, Amerika Serikat, Inggris, ataupun Turki. Akan tetapi yang muncul sekarang kalau boleh sebut kata yang tepat adalah kecewa. Ya, kecewa dengan negeri Indonesiaku ini!

“Keadaannya sudah terlanjur parah. Gila! Kalau begini-begini saja hingga beberapa tahun ke depan, mending *gue* pindah ke luar negeri”, “*Oh my god*, Indonesia kok begini-begini amat, ya!” Ada gumam dan umpatan yang lain yang mungkin tidak kita ketahui. Tapi yakinlah, negeri ini, di samping sumber daya alam yang melimpah dan subur juga penuh dengan gumaman dan umpatan. Itulah realitanya.

Namun, kecewa dan mengumpat saja tidak akan memperbaiki apa-apa. Justru yang muncul adalah dosa akibat perbuatan tercela tersebut. Kita lebih diyakinkan lagi dengan firman-Nya, *“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum bila kaum itu tidak merubahnya sendiri.”* (QS. Ar-Ra’d: 11). Tapi mengumpat dan kecewa juga bisa dipandang positif, yakni menjadi dorongan untuk memperbaiki dan meluruskan yang salah dari negeri ini.

Pertanyaan yang muncul lalu, apakah ada hal positif dari negeri ini? Ya ada tentu. Tak semua pemberitaan menyajikan hal buruk. Banyak prestasi yang ditorehkan oleh Indonesia. Seperti sekarang Indonesia menjadi negara G-20, adik-adik siswa dan siswi sekolah menengah kita menjuarai Olimpiade Sains Internasional, dan bulutangkis kita menempati papan atas dalam hal medali. Namun, terlepas di balik berita yang disajikan media itu hanya untuk kepentingannya semata, negara (rakyat termasuk di dalamnya) harus mengintrospeksi diri, karena negara kita belum siap lepas landas. Dalam bahasa yang sarkas, negara kita ini layaknya pesawat dalam hanggar yang masih diuji kelayakannya.

### **Korupsi Merajalela**

Ada yang pernah berkata bahwa kekayaan di seluruh dunia ini, 90 persennya dimiliki oleh 10 persen penduduknya, dan sisanya dibagi untuk rakyat. Kita hanya dapat geleng-geleng kepala. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Bagi mereka yang memang berusaha kemudian beruntung mendapatkan segalanya, itu perlu kita acungi jempol. Akan tetapi mereka yang berfoya-foya kemudian menggunakan harta yang tak halal apalagi uang negara yang sebetulnya untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya, jeruji besi saja rasanya kurang setimpal untuk mengganjar.

Korupsi di Indonesia bukan mainan baru lagi, bahkan kita sudah hampir bosan membicarakannya. Gedung KPK saban hari disinggahi oleh anggota dewan, kepala daerah, menteri, dan cukong yang memakai rompi oranye. Korupsi menggerogoti pondasi negara kita, Pancasila. Inilah yang kemudian menjadi penyebab utama dan harus menjadi fokus utama pemerintah

sebagai pengambil kebijakan yang bertanggungjawab kepada rakyat, mengapa Indonesia tercinta tidak maju-maju. Rasanya malu bila menyebut posisi ke berapa Indonesia ini dalam kategori negara terkorup.

Studi akan korupsi bermunculan dan berkembang dengan perspektif dan latar belakang yang bermacam-macam untuk membabat habis dari segi aspek sejarah, jenis, hingga hukuman yang paling tepat untuk pelaku-pelaku yang terbukti melakukannya. Di balik semua itu, ada yang menggelitik yaitu korupsi justru dilakukan oleh mereka yang berpendidikan tinggi. Perumpamaan yang paling tepat bagi mereka adalah “makin berisi padi makin menggerogoti tanaman lain yang ada di sekitarnya seperti inang.” Padi berisi tidak makin merunduk seperti yang diajarkan guru-guru kita. Bukankah mereka harusnya menjadi contoh yang baik bagi generasi setelahnya? Buat apa pendidikan yang selama ini mereka enyam di bangku kuliah bila akhirnya menyengsarakan?

### **Jujur Itu Mahal!**

Ketika akan naik menjadi pengambil kebijakan, baik di pemerintahan atau anggota legislatif, daerah atau nasional, seseorang tentu harus melewati masa kampanye. Kita berada di alam demokrasi yang mengharuskan adanya sistem pemilu. Pada saat kampanye itu kebanyakan mereka mengumbar janji-janji bak oase di tengah padang pasir kepada rakyat yang kehausan. Tapi apa kenyataannya setelah mereka terpilih? Alih-alih ada kebijakan yang ditelurkan untuk tujuan diberdirikannya negara, dalam hitungan bulan sudah ketahuan melakukan praktik korupsi. Kejujuran pertama sudah dicoreng.

Selain itu, dalam mekanisme pengangkatan seseorang menjadi pengambil kebijakan pun ada pengangkatan sumpah. Atas nama Tuhan lagi. Kemudian dilanggar. Jadilah kejujuran tercoreng kedua kali. Miris sekali dan kita hanya bisa geleng-geleng kepala sembari mengucapkan istigfar. Mereka sudah menggadaikan Tuhan dengan miliaran uang yang mereka gelapkan untuk kepentingan duniawi belaka. *Na'udzubillah*. Sungguh kejujuran itu mahal harganya.

Kembali lagi pada kaitannya dengan universitas atau sekolah yang membesarkan para pengambil kebijakan. Sebetulnya institusi pendidikan tidak dapat dikatakan salah. Namun bertanggungjawab untuk menemukan ramuan yang pas dalam menyusun kurikulum termasuk di dalamnya staf pengajar yang dapat mentransfer nilai-nilai kebenaran yang hakiki.

Sebagai contoh, pelajaran agama di sekolah-sekolah konvensional hanya diajarkan selama satu hingga dua jam dalam seminggu. Pun dengan mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Di kampus juga demikian, hanya menjadi mata kuliah yang kecil dengan bobot sebanyak 2 SKS dalam satu semester. Setelah itu sudah. Sehingga lulusan terbaik dari universitas terbaik di dunia pun hanya akan menjadi laptop dengan Prosesor Intel Core-7 namun sekali pakai langsung *hang*. Karena ada separuh yang kopong, yaitu moralitas!

Pada akhirnya semua harus bertanggungjawab atas segala perubahan, perkembangan, dan kejadian di Indonesia. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah mereka yang sekarang akan duduk di bangku pemerintah dan anggota legislatif. Karena mereka itu wakil rakyat Indonesia yang telah diamanahkan, sistem negara kita menganut demokrasi. Maka biarlah sedikit tulisan ini menjadi bahan perenungan Indonesia akan dibawa kemana. Selamat bekerja![]

# NEGARAWAN BERJIWA KSATRIA

*Fariz Abdullah*

*“Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku.”*

—Bung Hatta

**N**egarawan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan kedepan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan. Sementara itu, definisi kepemimpinan adalah kombinasi interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasinya. (Hughes, Leadership, 7th Ed. 2014). Adapula yang mengasosiasikan kepemimpinan terkait pengambilan risiko, dinamika, kreativitas, perubahan, dan visi.

Dewasa ini, negarawan dalam arti memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, menjadi sosok yang dirindukan bagi suatu bangsa dan negara, dimana pun itu. Keberadaannya bagai cahaya dalam kegelapan untuk mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. Sejatinya, negarawan yang akan mengantarkan sebuah bangsa dihormati dan disegani di mata internasional.

Indonesia dengan segala sumber dayanya memiliki potensi yang luar biasa. Dengan jumlah rakyatnya mencapai 247,43 juta jiwa (BPS, 2014), Indonesia memiliki Gross Domestic Product (GDP) sekitar USD 868.35 juta pada 2013 (World Bank), dengan nilai GDP yang merepresentasikan 1,4% dari ekonomi dunia. Sedangkan

GDP per capita mencapai 1810.31, pertumbuhan ekonomi 6,17% (BPS, 2013), sementara GDP *Annual Growth Rate* Indonesia dengan rerata 5,42% dalam kurun 2000 sampai 2014. Besaran GDP tersebut merepresentasikan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah, maka semakin tinggi GDP semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah.

Kabar baiknya lagi, Indonesia saat ini sedang berhadapan dengan sebuah peluang besar kependudukan bernama “bonus demografi”, yaitu rasio ketergantungan yang menurun, di mana penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia nonproduktif. Implikasi terpenting dari fenomena ini adalah munculnya jumlah kelas pekerja yang sangat besar. Kelas pekerja inilah yang kemudian juga akan menjadi masyarakat kelas menengah dengan tingkat konsumsi tinggi, diproyeksikan jumlahnya mencapai 135 juta jiwa pada tahun 2030 (McKinsey, 2013).

Tak lupa, ASEAN Economic Community 2015 menjadi isu menarik yang dapat dibahas dan dianalisis terkait tantangan dan peluangnya bagi Indonesia di masa depan. AEC secara makro dapat memengaruhi aktivitas ekspor impor di perdagangan internasional lingkup ASEAN, sehingga memungkinkan munculnya satu kekuatan baru yang borderless di pasar internasional terbesar se-ASEAN.

### **Konsepsi Negarawan Berjiwa Ksatria**

Indonesia dengan segala kapasitasnya tidak mampu menghebat dan memiliki daya saing di dunia internasional jika tidak memiliki pemimpin berjiwa ksatria. Sosok pemimpin akan memberikan dampak baik dalam kehidupan rakyat secara keseluruhann. Karenanya contoh keteladanan dalam menyejahterakan rakyat, lahir dan batin sangat dibutuhkan dewasa ini. Tidak berlebihan jika Indonesia mengharapkan pemimpin ideal yang memberikan kebaikan dan keberkahan bagi bangsa. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ

# الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu mengabdikan.” (QS. Al-Anbiya’: 73)

Sejenak, mari kita coba refleksikan masa lalu. Indonesia memiliki banyak tokoh-tokoh intelektual pembaharu sekaligus perintis kemerdekaan di masa itu yang dapat diteladani, seperti Muhammad Natsir, Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Buya Hamka, dan Bung Hatta. Atas jasa mereka, Indonesia diperhitungkan dengan mendapatkan pengakuan menjadi bangsa yang bermartabat di dunia internasional.

Contoh jiwa ksatria yang dapat kita contoh dari tokoh-tokoh bangsa tersebut adalah sikap mereka yang mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi atau keluarganya. Rela berkorban, berintegritas, serta hidup dalam kesederhanaan, yang mengajarkan bahwa hidup adalah senantiasa memberi yang kita miliki untuk menciptakan kemanfaatan bagi sesama. Karena mereka yakin, dengan prinsip memberi, justru semakin bertambah nikmat dan karunia Tuhan yang mereka dapatkan. Seperti firman Allah SWT,

# وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Jika kalian bersyukur, maka akan kutambahkan nikmat-Ku, tetapi jika kalian kufur nikmat, Sungguh Azab-Ku amat pedih.” (Q.S Ibrahim: 7)

Tahun 2014 menjadi momen perhelatan pesta demokrasi akbar lima tahunan dalam rangka memilih putra terbaik bangsa

yang akan menahkodai kapal Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Dua pasang saling beradu kreasi dan gagasan dalam kontestasi pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.

Lebih dalam, penulis menjabarkan visi, misi, dan program pasangan calon presiden RI 2014-2019 nomor urut satu yang lalu, Prabowo Subianto–Hatta Rajasa, dengan visi “Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat.” Dengan penguatan misi pada: 1) Perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. 2) Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri. serta 3) Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudi luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, dan terampil.

Sedangkan mengenai visi, misi, dan program pasangan calon presiden RI 2014-2019 nomor urut dua, Joko Widodo–Jusuf Kalla, dengan visi, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu jaga kedaulatan wilayah dan kemandirian ekonomi. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif. 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri. Serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Jika penulis menganalisis dari sisi disiplin ilmu manajemen, lingkup kepemimpinan maupun ekonomi. Baik Prabowo Subianto–Hatta Rajasa maupun Joko Widodo–Jusuf Kalla sama-sama memiliki mimpi besar dalam upayanya meningkatkan martabat bangsa. Prabowo tipikal leader dengan gaya kepemimpinan yang tegas, berwibawa, dan disiplin, serta Jokowi melalui pendekatan managerial yang humanis, merakyat, dan teknikal.

Terlihat jelas bahwa keduanya juga berperan aktif membentuk Indonesia sebagai bangsa yang mandiri di segala aspek. Misalnya dalam bidang ekonomi, Prabowo menekankan pada kebijakan perekonomian berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dengan melakukan seleksi ketat kepada perdagangan asing yang masuk ke dalam negeri dalam rangka memberikan perlindungan pada ekonomi dalam negeri untuk dapat bertahan menghadapi arus globalisasi. Sedangkan Jokowi memiliki fokus pada pengembangan ekonomi kreatif yang dapat mendongkrak jumlah pengusaha di Indonesia, sehingga dapat mandiri dan memiliki daya saing. Konsep kerja keduanya sangat berkaitan satu sama lain, integrasi kedua langkah kerja tersebut menjadi inisiasi yang baik pada pemerintahan ke depan.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, baik Prabowo maupun Jokowi menjamin bahwa jika terpilih, seluruh rakyat Indonesia wajib memiliki akses pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pun akses mendapatkan kesehatan gratis, pendidikan tinggi, jaminan sosial adalah janji-janji yang diutarakan calon pemimpin bangsa masa depan ini.

Lebih kurang 240 juta lebih jiwa rakyat Indonesia menantikan adanya kepemimpinan baru putra terbaik bangsa yang dapat merealisasikan janjinya atas dasar kebijaksanaan dan kejelasan visi sehingga memunculkan certainty dalam masyarakat untuk dapat hidup layak.

Kini, rakyat diharapkan terus mengingatkan program-program kepada presiden terpilih. Menerapkan proses *check and balances* mengawal jalannya pemerintahan yang adil dan demokratis. Dengan terus aktif partisipatif atas saluran-saluran yang ada secara vertikal maupun horizontal.

Bagi rakyat, refleksi seorang pemimpin dapat terlihat dari bagaimana masyarakatnya. Jika masyarakatnya jujur, maka pemimpinnya akan jujur. Kalau rakyatnya damai, pemimpinnya pasti juga cinta perdamaian. Sehingga penting bagi kita untuk mengubah diri sendiri sebelum menuntut lebih banyak, dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat, dan mulai saat ini.

Bagi pemimpin, ia akan lebih arif dan bijaksana jika memiliki karakter yang kuat dalam nilai yang dianut sesuai dengan kebenaran fitrah manusia. Tak lupa senantiasa melakukan segala sesuatu dalam konteks beribadah kepada-Nya, agar segala ikhtiar tidak ada rasa kesia-siaan. Berikut ada beberapa pesan untuk sang negarawan berjiwa ksatria.

Pertama, pemimpin berjiwa ksatria selalu melangkah dalam hiruk pikuk perjuangan, bersikap santun dan terbiasa dengan pola hidup sederhana. Ia rela menjadi seorang yang sederhana namun tak melupakan perjuangannya untuk menghebatkan perjalanan bangsa dan negaranya. Kedua, pemimpin dan rakyat sama-sama secara giat berkontribusi dan bekerja daripada berwacana dan berdialektika.

Ketiga, pemimpin senantiasa menghidupkan tradisi intelektual yang kuat dan mengakar berupa baca, tulis, dan diskusi. Sebab sejarah bangsa ini tentu mengakui bagaimana pandangan para pendiri bangsa yang dibangun atas dasar argumentasi, rasionalitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, membentuk negarawan berjiwa ksatria, memang bukan pekerjaan mudah atau instan, tetapi merupakan kerja serius dan berkelanjutan dalam bingkai pembinaan yang berjalan baik, sehingga stok kepemimpinan tidak pernah langka atau tidak tersedia, pemimpin yang lahir dari sebuah proses pembinaan yang baik, tentu jauh lebih baik daripada pemimpin yang lahir secara instan karena popularitas, kedekatan, maupun faktor keturunan, dan lain sebagainya.

Dalam Islam, melahirkan kepemimpinan merupakan amalan puncak yang harus diberi perhatian besar karena fungsi kepemimpinan dalam Islam berdasarkan *Siyasah Syar'iyah* adalah *Hirasatud Din* (memelihara dan mempertahankan ajaran agama) dan *Siyasatud Dunya* (merancang strategi untuk kebaikan duniawi). Membangun kebaikan sebuah masyarakat atau bangsa harus diawali dengan menciptakan para pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga sehingga dapat secara optimal menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat.[]

# PELAJARAN 7 NEGARAWAN

*Asya Fathya Nur Zakiah*

Tujuh puluh tahun Republik Indonesia berdiri tegak sebagai negara Republik yang berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden. Selama 70 tahun pula Indonesia dipimpin oleh tujuh presiden. Presiden adalah negarawan yang telah berjasa dan berkorban memimpin bangsa Indonesia sampai seperti sekarang ini. Berbagai pro-kontra atas kebijakan yang dibuat para pemangku kekuasaan dilontarkan, ada pula yang dibungkam paksa.

Ir. Soekarno, sebagai presiden pertama Republik Indonesia, dalam masanya telah berani mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Hubungan diplomatik dilakukan dengan berbagai negara supaya Indonesia diakui secara *de facto* sebagai suatu negara. Pembangunan dalam bidang ekonomi, komunikasi-informasi, pertahanan-keamanan dilakukan demi kemajuan bangsa Indonesia. Ir. Soekarno berhasil menanamkan nilai-nilai patriotisme, semangat kebangsaan, kemandirian bangsa, mengembalikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diikuti banyak partai dengan pelaksanaan yang baik. Sayangnya, Pemilu ini tidak diikuti dengan kehidupan politik yang membaik hingga berujung pada pemberontakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan bidang ekonomi tidak tergarap dengan baik yang berujung dicetuskannya Tritura dan suksesi kepemimpinannya.

Soeharto dengan gaya kepemimpinannya dalam Orde Baru selama 32 tahun membawa Indonesia—yang menurut publik,

khususnya rakyat golongan ekonomi ke bawah—menjadi masa yang paling baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan Indonesia. Selain itu, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi landasan hukum perencanaan pembangunan yang dijabarkannya dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Repelita ini sukses membawa Indonesia mengalami pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara. Namun, kejayaan yang dicapai oleh Soeharto dengan rezimnya akhirnya tumbang jua. Periode 1989-1998 merupakan masa tersulit yang harus dilalui oleh rezim ini, di antaranya tindakan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, korupsi yang sangat besar, utang luar negeri yang tinggi, dan krisis ekonomi.

Masa kepemimpinan B.J. Habibie menjadi masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. B.J. Habibie melakukan perbaikan di berbagai bidang, seperti kebebasan pers, pembentukan partai politik dan percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999. Di dalam pemulihan bidang ekonomi, pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun, sayangnya pada masa ini pun Timor-Timur harus terpisah dari Indonesia berdasarkan hasil referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999.

Pemilu pertama masa reformasi memilih Abdurrahman Wahid menjadi presiden. Perbaikan dalam bidang ekonomi gencar dilakukan. Alhasil, ekonomi Indonesia pada tahun 2000 mampu tumbuh mencapai 4,8%, jauh dari perkiraan semula, 2-3 persen. Selain itu, angka ekspor nasional terdongkrak naik, baik pada sektor manufaktur maupun elektronik. Namun, Presiden yang akrab disapa Gus Dur ini terlibat dalam beberapa permasalahan, seperti dana non-budgeter Bulog dan Bruneigate yang dipermasalahan oleh anggota DPR dan pemecatan beberapa menteri karena tidak sejalan dengan pemikirannya. Pada akhir November, 151 anggota DPR menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gusdur. Pemakzulan ini menyebabkan wakilnya yaitu Megawati Soekarnoputri menggantikan posisi Gus Dur saat itu.

Megawati Soekarnoputri naik tahta menjadi presiden pada periode selanjutnya dengan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, praktiknya para pemimpin di

daerah dan pusat seolah menjadi raja kecil. Selain itu, tidak terlihat perbaikan pada kehidupan rakyat Indonesia, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Tindak kekerasan dan kejahatan pun semakin marak di masyarakat. Penegakan hukum yang diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik tindak kejahatan, kekerasan, korupsi dan kolusi tidak terlihat. Kesangsi masyarakat terhadap janji Megawati di awal kepemimpinannya atas ekonomi kerakyatan dan perlawanan terhadap neoliberalisme, terbukti dengan tindakannya menjual sejumlah badan usaha milik negara.

Periode selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla mengusung visi Indonesia yang aman, bersatu, rukun dan damai; menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia; dan penghidupan yang layak. Dan, pada tahun 2009, SBY kembali memimpin Indonesia dengan wakilnya Boediono mengusung visi Indonesia yang demokratis dan berkeadilan demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Pada kedua masa pemerintahan ini, pemerintah melakukan berbagai inovasi program baru yang memiliki tujuan membantu ekonomi masyarakat kecil, di antaranya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berjalan dengan baik meski masih banyak kekurangan.

Pemberantasan koruptor yang merugikan bangsa dan negara pun digalakan. Namun, cita-cita meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diusung diawal kampanye belum sepenuhnya terealisasi. Harga kebutuhan hidup terus melambung, sedangkan penghasilan rakyat semakin minim. Research Raflesia Research Society Foundation (2014) menyatakan hasil riset tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY pada dua periode ini merasa 'kurang puas'. Beberapa masalah yang membuat publik merasa kurang puas, yaitu harga kebutuhan pokok yang tidak terjangkau (37,3 persen), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (12,4) persen, susah mencari lapangan kerja (8,0 persen), dan kesehatan serta harga obat-obatan yang mahal (6,3 persen). Padahal isu-isu ini yang dijanjikan ketika kampanye.

Tanggal 9 Juli 2014 menjadi hari bersejarah untuk bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Waktu yang sakral

ini menjadi penentu terpilihnya pemimpin dalam membawa Indonesia menuju cita bangsanya. Berbagai janji telah kedua calon (Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla) kemukakan dari jauh hari untuk Indonesia. Visi-misi dan program dideskripsikan dengan jelas dalam orasi di berbagai daerah atau debat yang disiarkan stasiun televisi secara nasional untuk melihat sejauh mana visi-misi dan program yang ditawarkan lebih baik dibanding yang lainnya. Kedua calon presiden dan wakil berlomba-lomba dalam menarik hati rakyat karena sistem demokrasi yang membebaskan pilihan di tangan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengumumkan hasil Pemilu. Pada tanggal 22 Juli 2014 Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan 52,47% suara rakyat Indonesia yang memilih dengan mengusung visi Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kemandirian mutlak diperlukan untuk memperkuat semua sektor baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemandirian ini pun mencerminkan sikap bangsa dan negaranya. Harapan ini yang diusung presiden ketujuh untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik.

Pendidikan yang merupakan pilar tegaknya bangsa belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan di Indonesia terdapat lebih dari 1,8 juta anak/tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan. Program Pembangunan PBB menempatkan Indonesia pada posisi 121 dari 185 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629 (USAID 2013). Metode pembelajaran, keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata membuat pendidikan Indonesia tidak merata di seluruh Indonesia. Hal ini membuktikan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengamalkan Pasal 31 UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusional.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara-negara di ASEAN. Transportasi

publik dan energi masih belum dapat memuaskan kebutuhan warga. Hal ini pun berdampak pada cepat-lambatnya pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur menjadi harapan Indonesia untuk menyambut ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Perwujudan AEC di tahun 2015 ini akan menempatkan ASEAN, khususnya Indonesia sebagai kawasan pasar terbesar ke-3 di dunia. Laju inflasi yang masih tergolong tinggi, stabilitas makro dan tingkat kemakmuran Indonesia yang lebih rendah menjadi tantangan tersendiri untuk menyambut AEC dengan baik. Menurut Media Indonesia (2009) para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di sektor industri petrokimia hulu, baja, tekstil dan produk tekstil, alas kaki serta elektronik belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari China karena harga yang relatif murah dari produksi dalam negeri. Hal ini masih menjadi PR besar mengingat perekonomian menjadi modal keberlangsungan negara.

Indonesia yang memiliki kekayaan alam terpenjara dengan sistem yang ada. Hasil bumi yang melimpah tidak dapat sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya. Penurunan produksi terjadi, sehingga Indonesia harus melakukan impor untuk pemenuhan kebutuhan primer. Bahkan terjadi peningkatan impor dari tahun ke tahunnya. Impor beras meningkat menjadi 141%, jagung 89%, dan kedelai 19% (USDA 2011). Hal ini membuktikan janji pemerintah untuk mengeksplorasi kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia masih belum terpenuhi dengan baik.

Bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi setumpuk masalah di bidang kesehatan. Meskipun Jamkesmas sudah diluncurkan namun jaminan ini belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pemerintah. Tingginya angka kematian ibu dan bayi, layanan kesehatan yang belum optimal, mahal biaya kesehatan, penyebaran dokter tidak merata dan berbagai masalah lainnya menjadi masalah penting yang harus segera diselesaikan.

Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi simbol kebangsaan. Keragaman etnis, suku, budaya dan agama masih belum dapat menyatukan Indonesia dalam satu tujuan. Terorisme, penyerangan

Masjid Ahmadiyah di Tulungagung, pengusiran dan pembakaran rumah-rumah warga Syiah Sampang, serta kasus pendirian gereja di beberapa tempat menjadi salah satu bukti bangsa Indonesia belum sepenuhnya menjadi satu jua. Kekayaan etnis dan budaya pun belum dapat diakui oleh Indonesia. Plagiarisme dan akuisisi kebudayaan oleh negara lain menjadi permasalahan baru bagi bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menjadi pedang bunuh diri bagi bangsa Indonesia. KKN ini bahkan menempatkan Indonesia menjadi negara terkorup keempat di dunia. Hal ini disebabkan KKN tumbuh subur pada pemerintahan yang melabeli diri demokrasi namun mengabaikan prinsip demokratisasi dasar yakni transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Tindakan ini dapat merugikan bangsa Indonesia di semua sektor baik ekonomi, pendidikan, pembangunan infrastruktur dan lainnya. Selain itu, tumbuh kembangnya budaya dan relasi informal dalam pelayanan publik menjadikan masyarakat Indonesia tidak percaya lagi terhadap pemerintahnya.

Permasalahan-permasalahan diatas masih akan terus berlangung bila presiden yang belum tentu menjadi seorang negarawan tidak melakukan eksekusi yang jelas, cepat dan tepat atas janji-janji yang diucapkan ketika kampanye. "Lagi-lagi pemerintah gagal," mungkin itu yang terbersit dalam diri kita. Namun, tanpa seorang pemimpin yang berjiwa negarawan, Indonesia hanya akan menjadi negara yang miskin pada tanah yang kaya, terpenjara dalam kemerdekaan maya dan ditipu tak berdaya oleh negara lainnya.

Setelah mengaca kelebihan dan kekurangan presiden-presiden pendahulu, semoga presiden ketujuh Indonesia mampu mengemban amanahnya dengan baik. Tidak hanya mengumbar janji namun tetap istikamah dalam membawa Indonesia sesuai cita bangsa yang tertera pada Pancasila maupun UUD 1945.[]

# MEMBANGUN MENTAL POLITIK HUMANIS

*Ekamara Ananami Putra*

Sembilan agenda prioritas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang disebut Nawa Cita, menjadi pegangan utama bagi rakyat untuk mengawal pemerintahan baru. Dengan terpilihnya pasangan Jokowi-JK, dalam pemilihan presiden 9 Juli 2014 lalu, Nawa Cita harus dilunasi oleh kedua pasangan ini sebagai janji kampanye yang mereka lontarkan pada hajatan demokrasi terakbar di negeri ini.

Nawa Cita yang menjadi agenda prioritas Jokowi-JK merupakan turunan dari visi dan misi yang ditetapkan oleh pasangan ini. Nawa Cita itu meliputi berbagai bidang, yaitu pertahanan dan keamanan, tata kelola pemerintahan, otonomi daerah, reformasi sistem hukum, pendidikan dan kesehatan, produktivitas dan daya saing ekonomi, kemandirian ekonomi, revolusi karakter, serta kebudayaan dan restorasi sosial.

Sembilan bidang itu harus dipertahankan, ditingkatkan dan dimajukan secara signifikan. Melalui tulisan ini, penulis hanya akan mengulas beberapa agenda dari Nawa Cita tersebut. Terutama yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, reformasi sistem hukum dan revolusi karakter. Tulisan ini lebih berupa sebuah gagasan atau ide penulis, yang dapat menjadi salah satu alternatif jalan atau strategi untuk mewujudkan pencapaian pada bidang-bidang tersebut sesuai dengan janji Jokowi-JK.

Dalam dokumen Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi dan Program Aksi, sebagai dokumen tertulis janji Jokowi-JK dalam kampanye.

bidang tata kelola pemerintahan, reformasi sistem hukum, dan revolusi karakter ditempatkan dalam poin kedua, keempat dan kedelapan. Masing-masing bidang itu bunyi lengkapnya seperti berikut: (2) Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; (4) Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (8) Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa.

### **Politik Humanis**

Tiga bidang itu, bagi penulis lebih saling berkaitan erat satu sama lain dibanding bidang lain. Penulis menganggap keterpaduan tiga bidang itu akan dapat menciptakan sebuah suasana atau pembentukan mental politik humanis. Sebuah mental politik yang dapat mewujudkan tujuan utama sebuah bangsa untuk bernegara: kesejahteraan rakyat. Apa mental politik humanis itu? Sebelum penulis jelaskan tentang makna politik humanis, perkenankan penulis untuk menjelaskan terlebih dahulu, mengapa “mental politik” menjadi pilihan penulis untuk disandingkan dengan “perasaan humanis”, bukan yang digunakan “mental ekonomi” atau “mental hukum” saja?

Pertama, karena penulis berlatarbelakang mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan. Sehingga, kapasitas dan kompetensi akademik itu yang membuat politik ditempatkan sebagai ilmu atau bidang kehidupan yang paling pas diurai dalam tulisan ini. Selanjutnya, karena makna klasik politik yaitu upaya untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan yang meniscayakan interaksi antarorang serta saling memengaruhi satu sama lain (Budiardjo, 2008). Membuat penulis semakin mantap, bahwa kehidupan ini segala-galanya tidak bisa dilepas dari tindakan yang bersifat politis.

Bahkan, politik sebagai sebuah ilmu juga sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu lain seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi dan hukum. Oleh karena itu, penulis lebih memilih politik untuk dibentuk mental yang humanis. Lagipula, jika kita tengah membicarakan

janji seorang pemimpin, presiden atau negarawan, sejauhnyanya kita tengah membicarakan politik. Baik dengan pemaknaan klasik seperti di atas, maupun dengan pemaknaan yang lebih luas lagi.

Lalu, apa yang dimaksud mental politik humanis? Mental politik humanis yaitu sebuah kondisi ketika ruang politik bernegara dan berkebangsaan dipenuhi oleh pelaku-pelaku politik yang dilandasi moral dan etika yang tinggi (akhlak) sehingga sadar akan hak dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Kondisi ketika partisipasi publik dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan dilakukan secara profesional dan proporsional. Kondisi ketika hukum ditegakkan seadil-adilnya bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Kondisi ketika kebijakan pemerintah terutama di bidang ekonomi semata untuk kesejahteraan rakyat.

Setidaknya itulah definisi mental politik humanis yang dapat penulis maknai. Tentu, politik humanis ini seperti namanya merupakan sebuah politik yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, harmonis, keselarasan dan pluralitas yang *nguwongke wong* (memanusiakan manusia). Sangat bisa, makna dari mental politik humanis ini diperluas lagi cakupannya oleh tiap-tiap pembaca. Selama pemaknaan itu tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar dari sebuah politik humanis.

### **Melawan Pembusukan Politik**

Sesungguhnya, pembentukan mental politik humanis ini merupakan salah satu cara untuk “memurnikan” operasionalisasi politik sebagai sebuah ilmu. Pada dasarnya para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, menganggap politik itu memiliki tujuan yang teramat mulia sebagai usaha untuk meraih kehidupan yang lebih baik (Budiardjo, 2008). Sehingga, kewajiban dalam aktivitas politik itu seharusnya sama dengan menunaikan tugas suci, karena berupaya memastikan tercapainya kehidupan yang lebih baik berupa kesejahteraan.

Namun, nyatanya kini penulis menyaksikan serta merasakan terjadinya pembusukan politik. Pembusukan ini paling gampang kita identifikasi, yaitu ketika banyak orang yang menganggap bahwa politik itu sebuah barang kotor yang penuh dengan kebusukan, kebohongan dan kejahatan semata. Akibatnya, banyak orang—terkhusus orang baik—yang tidak mau beraktivitas dalam

dunia politik apalagi yang berbau kekuasaan. Hasilnya, semakin banyak dan leluasa orang jahat yang menguasai panggung politik dan kekuasaan yang membentuk oligarki kejahatan. Itulah yang dimaksud dengan pembusukan politik.

Tidak bisa dimungkiri memang, saat ini kita tengah disuguhkan berbagai macam akrobat dan tindakan busuk para elit, politisi serta pemimpin kita. Mulai dari hal-hal yang berakitan dengan teknis-administratif seperti tatakelola pemerintahan yang masih belum baik, inefisiensi dan kurangnya transparansi anggaran, serta rendahnya keterbukaan informasi publik. Sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan rendahnya akhlak seperti penyalahgunaan jabatan, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok, tindakan asusila sampai pada tindakan korupsi dan pencucian uang. Kondisi dan tindakan-tindakan macam ini yang membuat politik semakin dianggap sebagai kebusukan.

Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2013 menunjukkan bahwa sejak dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sejak tahun 2005, tidak kurang 300 pemimpin daerah—kepala dan wakil kepala daerah—mulai tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota—yang tersangkut korupsi (Kompas 2014). Belum lagi ribuan anggota legislatif dari tingkat pusat sampai daerah yang juga tersangkut korupsi. Kondisi ini diperunyam dengan persekongkolan jahat yang terbentuk antara penguasa dan pengusaha yang acapkali sama-sama mengambil keuntungan dalam setiap proyek.

Contoh di atas, baru sedikit kasus dari dunia eksekutif dan legislatif. Belum kita tampilkan kasus yang berasal dari dunia yudikatif seperti penyuapan hakim. Makin gelap pula dunia politik jika kita ceritakan tindakan amoral sebagian pejabat kita seperti tindakan asusila dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, tidak salah kiranya di negeri ini politik menjadi bual-bualan dan divonis sebagai biang keladi atas terjadinya kehancuran bangsa.

Sebab-sebab tersebutlah yang menggugah penulis, untuk menyampaikan ide tentang pembentukan mental politik humanis pada pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Mental politik humanis akan menjadi antitesis dari mental politik busuk yang selama ini

kita saksikan dan alami. Mental politik humanis merupakan cara terbaik dan tepat untuk mengubah wajah struktur dan sistem pemerintahan serta hukum di republik ini. Sehingga tujuan utama dari dibentuknya negara ini dapat segera tercapai: melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia.

Selanjutnya, bagaimana cara atau strategi untuk mencapai mental politik humanis itu? Setidaknya ada tiga jalan besar yang ditempuh untuk membentuknya. Tiga jalan besar tersebut sejalan dengan tiga dari sembilan agenda prioritas (Nawa Cita) pemerintahan Jokowi-JK, yang penulis ambil untuk dibahas dalam tulisan ini. Tiga jalan besar itu dimulai dari (1) pendidikan (revolusi karakter); (2) reformasi sistem hukum dan pemerintahan; dan (3) pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tiga jalan ini bagi penulis sepatutnya perlu diambil oleh pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Karena jalan ini menjadi salah satu cara untuk mencapai tiga agenda prioritas yang penulis sebutkan di awal.

### **Pendidikan Kunci Revolusi**

Menjadi paling pertama dan utama, untuk mengubah sebuah tindakan yang disertai dengan perasaan dan pemikiran (mental) suatu masyarakat yaitu melalui pendidikan. Pendidikan menjadi kata kunci untuk mewujudkan sebuah revolusi karakter atau revolusi mental sebuah bangsa. Sehingga, revolusi di bidang pendidikan harus dinomorsatukan untuk mencapai revolusi mental, seperti yang dicita-citakan Soekarno dan kembali diangkat oleh Jokowi dalam Pilpres 2014 sebagai misi besar pemerintahannya ke depan.

Dalam hal ketika bangsa tengah mengalami multikrisis seperti sekarang (kepemimpinan, akhlak, keimanan, kepercayaan, dan keteladanan). Maka dari dunia pendidikan itu, yang perlu ditumbuhkembangkan dan ditingkatkan yaitu pendidikan akhlak. Sesungguhnya, jika kita perhatikan bahwa sumber dari segala kebobrokan dan kehancuran politik serta hukum di negeri ini berawal dari krisis akhlak pada pemimpin bahkan masyarakat sendiri.

Kurikulum pendidikan ke depan, mulai dari satuan penyelenggaraan pendidikan paling dasar sampai paling tinggi sekalipun, harus menempatkan pendidikan akhlak dalam setiap mata pelajaran. Tentu yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai akhlak itu sendiri, bukan dengan memperbanyak beban jam pelajaran pendidikan agama, apalagi sampai membenturkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain sehingga tampak menyederhanakan beberapa ilmu dan pengetahuan. Kondisi ini yang terjadi pada desain Kurikulum 2013.

Pendidikan akhlak tentu tidak dapat semata-mata diajarkan melalui bangku sekolah. Tetapi harus lebih gencar disosialisasikan di luar kelas seperti keluarga, kelompok-kelompok dan masyarakat secara umum. Pendidikan akhlak harus mengutamakan praktik dan contoh dalam bentuk perilaku berkehidupan di masyarakat ketimbang berteori di ruang-ruang kelas.

Apabila pendidikan (nilai-nilai) akhlak ini sukses dijalankan, maka terbentuknya mental manusia Indonesia yang humanis terutama di bidang politik merupakan suatu keniscayaan. Akhlak menjadi kunci revolusi karakter bangsa, karena akhlak tidak hanya mampu membedakan mana yang salah dan benar, juga baik dan buruk. Tetapi lebih dari itu, akhlak juga mengandung etika dan estetika berkehidupan dalam masyarakat.

### **Perombakan Sistem Perekrutan**

Setelah terbentuknya manusia Indonesia yang bermental humanis melalui pendidikan akhlak, jalan berikutnya bagi pemerintahan Jokowi-JK yaitu memastikan hadirnya sistem yang baik dan berkualitas untuk menyambut kehadiran manusia-manusia humanis hasil pendidikan akhlak itu. Tidak jarang sistem yang buruk justru menjadi jurang kehancuran bagi orang-orang yang berkualitas dan berperilaku jujur. Sehingga, perombakan sistem yang menghambat kemajuan dan menjebak kejujuran harus dilakukan.

Ada banyak sistem yang harus dirombak di negeri ini, terutama sistem di bidang politik dan hukum. Tetapi, penulis hanya akan menyoroti sistem perekrutan penyelenggara negara. Sistem perekrutan baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif

harus dirombak oleh Jokowi-JK. Sistem ke depan harus menjamin manusia-manusia humanis dapat berkarya dan mengabdikan dalam penyelenggaraan negara.

Sistem perekrutan ini sangat penting karena menentukan baik buruknya penyelenggaraan negara dari segi sumber daya manusia (SDM). Sistem saat ini sangat merugikan orang-orang baik, karena menciptakan struktur oligarki yang teramat kuat sehingga kekuasaan itu hanya diatur dan dijalankan oleh segelintir orang. Sistem sekarang justru merusak mental dan menjebak orang-orang baik itu untuk berperilaku jahat. Betapa tidak, sudah menjadi rahasia umum misalnya, untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) terutama di daerah-daerah, harus mengeluarkan uang sogokan untuk atasan atau kepala daerah setempat yang jumlahnya tidak sedikit.

Sistem perekrutan yang busuk ini tidak hanya ketika ingin menjadi PNS, tetapi juga ketika ingin berkarier sebagai jaksa, polisi dan tentara. Tentu tidak boleh dilupakan sistem perekrutan politisi yang bertumpu pada partai politik (parpol) juga harus dirombak. Sistem perekrutan politisi saat ini menghasilkan banyak politisi bermental pemburu rente semata. Sistem perekrutan yang baik juga perlu diterapkan di sektor swasta atau bahkan kelompok masyarakat sipil. Karena, swasta seringkali berkoalisi dengan penguasa untuk menggarong uang rakyat. Dengan hadirnya sistem perekrutan yang baik, dapat dipastikan penyelenggaraan negara tengah dijalankan oleh manusia-manusia berkualitas yang bermental politik humanis.

### **Komitmen *Good Governance***

Setelah membentuk mental manusia Indonesia yang humanis, kemudian merombak sistem busuk menjadi sistem humanis. Maka, jalan ketiga dari jalan besar yang penulis ajukan untuk diambil oleh Jokowi-JK, yaitu komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bernegara dan berkebangsaan harus ditingkatkan oleh pemerintahan mendatang.

Pemerintahan mendatang harus sadar betul bahwa paradigma penyelenggaraan negara sekarang sudah tidak lagi bertumpu pada satu aktor tunggal yaitu negara itu sendiri. Tetapi diperlukan kerja sama dan kolaborasi antaraktor yang berkepentingan seperti aktor swasta dan masyarakat sipil. Koalisi tiga aktor ini harus diarahkan untuk membentuk politik humanis ketimbang politik busuk yang sering ditampilkan di depan publik.

Kerja sama antara tiga aktor *governance* harus memiliki tujuan bersama, yakni terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Swasta dan kelompok masyarakat sipil harus jeli melihat sektor atau bidang yang belum bisa dijangkau oleh negara untuk digarap dan diberdayakan. Begitu pula negara, harus mendukung kegiatan swasta dan LSM yang melakukan pemberdayaan masyarakat serta mengisi ruang-ruang kosong yang belum ditempati negara.

Tentu saja, koalisi ini harus tetap kritis satu sama lain ketika salah satu aktor dianggap tidak mengalami kemajuan dan perubahan yang berarti dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan tersebut. Kondisi itulah yang disebut dengan mental politik humanis. Tim pemerintahan Jokowi-JK harus membuktikan kemampuan mereka untuk menggabungkan segenap kekuatan unsur-unsur dalam *governance*. Seperti kesuksesan pasangan ini menggabungkan unsur-unsur tersebut, hingga mengantar mereka pada tampuk kekuasaan tertinggi di republik ini.

Pada akhirnya, terbentuknya mental politik humanis merupakan keniscayaan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Mental politik humanis dapat terbentuk dari tiga agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK sebagai bagian dari Nawa Cita. Mental politik humanis dalam penyelenggaraan bernegara dan berbangsa, merupakan salah satu jalan terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.[]

# MELAYANI RAKYAT ATAU MEMENUHI HASRAT

*Kgs. M Aditia*

Indonesia adalah negara yang sangat luas yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan juga terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah penduduk sekitar 228 juta jiwa (Mustika Candra, 2011:15). Namun apa yang terjadi sekarang adalah ironi bagi Indonesia. Banyak sekali rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, kelaparan, dan susah mendapatkan pendidikan. Kurangnya penyediaan lapangan pekerjaan, mahalnya pendidikan serta informasi yang tidak tersebar dengan baik adalah beberapa penyebab hal itu.

Keadaan itu membuat banyak rakyat Indonesia menjadi pengangguran. Terhitung November 2013, angka pengangguran di Indonesia sekitar 7,9 juta jiwa (Badan Pusat statistik, 2013). Melihat fakta, jelas harus ada suatu terobosan untuk negeri ini. Harus ada seorang pemimpin yang bersungguh-sungguh berkorban untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Berbicara masalah pemimpin untuk rakyat Indonesia, sepertinya tahun 2014 ini adalah tahun yang tepat, dimana rakyat berbondong-bondong datang ke TPS. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu pemimpin Indonesia yang lebih baik, yang bersungguh-sungguh ingin melayani rakyat, bukan hanya sekedar untuk memenuhi hasrat segelintir orang tanpa memikirkan kepentingan rakyat banyak.

Pemilihan umum selesai dilaksanakan dengan baik, dimulai dari memilih DPR dan diakhiri dengan pemilihan presiden. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilaksanakan KPU, pasangan

Joko Widodo dan Jusuf Kalla unggul dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa. Siapapun yang menjadi presiden, ada suatu masalah besar yang mereka hadapi, masalah klise pasca pemilihan umum yaitu pembagian jatah kekuasaan untuk partai pendukung.

Masalah pembagian jatah kekuasaan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, semenjak pemilihan langsung pada 2004 masalah ini sudah ada. Setelah 10 tahun demokrasi berjalan, tidak ada satu pun yang berhasil memecahkan masalah ini dengan baik. Mungkin ada beberapa terobosan, namun belum bisa menyelesaikan dengan baik.

Mengapa pembagian jatah menjadi suatu masalah besar? Pada dasarnya apabila proses pembagian jatah ini dilakukan dengan profesional, tidak akan ada masalah yang timbul, namun apa yang terjadi sekarang ini adalah suatu permasalahan besar bagi rakyat Indonesia. Hal ini karena para partai pemenang pemilihan umum biasanya akan melakukan tindakan yang hanya memikirkan kepentingan mereka dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Contohnya dalam penempatan posisi menteri, sudah bukan rahasia bahwa banyak orang yang tidak profesional ditempatkan pada posisi ini. Seharusnya sebagai partai yang telah memenangkan pemilihan umum, mengirimkan wakil profesional terbaik di bidang yang telah ditentukan, namun apa yang terjadi adalah tidak profesional dan hanya memikirkan kepentingan mereka di atas kepentingan rakyat. Mereka mengirimkan wakil yang dianggap paling berjasa kepada partai, tanpa melihat apakah orang yang ditunjuk tersebut memiliki kemampuan yang tepat di dalam bidang itu.

Permasalahan seperti ini bukan hanya terjadi di dalam partai tertentu, namun hampir di setiap partai pemenang pemilu. Pada akhirnya, yang terjadi pada rakyat adalah mereka dipimpin oleh menteri yang tidak kompeten. Ini berdampak pada tingkat keefisienan pemerintahan yang terbentuk. Apa yang saya maksud dengan keefisienan adalah sebagai berikut.

Pertama, munculnya kementerian yang boros, yaitu kementerian yang pada dasarnya bisa disatukan ke dalam satu, karena beberapa alasan dipisah menjadi beberapa kementerian.

Lebih konsentrasi dalam menjalani tugas, mungkin salah satu alasannya. Padahal, jika dipikirkan, kementerian baru dapat membebani keuangan negara. Akan lebih baik hanya membentuk satu kementerian namun memiliki sub-sub divisi tertentu agar dapat bekerja dengan baik. Namun pemimpin kita berpendapat lain, para pemimpin memilih untuk membentuk kementerian yang boros yang mereka pikir akan mempercepat pembangunan.

Kementerian yang boros ini terlihat di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai contoh pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dilihat dari namanya, kementerian ini memiliki tugas melakukan pembangunan nasional meliputi seluruh wilayah NKRI, dari pelosok desa hingga kota. Namun ada satu kementerian lain memiliki tugas yang hampir sama, yaitu Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kedua kementerian ini sebenarnya memiliki tujuan dan dasar yang sama yaitu untuk membangun, mengapa kedua kementerian ini harus dipisah? Apakah karena kebutuhan ataukah hanya pemuas hasrat jabatan para elit partai? Kalau saja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diisi oleh orang-orang yang kompeten, maka Indonesia akan bisa melakukan pembangunan dengan baik, tanpa harus memiliki lebih dari satu kementerian yang pada dasarnya memiliki tugas hampir sama.

Jelas ini merupakan masalah besar yang akan dihadapi oleh presiden baru yang memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Rakyat masih bertanya-tanya, apakah bisa pemimpin baru lebih memilih kepentingan rakyat daripada kepentingan partai pendukung. Tentunya rakyat berharap melihat kementerian yang benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan seperti kementerian sebelumnya yang memiliki banyak cabang namun minim hasil.

Kedua, munculnya jabatan wakil menteri. Pertanyaan yang muncul dengan jabatan itu adalah, apa tugas yang dijalankan wakil menteri? Mengapa harus ada wakil menteri? Mungkin, pemerintah menunjuk wakil menteri guna untuk mendukung tugas para menteri yang duduk di kabinet, namun mengapa harus wakil menteri? Apakah orang yang duduk sebagai menteri tidak sanggup menjalani tugas sebagai menteri? Kalau jawabannya iya,

mengapa tidak ganti saja menteri tersebut dengan wakil menteri sehingga pada akhirnya tidak akan ada jabatan wakil menteri di dalam pemerintahan.

Mengapa wakil menteri ini banyak mendapat sorotan masyarakat? Alasan paling logis adalah karena wakil menteri memiliki kedudukan yang sama dengan menteri dimana seluruh fasilitas pendukung yang nilainya sangat besar akan dibebankan kepada anggaran pemerintah. Tentu ini membebani keuangan negara. Di Indonesia masih banyak rakyat yang miskin. Sebagian orang percaya bahwa lebih baik menggunakan uang fasilitas wakil menteri tersebut untuk keperluan rakyat miskin seperti untuk sekolah gratis.

Sebenarnya apabila menteri atau wakil menteri ini bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat, tidak akan muncul anggapan negatif di kalangan masyarakat. Namun karena kinerja yang telah ditunjukkan selama ini belum memuaskan, sudah sepatutnya rakyat mempertanyakan hal ini. Tentunya rakyat tidak mau uang negara di berikan kepada orang-orang yang tidak berkompeten yang menjabat sebagai menteri atau wakil menteri.

Rakyat telah bosan memakan janji-janji yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Sekarang adalah saat yang tepat bagi rakyat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin yang benar berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan hanya mengucapkan janji-janji yang tidak pernah dipenuhi.

Beberapa waktu lalu ketika berkampanye, presiden terpilih Joko Widodo berjanji di dalam visi dan misinya bahwa ia akan membawa perubahan yang lebih baik kepada rakyat Indonesia di semua sektor. Salah satu sektor yang akan diperbaiki adalah efisiensi kementerian yang telah ada pada pemerintahan sebelumnya. Hal ini tercermin di dalam visi dan misi yang telah disampaikan. Salah satu butir isi dari janji-janjinya adalah, "Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani."

Rakyat sangat mengharapkan presiden terpilih dapat menjalankan apa yang dijanjikan dengan baik. Sehingga akan tercipta pemerintahan yang berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan hanya pemerintahan yang bertujuan memenuhi hasrat segelintir orang.[]

# REVOLUSI MENTAL PENJAJAH DAN KORUPTOR

*Muhammad Isyraqi El Hakim*

**M**asih basah bibir kita membicarakan pemilu presiden terbaru negara Indonesia. Gejolak yang terjadi bahkan sangat panas. Persahabatan bisa berubah menjadi sebuah kesinisan, hanya karena perbedaan pilihan. Namun, semua itu sudah terselesaikan, ketika sang hakim mengetok palu, memutuskan hasil pemilihan umum di negara ini.

Presiden baru, maka akan ada perubahan baru yang akan dilakukan. Janji janji terus mengalir ketika masa-masa kampanye dilakukan. Janji janji yang mungkin keluar karena hati ingin merubah kondisi, atau mungkin hanya sekedar ingin meyakinkan hati yang masih bimbang karena tak tahu pemimpin mana yang harus diyakini.

Kini, janji-janji sudah terucap. Berbagai gagasan guna menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh negara ini sudah diucapkan. Masalah kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, dan berbagai hal lainnya. Namun, ada satu janji yang ingin kami tagih, yakni janji untuk menyejahterakan rakyat.

Wajar saja, para calon presiden dalam debatnya pernah berkata, bahwa presiden adalah pelayan rakyat. Namun, pada kenyataannya, justru para pemegang keputusan tertinggi negara inilah, yang justru jauh dari kata melayani, mungkin lebih tepatnya mereka itu dilayani rakyat.

Menurut laporan yang masuk pada KPK, selama periode 2013, terdapat kasus korupsi hingga 179.697. Bahkan, hingga 30 April

2014, tercatat ada 2.173 kasus yang dilaporkan, dan baru sebanyak 1.975 kasus yang ditindaklanjuti. Ini menunjukkan, bahwa masih banyak kasus korupsi yang terjadi di dalam sistem pemerintahan kita.

Di negara ini, korupsi memang sudah membudaya. Bahkan, negara kita masuk ke jajaran 60 negara terkorup dunia. Hal ini membuat kondisi ini semakin miris. Padahal, menurut Finn Heinrich, peneliti utama dari TI (Transparansi Internasional), kegiatan korupsi adalah perbuatan yang sangat menyakiti dan menyengsarakan rakyat kecil. Karenanya, sangat miris ketika negara yang belum sejahtera, malah banyak perilaku korupsinya. Negeri ini sedang dijajah, walau kata 'merdeka' sudah berkumandang sejak 69 tahun lalu, namun penjajahan masih sedang terjadi. Bukan oleh Belanda, justru oleh orang-orang yang kita percaya untuk bisa meningkatkan nasib dan kesejahteraan masyarakat.

Sederet masalah di atas memang membuat kita suram. Namun, bukan berarti tidak akan selesai. Walikota Bandung saat ini, Ridwan Kamil, berkata dalam pidato kampanyenya, bahwa uang APBD Kota Bandung sangat banyak. Jangankan untuk melaksanakan program, uangnya pun berlebih untuk melaksanakan berbagai program baru. Pada walikota terdahulu, Dada Rosada, banyak program yang terkesan kesulitan uang. Ternyata, Dada Rosada menjadi tersangka kasus korupsi.

Ridwan Kamil merupakan tokoh yang menyadarkan saya, ketika sebuah sistem pemerintahan dijalankan dengan bersih, maka segala kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Presiden terpilih, Jokowi sendiri menyadari akan masalah ini. Karenanya, dia menyatakan sebuah slogan dalam kampanye kemarin: REVOLUSI MENTAL.

Mental bangsa ini harus diubah, mental bangsa ini harus dibentuk, mental bangsa ini harus jauh dari perbuatan tidak terpuji seperti korupsi. Karena itu, menurut saya, kita harus merevolusi mental para oknum pejabat yang kini sedang menjajah negara kita sendiri, merevolusi mental para koruptor atau mereka yang berpotensi menjadi koruptor suatu saat nanti.

Dalam pengamatan saya, orang Indonesia sangat senang melakukan berbagai perilaku yang melanggar aturan karena

satu hal, yakni hukum berjalan sangat tidak kuat. Karenanya, bagi mereka yang melanggar, bisa melewati jerat hukum dengan mudah, layaknya ikan kecil melewati lubang pada jala besar. Jika ingin membuat perubahan tingkah laku masyarakat, koruptor, ataupun calon koruptor di negara ini, ada beberapa yang harusnya bisa dipertimbangkan sebagai langkah yang baik.

Pertama, pemberian efek jera. Setelah saya mempelajari tingkah laku masyarakat kita, ternyata masyarakat kita ini tidak akan mematuhi aturan, kecuali mereka mendapat efek jera ketika sudah tertangkap. Beberapa negara melakukan hukuman cukup berat bagi para pelaku korupsi, mulai dari potong tangan, hukum rajam, bahkan hukuman mati. Hal ini dilakukan karena negara tersebut menganggap korupsi merupakan sebuah pelanggaran yang sangat merugikan rakyat dan bahkan dianggap pembunuhan rakyat secara masal. Karenanya, hukuman yang diberikan sangat keras.

Negara kita masih jauh dari kata penegakan hukum. Bahkan, para koruptor sendiri mendapatkan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera. Masih teringat di kepala kita, kasus korupsi terbesar di Banten yang dilakukan oleh Ratu Atut? Kasus korupsi miliaran itu hanya dijera hukuman selama 4 tahun. Hal ini harus segera dibenahi, pemberian efek jera yang setimpal harus dilakukan.

Kedua, adanya transparansi. Transparansi dalam segala transaksi yang berlaku harus terbuka dan bisa diakses oleh rakyat. Agar masyarakat bisa percaya dan mengawasi secara langsung aliran uang yang berasal dari pajak masyarakat. Pasalnya, tanpa transparansi menimbulkan kecurigaan dari rakyat, serta bisa menimbulkan kesempatan untuk melakukan korupsi.

Ketiga, pendidikan moral. Mengapa Jepang yang usianya lebih muda bisa lebih maju dari kita? Ya, pendidikan moral menjadi salah satu pembeda. Orang Jepang merupakan negara yang terbilang bersih dari kasus korupsi. Sedangkan Indonesia masih belum bisa menandingi Jepang. Salah satu pelajaran yang diajarkan dari kecil oleh orang Jepang adalah pelajaran moral. Sedangkan di Indonesia? Jarang sekali pelajaran moral diajarkan kepada anak-anak Indonesia.

Tiga hal diatas merupakan gagasan yang ingin saya sampaikan kepada presiden Indonesia. Kita membangun Indonesia diawali dengan merevolusi mental masyarakatnya. Sebetulnya, masalah besar bangsa ini justru berawal dari pelanggaran kecil. Infrastruktur yang berjalan lambat dan tingkat kesejahteraan yang belum sesuai harapan. Korupsi itu ibarat membuang sungai di sampah, walau kecil namun banyak orang yang melakukan. Akhirnya kita mendapat musibah banjir dan bencana bagi mereka yang tak bersalah.

Korupsi terjadi karena adanya *mindset* dari para pemimpin yang tidak berpikir untuk melindungi rakyat. Jabatan wakil rakyat yang ada saat ini tak lebih sebuah jabatan pekerjaan sebagai mata pencaharian bagi para pemimpin. Wakil rakyat bagi saya adalah jabatan yang diemban bukan hanya karena sebuah keinginan, melainkan karena kemampuan yang memadai. Namun, partai-partai dalam pemilu legislatif, banyak yang mengajukan calon karena popularitas semata, agar sang calon mendapat suara banyak dan menambah jumlah kursi partai di Senayan.

Kisah ini tidak saya karang. Kisah ini terjadi pada orangtua saya. Ibu saya adalah dosen di salah satu universitas di Bandung. Beliau hanya seorang dosen biasa yang bahkan jarang membicarakan politik. Jangankan politik, mungkin membicarakan terkait masalah negara dan kebijakan pun jarang.

Tiba-tiba, beberapa bulan sebelum pemilu legislatif, ibu saya ditawarkan oleh salah satu partai untuk menjadi salah satu calon anggota legislatif. Selain sebagai dosen, ibu memang aktif di dunia tilawah. Beliau sering menjadi juri dalam berbagai lomba tilawah Al-Quran. Sepertinya, prestasi tersebut menjadi dasar partai untuk mengajak ibu menjadi salah satu calon legislatif dari partai tersebut.

Langsung saja, tawaran tersebut ditolak oleh ibu. Pasalnya, ibu sendiri yang mengatakan bahwa aneh baginya menjadi wakil rakyat. Jangankan menjadi wakil rakyat, urusan masyarakat saja beliau tidak terlalu *concern*. Namun, salah satu teman ibu yang sama-sama berprofesi sebagai juri tilawah, akhirnya menjadi salah satu calon.

Sungguh miris, ketika justru jabatan pemimpin ini diberikan kepada mereka yang sebetulnya tidak berkeinginan. Paling

berbahaya lagi, jika diberikan kepada mereka yang tidak berkemampuan namun memiliki kemampuan harta yang besar, atau popularitas besar.

Inilah mungkin yang mendasari, mengapa ada pemimpin atau wakil rakyat yang tidak memedulikan nasib rakyat atau melindungi rakyat. Mengapa? Karena mereka dilahirkan bukan dari keinginan sendiri, ataupun keinginan melindungi rakyat, tapi mereka lahir dari sebuah tawaran yang hadir guna memenangkan partainya di Senayan.

Lalu, kemana orang-orang hebat yang memang memperjuangkan nasib rakyat? Ya, terkadang mereka lebih senang berada di luar sistem, tidak tergabung dengan partai, dan tidak berkuasa karena berada di luar jalur pemerintahan kita.

Hal ini juga yang harus menjadi PR presiden baru. Bagaimana langkah presiden baru untuk bisa melakukan seleksi atau penyaringan kabinetnya. Seperti halnya pendaftaran kepala dinas yang sekarang sedang marak karena tesnya yang sulit. Tujuannya memang mencari kepala dinas dengan kualitas tingkat tinggi.

Ini bukan tidak mungkin, justru sangat bisa dilakukan, andai ada kebijakan yang bisa mengatur dan memfilter orang yang kapabel untuk menjadi pemimpin rakyat kita. Ridwan Kamil dan Tri Rismaharini adalah contoh pemimpin kota yang melindungi rakyat, mereka dilahirkan dari kepercayaan masyarakat, serta atas prestasinya sebelum maju sebagai walikota. Patutnya ini bisa dicontoh oleh para wakil rakyat atau pemimpin lainnya.

Rakyat kecil hanya bisa terdiam melihat wakilnya melakukan pelanggaran, rakyat kecil hanya bisa menahan amarah ketika wakilnya tidak hadir dalam rapat untuk memperjuangkan rakyat. Rakyat kecil hanya bisa mengelus dada ketika yang hadir rapat hanya datang untuk tidur atau bahkan bermain *gadget*. Rakyat kecil hanya bisa berdoa ketika yang mereka percaya untuk mewakilinya bahkan tidak melindungi rakyat kecil.

Saya mengajukan gagasan agar ada penilaian bagi kinerja masing-masing pemimpin rakyat. Sehingga, jika terdapat pelanggaran atau kinerja buruk, rakyat bisa menuntut wakil rakyat untuk melepas jabatan. Pembina Forum Indonesia Muda, Elmir

Amien pernah berkata, “Untuk menjadi seorang pemimpin atau wakil rakyat di Indonesia itu gampang. Anda jadi orang munafik pun bisa. Anda jadi orang bodoh pun boleh. Asal jangan kelihatan melanggar aturan. Karena tidak akan ada orang yang melepas jabatan Anda ketika anda memegang jabatan jabatan besar di negara Indonesia ini”. Pernyataan itu agaknya benar.

Alangkah baiknya jika presiden sebagai jabatan tertinggi di negara ini, sebagai pelayan masyarakat, mampu juga membuat sistem pemerintahan yang bisa terisi dengan orang-orang yang peduli dan melindungi rakyat. Karena, ketika tidak ada perasaan melindungi rakyat pada hati masing-masing wakil rakyat ataupun pemimpin kita, maka korupsi, kolusi, nepotisme, akan terus terjadi, membudaya, bahkan menjamur di negara Indonesia. Saya percaya, presiden baru akan memberikan semangat baru, dan perubahan bagi negara kita tercinta.[]

# MENGELOLA KEKUASAAN

*Maman*

Pemerintah dan pemerintahan adalah institusi yang terbentuk dari adanya kebutuhan bersama masyarakat terhadap adanya organisasi yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Termasuk di dalamnya aturan atas kegiatan perekonomian dan aturan atas kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan adanya peraturan dan kelompok orang yang mengatur, kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan tertib terhindar dari kericuhan. Dengan adanya lembaga pemerintahan dalam kehidupan sosial diharapkan terjadi keteraturan dan ketertiban termasuk pengelolaan sumber daya alam.

Jumlah masyarakat yang semakin bertambah, diikuti juga dengan kompleksnya kebutuhan masyarakat. Secara rasional tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya lembaga yang menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat yang adil. Kondisi demikian yang mendorong masyarakat kuno Yunani untuk membentuk pemerintahan dalam skala kecil yang melingkupi masyarakat kota. Pembentukan lembaga pemerintahan ini secara esensial adalah penyerahan sebagian besar kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat kepada sebagian orang untuk memimpin dan mengatur suatu daerah serta menggunakan kekuasaan tersebut untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan masyarakat di kota tersebut.

Dengan kekuasaan yang dimilikinya, pemerintah berkuasa untuk membentuk regulasi dan memaksakan aturan tersebut kepada wilayahnya termasuk kepada masyarakat yang merupakan

pemilik asal kekuasaan tersebut. Bahkan pemerintah berhak untuk menyiapkan perangkat seperti polisi dan lain-lain guna menegakkan regulasi tersebut jika memang ada pelanggaran yang terjadi.

Pada masa sekarang, Indonesia seperti mayoritas negara di dunia, menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem politik. Proses terbentuknya pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum setiap lima tahun. Masyarakat mengadakan pesta demokrasi yang secara esensial adalah proses memilih pemimpin dan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin. Mereka diharapkan akan menggunakan kekuasaan dengan amanah untuk mengelola negara, memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat dan negara tanpa sedikit pun kekuasaan itu digunakan untuk kepentingan individu maupun golongan.

Jadi pada dasarnya kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat dengan suatu harapan, yaitu akan dialokasikan kembali kepada rakyat dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang memberikan kesejahteraan. Sebagai konsekuensi logis, pemerintah memiliki kewajiban menjadi pelayan bagi rakyat, mengalokasikan setiap sumberdaya untuk kebutuhan rakyat.

Kendati Indonesia sudah cukup lama merdeka dan pemerintahan sudah lama dibentuk, masih saja terdapat banyak permasalahan di lingkungan institusi pemerintahan Indonesia. Beberapa permasalahan antara lain korupsi, kolusi dan nepotisme yang kian marak merasuki lembaga lembaga negara seperti lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif yang notabene sebagai tonggak akhir penegakan hukum di Indonesia. Kasus Akil Mokhtar yang terkait dengan suap Pilkada Banten menjadi bukti bahwa korupsi di negeri ini semakin menjadi, sistematis dan memprihatinkan. Bagaimana mungkin, lembaga yang seharusnya menjaga wibawa hukum malah menjadi aktor yang meruntuhkan wibawa hukum sendiri?

Permasalahan lainnya adalah besarnya biaya operasional birokrasi yang tidak sebanding dengan kinerja birokratnya. Juga masalah politik internasional yang merugikan Indonesia seperti perjanjian kerjasama dengan TNC yang secara jelas tidak seimbang

antara tamu dengan tuan rumah. Ditambah berbagai permasalahan lain yang membuat pemerintahan berjalan tidak stabil, bahkan mengganggu kinerjanya dalam melayani rakyat sehingga pada akhirnya merugikan rakyat itu sendiri. Itu adalah sekelumit permasalahan pemerintahan Indonesia yang harus diselesaikan.

Indonesia adalah negara besar, kaya dan punya mega potensi yang masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Sampai sekarang malah harus berkutut dengan penyakit-penyakit yang menjangkiti mesin organisasinya. Lantas bagaimana kita sebagai pemuda menyikapi kondisi tersebut? Sama sekali tidak berarti ketika hanya menyesali atau bahkan mengutuk kondisi keterpurukan tanpa memikirkan solusi permasalahan.

Ya, di tangan kitalah sebagai pemuda, solusi tersebut ada. Pemuda adalah generasi masa depan yang memiliki kekuatan besar, pemikiran modern dan membawa harapan akan berbagai solusi terhadap permasalahan di Indonesia dan juga di pemerintahan Indonesia saat ini. Sebagai pemuda, seharusnya kita mampu mengkritisi, mengusahakan solusi terhadap problem yang ada dengan berbagai cara yang kita miliki. Dimulai dengan status kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat Indonesia, kita senantiasa partisipatif terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

Seperti ketika ada program pemerintah, kita harus senantiasa mendukung program pemerintah tersebut. Adapun ketika terjadi penyimpangan ataupun hal hal yang sifatnya menyalahi tugas dan fungsi mereka sebagai birokrat, pelayan rakyat dan pemegang amanah rakyat, maka sudah seharusnya kita memberikan kritik dan solusi. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendukung, mengkritisi pemerintah seperti audiensi, demonstrasi dan berbagai cara lainnya yang tentunya legal, santun dan juga sesuai dengan budaya dan norma masyarakat Indonesia.

Ide-ide kita juga menjadi sumbangsih positif bagi kondisi saat ini, sehingga kehadiran kita sebagai pemuda mampu memberikan solusi terhadap permasalahan, khususnya di lembaga pemerintahan yang dilanda berbagai permasalahan. Pemuda adalah mereka yang hidup dengan ide perubahan, mereka punya solusi, menangkap peluang, dan agen perubahan yang menjadi harapan bangsa untuk maju.

Lebih jauh, bagi pemuda yang bercita-cita menjadi politisi atau birokrat, tentunya harus bekerja dengan profesional, sungguh-sungguh menjaga amanah dan berorientasi kepada melayani dan menyejahterakan rakyat. Sekali lagi, kekuasaan yang dimiliki oleh aparatur negara, adalah kekuasaan titipan dari rakyat yang harus dialokasikan kembali dalam bentuk program dan kebijakan yang bermanfaat. Penyakit-penyakit yang menjangkiti pemerintahan harus mampu dihentikan secara sistematis dan menyeluruh sehingga menciptakan pemerintahan yang stabil, maju dan memberikan kontribusi maksimal kepada masyarakat.

Sebagai negarawan sejati, tentunya bukan jabatan, penghargaan dan harta yang menjadi tujuan dalam mengemban amanah. Sejatinya negarawan memahami bahwa amanah adalah sesuatu yang berat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat, negara bahkan kepada Allah SWT. Sebagai negarawan tentunya memahami bahwa di dalam suatu amanah harus dilaksanakan.

Sebagai negarawan sejati, tentunya mempunyai cita-cita besar yang menjadi energi untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, bebas dari penyakit korupsi, politisasi birokrasi dan tindakan yang merugikan rakyat, untuk menciptakan Indonesia yang kuat, makmur dan sejahtera. Negarawan adalah mereka yang mempunyai visi besar, bukan lagi membicarakan kesuksesan pribadi, mengusahakan hidup mewah yang mengesampingkan kepentingan orang banyak. Kepuasan seorang negarawan bukanlah ketika berhasil meraih gelar tertinggi, mendapat gaji besar atau mempunyai kekayaan yang banyak, tapi kepuasan adalah ketika potensi, ide dan kemampuan yang dimiliki akhirnya mampu memberikan kemanfaatan kepada orang lain.

Sebagai pemuda, sudah saatnya kita berusaha dan belajar secara maksimal dari sekarang untuk membangun kapasitas sebagai seorang pemimpin. Agar kelak bisa menjadi negarawan sejati dan aktor yang memberikan solusi, dan menjadi pelaku sejarah kebangkitan bangsa besar yaitu Indonesia. Saat ini Indonesia masih menantikan sosok pemimpin yang memiliki ide dan keberanian besar yang mampu memberikan kontribusi maksimal kepada negara. Pada akhir, kita yang harus menjadi jawaban atas

berbagai problem tersebut, kita sebagai generasi masa depan yang menjadi jawaban atas penantian bangsa Indonesia terhadap sosok pemimpin.

Belajar secara sungguh-sungguh adalah satu proses yang tentunya harus kita tempuh secara maksimal. Di samping kita mulai mengenali Indonesia lebih dalam dan lebih detail. Tentunya banyak proses proses yang harus kita lakukan untuk membentuk karakter kepemimpinan sejati hingga kita siap terjun secara nyata dalam pemerintahan Indonesia. Menjadi negarawan sejati bukanlah hasil instan, tapi harus melewati rangkaian proses panjang hingga semuanya membentuk akumulasi hasil dari proses yang kita lakukan.[]

# BERKACA PADA TURKI

*Rizal Eko Kurniawan*

Indonesia melantik pemimpin baru pada 20 Oktober 2014. Melantik presiden ketujuh sejak negara ini berdiri. Tiga kali di era reformasi, Indonesia melaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat. Ongkosnya mencapai 16 triliun rupiah. Apakah hasil pemilu ini benar-benar mencerminkan kebutuhan pemimpin yang layak bagi Indonesia? Jika Presiden terpilih hanya sebuah manifestasi politik saja, apakah bangsa Indonesia siap menerima konsekuensinya?.

Ir.H. Joko Widodo berhasil memenangkan kontestasi lima tahunan ini dan akan memimpin negara besar. Di luar masih menumpuknya permasalahan ibukota, sebanyak 53,13% hasil perolehan suara pilpres 2014 lalu, artinya ada 70 juta pemilih, yang meletakkan harapan kepada Jokowi. Jokowi akan memimpin negara dengan 13.000 pulau yang kini rawan diperjualbelikan. Negara dengan 2 juta kilometer persegi yang dihuni ragam suku, budaya, adat, agama serta ancaman radikalisme dan separatisme.

Negara keempat di dunia dengan garis tepi pantai lebih dari 95.000 kilometer yang rawan *human trafficking*, pesona flora dan fauna indah terancam punah, serta sebaran pengangguran di 34 propinsi dan 608 kabupaten kota menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang majemuk rawan intoleransi serta konflik horizontal.

Indonesia masih dijangkiti kemiskinan yang mencapai 10 juta jiwa (BPS, 2014). Angka tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan dapat menimbulkan dampak sistemik bagi negara ini, di antaranya mendorong jumlah kasus kriminalitas mencapai 305.708

pada tahun 2013. Indonesia pun masih menempati peringkat 114 dari 177 negara *Corruption Perception Index* yang diukur berdasarkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini hanya akan terus menjadi pemeo negara tetangga tentang persepsi negara kita.

Selain itu, masalah pendidikan juga tidak kalah hebatnya. Dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia tidak lebih dari 13% penduduk kita yang mengenyam pendidikan tinggi. Belum lagi pemerataan pendidikan, masalah infrastruktur, Ujian Nasional yang menuai pro dan kontra sampai UKT di tingkat perguruan tinggi. Hal ini merupakan sedikit dari daftar wajib bagi Jokowi agar segera menyelesaikan masalah-masalah kronis yang membelenggu bangsa ini selama bertahun tahun.

Meski United Nations Development Programme (UNDP) mencatat bangsa kita selalu memiliki tren positif dalam indeks pembangunan manusia. Kemajuan ini tidak lepas dari bonus demografis bangsa kita yang memiliki proporsi pemuda lebih besar. IPM sendiri merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara. Perlu diingat bahwa pengangguran terdidik bangsa kita juga meningkat.

Tersiar kabar, ada salah seorang putra terbaik bangsa kita yang mengenyam pendidikan di luar negeri, justru ditolak bekerja di tanah airnya sendiri. Benarkah bahwa bangsa kita belum butuh orang cerdas? Atau mungkinkah bangsa ini belum siap untuk memberikan lapangan pekerjaan sesuai dengan kompetensi. Pendidikan merupakan perhatian utama bagi siapapun pemimpin negeri ini. Tidak tanggung tanggung, seperlima APBN digelontorkan demi memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini menjadi tonggak utama pembangunan bangsa, pelan tapi pasti muncul alokasi pembiayaan mahasiswa berprestasi untuk masyarakat ekonomi lemah.

Bidik Misi misal, merupakan sebuah terobosan dalam bidang pendidikan sebagai jalan meraih cita. Kini di tahun keempat

program beasiswa ini berjalan telah meluluskan ribuan sarjana dan diploma dari berbagai universitas Indonesia sebagai wujud nyata perhatian pemerintah di bidang pendidikan.

### **Tunggakan Janji Pendidikan**

Kini, Jokowi-JK yang menjadi nahkoda kemana pendidikan bangsa kita akan bermuara. Sistem pendidikan Jokowi JK yang mereka nyatakan semasa kampanye, banyak menyimpan kontroversi. Jokowi-JK berkomitmen akan menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan. Pernyataan ini tertuang tidak begitu jelas bagaimana penyesuaian kurikulum sebelumnya dalam daftar visi misi mereka. Mengapa hal ini terasa penting?

Bukan tanpa alasan, sejak dekade terakhir Indonesia sudah bergonta ganti kurikulum mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan terakhir kurikulum 2013. Kini kurikulum pendidikan 2013 sudah mulai diberlakukan dengan mengutamakan sikap kritis peserta didik. Hal ini tentu belum bisa diterapkan di sekolah sekolah yang minim akses informasi atau daerah daerah tertinggal secara umum kurikulum ini tidak memperhatikan budaya lokal masing masing daerah di Indonesia. Guru-guru yang mampu membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) sendiri kini dihilangkan, karena semua disiapkan secara terpusat oleh Kemendikbud dengan tujuan seluruh capaian satuan pendidikan mampu diseragamkan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan misi pembangunan yang akan dibawa oleh kabinet Jokowi-JK. Sebab Jokowi-JK mereka berencana akan menghapuskan UN. Hal ini tentu menjadi kontradiktif dan sinyal bahwa murid yang akan bersekolah dalam dua tahun ke depan kemungkinan akan merasakan dua kurikulum yang berbeda, karena pemberian materi secara seragam tentu akan menyulitkan bila ujian diberikan kembali di tingkat satuan pendidikan. Tak pelak hal ini akan menambah kesenjangan kualitas pendidikan antara pusat dan daerah, khususnya daerah terdepan terluar dan tertinggal. Hal ini akan menjadi beban berat masing

masing daerah akibat belum terpenuhinya jumlah guru, insentif dan infrastruktur.

Apakah murid-murid di negara kita hanya akan terus menjadi kelinci percobaan? Karena setiap saat bisa saja kurikulum tiba-tiba diubah tanpa proses evaluasi. Jika Jokowi-JK ingin ada perubahan di sektor pendidikan ke arah yang lebih baik, kabinet bentukan Jokowi-JK harus memiliki keseriusan penting soal UN. Pentingnya sebuah standar ujian nasional menjadi alat pertimbangan penentu kebijakan mana daerah prioritas infrastuktur pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak bisa hanya fokus di Jawa, karena pendidikan kewarganegeraan lebih butuh di daerah perbatasan guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sektor pendidikan menjadi salah satu potret tunggakan janji bagi Jokowi-JK 5 tahun ke depan.

Integritas suatu bangsa tercermin dari kinerja dan realisasi janji pemimpinya mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk rakyatnya. Janji adalah sebuah kesanggupan dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Janji berbentuk konkrit. Bentuk janji tanpa realisasi hanya akan jadi wacana tanpa aksi. Kepemimpinan Jokowi selalu menjadi kontroversi. Sosok bersahaja ini berubah menjadi negarawan yang rela terjun langsung di sisi lain padatnya ibukota.

Sebagian dari rakyat Indonesia mempertanyakan tentang daftar janji yang belum dilunasi. Ibukota masih dirundung berbagai masalah, dengan realisasi janji Jokowi yang belum terpenuhi. Sejak menjabat, banjir dan kemacetan selalu menghiasi layar televisi. Belum tertunainya seluruh janji membuat rakyat seakan sangsi dengan kapabilitas Jokowi memberi solusi. Kini ibukota masih punya setumpuk janji, demi rakyat yang memilih beliau menjadi pemimpin negeri.

### **Berkaca ke Turki**

Siapa yang tidak mengenal Turki? Negeri dimana kekhalifahan terbaik pernah bersemayam. Bicara tentang pemimpin negeri, Turki bisa menjadi contoh negeri yang berkembang pesat baik dari sisi politik maupun ekonomi. Nilai GCP meningkat pesat,

Turki mampu menekan inflasi secara mengagumkan dan Erdogan menyulap negeri sekuler kini menjadi lebih disegani. Pertumbuhan ekonomi stabil, dan kini Turki menduduki posisi ke-6 dari segi ekonomi di Uni Eropa.

Pertumbuhan ekonomi berkembang pesat sejak Presiden Abdullah Al Gul dan Erdogan mengabdikan untuk Turki. Tentu kemajuan yang kini dirasakan rakyat Turki bahwa menjadi cerminan hasil pemimpin yang berintegritas tinggi. Erdogan menjadi contoh sosok negarawan sejati ketika Erdogan paham bahwa sang istri belum bisa mendampingi suami sebelum undang-undang larangan jilbab di negeri itu diganti. Turki melarang penggunaan jilbab dalam institusi negara selama 10 tahun. Setelah AKP kini menduduki posisi mayoritas dalam parlemen Turki, aturan larangan berjilbab telah dihapus. Pelan tapi pasti Turki mulai berbenah dan lebih syar'i.

Reformasi birokrasi yang dijalankan Turki mampu mengubah keterpurukan dan bangkit menjadi negara maju. Erdogan memiliki dedikasi tinggi demi kesejahteraan dan martabat rakyat Turki. Kini negara Barat dan kaum sekuler yang coba merecoki pemerintahan mulai jengah, sebab usaha dan kepercayaan rakyat Turki terhadap Erdogan melebihi konspirasi rezim sekuler di pemerintahan Turki.

Belajar dari Turki, Indonesia memiliki potensi lebih besar dilihat dari berbagai sudut pandang. Kini Jokowi dapat belajar tentang arti sebuah dedikasi dari seorang Erdogan di Turki. Menilik seorang Erdogan dan Jokowi mereka memiliki kesamaan berangkat dari arus bawah, dan pernah menyandang status walikota. Dalam kurun waktu 15 tahun, prestasi Erdogan melejit. Jokowi yang akan menjalankan tugas sejak tanggal 20 Oktober nanti praktis akan mengemban semangat negeri yang mirip dengan Turki.

Menepati janji sebagai negarawan sejati yang dengan berkontribusi tanpa henti untuk membangun negeri. Dengan semangat, dan kerjasama dari berbagai pihak Jokowi digadang-gadang mampu mencari solusi dari benang kusut persoalan di penjuru negeri. Semoga Jokowi mampu melunasi janji sebagai seorang negarawan sejati bukan sebagai tangan kanan yang menerima instruksi sebelum masa kepemimpinan berganti.[]

# PESAN RUBI UNTUK NEGARAWAN

*Dhita Inawati Sam*

*“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way”*

—Franklin D. Roosevelt

Pancaran matanya berkilau diterpa sinar matahari. Lurus tajam menatap sawah ladang yang luas. Mulutnya terdiam, namun pikirannya melayang hingga batinnya berucap, “Akan menjadi apakah kelak, jika sawah ini aku tinggal?” Batin Rubi, gadis kampung yang saat ini duduk di kelas 6 SD.

Sepetak dua petak sawah yang dikelola oleh kepala keluarga di kampung biasanya akan dilanjutkan pengelolaannya oleh anak-anaknya. Bukan milik sendiri. Ya, petak sawah itu memang bukan milik sendiri. Jarang sekali warga yang memiliki sawahnya sendiri di kampung Rubi. Biasanya mereka hanya mengurus sawah-sawah yang dimiliki orang kota atau perusahaan.

Sebagai anak kampung, Rubi berbeda dari anak-anak sebaya kebanyakan. Dia memiliki cita-cita tinggi, menjadi presiden. Jika sebagian besar anak di kampungnya hanya menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah dasar, dia berbeda. Dia ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Masuk ke SMP, lalu SMA hingga ke perguruan tinggi, lalu menjadi presiden—yang ia cita-citakan.

Hempasan angin meniup rambut merah Rubi yang tersengat matahari. Pekerjaannya tiap pulang sekolah memang di sawah,

mengairi sawah dan menjaganya dari gangguan burung. Saat duduk hampa dengan tangan menyentuh tanah, dia kembali membatin, rasanya cita-citanya tak mungkin terjadi. Bapaknya sudah tua. Begitu pula ibunya. Sedangkan Rubi adalah anak pertama dari tiga bersaudara, dua adiknya masih kecil. Jika kelak ia pergi keluar kampung untuk mewujudkan cita-citanya mendapatkan pendidikan, siapa yang akan mengurus sawah demi mendapatkan upah untuk keperluan makan? Air matanya membendung di tepi. Hampir jatuh meratapi cita yang terhalang nasib. Presiden, cita-cita itu rasanya kandas tenggelam di tengah sawah.

Dalam kesendiriannya menatap hijau sawah, datanglah wanita berparas elok, ibunya. Ibunya yang akrab disapa Emak, dengan lembut menghampiri lalu memegang pundaknya dan berkata, "Jangan pernah putus harapan, *Nduk*. Emak dan Abah baik-baik saja di sini."

Emak Rubi bernama Yati dan abah-nya bernama Maman. Emak bekerja serabutan. Pagi buta menyiapkan gorengan untuk dijual Rubi di sekolah, siang berada di kebun mencari kayu bakar dan sore menengok sawah yang digarap Abah. Sedangkan Abah, hampir sepanjang waktunya dihabiskan di sawah.

Rubi terkaget dan spontan mengusap kedua matanya yang hampir menitikkan air. "Bagaimana bisa Rubi tinggalkan emak dan abah untuk mengurus sawah ini sendirian?" ungapnya. "Jika *Nduk* jadi presiden, Emak yakin *Nduk* akan merawat sawah dari langit sana," balas ibunya. Air mata Rubi menetes.

Tiba-tiba Rubi mengingat ulasan-ulasan janji para 'orang langit' selama masa kampanye pilpres. Sebagai seorang anak kecil, dia memang aktif membaca koran. Ia tidak pernah membeli koran, tapi ia sering menyisip di antara tumpukan koran siap bakar di tempat pembuangan sampah di kampungnya. Rubi membacanya, dan dari sana dia mendapat informasi tentang Pilpres 2014.

Di rumahnya tak ada TV, namun tak jarang pula dia relakan malam-malam dilewati di rumah Pak RT untuk sekedar menyaksikan debat calon presiden dan wakil presiden selama masa pemilihan presiden. Lucu rasanya ketika warga di kampungnya mencoblos karena imbalan uang yang dibagikan tim sukses pada hari pemilihan presiden, Rubi kecil berkata dengan polos kepada

kedua orangtuanya, “Bahkan uang ini tak cukup untuk dapatkan 2 liter beras yang kita tanam, Mak.”

Presiden. Jarang orang berani bermimpi untuk menjadi presiden. Tapi lihatlah, Rubi kecil berambut merah berkulit gelap dan kurus, berani menggantungkan mimpi itu di depan matanya. Dan lihatlah, karena mimpi yang digantungnya, ia terbiasa melakukan tindakan bak presiden, yang kelak membawanya pada sikap seorang negarawan. Berfikir, menganalisis, dan memutuskan.

Kehidupannya sederhana. Kampungnya tidak dihindangi infrastruktur memadai dari pemerintah pusat maupun daerah. Sekolah dasar dan menengah pertama jumlahnya sangat terbatas, apalagi Sekolah Menengah Atas (SMA), kita tidak dapat melihat satu bangunan SMA pun di kampungnya. Menjadi wajar ketika warga di kampungnya hanya menamatkan Sekolah Dasar. Biaya yang dikeluarkan untuk melanjutkan sekolah terlalu mahal, sedangkan penghasilan keluarga sebagai petani tidak seberapa. Ini bukan tentang program pemerintah menyediakan pendidikan gratis 12 tahun. Bukan! Mana pula Rubi dan warga kampung mengerti tentang itu. Ini adalah tentang akses. Untuk mencapai SMA yang letaknya di kota, ia harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, melewati medan yang tidak ringan.

Itulah potret kehidupan Rubi di kampung. Kemiskinan yang secara normatif seharusnya tidak menghambat cita-cita warga negara namun secara realistis, ia menghambat. Kondisi ini bagai segitiga yang selalu terhubung, kemiskinan-pendidikan-kualitas hidup. Kemiskinan kadang menyebabkan seseorang harus memilih apakah ia akan melanjutkan pendidikan demi masa depan yang lebih baik atautkah ia bertahan di tempatnya untuk bekerja demi kebutuhan hari ini yang tercukupi. Kondisi miskin yang menghambat tercapainya pendidikan tinggi akan menimbulkan kualitas hidup yang stagnan atau bahkan menurun.

Dilema seperti ini tidak terjadi di kalangan masyarakat kota atau menengah ke atas. Namun terjadi pada masyarakat miskin atau sangat miskin. Beruntung Rubi memiliki orang tua yang mendukung cita-citanya untuk bersekolah lebih tinggi. Tidak jarang kita temui kondisi dimana orang tua di perkampungan belum memahami tujuan penting dari pendidikan formal bagi anak.

Bumi pertiwi Indonesia, sebagai negara berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa, juga salah satu negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia tentu membutuhkan iron stock yang berkualitas, membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk mengelola pemerintahannya. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, tools yang paling penting diperhatikan adalah pendidikan. Di dalam UUD 1945 (amandemen) Republik Indonesia telah mengatur fungsi pendidikan dalam pasal 31 ayat 3 dan 5. Tujuan pendidikan nasional juga telah diatur dalam UU no 20 tahun 2003.

Maka pertanyaan besar dalam konteks ini adalah, mengapa masih ada anak selemah Rubi? Dan ada berapa banyak Rubi-Rubi di luar sana? Jika pemerintah menjamin pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negaranya, maka apakah pemerintah telah ikut menjamin pula pemenuhan infrastruktur dasar di suatu wilayah? Berapa banyak desa tertinggal di bumi pertiwi ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membawa kita pada cara pengejawantahan suatu produk hukum menjadi produk lapangan yang dapat dinikmati oleh warga Negara.

Rubi, seorang anak petani, yang bercita-cita menjadi presiden, mengingat benar janji-janji capres dan cawapresnya, salah satunya ia ingat: Kartu Indonesia Pintar. Ia tidak begitu mengerti tentang itu, ia hanya tahu bahwa akan ada harapan untuk pintar baginya — agar kelak ia bisa menjadi presiden. Kata orang-orang kartu itu seperti kartu ATM, tapi apa pedulinya Rubi? Bahkan melihat ATM saja ia tidak pernah. Yang ia tahu, kedua pasang capres-cawapres memiliki itikad baik untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jika kata orang-orang dengan kartu itu dia bisa sekolah dengan gratis dan nyaman, mungkin tetap saja yang terlintas dibenaknya adalah sekolah yang sangat jauh dari kampung halamannya, harus meninggalkan emak dan abah serta kedua adiknya, juga sawah yang harus diurusnya. Pertempuran batin itu selalu menghampiri Rubi, anak miskin dari pelosok kampung yang tidak lama lagi akan lulus SD.

Ini adalah tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap pemimpin Indonesia. Sekali lagi, ini adalah tantangannya. Luas Indonesia ditambah kondisi geografis yang berbentuk

kepulauan menjadi tantangan besar dalam usaha pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Baik pemerataan kualitas sistem maupun infrastruktur. Rakyat Indonesia sebagaimana Rubi dapat menyaksikan bahwa selama masa kampanye, kedua capres-cawapres meletakkan pendidikan sebagai salah satu poin yang akan dibenahi dan ditingkatkan.

Salah satu dari 9 agenda prioritas Presiden terpilih 2014-2019, Bapak Ir. Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla, yaitu "Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan" (Visi Misi Jokowi-JK 2014: 9). Agenda tersebut merupakan hal menarik dan penting yang patut dikawal oleh seluruh rakyat Indonesia.

### **Agenda Prioritas**

Beberapa hal yang perlu dicermati dari agenda prioritas bidang pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah adalah Akses. Pemerintah boleh mengeluarkan produk hukum yang mengatur pendidikan gratis, namun konteks pengejawantahan pendidikan gratis tersebut perlu didukung dengan akses. Dalam hal ini, kita dapat sebut akses sebagai infrastruktur pendidikan yang layak di seluruh daerah, termasuk tenaga pengajar yang kompeten.

Jika pendidikan berkualitas hanya bisa diakses oleh masyarakat kota, maka boleh jadi jumlah Rubi di pelosok desa akan bertambah. Kemiskinan adalah hal dilema yang menyebabkan lambatnya kemajuan suatu negara, sedangkan kebalikannya, pendidikan merupakan faktor pendorong kemajuan. Jika salah satu faktor pendorong kemajuan negara adalah pendidikan, dan pendidikan ini berkaitan erat dengan kemiskinan atau taraf hidup suatu keluarga, maka sudah sepatutnya pemerintah memotong habis dilematis kemiskinan dan pendidikan dengan cara menyediakan akses atau infrastruktur pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia, sebuah negara yang berdiri di atas kesepakatan untuk hidup bersama ini, dalam waktu dekat akan mengalami bonus demografi. Keadaan di mana jumlah masyarakat usia produktif lebih tinggi dibanding usia non produktif. Keadaan ini

tidak berlangsung selamanya. Maka tantangan untuk memajukan pendidikan Indonesia telah dimulai sekarang. Mengutip ungkapan Franklin D Roosevelt, *“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”* Dari ungkapan tersebut, pemerintah selaku pelaku politik kenegaraan seyogyanya menyadari bahwa regulasi politik harus berpihak pada pendidikan. Sehingga tidak ada lagi alasan-alasan normatif yang diberikan ketika (dalam hal ini) ada desa-desa di pelosok yang kekurangan akses pendidikan, karena jika menelan mentah-mentah ungkapan Roosevelt, dalam kasus Rubi contohnya kita dapat mengatakan: pemerintah salah—membiarkan kondisi dilematis terjadi dengan tidak menyediakannya akses pendidikan yang layak.

Sang Negarawan Dunia. Akhirnya kita sampai pada kosa kata ini. Menjadi negarawan adalah keinginan setiap orang, atau paling tidak para pemimpin di negeri ini. Konteks negarawan memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan dengan presiden. Jika presiden merupakan suatu sebutan formal untuk jabatan struktural tertinggi sebuah negara, maka negarawan adalah suatu gelar kehormatan yang disematkan rakyat kepada orang-orang yang dianggap memiliki jasa besar terhadap negara atau memiliki sikap yang patut dicontoh oleh warga.

Negarawan tidak terbatas waktu dan masa jabatan. Negarawan, berdasarkan KBBI, adalah orang yang ahli dalam menjalankan negara/pemerintahan. Indonesia membutuhkan banyak negarawan, bukan sekedar politikus. Kebijakan-kebijakan terkait pendidikan nasional akan lebih bijak diputuskan oleh seorang yang bersifat negarawan--mengabdikan demi kepentingan bangsa, berpandangan objektif, membuat karya nyata bukan sekedar retorika belaka.

Politikus yang sebagian besar menjalankan pemerintahan hari ini harus mulai sadar peran penting yang wajib dimilikinya sebagai seorang pemimpin pemerintahan sehingga dengan itu mereka dapat selalu memperbaiki diri dan pola laku menuju perilaku Negarawan Sejati. Hanya dengan hal itulah, tidak ada lagi hal yang dipolitisasi, termasuk pendidikan. Tidak ada lagi korupsi. Tidak ada lagi pengubahan kurikulum setiap masa pergantian kepemimpinan.

Rasanya, Rubi di luar sana hanya menanti hal yang sederhana— agar bangunan sekolah layak tersedia di kampungnya. Negarawan sejati sudah tentu kebermanfaatannya dirasakan oleh negara, dan boleh jadi oleh dunia. Tidak jarang kita mengenal tokoh-tokoh yang berpengaruh secara luas di dunia, dan itu adalah pembuktian keberhasilan kerja nyata di negaranya.

Jika kita belum menemukan negarawan dunia yang berasal dari Indonesia sekarang, boleh jadi ia adalah Rubi! Seorang anak kampung yang selalu menantikan pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan yang layak untuknya dan untuk anak-anak di kampungnya. Bukan tidak mungkin, karena ia terus berjuang. *“Education is the most powerful weapon we can use to change the world,”* kata Nelson Mandela.[]

# KORUPSI BOBROKKAN MORAL BANGSA

*Irma Novikawati*

Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Banyak orang-orang hebat dilahirkan di tanah surga ini. Siapa yang tak kenal dengan tokoh kebanggaan orang Indonesia, presiden ketiga Republik Indonesia, Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie. Tokoh yang karya-karyanya diakui dunia. Karya Habibie dalam menghitung dan mendesain beberapa proyek pembuatan pesawat terbang di antaranya VTOL (Vertical Take Off & Landing), Pesawat Angkut DO-31, pesawat Angkut Militer TRANSALL C-130, Hansa Jet 320 (Pesawat Eksekutif ), Airbus A-300 ( untuk 300 penumpang ), CN -235, dan N-250.

Habibie secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam menghitung dan mendesain helikopter BO-105, *Multi Role Combat Aircraft* (MRCA) serta beberapa proyek rudal dan satelit. Selain Habibie masih banyak orang-orang hebat Indonesia yang diakui dunia di antaranya Mujair, Tjandramukti, Prof. Poorwo Soedarmo, Tjokorda Raka Sukawati, Prof. Ir. R.M. Sedyatmo, Mukibat, Michael Iskandar a.k.a Om Chia, Prof. Dr. Khoirul Anwar, dan Pak Minto. Namun jarang orang Indonesia yang mengenal nama-nama orang hebat ini, padahal jika kita cari di Google dapat kita lihat kiprah dan karya-karya yang membanggakan. Seharusnya kita patut berbangga menjadi rakyat Indonesia.

Selain banyak sumber daya manusia, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Kekayaan alam Indonesia menjadi daya tarik dunia, negara lain berlomba-lomba untuk

menginvestasikan modalnya untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam yang ada. Sektor pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, hasil tambang menjadi potensi yang menggiurkan negara lain untuk melirik Indonesia. Sementara rakyat Indonesia sendiri tak nampak gairahnya untuk mengelola potensi yang dimiliki dengan tangannya sendiri. Kini, Indonesia layaknya dijajah di negeri sendiri. Rakyat Indonesia kebanyakan hanya bekerja sebagai buruh di perusahaan, justru orang asinglah yang menjadi atasan. Bagaimana mungkin Indonesia ingin menjadi negara maju kalau kondisinya seperti ini?

Korupsi merajalela di kalangan pejabat, berbagai kasus datang silih berganti. Sungguh malu menjadi orang Indonesia. Indonesia yang berpedoman pada Pancasila sudah tak lagi menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita bangsa. Hanya ada kebobrokan moral yang melanda bangsa ini.

Berdasarkan studi Transparency International, pada tahun 2013, skor CPI (*Corruption Perception Index*) Indonesia sebesar 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur. CPI ini digunakan oleh banyak negara sebagai referensi tentang situasi korupsi. CPI merupakan indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi secara global. Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga belas) data korupsi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga independen yang kredibel. CPI digunakan untuk membandingkan kondisi korupsi di suatu negara terhadap negara lain. CPI mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi.

Hasil statistik yang dilakukan oleh ACCH (Anti-corruption Clearing House) KPK juga menyatakan bahwa pelaku korupsi terbanyak di Indonesia adalah Kepala Lembaga/Kementerian. Per 31 Juli 2014, di tahun 2014 ini KPK menangkap tersangka korupsi dari dari profesi Kepala Lembaga/Kementerian sebanyak 7 orang, Swasta sebanyak 8 orang, Walikota/Bupati/Wakil sebanyak 6 orang, Hakim sebanyak 2 orang, Anggota DPR/DPRD sebanyak 2 orang, dan Eselon I/II/III sebanyak 1 orang.

Dari data tersebut terlihat kondisi Indonesia sangat miris. Pemimpin sudah kehilangan prinsip dan karakter kepemimpinannya. Indonesia sedang mengalami krisis

kepemimpinan. Seorang pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bertindak sebaliknya. Begitu mudahnya melakukan praktek korupsi. Rakyat dibiarkan meronta kesakitan sedangkan dia menikmati kesenangan.

Begitu pula mengenai masalah lingkungan, banyak terjadi kasus perikanan liar, penebangan liar dan penambangan liar. Praktek penebangan liar terjadi di berbagai hutan di Indonesia, misalnya di dalam TEMPO diberitakan kasus *illegal logging* yang terjadi di Jawa Timur, merugikan negara sebesar Rp 29 miliar. Pembalakan liar hutan di Jambi yang tak pernah berhenti, cagar alam dibabat dengan pohon usia 150 tahun ditebang, ANTARA NEWS memberitakan pula pembalakan liar di hutan Tambora dan banyak kasus lain yang membutuhkan solusi terkait dengan lingkungan.

Kondisi lingkungan sudah semakin memprihatinkan, misalnya penambangan liar yang terjadi di Kalimantan Selatan. TEMPO memberitakan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Brigadir Jenderal Machfud Arifin mengatakan penambangan liar makin marak sehingga perlu ditertibkan. Menurut Machfud, ada dua modus operandi yang digunakan dalam penambangan batu bara ilegal. Pertama, pemilik lahan menawarkan lokasi yang diketahui memiliki kandungan batu bara kepada pengusaha, meskipun tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Kedua, pengusaha pertambangan kerap mengubah titik koordinat yang menjadi lokasi penambangan. Ini, kata Machfud, bertentangan dengan ketentuan karena lahan penambangannya tidak sesuai dengan dokumen.

Menurut Machfud, sepanjang Januari-November 2013 ada 122 kasus penambangan liar. Sebanyak 33 kasus di antaranya dalam tahap penyelidikan. Sedangkan jumlah tersangka 89 orang. Barang bukti yang disita selama operasi penertiban berupa 120 unit eskavator, 6 unit bulldoser, 4 unit dump truck, 11 unit tronton, 6 unit loader, 1 unit kendaraan beroda empat, 1 unit laptop, 6 plastik berisi emas, 200 metrik kubik batu gunung dan 211.886 metrik ton batu bara.

Kasus lain yang diungkap Polda Kalimantan Selatan adalah penyalahgunaan narkoba. Selama periode Januari-6 Desember

2013 terdapat 1.272 kasus narkoba dengan 1.691 orang tersangka. Enam orang di antaranya berstatus mahasiswa. Barang bukti yang disita berupa ganja seberat 1.634,18 gram, ekstasi 2.677 butir, dan sabu 4.744 gram.

Sedangkan pembalakan liar periode Januari-November 2013 tercatat sebanyak 62 kasus dengan 63 orang tersangka. Barang bukti yang disita di antaranya kayu ulin 4.527 batang, karuing 183 batang, kayu pelat 35 potong, *dump truck* 22 unit, kendaraan beroda empat 11 unit, perahu kelotok 1 unit, dan kapal besi 1 unit. Kasus-kasus tersebut harus menjadi perhatian bagi kita semua. Penegak hukum di Indonesia harus tegas untuk memberikan sanksi dan menindak oknum-oknum yang merugikan negara. Selama ini belum ada keseriusan pemerintah untuk menegakkan hukum terutama masalah korupsi, begitupula dengan pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar.

Namun jangan sampai kita hanya terpenjara membicarakan permasalahan dalam negeri. Permasalahan di Indonesia tak pernah habis dikaji. Kita sering melupakan satu hal, yaitu kekuatan yang dimiliki Indonesia. Bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki seperti sumber daya manusia dan sumber daya alam tadi. Pembangunan karakter bangsa menjadi poin penting agar tidak terjadi kasus-kasus korupsi, perusakan lingkungan, konflik antardaerah, tindakan asusila, dan kejahatan kemanusiaan.

Negeri ini butuh sosok pemimpin. Pemimpin yang seperti apakah yang diharapkan? Pemimpin yang tak hanya mengobral janji manis semata, namun yang menjalankan tugasnya sesuai amanah rakyat. Pemimpin yang bisa menjadi teladan dan mengayomi bangsa Indonesia. Bukan sosok pemimpin yang hanya membawa kepentingan golongan tertentu. Pemimpin yang bisa menerima aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Tahun 2014 ini merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, di mana rakyat memilih presiden yang akan memimpin mereka dan memberikan jaminan kehidupan yang lebih layak.

Hasil Pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 ini memberikan mandat besar kepada pasangan Jokowi-JK untuk memimpin negeri ini. Ada harapan besar rakyat Indonesia kepada pasangan tersebut untuk bisa membangun Indonesia

dan mensejahterakan mereka. Kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi rakyat Indonesia harus senantiasa dipikirkan oleh presiden terpilih. Dari Sabang sampai Merauke memberikan kesempatan bagi pasangan Jokowi-JK untuk membuktikan janji-janji yang telah mereka ikrarkan saat kampanye pemilihan presiden.

Seperti yang telah dijanjikan oleh pasangan presiden Jokowi-JK, untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian kebudayaan maka pasangan tersebut merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWA CITA. Sekarang saatnya kita menagih janji. Dari sembilan poin agenda prioritas tersebut kita lihat pada poin keempat yaitu, “Kami menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”

Prioritas tersebut sangat menarik. Saat ini Indonesia membutuhkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Namun kembali lagi pada upaya konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Kita sebagai rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Jokowi-JK yang akan menahkodai Indonesia. Selama ini rakyat sudah sering mengalami kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. Sudah saatnya pemerintah mengembalikan kepercayaan rakyat Indonesia terkait profesionalitas pemerintah dalam mengemban tugasnya. Apakah semua itu janji-janji manis belaka atau tidak. Rakyat menunggu aksi nyata dari kata-kata Jokowi-JK yang terucap untuk memperbaiki Indonesia.

Rakyat Indonesia jangan ragu-ragu untuk selalu melakukan fungsi *controlling* kinerja pemerintah. Sikap kritis rakyat demi perbaikan bangsa ini mengambil peranan besar. Mahasiswa yang sering dikatakan *agent of change*, jangan hanya menjadi penonton, tapi mari ikut mengambil peran sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.

Mahasiswa adalah generasi yang akan menggantikan kepemimpinan di masa mendatang. Kita harus belajar proaktif mengkaji kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Namun jangan sampai pula hanya meneriakkan dan mencela

pemerintahan tanpa memberikan solusi nyata. Tidak mudah untuk mengelola Indonesia yang luas, dengan karakter masyarakat yang beraneka macam, dengan keinginan yang berbeda-beda. Sudah selayaknya rakyat Indonesia berpartisipasi sesuai dengan bidang, demi tegaknya bangsa yang kita cintai, yang kita banggakan. Tempat kita berpijak dan menghirup udara segar. Tanpa sebuah sinergi, persatuan dan kemajuan Indonesia hanya sebuah mimpi. Mari membangun titik temu untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat.

Sabda Rasulullah, “Setiap diri kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban.” Semoga pemimpin negeri ini serius menegakkan keadilan dan memenuhi janji yang diikrarkan.  
[]

# BERHARAP HAPPY ENDING

*AR Haderani*

Pesta demokrasi di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ini rutinitas yang akan terus terjadi karena untuk meneruskan estafet kepemimpinan bangsa. Bagi sebagian orang, ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu, tetapi bagi sebagian lagi adalah momen menakutkan. Karena di sinilah perang merebut kursi kekuasaan terjadi.

Saling serang dan saling sikut menjadi tontonan. Bahayanya, berbagai cara akan ditempuh dalam persaingan, baik yang sehat maupun yang tidak sehat. Sungguh hal itu sulit untuk dihindarkan, tinggal bagaimana setiap individu untuk menahan diri agar tercipta demokrasi yang baik dan bersih.

Kini pesta demokrasi sudah selesai, perang telah berakhir dan bendera perdamaian pun telah dikibarkan. Sungguh pertarungan yang melelahkan bagi kedua pihak, pikiran, tenaga dan materi terkuras. Tetapi ini membuat Indonesia tersenyum karena melihat anak bangsanya berlomba-lomba memperbaiki bumi pertiwi. Hal substansial dari pesta demokrasi yang terjadi bukan semata-mata untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah karena semua pihak yang terlibat merupakan putra terbaik bangsa, yang terpenting adalah mereka siap berdedikasi untuk bangsanya.

Ini bukan hanya berbicara mengenai siapa yang berkuasa nantinya. Pemilu hanyalah sebuah cara untuk membagi, siapa yang akan diberi ruang oleh rakyat untuk merealisasikan ide serta solusinya mengenai persoalan bangsa, baik dari dalam sistem pemerintahan atau dari luar sistem pemerintahan.

Hasil pilpres sudah didapatkan, tinggal menunggu waktu singgasana kepresidenan akan berpindah tangan. Itu berarti tanggung jawab moral dan sosial terhadap rakyat siap diemban. Sudah lama rakyat menanti dengan penuh harapan pasti, menanti presiden terpilih untuk segera melaksanakan janji.

Terkadang kita mendengar pendapat dari orang-orang sekitar, bahwasanya siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, tidak akan ada pengaruhnya. Bahkan ada pendapat yang lebih mencengangkan yaitu, siapapun nanti yang memimpin bangsa ini tidak akan membawa perubahan yang berarti untuk negeri yang sudah terpuruk ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendapat tersebut keluar dari hati karena sudah lelah melihat keadaan negeri.

Setiap sudut jalanan di kota-kota besar dipenuhi dengan pengamen serta peminta-minta. Jika diperhatikan, semakin hari populasi mereka bertambah, hal ini bukan tidak diketahui tetapi terkadang orang-orang yang tahu malah diam bahkan seolah-olah membiarkan. Ingin rasanya menolong tetapi apa daya tangan tak sampai untuk menjangkau semua. Terkadang terlintas pertanyaan, apakah ini yang disebut negara merdeka? Jika iya, mungkin perlu ada yang harus menjelaskan, merdeka dalam arti yang seperti apa? Pasti semua bisa menjawabnya di dalam hati, tidak semua yang bisa mengungkapkannya dengan suara.

*Bagaikan pungguk merindukan rembulan.* Kata pepatah ini melekat pada diri bangsa, seakan-akan sebuah isyarat besar bahwa negeri ini sudah jauh dari harapan. Itu juga menggambarkan kesenjangan hubungan antara pemerintah dan rakyat, sehingga ketidakpercayaan muncul satu sama lain.

Setiap hari negeri ini disuguhi berita yang memilukan. Air mata terkadang mengalir tak tertahan, bagaimana bisa negeri yang besar ini, yang memiliki sejarah-sejarah hebat tetapi yang disiarkan hanya prestasi memalukan. Apakah ini wajah Indonesia yang sebenarnya ataukah ini hanya ulah mereka yang suka membuat negeri ini tampak lemah?

Perbaikan demi perbaikan terus diupayakan, sistem-sistem dirombak dan revolusi mental harus dilakukan. Sudah saatnya masyarakat harus bermental tangguh dan, percaya pada kemampuan bangsa sendiri karena sesungguhnya bangsa ini

adalah bangsa besar dan hebat, yang didukung dengan kekayaan alam memadai. Maka kejayaan itu sudah sepatutnya kita raih.

Hal mendasar adalah kesadaran diri dari setiap individu masyarakatnya, perbaikan itu dimulai dengan diri sendiri. Semangat gotong royong yang menjadi budaya masyarakat Timur bisa menjadi landasan kebersamaan untuk mencari solusi yang terbaik bagi negeri ini.

Kemauan yang kuat untuk berubah, kesadaran yang tinggi untuk bisa bekerja bersama-sama dengan sebuah keselarasan, maka akan terbangunnya rasa saling percaya sehingga beban berat itupun akan terasa ringan. Bukan tidak mungkin akan terwujudnya Indonesia yang hebat dan berdaya.

Layaknya sebuah kisah dalam FTV, dimana pasti ada *happy ending* di akhir cerita. Begitu juga yang diharapkan dalam kisah di negeri ini. Menilai boleh, tetapi bukan hanya untuk mengkritisi. Mengkritik boleh tetapi sebaiknya diiringi dengan sebuah gagasan solusi. Populasi penduduk yang besar ini membawa keberuntungan tersendiri, salah satunya lebih banyak solusi yang akan bermunculan dari pemikiran anak negeri.

Memang hal yang tidak mudah, bahkan meski pemimpinya sehebat aktor dalam film Rambo, tanpa partisipasi dari semua elemen masyarakat, hal itu sulit untuk diwujudkan. Ibarat seorang arsitek yang hanya bisa mendesain bangunannya saja tetapi tidak akan bisa mendirikan bangunan itu sendiri tanpa bantuan dari pekerja-pekerja bangunan.

Salah satu kisah dari anak bangsa, yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan terancam akan dihukum mati di salah satu negara Timur Tengah, aksi cepat tanggap pun terkesan lamban dilakukan. Proses yang cukup panjang dan alot untuk mempertimbangkan membayar uang diyat sebagai syarat adat setempat agar bisa dibebaskan dari hukuman, padahal terlambat sedikit maka satu jiwa anak bangsa akan melayang. Entahlah, mungkin ada alasan yang tepat kenapa begitu lama mengambil keputusan sepeenting itu. Mungkin perlu hitung-hitungan secara cermat, tetapi apapun alasannya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” adalah kewajiban pemerintah negara sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD’45.

Belum lagi berita tentang korupsi yang tiada habisnya, di setiap sudut negeri dari timur ke barat, dan selatan ke utara terjadi tindak pidana korupsi. Bahkan ini sudah mengakar dan menjadi budaya di berbagai sektor kehidupan. Sudah menjadi biasa didengar, seakan-akan bukan lagi suatu masalah. Karena keburukan yang dilakukan secara terus-menerus akan terlihat menjadi sebuah hal yang lumrah.

Sesungguhnya ini adalah jeritan hati rakyat. Hati yang sudah lelah melihat keadaan, hati yang terus bertanya-tanya, "Adakah perubahan untuk negeriku?" Sedih memang, tetapi harapan itu tidak pernah hilang. Harapan itu akan terus digenggam hingga tiba saatnya muncul seorang negarawan yang siap menjawabnya.

Angin segar berhembus ketika masa pemilihan umum datang. Masyarakat melihat harapan perubahan akan terjadi ketika kepemimpinan berganti. Kabut yang selama ini menutupi langit malam mulai menghilang dan keindahan cahaya bintang-bintang mulai tampak terang benderang. Semoga kabut itu benar-benar pergi dan tidak akan kembali lagi di langit negeri ini.

Hal yang dirindukan rakyat saat ini adalah pemerintah yang melindungi, bukan yang tak peduli. Pemerintah yang ikhlas melayani dengan hati bukan malah muncul ke permukaan ketika detik-detik perang merebut kursi dan kekuasaan akan dimulai. Pemerintah yang memegang penuh amanah, agar uang yang selama ini rakyat titipkan melalui pajak, bisa dikelola dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan bangsa, bukan untuk masuk ke kantong mereka yang tak berjasa.

Hidup ini adalah sebuah janji. Bahkan dari dalam kandungan pun sebelum ditiupkan ruh ke janin, kita sudah berjanji kepada Tuhan untuk beribadah kepada-Nya saat nanti diturunkan di dunia. Begitu pun setelah hidup di dunia, berbagai interaksi sosial terjadi, melalui komunikasi sehari-hari, tanpa sadar atau tidak sadar terkadang janji pun terucapi. Hal yang mesti diingat, bahwa janji tetaplah janji dan harus ditepati, apalagi menyangkut masalah rakyat dan telah disumpah di atas Kitab Suci.

Proses tarik ulur ini akan terus terjadi, antara janji dengan kenyataan di lapangan nanti. Bukan hanya ucapan indah yang dinanti, tetapi apakah pengabdian mereka untuk negeri akan

ditepati. Tumpuan harapan rakyat sudah disematkan, semua pihak akan terus mengamati dan mengawasi, apakah pemimpin yang terpilih akan menepati janji terhadap rakyat dan bumi pertiwi.

Dengarlah jeritan hati  
Suaranya yang syahdu dan penuh lirih  
Akankah kita terus terpuruk begini?  
Atau malah bangkit menerjang ombak yang tak bertepi  
Layaknya seperti legenda zaman prasasti  
Katanya satria piningit masih bersembunyi  
Akankah dia menampakkan diri?  
Atau malah hanya keluar di malam yang sunyi

Ingin rasanya lelah berharap  
Karena tak pernah ada bukti yang terungkap  
Tapi diri ini terus meyakini  
Bahwa presiden terpilih akan setia melayani

Dengarlah wahai presidenku  
Dengarlah jerit tangis rakyatmu  
Bukan janji yang kita butuh  
Tapi aksi nyata yang kita perlu ![]



# **JANJI KEDAULATAN**

# MERAWAT ISI PERUT BUMI PERTIWI

*Hikmatyar Abdul Aziz*

S adarkah kita? Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Negeri yang membuat bangsa lain iri dengan segala potensi yang terpendam di dalam perut buminya. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, menjadi sebuah kewajiban untuk menjaga martabat bangsa dengan menunjukkan bahwa kita mampu menjaga dan mengelola sumber dayanya.

Sebagai orang yang lahir dan tumbuh di bumi Indonesia, seharusnya kita menyadari bahwa kita mewarisi segala kekayaan alam yang tersebar luas sepanjang Nusantara. Namun, sekaligus menanggung beban negara yang harus kita sikapi dengan bijak dan arif sebagai seorang negarawan.

Menjaga keutuhan negara dan segala sumber dayanya tidak dapat dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal dan tidak mencintai tanah airnya sendiri. Nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan kepada putra dan putri penerus bangsa melalui kurikulum pendidikan yang sekarang pun masih memiliki banyak celah. Kondisi generasi mudanya yang rapuh dan semakin acuh terhadap kondisi nasional menjadi potret paling jelas belum berhasilnya kurikulum pendidikan menanamkan rasa cinta tanah air pada generasi muda.

Bangsa ini harus memiliki karakter yang kuat guna mempertahankan kedaulatan di segala aspek kehidupan yang saat ini masih dijajah oleh pihak asing. Jika setiap pribadi sadar akan pentingnya rasa cinta tanah air dan paham betul mengenai cita-cita bangsa yang telah dirumuskan para pejuang kemerdekaan tentu

setiap pribadi dari kita akan memiliki rasa memiliki Indonesia dan berusaha untuk merawatnya.

Di tengah krisis nasionalisme yang melanda, tidak semua sadar bahwa negara kita sedang digembosi dan digerogeti secara halus oleh pihak asing. Sedikit demi sedikit sumber daya alam yang kita miliki diambil dan dibawa pergi. Potensi sumber daya mineral, migas, dan panas bumi yang seharusnya dapat kita optimalkan untuk ketahanan dan pembangunan nasional justru kita biarkan orang lain mengambil begitu saja. Mungkin bangsa kita terlalu dermawan dan berbaik hati kepada bangsa lain. Padahal negara ini masih tertatih-tatih untuk menghidupi sekitar 240 juta lebih penduduknya. Di sisi lain masih banyak tugas yang belum terselesaikan seperti pemerataan kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur.

Sektor energi menjadi salah satu sektor utama yang sangat berpengaruh pada pembangunan perekonomian nasional maupun perekonomian kerakyatan. Hal tersebut dapat dilihat dari BBM (Bahan Bakar Minyak) sebagai komoditas energi yang saat ini masih mendominasi dan digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh kasus ketika terjadi isu BBM akan mengalami kenaikan harga otomatis akan terjadi pergolakan di tengah masyarakat kita. Ketika terjadi kelangkaan BBM, maka perekonomian masyarakat mengalami krisis. Harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan hampir di seluruh daerah. Betapa pentingnya sektor energi sebagai penyokong hidup jutaan masyarakat Indonesia.

Pengamat kebijakan energi Sofyano Zakaria mengungkapkan saat ini kapasitas kilang minyak Indonesia hanya mencapai 1.200.000 BPH (Barel Per Hari). Sedangkan produksi minyak yang dapat diolah di kilang dalam negeri hanya 649.000 BPH. Angka ini sangat jauh di bawah konsumsi minyak domestik yang mencapai 1.500.000 BPH. Kekurangan dari hasil produksi minyak dalam negeri ditambal oleh impor dari Arab Saudi dan Nigeria. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan energi domestik saja Indonesia sangat tergantung dari pihak luar. Bahkan Indonesia kalah dengan negeri tetangga, yakni Malaysia yang mampu memproduksi 800.000 BPH padahal tingkat konsumsi domestiknya hanya 600.000 BPH.

Sofyano, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), juga mengungkapkan perlunya Indonesia untuk segera membangun kilang-kilang minyak baru meskipun akan mengeluarkan anggaran yang sangat besar. Kilang minyak Balongan di Indramayu yang dibangun pada 1990 merupakan kilang minyak yang terakhir dibangun bangsa ini. Dengan tidak dibangunnya kilang minyak selama 24 tahun terakhir sudah sewajarnya jika kita curiga dan bertanya-tanya ada apa di balik lambatnya perkembangan infrastruktur di sektor energi. Padahal kilang minyak sangatlah penting dalam upaya Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menambah jumlah produksi minyak dalam negeri yang nantinya akan mengakomodasi kebutuhan BBM domestik.

Pertamina sebagai aset negara seharusnya mendapatkan prioritas dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang masih terpendam di perut bumi. Pemerintah pusat sudah sewajarnya mendukung BUMN yang mengelolanya, bukannya membiarkan pihak asing mengambil sumber daya yang kita miliki. Ketika bangsa kita ini tengah mengalami krisis pasokan energi, di sisi lain pihak asing terus mengekspansi blok-blok strategis penghasil minyak dan gas bumi di Indonesia.

Perlu ketegasan para pemimpin yang duduk di kursi kementerian terkait dan para anggota DPR kepada pihak swasta apalagi pihak asing. Hal itu dapat dimulai dengan tidak melanjutkan kontrak pihak asing di blok-blok sumber daya alam dan mineral kita. Blok yang telah habis masa kontraknya dapat dialihkan dan dikelola oleh Pertamina. Itu berlaku untuk seluruh blok strategis yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pihak asing.

Bangsa kita mungkin sekarang merasa dapat berdiri tegak, tapi lupa berkaca bahwa sebenarnya kita masih tertunduk dan mengangguk-angguk atas permintaan pihak asing. Sudah saatnya para pejabat yang memihak kepentingan asing dan menciderai kepercayaan rakyat Indonesia untuk dicopot dari jabatannya dan diadili. Sederet persoalan dan permasalahan itulah yang membuat ketahanan energi nasional kita kian menipis. Jika tidak segera berbenah diri, bangsa kita yang sudah 69 tahun merdeka ini akan terus kehabisan nafas. Meski sudah merdeka sebenarnya kita masih terjajah di segala bidang aspek kehidupan, salah satunya adalah energi.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Merebut kembali blok-blok sumber daya alam dan mineral dari pihak asing merupakan amanah dari konstitusi. Sudah sewajarnya pula kita bangsa Indonesia mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengupayakan kedaulatan di sektor energi yang merupakan pilar pembangunan perekonomian nasional dan perekonomian kerakyatan. Membiarkan pihak asing terus menggerus sumber daya alam dan mineral kita merupakan sebuah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi dan cita-cita para pendiri negeri.

### **Saatnya Indonesia Berdaulat**

Kini Indonesia sedang masuk pada masa transisi pemerintahan menyosong era kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Joko Widodo dan Mohammad Jusuf Kalla. Salah satu pasangan terbaik yang dimiliki Indonesia dan mendapat amanah dari rakyat Indonesia untuk membawa bangsa menjadi bermartabat dan berdaulat. Pada masa transisi ini dibentuk kabinet baru yang akan menahkodai sektor-sektor pembangunan Indonesia ke depan. Seluruh masyarakat Indonesia tentu ingin menagih janji sang presiden dan wakil presiden terpilih yang telah mencanangkan visi, misi, program kerjanya ketika masa kampanye. Sekarang pula saatnya bagi pasangan nahkoda Indonesia yang baru untuk membuktikan dan memperlihatkan sikap negarawan yang siap mengabdikan pada negeri.

Sudah terlalu lama bangsa kita tunduk pada intervensi dari pihak asing. Sudah terlalu lama pula kita berjalan terlalu lambat ketika negara-negara tetangga sudah berlari. Sekarang saatnya untuk bangkit dan melanjutkan skenario besar bangsa ini. Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa ini sudah selayaknya menentukan langkahnya sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing yang mengkhianati tujuan bersama. Mengelola sumber daya alam dan mineral yang masih tersimpan di perut bumi pertiwi merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah sebagai pengelola ketatanegaraan yang menjalankan amanah rakyat telah merumuskan cara untuk

mencapai kemandirian energi dalam Catur Dharma Energi. Dalam Catur Dharma Energi memuat empat agenda utama Indonesia di sektor energi yang perlu partisipasi aktif oleh seluruh masyarakat. Empat agenda ini yakni meningkatkan produksi migas, mengurangi pemakaian bahan bakar minyak, mendorong energi baru terbarukan, dan gerakan hemat energi.

Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai salah satu perangkat guna mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional sampai dengan 2050 dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Kebijakan Energi Nasional tersebut memuat tentang tujuan, sasaran, dan arah kebijakan energi sampai dengan tahun 2050. Tentu hal ini harus segera disambut dan didukung oleh pemerintahan baru Joko Widodo dan Mohammad Jusuf Kalla. Dengan Catur Dharma Energi dan Dewan Energi Nasional harapannya Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan energi sesuai amanah konstitusi.

Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., PhD., anggota Dewan Energi Nasional (DEN), menyatakan bahwa pemerintah yang baru mempunyai perangkat untuk pembangunan energi ke depan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2050. Harus ada terobosan yang dilakukan pemerintah baru untuk mencapai target-target KEN, pemerintah baru dapat memanfaatkan DEN sebagai pendamping pemerintah untuk pembangunan energi ke depan. Masyarakat melalui DEN dapat menyampaikan masukan ke pemerintah karena DEN merupakan wakil dari masyarakat. Jika KEN dilaksanakan dengan tepat akan mencapai kemandirian dan kedaulatan energi yang akhirnya mencapai kemandirian dan kedaulatan nasional.

Selain berharap pada kinerja pemerintahan yang baru dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pada sektor energi, kita sebagai mahasiswa juga harus menjalankan tugas kita sebagai katalisator dan tetap bersikap kritis terhadap segala kebijakan yang diambil pemerintah. Mahasiswa sebagai generasi muda harus menyebarkan semangat positif ke masyarakat luas melalui gerakan-gerakan yang kreatif dan persuasif sebagai bentuk upaya merawat Indonesia.[]

# LANGKAH AWAL MENUJU KEDAULATAN ENERGI

*Aditya Pratama*

**T**erwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Itulah visi yang akan dibawa oleh presiden dan wakil presiden baru Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi Tanah Air tercinta. Kemerdekaan tidak hanya ketika telah berhenti berperang atau ketika suatu negara telah memiliki pemerintahannya sendiri. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita telah berdaulat di negeri sendiri dan terwujudnya kemandirian dalam segala bidang.

Layaknya seorang anak yang selalu dituntut untuk berkepribadian baik, sopan santun, dan ramah agar disukai oleh banyak orang, Indonesia pun dituntut untuk berkepribadian. Baik lewat ragam budaya yang ada, maupun keramahtamahan rakyatnya. Sehingga, Indonesia memiliki identitas tersendiri dan dapat menjadi negara yang aman serta tenteram karena rasa saling menghargai antar sesama masyarakat, yang juga memberikan rasa nyaman bagi orang asing yang berkunjung ke Tanah Air. Sementara itu, gotong royong adalah landasan yang tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945 yang juga menjadi landasan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dalam membangun persatuan rakyat yang saat itu masih tercerai berai.

Nah, itulah yang akan dibawa oleh Jokowi-JK, pasangan presiden-wakil presiden terpilih dalam pemilu 2014. Dari sekian banyak bidang yang dijanjikan kedaulatan dan kemandiriannya, yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah tentang kedaulatan dan kemandirian energi.

Energi bagaikan nyawa bagi setiap negara. Pembangunan tidak akan berjalan tanpa energi, perkembangan dan kemajuan suatu negara pun akan sangat tergantung pada sektor yang penting ini. Presiden Soekarno pada zamannya menyadari itu. Oleh sebab itu, beliau menyiapkan segala kekayaan Indonesia di bidang energi hanya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan keyakinan bahwa pada saat tiba waktu Indonesia telah berkembang pesat, energi tersebut akan sangat diperlukan dan secara mandiri kebutuhan itu dapat dipenuhi sendiri. Namun, kenyataannya sampai hari kemerdekaan yang ke-69, Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri, subsidi BBM masih tinggi, dan tarif dasar listrik terus melambung.

Apa permasalahan utama yang menjadi penyebabnya? Ya, karena sebenarnya kita masih belum merdeka. Kedaulatan di sektor energi masih jauh dari apa yang disebut “tercapai”. Oke, kita coba tengok kenyataan yang ada sekarang. Di negara kita sendiri, perusahaan dengan produksi minyak bumi terbanyak dipegang oleh Chevron Pacific Indonesia, perusahaan asal Amerika. Sementara itu Pertamina, BUMN, menempati posisi kedua. Sedangkan, di sektor gas bumi posisi tertinggi dipegang Total E&P Indonesia, perusahaan asal Prancis, dan Pertamina lagi-lagi hanya menempati posisi keempat.

Fakta pun menyebutkan, 85,4 % migas di Indonesia dikelola oleh pihak asing dan sisanya dikelola oleh Pertamina (Kumalasari, 2013). Bahkan, di sektor pertambangan, emas nomor wahid di dunia yang berada di Indonesia pun dikuasai oleh asing, dengan besar royalti yang diberikan kepada Indonesia hanya 1%. Oleh sebab itu, salah satu amanat dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” praktis belum terwujud.

Oleh sebab itu, sangat tepat apabila 5 tahun ke depan segala program pemerintah terkait di bidang energi harus dilandaskan pada visi di atas. Setidaknya, berikut adalah beberapa permasalahan di bidang energi yang harus segera diselesaikan untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian di bidang energi, simaklah wahai para pemimpin negeri!

## 1. Revisi UU Migas

Segala hal yang berkaitan dengan migas di tanah ibu pertiwi sekarang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001. UU yang terbaru ini menggantikan UU No. 8 Tahun 1971 sebagai landasan utama di sektor migas. Namun, kehadiran UU ini memicu banyak perdebatan, karena dianggap sangat pro asing. Pada UU No. 22 Tahun 2001 (UU Migas), Pertamina ditempatkan sejajar dengan perusahaan swasta yang hanya sebagai investor. Padahal, dalam UU sebelumnya dijelaskan posisi Pertamina juga sebagai regulator dan pihak lain hanya sebagai investor yang menerima bagi hasil dengan presentasi tertentu.

Kebijakan UU No. 22 Tahun 2001 ini menyebabkan terbukanya pintu liberalisasi sektor migas, perusahaan-perusahaan asing menguasai sektor ini. Hal ini dipersulit dengan rumitnya birokrasi untuk mencapai kesepakatan dalam pengelolaan suatu blok migas.

Ini akan memicu lebih besar peluang praktek KKN, sehingga 'semakin banyak uang semakin lancar jalan yang ditempuh'. Akibatnya, para investor dalam negeri pun telanjur kalah bersaing dengan investor asing yang mempunyai lebih banyak dana. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa tugas para pemimpin bangsa yang baru adalah merevisi UU Migas, menjadi berpihak pada rakyat.

Apa yang sebenarnya bisa didapatkan dengan melakukan pembenahan sektor migas melalui UU? Ada cerita di negeri lain. UU migas yang terbaru di Venezeula, yaitu UU Hidrokarbon tahun 2002 menjelaskan bahwa semua kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengumpulan, transportasi, dan tangki penimbun hanya boleh dilakukan oleh perusahaan negara atau dalam bentuk "mixed company" dimana partisipasi negara harus lebih besar dari 50%. Di samping itu perusahaan dikenakan pajak pendapatan sebesar 50% (sebelumnya hanya 34%). Melalui landasan UU ini, Venezuela berhasil menasionalisasi blok-blok migasnya. Hasilnya, saat ini Venezuela bertengger di posisi 7 negara dengan produksi minyak terbesar di dunia.

Apa yang dilakukan Chavez di Venezuela juga harus dilakukan secara tegas dan berani oleh Pak Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini. Melalui revisi UU Migas, diharapkan peran BUMN dalam pengelolaan migas di negeri ini

dapat lebih besar. Ini adalah momentum yang tepat, di saat harapan baru mulai muncul terhadap pemerintahan yang baru, harapan akan kedaulatan dan kemandirian yang menjadi visi Jokowi-JK. Suatu langkah perubahan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat.

## 2. Nasionalisasi Freeport

Kontrak karya PT. Freeport akan habis pada tahun 2021, dengan perjanjian perpanjangan maksimal 2 tahun sebelum kontrak sebelum jatuh tempo. Lagi-lagi ini adalah momentum tepat bagi Jokowi-JK untuk merealisasikan visi mereka. Perusahaan asal Amerika yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1967 ini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia menghasilkan sebagai berikut:

Komoditi (Unit)	1998	1999	2000	2001	2002	Jumlah
Konsentrat Cu (Dmt)	2.640.040	2.605.180	2.522.670	2.209.640	2.283.220	12.260.750
Tembaga (Ton)	809.077	766.027	776.048	690.347	694.098	3.735.597
Emas (Kg)	91.045	92.235	77.121	103.308	77.821	441.530
Perak (Kg)	163.324	141.744	136.931	150.161	141.566	733.726

Sumber: Diolah dari Asosiasi Pertambangan Indonesia ([www.ima-api.com](http://www.ima-api.com)) dalam Yudiatmaja, 2012

Dengan pendapatan tersebut, royalti yang diberikan kepada pemerintah Indonesia hanya 1%. Bayangkan apabila kita bisa mengolahnya sendiri, berapa triliun devisa negara kita akan bertambah?

Tahun 2019 semakin dekat dan momentum itu akan segera datang, waktu yang tepat untuk melihat keseriusan Jokowi-JK untuk merealisasikan visi mereka. Yudiatmaja dalam tulisannya yang berjudul “Nasionalisasi PT. Freeport Indonesia” mengibaratkan kontrak karya sebagai bagian hilir dari suatu sungai, sedangkan kepemilikan perusahaan adalah hulunya. Untuk membersihkan suatu sungai dari pencemaran tentunya harus dimulai dari hulu, untuk kemudian akan berdampak ke bagian hilir, begitupun dengan kasus PT. Freeport. Oleh karenanya renegotiasi bukan hal yang perlu diperjuangkan, namun nasionalisasi menjadi terpenting yang harus dibahas dan direalisasikan.

### 3. Pengurangan Subsidi BBM

Dampak dari ketidakmampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan migasnya sendiri menyebabkan impor harus dilakukan. Hal ini memengaruhi harga migas di dalam negeri. Sehingga untuk mencapai kestabilan, kebutuhan BBM bagi rakyat terpenuhi, harga kebutuhan pokok terjangkau, dan tidak terpengaruh harga minyak dunia, maka subsidi dikeluarkan. Kebijakan ini menjadi isu usang namun selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Berbarengan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden baru pun, isu ini kembali mencuat. Diawali oleh pembatasan penjualan BBM bersubsidi, dilanjutkan dengan pernyataan Jokowi yang meminta SBY menaikkan harga BBM bersubsidi. Jika jadi harga BBM dinaikkan, apakah kebijakan ini dapat mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi?

Data yang dikeluarkan oleh IISD (2013a); Tempo (2013); Kompas (2013); Sekretariat Kabinet (2012), Nota Fiskal dan RAPBN 2014 menunjukkan bahwa total subsidi bahan bakar pada tahun 2013 sebesar Rp 199,9 triliun, pada 2014 mencapai Rp 210,7 triliun, dan diperkirakan pada 2015 melonjak hingga Rp 291 triliun. Sementara itu, Agustina (2008), menyatakan 54 % subsidi BBM dinikmati oleh komersil (transportasi umum, industri), sedangkan 46 % untuk konsumsi pribadi (rumah tangga), dan dari 46 % ini, hampir 50 % dikonsumsi oleh golongan orang kaya. Dengan adanya data-data tersebut wajarlah bila pertanyaan ini dilontarkan, sudah tepat sasaran kah subsidi BBM yang rata-rata mencapai 20an % dari total APBN negara kita? Saya rasa tidak.

Di satu sisi, subsidi BBM sangat dirasakan manfaatnya oleh golongan bawah, harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari harga BBM pun dapat dikendalikan. Namun, di sisi lain keberadaan subsidi dapat menghambat pemanfaatan energi alternatif dan menahan laju diversifikasi energi, terutama dari BBM ke BBG, disebabkan oleh terlalu ketergantungannya terhadap BBM yang relatif murah karena disubsidi.

Apabila subsidi ini terus dipertahankan tanpa ada langkah untuk menguranginya, maka seperti yang telah diungkapkan oleh Tutuka Ariadji (Teknik Perminyakan ITB) dalam presentasinya di acara diskusi publik di ITB, bahwa pada 2030, diperkirakan

produksi Indonesia tinggal sekitar 500.000 barel dengan bagian bersih Indonesia dikurangi biaya *cost recovery* menjadi sekitar 250.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan konsumsi minyak Indonesia sebesar 2,1 juta barel per hari. Dengan memperhitungkan perkiraan tersebut, maka diperoleh angka subsidi BBM tahun 2030 bisa mencapai lebih dari Rp 430 triliun, atau 2,3 kalinya subsidi BBM tahun 2014.

Untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi, tidak ada cara lain kecuali kita harus mulai melirik energi alternatif. Langkah awal adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan mengalihkannya pada sektor-sektor strategis lain. Pemanfaatan subsidi dalam percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan kilang dan pipanisasi gas, akan lebih bisa memberikan dampak yang positif bagi ketersediaan energi dalam negeri.

Hingga saat ini Indonesia terpaksa harus mengeksport minyak mentah karena kilang yang ada di dalam negeri tidak dapat menampung seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri impor pun harus dilakukan, dengan harga yang disesuaikan dengan harga minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dalam negeri pun harus mengikuti harga minyak dunia yang mengakibatkan akan semakin membengkaknya subsidi BBM. Sementara itu, diversifikasi energi dari BBM ke BBG pun harus ditunjang dengan infrastruktur yang memadai, salah satunya dengan adanya pipanisasi gas untuk mempermudah dan mempercepat penyaluran gas.

Selain itu, dampak yang dapat ditimbulkan akibat pengurangan subsidi BBM, yaitu naiknya harga-harga kebutuhan pokok, yang selalu menjadi kekhawatiran rakyat, harus ditanggulangi. Oleh sebab itu, pengalihan subsidi ke sektor pangan perlu dilakukan, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi untuk mencapai swasembada pangan.

#### **4. Diversifikasi Energi**

Melihat kenyataan bahwa produksi minyak bumi trennya akan terus menurun, maka diversifikasi harus segera dilakukan. Gas bumi merupakan salah satu energi yang potensial untuk dikembangkan menjadi pengganti minyak bumi. Jumlah produksi

minyak bumi per harinya hanya sebesar 850 ribu barel, sedangkan konsumsinya mencapai 1,5 juta barel per hari. Sementara itu, kondisi yang sebaliknya terjadi pada sektor gas. Produksi mencapai 1,45 juta barel per hari dan konsumsi 800 ribu barel per hari. Maka pertanyaannya mengapa pemanfaatan gas bumi ini tidak untuk kebutuhan domestik yang jelas-jelas tidak terpenuhi apabila BBM selalu menjadi sumber energi yang utama?

Hal serupa juga yang menjadi tuntutan utama SP-PLN ketika melakukan aksi di depan gedung ESDM pada Juli 2014. Akibat dari pemanfaatan BGG untuk kebutuhan domestik masih kurang, menyebabkan PLTG pun harus menggunakan sumber energi berupa BBM. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Sehingga, tarif dasar listrik pun harus dilakukan. Sementara itu, berdasarkan hasil kajian oleh Himpunan Mahasiswa Elektro ITB, diperoleh kesimpulan bahwa apabila seluruh PLTG dan PLTGU di Jawa menggunakan gas tanpa harus menggunakan BBM, PLN dapat menghemat hingga Rp 12 triliun (dengan acuan harga minyak dan nilai tukar rupiah pada tahun 2012 sesuai dengan data statistik PLN), dan jika seluruh PLTD di Indonesia dikonversikan menggunakan gas maka PLN dapat menghemat biaya operasional hingga Rp 48 triliun.

Tetapi, kekayaan Indonesia tidak hanya terbatas pada energi fosil. Melimpahnya energi non-fosil membuat kita juga harus bertindak bijaksana dengan memanfaatkan kekayaan yang juga Allah berikan berupa energi non-fosil. Berdasarkan data dari Pusdatin ESDM, Indonesia memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar di antaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m<sup>2</sup>/hari, energi angin 3-6 m/det, dan energi nuklir 3 GW.

Kita ambil contoh Provinsi Riau, luas lahan sawit di provinsi ini adalah 2.103.175 meter persegi, dan 146 PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan Total Kapasitas Produksi Pengolahan 6.137 ton/jam TBS. Dari total kapasitas produk, PKS dapat menghasilkan Fiber dan Shell sebesar 13.010 ton/jam serta limbah cair 37.822 m<sup>3</sup>/jam. Tenaga listrik yang dapat dihasilkan dari Fiber dan Shell sebesar 1.099,3 MW dan dari Limbah (Biogas) 114,9 MW. Penggunaan Fiber dan Cangkang untuk kebutuhan PKS sebesar 193,5 MW (tersisa

905,8 MW), sedangkan penggunaan Biogas (limbah cair) sebesar 2,9 MW (tersisa 112 MW). Pemanfaatan limbah kelapa sawit ini selain dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, menghemat penggunaan BBM bersubsidi, juga dapat menurunkan HPP listrik rata-rata Provinsi Riau.

Dengan didasarkan pada data dan kenyataan yang ada yang telah diuraikan, tidak pantas apabila kita masih berkata bahwa diversifikasi energi belum saatnya.

Wahai pemimpin negeri yang baru, inilah tuntutan saya sebagai anak bangsa yang peduli pada negaranya, sebagai orang yang ingin menagih janji pemimpin. Inilah tuntutan saya sebagai langkah awal untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian di bidang energi.[]

# NEGERI KAYA ENERGI (TAPI) MERANA

*Ahmad Yasin R*

Pengelolaan sumber energi dalam negeri kita masih banyak dikuasai oleh asing. Untuk minyak, misalnya, Indonesian Resource Studies (IRESS) menemukan bahwa Pertamina hanya memproduksi minyak sebesar 15 persen dan 85 persen diproduksi oleh asing. Sementara data Kementerian ESDM pada tahun 2009 menyebutkan, Pertamina hanya memproduksi 13,8%. Sisanya dikuasai oleh swasta asing seperti Chevron (41%), Total E&P Indonesia (10%), Conoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%). Sementara hampir 90% produksi gas Indonesia dikendalikan oleh 6 perusahaan asing, yakni Chevron, Total, ConocoPhilips, British Petroleum, dan ExxonMobil. Sementara untuk batubara penguasaan asing diperkirakan mencapai 70%.

Situasi itu menyebabkan—meminjam istilah Bung Hatta—“tampak produksi” jatuh ke tangan asing. Ini membawa banyak sekali konsekuensi. Pertama, sebagian besar kekayaan energi kita hanya dinikmati oleh perusahaan asing. Tak hanya itu, keuntungan dari eksploitasi sumber-sumber energi juga mengalir keluar melalui kantong-kantong perusahaan asing. Kedua, pemerintah tidak bisa menggunakan kekayaan energi kita untuk kepentingan nasional. Sebagai contoh, karena produksi gas dikuasai asing, maka kita tidak bisa menggunakan gas itu untuk menopang produksi pupuk. Kasus lainnya, karena tidak mendapat jatah gas yang cukup, PLN terpaksa memakai BBM yang sangat boros. Akibatnya, PLN mengalami inefisiensi hingga Rp 37,6 Triliun.

Ketiga, Indonesia semakin bergantung pada impor BBM. Masalahnya, harga BBM di dunia saat ini tidak lagi ditentukan oleh

permintaan dan penawaran, melainkan oleh spekulasi. Ahli minyak dari Centre For Research on Globalization (CRG) F W Engdahl mengatakan, sekitar 60% harga minyak dunia saat ini ditentukan aksi spekulasi. Artinya, menggantungkan diri pada impor BBM sama saja dengan menyerahkan leher rakyat kita kepada spekulasi.

Selain hal itu kebutuhan energi nasional juga terus meningkat data dari Kementerian ESDM 2014 menunjukkan bahwa kebutuhan energi nasional meningkat 7% per tahun. Sehingga menambah tantangan pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi terutama dari segi kemandirian pengelolaan energi. Penghapusan kebijakan liberalisasi energi juga masih PR negara, belum dicabutnya UU Nomor 22 tahun 2001 yang mengandung semangat liberalisasi energi. Dalam UU ini salah satunya terdapat pencabutan hak monopoli Pertamina sebagai pengelola energi utama dalam negeri sehingga membuka pintu asing untuk melakukan eksploitasi pada sumber energi nasional.

Tidak jauh berbeda, pengelolaan sumberdaya alam dalam negeri sebagian besar dikuasai asing. Dari sektor hulu sebagian besar eksploitasi bahan alam Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing seperti Freeport dan Newmont. Selain itu dari sektor hilir negara juga tidak mengelola sumberdaya alam hasil tambang secara optimal, sehingga kebanyakan dari hasil tambang ini diekpor dalam bentuk bahan mentah.

Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) terkait pelarangan impor barang mentah menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah untuk menyiapkan SDM dan infrastruktur untuk mengolah hasil tambang untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri secara mandiri.

Padahal, dari sektor sumberdaya energi, Indonesia memiliki sumber cadangan energi yang sangat besar, baik dari energi konvensional berbasis fosil, maupun energi baru dan terbarukan. Indonesia saat ini masih memiliki cadangan minyak sebesar 7,73 miliar barel. Angka ini terdiri dari 4,039 miliar barel cadangan proven dan 3,692 miliar barel cadangan berpotensi. Selain ada upaya untuk mencari sumur produksi baru, para ahli perminyakan juga berusaha untuk meningkatkan teknologi untuk produksi minyak yang lebih maksimal. Cadangan minyak bumi terbesar di

Indonesia terdapat di Sumatera bagian tengah dengan nilai 3,847 miliar barel cadangan.

Gas alam di Indonesia juga memiliki peranan yang cukup dominan setelah peran minyak sebagai sumber energi utama mulai dikurangi. Apalagi dengan komitmen yang diberikan pemerintah dalam *Clean Development Mechanism* pada Kyoto Protocol, gas alam mulai dipilih karena tingkat polusi yang lebih rendah. Selain itu Indonesia memiliki cadangan gas alam yang cukup besar, yaitu sebesar 152,89 TSCF. Gas alam juga memiliki harga yang stabil karena jauh dari muatan politis, tidak seperti minyak bumi.

Menurut ESDM 2011, cadangan batubara di Indonesia adalah 103,187 miliar ton. Cadangan tersebut tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Kalimantan (52,32 miliar ton) dan Sumatera (52,48 miliar ton). Mayoritas cadangan batubara di Indonesia memiliki kualitas yang menengah (*medium rank*), 22% berkualitas rendah (*low rank*) dan sekitar 12% berkualitas tinggi (*high rank*). Menurut standar kalori yang digunakan PLN, adb (ash dry basis), kandungan kalori batubara dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Low rank (kalori < 5,100 kkal/kg)
2. Medium rank (kalori 5,100-6,100 kkal/kg)
3. High rank (6,100-7,100 kkal/kg)

Saat ini PLN sedang melakukan uji coba sumber energi baru, yaitu *Gasified Coal dan Liquefied Coal*. Diharapkan dengan dikembangkan sumber energi baru ini maka kuantitas dan kualitas bakar menjadi lebih besar dan efisien.

Indonesia secara geografis terletak di pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu Pasifik, Indo-Australia, dan Eurasia. Pertemuan lempeng ini menyebabkan terbentuknya *ring of fire* atau sabuk api, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kedua sabuk api ini bertemu di wilayah Nusantara sehingga menyebabkan Indonesia kaya akan gunung api. Kondisi ini memberikan peruntungan karena terdapat kurang lebih 285 area yang diramalkan memiliki potensi panas bumi atau setara dengan 29.215 MW. Hingga saat ini terdapat 7 lapangan yang telah dieksploitasi dengan produksi setara 1.226 MW. Sedangkan saat ini 44 lapangan sedang dalam tahap survei, eksplorasi dan studi kelayakan.

Panas bumi dihasilkan dari panas dari inti bumi yang terletak di kedalaman 6.400 km di bawah permukaan kulit bumi. Panas tersebut merambat secara konduksi dan konveksi sehingga dapat dimanfaatkan di kedalaman 2-5 km tergantung letaknya. Di Indonesia, eksploitasi hanya menarik dilakukan di kedalaman 2 km, sedangkan Islandia dilakukan di kedalaman 5 km karena kebutuhan energinya yang tinggi.

Panas bumi disebut sebagai sumber energi yang *renewable* dan *sustainable*. Pemanfaatannya tidak menggunakan energi fosil sehingga tidak menghasilkan CO<sub>2</sub> yang dapat menyebabkan polusi. Indonesia telah menyetujui pengurangan emisi CO<sub>2</sub> hingga 2020, sehingga peran panas bumi menjadi salah satu solusi yang sangat menarik.

Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi sumberdaya yang besar. Baik pangan, energi dan sumberdaya alam. Ketiga pilar tersebut adalah bagian dari penopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi potensi tersebut akan sia-sia ketika negara tidak mampu membangun kedaulatan pengelolaan. Sehingga kekayaan negeri disedot oleh kepentingan asing. Akhirnya, rakyat pun dbuat merana.

Tugas negara adalah menjamin kedaulatan energi untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tugas pemerintahan adalah menggerakkan semua potensi agar mampu untuk mengelola hasil sumberdaya negara secara mandiri tanpa ada intervensi asing. Untuk membangun kedaulatan energi dan sumberdaya alam, diperlukan beberapa tahap, mulai dari pengokohan dasar hukum dan undang-undang yang mengatur kedaulatan itu. Memprioritaskan politik anggaran sampai pada tahap penyiapan infrastruktur dan SDM pengelola. Selain itu juga dibutuhkan sokongan terhadap kemajuan teknologi untuk mengelola energi dan sumberdaya alam secara mandiri.

Pemerintahan yang baru telah terpilih, maka saatnya kita menunggu realisasi janji-janji yang disampaikan ketika kampanye. Sebagai masyarakat sipil tugas kita adalah mengawal berjalannya pemerintahan sehingga dapat mewujudkan kedaulatan negara dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.[]

# MELUNASI UTANG KEMERDEKAAN

*Fadjar Mulya*

*“Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya, bukan sumber daya alamnya”*

— Anies Baswedan

Tahun 2014 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia dimana terjadi transisi kepemimpinan nasional. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki kewajiban mengambil peran dalam proses transisi kepemimpinan di republik ini. Banyak hal yang diberikan oleh mahasiswa. Mulai dari pencerdasan kepada masyarakat, kontrak politik kepada calon pemimpin, sumbangsih gagasan untuk Indonesia 5 tahun ke depan, hingga pengawalan Pemilihan Umum yang berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Tepat 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi memutuskan keabsahan dari hasil Pemilu 2014 di mana pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Dengan hasil tersebut tugas berat dalam membangun republik ini disandarkan kepada dua putra terbaik bangsa. Menyoroti gagasan, visi-misi, dan janji-janji yang disampaikan ketika kampanye, pasangan ini mengangkat konsep pengembangan sumber daya manusia dengan *tagline* Revolusi Mental. Untuk menguatkan hal tersebut ada sembilan agenda prioritas yang akan dilakukan salah satunya adalah kedaulatan energi dengan melakukan nasionalisasi migas, optimalisasi eksplorasi dan eksploitasi serta pengembangan energi terbarukan.

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan energi luar biasa. Daratan Indonesia adalah sepuluh daratan terbesar di dunia yang di dalamnya terdapat tambang batu bara melimpah, dan kekayaan hutan sebagai modal membentuk energi terbarukan berbasis bioenergi. Belum lagi gunung api sebagai sumber energi geothermal. Kekayaan laut Indonesia adalah garis pantai terpanjang kedua di dunia (Aulia, 2014), yang di dalamnya kekayaan minyak dan gas alam melimpah.

Namun minimnya sumber daya manusia dalam mengelola kekayaan membuat keran investasi terbuka bagi perusahaan asing. Perusahaan besar dengan bermodalkan tenaga ahli dan alat yang sangat mendukung, datang untuk memanen kekayaan energi kita.

Dilematis memang, ketika kita berbicara tentang eksplorasi hasil alam terutama tambang dan migas. Proses eksplorasi migas bagaikan taruhan berjudi di mana modal yang dipasang amat besar, dan waktu proses biasanya dua sampai tiga bulan. Ketika eksplorasi tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau proses eksplorasi gagal maka uang triliunan rupiah tidak akan menghasilkan apapun. Berbeda ketika eksplorasi berhasil, keuntungan berlipat-lipat diperoleh.

Itulah yang menjadi dasar pemerintah tidak berani eksplorasi dengan perusahaan nasional karena masih kurang yakin dengan sumber daya manusia dan alat pendukungnya. Ketakutan akan kerugian membuat pemerintah lebih memilih investor asing yang keuntungannya sudah pasti dijamin, ketika perusahaan asing gagal, pemerintah tidak menanggung kerugian, dan jika berhasil pemerintah mendapatkan keuntungan dari perusahaan asing.

Belum lagi energi geothermal yang baru-baru ini *booming*, mengingat Indonesia memiliki puluhan gunung aktif dan ini menjadi target perusahaan asing dalam berinvestasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia masih belum mencapai kedaulatan sepenuhnya terutama di bidang energi.

“Jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian,” menjadi kalimat yang digaungkan. Sejak awal, tim pemenangan Jokowi memang lebih fokus terhadap sumber daya manusia Indonesia. **Berdaulat, mandiri dan berkepribadian** menjadi tiga kata yang dapat disatukan menjadi makna besar. Aksi

nyata yang akan dilakukan dalam mencapai kedaulatan energi adalah nasionalisasi kekayaan alam. Sudah bukan rahasia lagi, hampir 75 % blok migas di Indonesia dikuasai oleh asing (Faisal Yusra, 2013).

Berbicara manusia Indonesia, apakah negeri ini mandul dalam melahirkan orang hebat? Tidak, orang hebat melimpah di negeri ini. Sayang mereka terkekang oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah korup. Harapan besar menanti pasangan Jokowi-JK lewat visi-misi yang tertulis. Semoga tidak hanya sebatas slogan-slogan namun aksi nyata.

Presiden Joko Widodo bisa banyak belajar dari Hugo Chavez saat memimpin Venezuela yang mampu merealisasikan nasionalisasi migas di negaranya. Saat itu satu per satu blok migas Venezuela terlepas dari kapitalis asing dan dikelola oleh perusahaan nasional. Harapan rakyat, Indonesia mampu melakukan nasionalisasi migas seperti yang dilakukan Chavez di Venezuela.

Aksi nyata mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah salah satu langkah mencapai kedaulatan energi nasional. Besar harapan sumber kekayaan alam negeri yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kita berpatok kepada 42 halaman visi misi, aksi nyata dan sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK. Pemerintahan lima tahun ke depan akan lebih fokus terhadap optimalisasi batu bara sebagai bahan bakar, mengingat cadangan minyak Indonesia semakin menipis, bahkan menurut Iwa Garniwa hanya bisa dimanfaatkan sekitar 11,2 tahun kedepan.

Ada tiga langkah nyata yang akan dilakukan pemerintahan dalam mencapai kedaulatan energi nasional di antaranya: (1) Transformasi Bahan Bakar Minyak menuju Bahan Bakar Gas, (2) Nasionalisasi Migas untuk mencapai kedaulatan, dan (3) Pengembangan Energi terbarukan.

Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Jokowi adalah transformasi bahan bakar dari minyak menjadi gas, sebagai bahan bakar transportasi, diyakini akan mengurangi subsidi BBM sekitar Rp. 60 triliun. Jika memang pemerintah pusat fokus terhadap

transformasi BBM menjadi bahan bakar gas (BBG), tentu BBM hanya menjadi bahan bakar kendaraan. Di sini juga perlu disoroti kebijakan distribusi BBM, optimalisasi BBM bersubsidi harus dilaksanakan mengingat cadangan minyak bumi kian menipis. Hanya masyarakat kurang mampu yang seharusnya menerima subsidi BBM.

Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi migas di dalam dan di luar negeri menjadi salah satu janji yang tertulis Jokowi-JK. Kalimat tersebut menarik dikaji dengan cita-cita besar mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Kedaulatan dan kemandirian menjadi kata kunci dalam mengawal proses peningkatan eksplorasi dan eksploitasi migas, 75% blok migas masih dikuasai asing. Lima tahun ke depan, jika persentase industri asing meningkat dalam menguasai blok migas, maka pemerintahan Jokowi-JK dianggap gagal dan tak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan tentang kedaulatan, kemandirian dan kepribadian bangsa Indonesia.

Cadangan minyak di Indonesia semakin menipis dan hanya mampu dimanfaatkan 11,2 tahun ke depan. Pemerintah dituntut mengambil peran dalam mengatasi masalah ketika eksplorasi dan eksploitasi migas ditingkatkan maka semakin kering sumur-sumur minyak negeri ini. Subsidi BBM yang besar rencananya akan dioptimalkan terhadap masyarakat kecil. Bisa dipastikan harga BBM akan naik 5 tahun ke depan, namun harus dipertahankan dengan harga standar, dengan cara pengawalan agar distribusi BBM tepat sasaran.

Batubara menjadi bahan bakar yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar gas, dalam sembilan agenda prioritas disebutkan penguatan batu bara dan gas untuk meningkatkan produksi listrik dalam negeri. Mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dalam acara Presentasi Hasil Kerjasama Studi Sumber daya dan Cadangan Batubara di Indonesia menyebutkan, cadangan batu bara Indonesia meningkat mencapai 65,4 miliar ton. Sebuah angka yang menggembirakan dan menjadi potensi menyambut cita-cita dari Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan batu bara. Optimalisasi batubara sangat mendukung kebutuhan energi nasional. Namun yang menjadi tugas berat adalah pengolahan

limbah hasil pengolahan batubara jika pemerintah benar-benar mengoptimalkan batu bara.

Harapan besar bangsa Indonesia dititipkan di bahu Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Indonesia belum mencapai kedaulatan bidang energi padahal kaya akan sumber daya alam. Memang benar dikatakan kekayaan terbesar sebuah negara adalah sumber daya manusianya, tapi ketika negara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia tentu menjadi negara kuat yang mampu memimpin dunia.

Kemerdekaan adalah utang yang harus diangsur. Lima tahun ke depan, Jokowi dan JK menjadi pionir utama dalam mengangsur utang-utang kemerdekaan tersebut. Sebagai masyarakat tentu kita punya tugas dalam melunasi utang kemerdekaan, dimulai dari diri sendiri, lingkungan hingga komunitas yang lebih besar kita bangun Indonesia untuk mencapai 100% merdeka di tahun 2045.[]

# MENAGIH JANJI KEDAULATAN ENERGI

*Muhammad Rifki Ali*

**D**imulai ketika revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18, energi menjadi tulang punggung produksi. Mesin uap yang ditemukan oleh James Watt mengubah pola pikir dan metode produksi yang lebih efektif dan efisien. Disusul dengan pengembangan lokomotif untuk mengangkut bahan bakar serta hasil produksi industri yang melimpah ruah. Perkembangan ini terus berjalan sampai akhirnya lampu pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison pada abad ke-19.

Bola lampu yang ditemukan oleh Edison sangat fenomenal dan menjadi catatan sejarah penting yang menggemparkan dunia. Pasalnya dengan lampu tersebut orang-orang beralih dari penggunaan lilin yang penerangannya terbatas menuju pemanfaatan listrik yang dapat ditransformasi menjadi energi penggerak mesin industri. Hingga saat era informasi sekarang penggunaan energi menjadi salah satu pondasi penting dalam mengelola sebuah negara. Salah satu sektor penting yang ada di Indonesia adalah energi, dari hulu hingga hilir.

Saat ini panggung kontestansi pemimpin negara Indonesia telah sampai pada keputusannya. Negeri ini dengan sekian banyak budaya dan bonus demografinya akan dipimpin oleh Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia dan wakilnya Jusuf Kala yang akan menemani memimpin selama lima tahun mendatang.

Banyak hal yang disampaikan oleh Jokowi, baik di atas panggung pidato, ataupun di dalam gagasan yang tertulis di visi dan misi. Sebanyak 41 halaman dijabarkan dalam tulisan yang menggambarkan masalah-masalah Indonesia serta tawaran solusi

yang diberikan dalam kabinet lima tahun kedepan. Inilah sosok pemimpin kita yang nantinya akan membawa bangsa ini menjadi negara yang lebih baik dengan salah satu jargonnya yaitu revolusi mental. Benarkah?

### **Tiga Masalah Pokok Menurut Jokowi-JK**

Berdasarkan visi, misi, dan program aksi Jokowi-JK ada tiga masalah pokok bangsa ini. Pertama, adanya ancaman terhadap wibawa negara. Ancaman ini serius, ketika keluar klaim-klaim kebudayaan khas Indonesia oleh Malaysia. Selain itu wilayah batas kedaulatan Indonesia pelan-pelan mulai mengecil setelah Sipadan dan Ligitan tidak berhasil dipertahankan di tanah Indonesia. Hal ini karena kurangnya perawatan dan pengawasan terhadap kekayaan alam Indonesia itu sendiri, sehingga dapat memancing para oportunist untuk mengambil alih serpihan-serpihan kedaulatan Indonesia.

Tidak hanya faktor eksternal, institusi dan aparatur negara juga menjadi salah satu hal yang mengancam kedaulatan Indonesia dari faktor internal. Pasalnya, banyak pelayanan yang masih seadanya dan bahkan terkesan koruptif, sehingga mengancam kepercayaan masyarakat untuk mengikuti sistem di dalam negara sendiri.

Saya pernah mengurus surat penting di suatu institusi negara untuk keperluan legalitas. Di dalam salah satu proses, ada hal menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pegawai institusi negara. Saya ditawarkan cara cepat untuk mengurus surat tersebut dengan syarat ada uang ekstra yang harus saya berikan. Hal ini terjadi karena kurangnya kejujuran, profesionalitas, dan integritas dalam pribadi oknum pegawai negara tersebut. Sayangnya hal ini juga dipacu dengan sistem feodal yang mengakibatkan para idealis profesional terkadang tertutupi dengan para veteran-veteran yang kadang belum tentu profesional dan update.

Eksplotasi sumber daya alam di Indonesia juga menjadi ancaman serius jika tidak ada kontrol supremasi dari pemerintah. Perdagangan bebas bisa ibarat pedang bermata dua. Dapat menjadi kekuatan jika bisa mengendalikannya, tetapi akan menghujam diri sendiri jika dibiarkan bergerak bebas tanpa arah.

Siapa bilang sumber energi Indonesia saat ini melimpah ruah? Berdasarkan hasil observasi data Sumber Badan Geologi Kementerian ESDM (2011), total sumber daya batubara di Indonesia sebesar 105.187,44 juta ton dengan cadangan sebesar 21.131,84 juta ton. Tingkat produksi rata-rata per tahun sekitar 300 juta ton. Jika diakumulasikan, untuk menghabiskan seluruh cadangan batubara di Indonesia dengan asumsi tidak ada peningkatan produksi setiap tahunnya, maka diprediksi tujuh puluh tahun lagi atau sekitar tahun 2081, stok bahan bakar batubara Indonesia terancam habis. Dibutuhkan eksplorasi lagi untuk mencari batubara yang tersimpan di perut bumi Indonesia.

Lebih parah lagi kalau membahas cadangan minyak di Indonesia. Ironisnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral Batubara, pada tahun 2011 sebanyak 273 juta ton batu bara diekspor keluar negeri, 68 ribu ton diimpor, dan hanya sebanyak 80 juta ton yang digunakan untuk keperluan dalam negeri. Sedangkan menurut data Statistik PLN (2012), sebanyak 43,99% Mega Watt (MW) dari keseluruhan pembangkitan listrik di Indonesia berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mayoritas menggunakan energi batubara.

Di Jepang, mereka mempunyai proyek penggalian kawasan bawah tanah yang digunakan untuk menampung gas LNG sebagai *security reserve* (cadangan pengaman) energi negara. Hal ini mereka lakukan karena mereka sadar betul bahwa sumber daya alam sangat sedikit. Yang mereka punya hanyalah teknologi yang akhirnya mereka jual sampai ke seluruh penjuru dunia. Tetapi teknologi hanya bisa bermanfaat ketika di hulunya terdapat energi yang membangkitkan pasokan listriknya.

Faktor lainnya adalah untuk mempertahankan pasokan energi Jepang ketika terjadi peperangan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dengan demikian, mereka tidak perlu repot-repot mencari pasokan energi ketika kondisi perdagangan internasional sudah tidak memadai.

Lain halnya dengan Indonesia yang dengan bangganya menjadi salah satu pengeksport batubara terbesar di dunia, meskipun cadangan batubara dalam negeri hanya 0,5 % dari cadangan batubara dunia. Lebih menyedihkan lagi, kita sebagai pengeksport

batubara terbesar, tidak bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan harga pasar. Karena batubara merupakan satu kebutuhan energi primer, seharusnya menurut hukum teori ekonomi *supply and demand* (pasokan dan permintaan), ketika saat ini Indonesia hanya membutuhkan 80 juta ton dari 300 juta ton batubara, kondisi ini disebut *oversupply* (kelebihan pasokan).

Ketika terjadi *oversupply*, sebaiknya *supply* ditahan agar *demand* naik. Ketika *demand* naik maka harga akan naik. Memang sedikit licik, tetapi ini salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki *bargaining position* (posisi tawar) di mata dunia. Cara ini hanya mampu direalisasikan ketika pemerintah berani melawan kepentingan pasar asing.

Kedua, lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa yang digambarkan dengan adanya kemiskinan yang meluap terutama di kawasan terpencil, kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin, kurangnya kontrol terhadap eksploitasi sumber daya alam yang bahkan sebagian besar hanya dinikmati oleh bangsawan asing. Ditambah ketergantungan pangan seperti impor beras, gandum, dan garam. Juga terancamnya pasokan bahan bakar minyak yang semakin menipis, sehingga memaksa para elit menerapkan kebijakan impor bahan bakar minyak yang harganya melambung tinggi.

Satu hal yang menjadi kunci dari semua ini adalah lemahnya kualitas pendidikan Indonesia baik sumber daya manusia, tenaga pengajar, dan fasilitas belajar. Seandainya pendidikan yang diprioritaskan, maka akan tercipta tenaga-tenaga pengajar yang kompeten. Lalu dari setiap tenaga pengajar ini mendidik para pelajar-pelajar baru yang kompeten, maka perekonomian di Indonesia perlahan akan membaik.

Ketiga, adanya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Yang saya tangkap dari permasalahan ini adalah bagaimana bangsa ini seharusnya bisa saling menghargai satu sama lain dan mendukung persatuan tanpa melihat perbedaan etnis dan kepribadian. Bagaimana kita mengajak orang-orang dengan kepribadian menyimpang untuk kembali kepada kepribadian yang baik. Orang-orang dengan kemampuan mentalitas yang kurang harus kita bina untuk menjadi putra putri bangsa yang berprestasi.

Arus pasar bebas dan globalisasi membuat bangsa ini semakin kehilangan jati dirinya. Globalisasi mengubah tatanan sosial masyarakat Indonesia yang sejak dulu terkenal dengan keramahannya sekarang perlahan-lahan menjadi liar tanpa batas ketika tidak disokong dengan pondasi agama yang baik. Materialisme mulai menjangkit di setiap pola pikir pribumi Indonesia yang meracuni tujuan akhir dari awal penciptaan manusia.

Menyontek yang mengakar menjadi budaya baru tanpa larangan dari guru. Anak muda dengan bangganya terlibat tawuran untuk menjadi yang terkuat. Para wanita yang rasa malunya tertutupi mengekspos diri untuk mendapat pujian dari sang lelaki.

Hal inilah yang harus dibendung di tengah cekaman *borderless-state* (dunia tanpa batas). Andai saja setiap warga negara Indonesia memaknai sila pertama dengan sungguh-sungguh, sehingga tertanam dalam diri, bahwa setiap gerak-gerik yang kita lakukan semua sudah diawasi oleh Yang Maha Kuasa, maka pribadi bangsa ini akan menjadi kuat dengan pondasi akhlak yang baik untuk membentuk kejujuran, keadilan, persatuan, dan integritas yang tinggi.

### **Kemandirian Ekonomi melalui Kedaulatan Energi**

Menyoroti poin ketujuh dari sembilan agenda prioritas Jokowi-JK yang menyatakan akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya sektor energi. Kebijakan pengurangan impor bahan bakar minyak merupakan kebijakan yang baik. Dengan dikurangi impor bahan bakar minyak (BBM), maka pendapatan Indonesia dapat dialihkan untuk sektor-sektor strategis lainnya.

Langkah lainnya bisa dengan mengurangi subsidi BBM. Seperti yang kita ketahui, hampir 30 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya dihabiskan untuk subsidi BBM yang notabeneanya merupakan komoditas habis pakai yang kurang strategis jika menginvestasikan dana negara untuk mensubsidi BBM. Akan lebih bijaksana jika dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kesehatan dan pendidikan di Indonesia.

Dua sektor itu merupakan sektor yang akan sangat menguntungkan bagi negara jika dapat dibina dengan baik. Pendidikan akan menghasilkan para ahli dan tenaga kerja yang profesional ditambah lagi jaminan kesehatan yang baik untuk mengurangi *revitalitation cost of health* (biaya revitalisasi kesehatan). Hal lain yang menjadi prioritas adalah meningkatkan eksplorasi migas baik di dalam maupun luar negeri. Semakin banyak eksplorasi yang dilakukan, maka akan semakin besar cadangan yang dapat diambil manfaatnya.

Hanya saja migas di Indonesia akan lebih baik jika dikelola oleh Pertamina. Dengan menambah investasi anggaran untuk sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan dapat meningkatkan pemasukan dari Pertamina sendiri, sehingga nantinya dapat diputar kembali untuk memperbesar kekuatan Pertamina untuk melakukan eksplorasi di luar negeri mengingat cadangan minyak di Indonesia kian menipis. Pembangunan infrastruktur penyimpanan cadangan energi adalah kunci untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri.

Sayangnya, saat ini kilang-kilang penyimpanan energi banyak tercederai dengan adanya mafia baik tingkat jalanan ataupun tingkat korporasi meja rapat. Pemerintah harus sadar dan berani untuk menindaklanjuti semua ini agar kedaulatan energi dapat terealisasikan. Pembangunan pipa gas dapat mengurangi biaya transportasi dalam pengiriman energi yang banyak mafia serta pungutan liar. Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah perencanaan dan perawatan yang baik.

Membahas soal pembangunan pipa gas, ada satu masalah lagi yang sepertinya harus diselesaikan oleh pemerintah, yaitu pembangunan pipa gas Kalija (Kalimantan-Jawa). Pipa gas ini akan terbentang sepanjang Laut Jawa dari Kalimantan Timur sampai Jawa Tengah. Di sisi lain, eksploitasi gas bumi di Kalimantan untuk keperluan daerah di luar Kalimantan menuai penolakan dari pemerintah setempat dengan dalih pembangunan di Kalimantan akan terhambat dengan sedikitnya pemasukan dari penjualan gas bumi ini. Sesuai dengan konsep yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim, sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Tetapi justru

dengan adanya pipa gas ini malah mengambil gas alam mentah ke pulau Jawa.

Di sisi lain pembangunan pipa gas ini akan mempercepat konversi dari BBM menuju BBG (bahan bakar gas). Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2011, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tambak Lorok yang terletak di Jawa Tengah mengalami inefisiensi sebesar Rp 2,1 triliun per tahun akibat kekurangan bahan bakar gas.

Pemanfaatan energi terbarukan merupakan langkah paling strategis untuk meningkatkan kedaulatan energi. Subsidi BBM akan sangat bagus ketika dialihkan ke pengembangan energi terbarukan, sehingga pasokan bahan bakar fosil untuk listrik nantinya akan perlahan-lahan digeser dengan menggunakan energi terbarukan. Komitmen pemerintah untuk memberikan insentif kepada riset dan aplikasi dalam pengembangan energi terbarukan akan sangat berharga ke depannya.

Hari ini kita menyaksikan sosok pemimpin yang akan menahkodai kapal kenegaraan dengan berbagai rencana yang seharusnya bisa membawa Indonesia lebih baik ke depan. Tantangan sesungguhnya adalah ketika kapal ini sudah berada di tengah perjalanan. Kita tidak tahu apakah akan ada badai yang menerjang, ombak yang mengamuk, atau bahkan angin yang tidak berhembus lagi.

Saat ini rakyat sedang menunggu untuk beraksi dalam segala situasi. Yang kami butuhkan bukanlah basa-basi ataupun tulisan janji, tetapi yang kami butuhkan adalah realisasi untuk majunya negeri.[]

# **JANJI KEMANDIRIAN**

# TERASING DI NEGERI AGRARIS

*Jhane Pebyana Wilis*

**S**emenjak sekolah dasar, saya kerap mendengar guru mengatakan 'Indonesia Negeri Agraris'. Dalam KBBI, agraris yakni hal yang mengenai pertanian atau tanah pertanian serta bersifat pertanian. Jika dikaitkan dengan perkataan guru saya, Indonesia adalah negeri yang perekonomian dan struktur masyarakatnya ditopang oleh sistem pertanian. Realita tersebut memang didukung dengan kondisi sumber daya alam Indonesia yang kaya dan tersebar hampir di setiap pulau dengan keunikan yang beragam. Pada saat itu, saya sangat setuju dengan guru saya. Hingga memasuki masa perkuliahan, sepertinya saya agaknya merasa asing dengan ungkapan tersebut.

Minggu lalu, saya pergi bersama ibu ke sebuah salon baru di Kota Tangerang. Saat *mbak* salon melayani saya, percakapan dimulai. Saya menanyakan dari mana asal dan bagaimana keadaan pertanian di daerah asalnya. Benar saja, dia berasal dari luar Jakarta, yakni Cirebon. Produk hasil pertanian yang paling unggul di daerahnya adalah padi. Ia menceritakan bahwa ibu dan bapaknya adalah petani padi. Namun ia memilih untuk merantau setelah lulus SMP ke Jakarta.

Sebab lahir dari keluarga petani, Si Mbak paham bahwa kualitas beras yang ada di kota tidak bagus. Hampir semuanya memakai pemutih. Sebab beras yang belum terkontaminasi dengan kimia berwarna putih keruh setelah dimasak. Orang tuanya yang bekerja sebagai petani memerlukan 3-4 bulan untuk memanen padi. Jika hasil panen padi dirupiahkan sebesar 800 ribu rupiah,

maka nominal tersebut harus dibagi tiga sama rata. Sepertiga untuk pengelola atau orang tua Si Mbak, sepertiga untuk pemilik sawah, dan sepertiga sisanya untuk obat dan biaya pemeliharaan. Kalau pun ada penghasilan tambahan biasanya berupa hasil ternak seperti anak kambing. Namun perlu waktu minimal setahun untuk menjual anak kambing hingga menjadi kambing dewasa.

Keadaan inilah yang menyebabkan Si Mbak tadi membandingkan lebih baik hidup di kota, meski hanya jadi pembantu yang bergaji Rp 800 ribu per bulan daripada menjadi petani yang memerlukan waktu 3-4 bulan untuk jumlah uang yang sama. Pernyataan dari Si Mbak tidak ada keraguan, bahkan terdengar seolah suatu keputusan yang membanggakan menurutnya untuk mengadu nasib di kota.

Cerita lainnya berasal dari pengalaman saya yang terbiasa menjalani kuliah lapangan ke desa-desa di luar Jakarta. Meski berbeda-beda provinsi yang saya kunjungi, uniknya ada sebuah pola migrasi yang sama. Kebanyakan kaum muda pedesaan yang berumur belasan hingga dua puluh tahunan jarang berada di lokasi sebab mereka merantau ke kota. Mayoritas mereka pergi untuk mencari nafkah menjadi kuli, buruh, pembantu rumah tangga, dan pekerjaan lainnya yang dengan keahlian rendah serta berupah minim. Sedikit sekali dari mereka yang beralasan karena melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Mirisnya, ketika saya dan teman sejurusan mengobrol santai dengan anak-anak kecil yang mayoritas dari keluarga petani. Cita-cita mereka juga ingin merantau ke kota. Seolah kota menjadi tempat yang menjanjikan bagi mereka yang berjuang nekat. Benar-benar nekat. Sebab dari data yang kami dapatkan, mayoritas hanya lulusan SD atau SMP.

Fenomena ini secara tidak langsung menyebabkan dua hal. Pertama, kota besar yang sempit dan macet semakin sesak dengan penduduk baru. Kedua, potensi pedesaan terabaikan karena sumber daya manusia mudanya lebih memilih mengadu nasibnya di ibukota. Alhasil, sendi perekonomian semisal pertanian, perkebunan, dan pariwisata belum mampu menyumbang pendapatan penduduk setempat sebab rendahnya produktivitas dan kreativitas baik dalam pemasaran maupun keberlanjutannya.

## Konsumen Harus Sadar Pangan

Ada sebuah cara sederhana yang biasa digunakan sosiolog untuk memahami lingkungannya. Namanya *debunking*. Maksudnya membongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah fenomena dan meninjaunya lebih dalam hingga akar. Misalnya, dalam konteks sistem pertanian atau pangan di Indonesia. Terkadang kita hanya peduli atas apa yang akan kita makan saja. Namun, pernahkah terpikir untuk mencari tahu, bagaimanakah proses di balik lauk-pauk yang tersaji di meja makan?

Di tingkat individu, siapa sangka ada kisah petani yang kekurangan modal atau pedagang sayur di pasar yang terkendala rantai distribusi. Di tingkat meso ada fakta komunal jika rumah tangga petani gurem yang bertempat di Jawa menurun tajam sebanyak 4,8 juta selama 2003 hingga 2013, menurut Faisal Basri. Di lingkup makro, ada realitas impor beras, jagung, daging sapi, bahkan garam demi mencapai ketahanan pangan nasional.

Ada sebuah perbandingan yang ironis tentang nasi menurut Komunitas Gerakan Terimakasih Petani, untuk menghabiskan sepiring nasi, kita butuh kurang lebih 10 menit. Tapi butuh 3-4 bulan untuk menanamnya saja, belum terhitung proses penggilingan dan pendistribusiannya.

Bicara tentang pertanian, kita tidak hanya bicara tentang tanggungjawab pemerintah pusat atau daerah, perusahaan swasta yang mengelola pertanian, dan LSM atau pihak terkait gerakan petani. Ada aspek yang perlu disadari oleh masyarakat sebagai konsumen. Peran konsumen sangat penting dalam rantai ekonomi. Sebab ia sebagai pembeli yang akan menghidupkan dinamika jual beli dalam pasar. Bahkan penghitungan pendapatan agregat untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara pun salah satunya menggunakan pendekatan konsumsi.

Lantas, apakah konsumen sepenuhnya yang bertanggungjawab atas hal ini? Saya rasa, ada benarnya juga. Kita, sebagai konsumen makanan, kita pula lah yang menciptakan *demand* pada pasar. Sebuah riset bisnis mengatakan, mayoritas konsumen tidak peduli terhadap aspek sosial maupun lingkungan atas apa yang mereka beli. Sifat konsumerisme dan individualistis tersebut jika disatukan bisa menjadi sebuah kelompok sosial yang sangat mempengaruhi sistem ekonomi, khususnya di bidang pertanian.

Kita sering tidak peduli atas apa yang kita beli. Misalnya saja bawang, garam, dan daging sapi—komoditas yang nilai impornya tinggi. Memang secara harga jauh lebih murah dibandingkan produk lokal, namun kualitasnya tidak terlalu baik. Ini masalah ekonomi klasik, harga tidak berbohong atas kualitas barang.

Meskipun demikian, permasalahan tersebut tidak bisa dihakimi dari satu sudut pandang. Faktor harga bagi kelas menengah kini sepertinya bukan persoalan. Sebab saya pun sendiri mengalami suatu momen saat saya ingin berbuka puasa di salah satu *mall* di Depok pada pukul lima sore. Seluruh tempat makan, baik milik dalam negeri maupun internasional *full-booked*. Minimnya permintaan kita terhadap sayur-buah lokal atau organik dan ketidaksadaran untuk menerapkan gaya hidup sehat juga bisa menjadi faktor mengapa pertanian lokal kita sangat lesu.

Jika sudah demikian, sepertinya kita harus bersiap-siap untuk menjalani pola konsumsi yang serba bergantung pada *supplier* importir, selalu mengikuti tren pola makan Barat yang sebenarnya itu strategi marketing mereka, dan yang paling mengerikan, yakni mempertahankan keasingan paradigma untuk menjadi petani atau konsumen yang cerdas di negeri agraris!

### **Konsumen Cerdas atau Agropreneur?**

Implikasi menjadi konsumen yang cerdas mungkin tidak terlalu terasa dampak signifikannya secara makro untuk saat ini, namun akan tampak beberapa tahun yang akan datang. Manfaatnya pun untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Bagi diri sendiri, tentu kita lebih tahu bagaimana kualitas pangan yang kita makan.

Pepatah lama mengatakan, "*you are what you eat.*" Ada baiknya kita sudah mulai peduli atas tubuh kita sebagai tindakan preventif kesehatan masa depan. Jauh lebih baik lagi menjadi konsumen cerdas plus peduli. Peduli bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Misalnya tidak menyisahkan makanan yang kita makan. Cara ini setidaknya menghargai jerih payah para petani dan juga finansial kita.

Untuk menciptakan multiplier effect yang lebih dahsyat, kita juga bisa menjadi seorang petani. Saya lebih suka menyebutnya

dengan istilah yang lebih tren, yaitu agropreneur. Menurut saya, agropreneur sama saja dengan petani, namun ia memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih mumpuni khususnya dalam hal *entrepreneurial mindset* sehingga efektivitas dan efisiensi sistem pertanian mampu dicapai.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, dalam Sensus Pertanian 2013, 10 tahun terakhir ini Indonesia kehilangan 5,07 juta rumah tangga petani. Fakta lainnya juga menyebutkan hanya 10% dari lulusan fakultas pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Padahal menurut Bob Sadino, seharusnya sarjana pertanian menempatkan diri mereka sebagai konsultan para petani agar mereka mampu mendapatkan informasi dan edukasi untuk pengembangan sistem pertanian.

Pola pikir *entrepreneur* yang taktis dan inovatif tentu mendukung tercapainya ketahanan pangan dalam konteks perbaikan sistem pertanian. Menurut Menteri Pertanian Suswono, penerapan teknologi tinggi pertanian itu penting dikenalkan agar masyarakat tani tetap antusias berkegiatan usaha tani. Di samping itu, mereka bisa menghemat energi dan biaya produksi sekaligus sebagai upaya mengatasi keengganan generasi muda bekerja di sawah.

Kesadaran untuk menjadikan pertanian Indonesia menjadi lebih baik bukanlah sekadar pekerjaan yang singkat dan parsial dari pihak pemerintah saja. Namun butuh proses kolaboratif dari swasta, masyarakat, dan LSM untuk memahami apa yang disebut dengan 'Negeri Agraris' yang sesungguhnya. Langkah awal yang perlu dijalani namun mendasar yaitu, bagaimana menghilangkan keterasingan dan ketidaksadaran kita bahwa Indonesia merupakan negeri agraris yang perlu dikembalikan kedaulatan pangannya. Kedua, bagaimana kita benar-benar memahami potensi yang paling besar dari kearifan lokal bangsa kita.

Mungkin terdengar melangit soal dua solusi tersebut. Padahal cukup menjadi konsumen yang sadar dan peduli pangan serta lebih mencari tahu lebih tentang agropreneur, merupakan langkah sederhana yang bisa dijalani.[]

# JERITAN PENGHUNI NEGERI AGRARIS

*Siti Nur Arifah*

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

—Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Sederet kalimat yang tercantum di dalam UUD 1945 mengandung banyak makna. Kata-kata “kemakmuran rakyat” yang merupakan tujuan dari penggunaan semua sumber daya alam yang ada di negeri ini. Pertanyaannya, sudah sejauhmana implementasi semua kebijakan selama ini? Sudahkah sesuai dengan yang dituangkan dalam Undang-Undang? Apakah benar kekayaan alam yang kini dimiliki negeri ini telah dirasakan rakyatnya? Sebuah pertanyaan ironis yang jarang orang bisa menjawab, terutama para pemegang kebijakan.

Mari kita lihat bagaimana kondisi negeri ini. Data BPS bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang. Dengan jumlah penduduk desa lebih besar jumlah penduduk miskinnya yaitu sebesar 14,32 persen. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia semakin tahun semakin menurun, namun dalam kenyataannya tetap saja penurunan sekian persen tersebut tidak mempengaruhi pertumbuhan dan keadaan ekonomi rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan penurunan tersebut terlalu kecil dan masih dirasa lambat. Di tataran dunia, Indonesia termasuk 15 negara yang masih di perhitungkan menjadi negara miskin.

Banyak lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah saat ini untuk menanggulangi kemiskinan, mulai dari tim penanggulangan kemiskinan secara nasional maupun koordinasi dengan daerah. Program-program pemerintah pun banyak yang dicanangkan, mulai dari distribusi beras miskin, hingga layanan pendidikan gratis. Tak hanya itu, dari semua sektor diusahakan menanggulangi kemiskinan. Maksud pemerintah di sini adalah baik, agar rakyat dapat terfasilitasi kebutuhan dasarnya.

Namun, hal ini tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada. Kemiskinan sangat erat dengan solusi bagaimana membuat rakyat itu bekerja. Apapun lapangan pekerjaannya. Sangat heran ketika melihat rakyat yang miskin adalah dari pedesaan, padahal di desa-desa lah tersimpan kekayaan alam. Hanya saja mereka tidak mampu dan tidak tahu bagaimana cara mengolahnya. Sedangkan di perkotaan, sangat banyak lapangan pekerjaan, namun kerap saja terasa bagaimana levelisasi dari rakyat tersebut. Sehingga masih saja ada rakyat dengan kategori miskin di perkotaan.

Tak sedikit pula orang-orang yang tinggal di pedesaan berbondong menuju kota, menurut mereka kota adalah ladang penghasilan, justru ini yang menjadi polemik. Seseorang dari desa yang tidak tahu akan medan perkotaan, justru menjadi sebuah masalah bagi pemerintah. Kesenjangan terasa karena perkotaan semakin padat, dan dari situ masalah sosial mulai bermunculan. Seharusnya pemerintah menangani hal ini, karena kemiskinan bukan terletak pada seberapa banyak pemerintah memberikan layanan kepada rakyat, tapi bagaimana rakyat bisa mengerti bagaimana arti dari kemandirian, inisiatif dan inovasi dilandasi dengan rasa perjuangan yang sangat tinggi. Karena negeri ini dibangun dengan sejarah semangat perjuangan yang menggelora dan gotong royong yang kuat. Dengan daya tahan dan daya saing yang tinggi.

Jika melihat fakta kemiskinan di atas, kita kembali lagi kepada sebuah pertanyaan, sudahkah rakyat ini merasa sejahtera di dalam negeri sendiri? Apakah kekayaan alam yang ada sudah tersalurkan dengan baik kepada pemiliknya: rakyat Indonesia? Sedikit saja coba kita tengok, tentang kebutuhan pangan. Dengan luas wilayah Indonesia yang hampir sama luasnya dengan Benua Eropa.

Indonesia sering disebut sebagai negara agraris. Dengan iklim tropis yang dimiliki, mampu membuat tanaman yang beraneka ragam dan tumbuh subur. Melihat potensi wilayah yang ada, tak ada alasan bagi kita untuk tidak memanfaatkan dengan baik kesempatan ini.

Mari kita kupas sekelumit tentang sisi pertanian negeri ini. Di balik fakta kemiskinan, jika kita telisik ada sumbangsih dari bidang pertanian untuk dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Pertanian erat kaitannya dengan pangan yang merupakan kebutuhan bagi setiap orang, yaitu ketersediaan pangan. Sebuah negara dapat dikatakan maju ketika kebutuhan rakyatnya dipenuhi dengan baik, tidak hanya jumlah namun juga harus memperhatikan kualitas. Ketika meja makan saja belum berdaulat, artinya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mencapai kedaulatan negara. Berdaulat suatu negara apabila kemandirian pangan tercapai. Kemandirian pangan tentunya butuh proses.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013, angka kerawanan pangan rakyat Indonesia pada tahun 2012 ternyata masih terdapat 47,64 juta penduduk berada dalam kondisi sangat rawan pangan. Tentu saja ini menjadi masalah yang perlu segera ditangani, mengingat saat ini jumlah rakyat rawan pangan sudah mencapai 19,46% dari jumlah penduduk. Kerawanan pangan inilah yang menjadi tolak ukur dari ketahanan pangan. Dari kerawanan pangan akan berdampak pada bencana kelaparan jika dibiarkan berlarut-larut.

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, penelitian Zoelick (mantan Presiden World Bank) yang mengamati progres pertumbuhan ekonomi di 101 negara pada tahun 1960 dan 2012, menunjukkan bahwa hanya negara-negara yang konsisten membangun ketahanan pangannya, menyediakan infrastruktur yang mengoneksi antar wilayah dan memberikan perlindungan sosial bagi warga negaranya yang mampu terlepas dari jeratan "middle income trap."

Coba kita bandingkan dengan kebijakan yang selama ini dibuat oleh pemerintah dalam setiap periode kepemimpinannya, hampir setiap kabinet memiliki fokus untuk pertanian. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 yang sempat menggarap tentang reforma

agraria dan revitalisasi infrastruktur pabrik dan bangunan dalam menunjang sarana prasarana pertanian. Dalam buku Evaluasi Paruh Waktu RPJMN BAPPENAS tercatat bahwa masalah pertanian menjadi prioritas nasional 5, yaitu ketahanan pangan serta lanjutan revitalisasi pertanian. Di dalamnya dijelaskan bahwa yang menjadi evaluasi adalah peningkatan kesejahteraan petani juga merupakan aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat jumlah petani yang cukup besar.

Salah satu Indikator kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Selama tiga tahun pelaksanaan RPJMN, nilai NTP meningkat dari 101,20 (2009) menjadi 105,76 pada 2012. Hal ini menunjukkan meningkatnya tingkat kesejahteraan petani. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras untuk mendekati angka target pada 2014 sebesar 115-120.

Kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani bukan hanya pada stabilitas harga, tetapi juga pada peningkatan produksi beberapa komoditi pangan utama (padi, jagung, tebu dan perikanan) yang kurang memadai, bahkan produksi kedelai mengalami penurunan. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas harga komoditi pangan, upaya yang perlu dilakukan adalah akselerasi program swasembada pangan terutama kedelai dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. (BAPPENAS, 2014)

Pentingnya penanganan ketahanan pangan ini tidak hanya berfokus pada bagaimana produksi secara nasional, tetapi juga bergantung dari seberapa besar pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan petani. Jelas akar permasalahan yang dikutip dalam evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu ini adalah dalam hal peningkatan produksi pangan, perbaikan infrastruktur, konversi lahan dan stabilitas harga. Sepertinya hal tersebut adalah permasalahan turunan dari masa ke masa yang tak kunjung usai. Dan setiap pergantiannya selalu dilakukan pembaruan-pembaruan program dan kebijakan. Pertanyaan yang kembali di ajukan adalah mengapa kemudian permasalahan klasik tentang pertanian ini yang kembali muncul? Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kurang relevan atautkah memang permasalahan pertanian ini tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaannya? Pertanyaan ini kembali muncul karena terlihat implementasi yang sangat minimal dalam pelaksanaannya.

Pemilihan presiden baru juga telah dilakukan di negeri ini, telah terpilih presiden yang merupakan pilihan rakyat. Kita kembali buka lembaran janji yang tertuang dalam visi misi Sang Presiden saat kampanye beberapa waktu silam. Berikut adalah visi misi Presiden terpilih di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

1. Tanah/lahan pertanian produktif jangan sampai dikonversi ke penggunaan yang lain. Lahan harus diamankan, karena tanah pertanian tidak hanya sawah padi, ladang padi, hutan sagu, kebun ubi-ubian, dan lahan sayuran. Saat ini lahan pertanian banyak yang berubah jadi pemukiman, industri dan pertambangan sehingga harus dihentikan.
2. Masalah petaninya sendiri, harus ada pendampingan agar lahan-lahan sempit bisa produktif. Petani jangan diarahkan untuk memakai bibit, hibrida impor, pestisida, dan pupuk kimia yang harus membeli. Petani harus mandiri dengan menggunakan benih-benih sendiri, pestisida alami sehingga tidak terbebani biaya produksi yang banyak.
3. Infrastruktur pertanian, dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. Bendungan-bendungan baru harus dibangun, karena saat ini dibutuhkan sawah-sawah yang baru.
4. Kualitas air di lapangan harus diawasi betul. Jangan sampai bendungan atau saluran irigasi dimasuki limbah industri yang akan mengurangi lahan kesuburan tani, sehingga harus dijaga.
5. Pasar belum memberi keuntungan pada petani, karena rantainya masih terlalu panjang. Teknologi dan industri pasca panen seperti packaging belum menyentuh petani.
6. Petani butuh modal dan butuh akses modal, sehingga bank pertanian harus didirikan untuk memberi perhatian pada petani. ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com))

Setelah dianalisis, semua yang tertuang di dalam gagasan rencana presiden sudah ada sebelumnya. Berharap memang pada kesempatan kepemimpinan kali ini ada inovasi dan keberlanjutan kebijakan yang dilakukan. Yang menjadi garis merah evaluasi terbesar dari tahun ke tahun adalah kurang adanya kebijakan yang berkelanjutan dalam setiap kepemimpinan.

Setiap pemimpin baru, mempunyai kabinet dan pengurus baru serta yang program yang baru pula. Sehingga tidak adanya keberlanjutan dan sinkronisasi program yang telah di buat sebelumnya. Masalah infrastruktur saluran air untuk perairan sawah di daerah misalnya. Saat itu ada Kuliah Kerja Profesi yang diadakan salah satu universitas di Indonesia, tempatnya di Subang, Jawa Barat. Para petani banyak mengeluhkan bahwa saluran air yang ada di daerah mereka hingga kini belum diperbaiki. Menurut penuturan para petani, saluran air tersebut telah dilaporkan, ditinjau di lapangan dan akan diperbaiki pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1, namun hingga kini belum ada hasil yang mereka dapatkan perkara akan adanya pergantian kepemimpinan. Hal kecil memang, namun bermula dari yang kecil menjadi sebuah representasi untuk negeri ini. Kurang adanya kebijakan yang berkelanjutan.

Contoh yang lain, pada zaman Presiden Habibie, tidak adanya subsidi bagi bahan bakar minyak, karena pemasukan yang ada dialokasikan ke tempat-tempat pelayanan dan fasilitas rakyat termasuk untuk perbaikan infrastruktur. Kebijakan yang bijak yang digulirkan saat itu meskipun masih ada yang menjadi evaluasi. Karena mustahil dalam dunia ini ketika kita berharap semua akan senang dengan kebijakan yang kita buat.

Pasti ada sisi positif dan negatif, tetapi setidaknya kebijakan untuk tidak ada subsidi itu merupakan langkah awal pengirisan anggaran. Seiring berjalan waktu, ternyata setelah itu mulai muncul subsidi untuk bahan bakar minyak, tentu dengan segala pertimbangan. Kita berpikir positif bahwa mungkin negeri ini telah beranjak lebih kaya karena pembiayaan subsidi tersebut. Namun, menjadi lucu ketika kini subsidi itu sedikit demi sedikit ditarik kembali. Dengan harga yang tentunya jauh lebih mahal berkali lipat. Sedikit agak bertentangan dengan kebijakan yang pernah ada. Jika memang subsidi tidak layak untuk diterapkan, mengapa perubahan pengadaan subsidi itu justru diciptakan yang kemudian di tarik kembali pada masa yang lain.

Menyambung dengan kasus di atas, bahwasanya harus ada tinjau ulang terhadap kebijakan-kebijakan yang diciptakan. Apakah kebijakan tersebut menjadi kebutuhan rakyat ataukah

hanya keinginan para pejabat. Pejabat negeri ini yang dalam hal ini merupakan pemerintah harusnya bekerja dengan landasan karena kebutuhan rakyat. Meski kini para pejabat negeri ini dipilih melalui perwakilan dari partai, tetapi jika sudah berada dalam tataran pemerintahan harusnya tidak lagi berpikir hanya untuk dirinya dan partainya, tapi jauh lebih mulia dari itu yaitu kepentingan rakyat Indonesia. Rakyat negeri ini menunggu bukti nyata dari para pejabat negeri ini.[]

# KEDAULATAN PANGAN BERBASIS KERAKYATAN

*Ayo Soraya*

Indonesia adalah negara agraris. Negara dengan tanah yang subur, *gemah ripah loh jinawi*. Negara yang terkenal dengan hasil pertaniannya. Namun Indonesia termasuk salah satu negara yang rawan pangan. Bukan karena tidak ada pangan, namun karena ketergantungan dari luar negeri. Saat ini jumlah penduduk Indonesia lebih dari 250 juta dan selalu meningkat jumlahnya. Pangan yang dibutuhkan pun semakin bertambah besar.

Tidak heran bangsa ini akan semakin ketergantungan terhadap pihak luar negeri karena ketidakmampuan mencukupi pangan dalam negeri. Hal ini disebabkan semakin menurunnya produktivitas lahan pertanian, menurunnya minat petani dalam produksi tanaman pangan, serta kebijakan pemerintah terkait pertanian yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani penghasil tanaman pangan. Sekarang bisa dilihat sendiri fakta yang terjadi di masyarakat bahwa impor selalu melonjak diiringi pertambahan jumlah penduduk Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia masih aktif melakukan impor berbagai komoditas pangan. Pada kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 saja, impor bahan pangan masih tinggi, yaitu sebanyak 15,4 juta ton. Di antara komoditi pangan yang diimpor tersebut adalah beras dengan jumlah mencapai 400 ribu ton, lalu komoditi kedelai mencapai 1,4 juta ton, bahkan singkong pun ikut diimpor dengan jumlah mencapai 100,7 ton. Sungguh ironis negeri ini, jumlah produksi pangan yang belum dapat mencukupi kebutuhan penduduknya. Pemerintah

pada tahun 2004 silam mencanangkan swasembada pangan akan terjadi pada 2014. Namun buktinya, di tahun ini swasembada pangan belum terwujud karena negara masih menggantungkan impor bahan pangan.

Dari tahun ke tahun, volume impor bahan pangan di Indonesia meroket tajam. Salah satu sebabnya adalah alih fungsi lahan pertanian di wilayah Jawa yang merupakan sumber utama penghasil tanaman pangan. Studi kasus yang saya temukan di daerah sepanjang Jalur Pantura di Jawa Tengah, alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik, ruko, jalan dan rumah yang setiap tahunnya semakin berkembang pesat karena lokasi sangat strategis yang menghubungkan antar kota. Akibatnya mengurangi jumlah produksi pangan seperti padi.

Pemerintah harus semakin tegas terhadap perijinan bangunan yang akan didirikan di atas lahan pertanian yang produktif, karena perlahan namun pasti kemudahan dalam perijinan alih fungsi lahan akan berdampak hebat terhadap produksi pangan yang merosot sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat. Meskipun jumlah penduduk meningkat, namun petani menjadi suatu profesi yang enggan disandang oleh masyarakat. Berdasarkan sensus pertanian BPS mencatat adanya penurunan rumah tangga petani 31,17 juta rumah tangga pada 2003 menjadi 26,13 juta rumah tangga pada 2013.

Menurut hemat saya, seolah pemerintah tak mau ambil pusing dengan permasalahan pertanian yang ada dengan mengambil jalan pintas ketika kekurangan bahan pangan. Solusi terjitu adalah impor dan masalah dianggap selesai. Namun tak semudah membalikkan telapak tangan dalam menyelesaikan permasalahan pangan di negeri ini. Perlu ada sistem pertanian yang terpadu dan berkelanjutan dari hulu ke hilir. Dibutuhkan optimisme yang tinggi dari semua pihak karena ketika sudah dimulai dan dirasakan manfaatnya, maka dampaknya akan terus berkelanjutan dari tahun ke tahun. Cita-cita Indonesia berdaulat pangan dapat terealisasi di depan mata.

Pada hakikatnya, kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa dan setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan produksi pangan secara mandiri dan ikut menetapkan

kebijakan pertanian yang akan dijalankannya tanpa ada pengaruh atau tekanan dari pihak luar yang memiliki kekuatan pasar internasional. Kedaulatan pangan dalam negeri akan terwujud dengan kerja sama dari semua elemen yang terlibat. Suatu bangsa yang berdaulat harus memiliki kedaulatan dalam proses produksi dan konsumsi pangannya sendiri sehingga mampu menciptakan kedaulatan pangan. Hal ini bukan hanya tugas rakyat, namun tugas pemerintah dengan berbagai kebijakan yang mendukung terwujudnya negeri yang berdaulat pangan.

### **Memilih Pemimpin**

Medio 2014 ini bangsa Indonesia diramaikan dengan proses pilpres. Pasangan putra terbaik bangsa, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kali ini masyarakat antusias dalam mengikuti pilpres, dilihat dari meningkatnya jumlah pemilih di Indonesia. Masyarakat mulai peduli akan nasib bangsa ini dengan mencari sosok negarawan yang tepat yang akan membawa negeri semakin makmur dan sejahtera.

KPU pun telah menetapkan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pemimpin Indonesia periode 2014-2019. Pemimpin yang terpilih ibarat menjadi corong Indonesia di mata dunia dan menjadi garda terdepan dalam memimpin bangsa. Sosok presiden yang memiliki sikap negarawan lah yang mampu mengajak masyarakat untuk membangun Indonesia berdaulat.

Berbagai janji yang sudah dilontarkan pada masa kampanye semoga tak dilupakan begitu saja ketika sudah menjabat dalam pemerintahan. Rakyat menaruh harap, bahwa presiden dan wakil presiden terpilih adalah sosok negarawan yang akan memperjuangkan nasib bangsa ini, mengedepankan kepentingan rakyatnya, dan berjuang untuk Indonesia tercinta.

Sosok negarawan yang menjadi pemimpin negeri ini semoga bukan orang yang hanya mengedepankan kepentingan sekelompok tertentu, melainkan demi ratusan juta rakyat Indonesia. Negeri ini pernah dipimpin oleh sosok negarawan seperti Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono yang semuanya pernah mengabdikan dirinya menjadi presiden negarawan yang pernah memberikan kontribusi bagi

negeri dengan caranya masing-masing dan selanjutnya estafet kepemimpinan akan dipegang oleh Joko Widodo.

### **Berbasis Agribisnis Kerakyatan**

Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam visi misinya menuliskan sejumlah permasalahan yang ada di Indonesia, namun ada tiga masalah utama yang saya anggap penting dan mendesak untuk diselesaikan, yaitu pembangunan manusia, kedaulatan energi dan kedaulatan pangan. Pemecahan tiga masalah itu merupakan tiga langkah strategis awal untuk membuka jalan bagi Indonesia untuk menuju kemandirian ekonomi. Dalam program yang akan dijalankan pasangan Jokowi-JK salah satunya akan membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui beberapa cara.

Pertama, melakukan pembatasan impor pangan melalui pemberantasan mafia impor, pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan produk dalam negeri. Munculnya mafia impor membuat rantai pemasaran semakin panjang dalam pertanian. Pemerintah dan pengusaha juga harus mengembangkan pengolahan produk dalam negeri yang memiliki nilai jual tinggi dalam ekspor produk pertanian.

Diperlukan kesadaran dan bantuan pemerintah dalam penggunaan teknologi tepat guna yang akan meningkatkan kualitas produk ekspor pertanian. Mengingat di tahun 2015 akan menghadapi Asean Economic Community (AEC) dimana persaingan antarnegara di ASEAN akan semakin ketat. Butuh persiapan yang optimal untuk menghadapi AEC yang tinggal beberapa bulan lagi.

Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan regenerasi petani melalui perencanaan 1.000 desa berdaulat benih hingga 2019. Peningkatan kemampuan petani dan hubungan baik antar petani, organisasi dan pemerintah, pembangunan sarana prasarana serta kelembagaan yang merata. Peningkatan pembangunan pertanian dan aktivitas ekonomi pedesaan dengan menambah investasi dan rerata umur petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan semakin muda.

Menanggulangi kemiskinan adalah tugas berat yang diemban seorang pemimpin bangsa. Ia harus mampu menggerakkan seluruh potensi bangsa untuk mengatasinya. Ketiga, implementasi reforma agraria melalui akses dan *asset reform*, yaitu pendistribusian aset terhadap petani dengan pendistribusian hak atas tanah dan menambah luas kepemilikan lahan pertanian, serta pembukaan 1 juta hektare lahan kering. Ketika hal itu benar-benar dilakukan oleh pemerintah tahun 2014-2019, ini sungguh luar biasa. Namun melihat kondisi yang ada di lapangan, sanggupkah pemerintah menyediakan lahan begitu banyak untuk petani gurem yang ada di Indonesia?

Saya melihat realita lahan pertanian di desa saya, dimana kepemilikan lahan pertanian sangat kecil. Ketika pemerintah akan menambah luasnya dari 0,3 ha menjadi 2 ha per KK tani, lalu tanah mana yang akan diberikan kepada desa saya? Sementara semua lahan pertanian di desa sudah menjadi aset kepemilikan masing-masing petani.

Untuk membuka 1 juta lahan kering pastinya akan menelan banyak biaya penunjang sarana dan prasarana. Perlu adanya banyak bendungan dan saluran irigasi yang memadai serta penggunaan pupuk organik untuk menunjang kesuburan tanah. Seyogyanya, ketika akan membuka 1 juta lahan baru untuk pertanian, jangan menghalalkan segala cara termasuk alih fungsi hutan untuk lahan pertanian karena dampak buruknya sudah pasti sementara dampak baiknya belum tentu.

Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan Koperasi. Pembangunan tersebut semoga bukan hanya wacana untuk menyenangkan hati rakyat saat kampanye saja. Banyak petani yang mengalami kesulitan mendapatkan akses ke bank untuk mendapatkan modal. Bank khusus pertanian bisa dijadikan alternatif untuk memberikan kemudahan untuk petani.

Kedaulatan pangan bukan hanya sebuah janji untuk negeri tapi pembuktian untuk bangsa ini. Pada momentum 16 Oktober 2014 sebagai Hari Pangan Sedunia, semoga pemerintah dapat membuat gebrakan baru untuk pangan Indonesia. Mengutip kata-kata Tantowi Yahya, "Lebih baik makan gaplek tapi merdeka dibanding

makan biskuit tapi tidak merdeka.” Kalimat itu begitu mendalam bagi saya, karena negara ini seperti terjajah oleh luar negeri dengan dijejali impor yang berkepanjangan. Gerakan pangan lokal harus digalakkan lagi. Masyarakat harus bangga untuk mengkonsumsi pangan lokal daerah masing-masing.

Negeri ini kaya dengan keberagamannya. Bukan pangan yang sama membuat kita bersatu, namun jiwa dan rasa cinta kita terhadap Indonesia yang menyatukan perbedaan kita. Bangga menjadi Indonesia, cintai produk lokal bangsa![]

# BANK PETANI DAN PUPUK MURAH

*Ibrahim Wahid*

**D**alam kehidupan, banyak hal yang saling berkaitan, seperti tanaman dan manusia. Agar tumbuh sehat dan kuat, manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup, sehat dan berimbang. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya, manusia diganggu oleh bakteri, virus dan jamur.

Masyarakat yang berada di kawasan kota tentu akan mudah mendapatkan makanan yang bergizi, tapi di kawasan pedesaan mereka kesulitan mendapatkan makanan yang bergizi serta air yang bersih. Ini perlu diperhatikan, karena semua sumber yang ada di setiap desa berbeda.

Jika itu yang terjadi pada manusia, tanaman pun membutuhkan hal yang sama, terlebih ia adalah tanaman budidaya. Sama halnya dengan manusia tanaman akan tumbuh dan menghasilkan buah yang sehat, jika kebutuhan pokoknya terpenuhi. Kebutuhan pokok tanaman ini adalah pupuk. Semua orang tahu jika pupuk sangat dibutuhkan oleh para petani. Dengan tiadanya pupuk tanaman tidak akan berkembang dengan baik, dampaknya petani pun akan rugi.

Melihat visi-misi presiden terpilih, Jokowi dalam bidang pertanian beberapa di antaranya sangat menarik, yaitu (1) pendirian Bank Petani/Terminal Agro, (2) menyejahterakan kehidupan petani, dan (3) mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.

Andai benar terwujud, berdirinya bank petani akan memudahkan para petani untuk memenuhi kebutuhan dalam

berkebun. Para petani kecil yang kesulitan modal dapat bertani dengan lancar. Penjualan hasil tani dapat dilakukan di bank petani. Harga jual sehat, petani desa dapat terbebas dari tengkulak yang berkeliaran, petani di tiap desa pun akan sejahtera.

Kehidupan para petani yang memprihatinkan akan berkurang, terkhusus petani kecil. Harapan pada bank petani ini sangat besar untuk menyejahterakan petani, tempat simpan pinjam dan juga jual beli. Petani tidak akan kesulitan menjual hasil tani mereka. Selama ini, kebanyakan petani kesulitan menjual hasil tani dan selalu ada tengkulak yang datang menawarkan harga yang rendah. Karena petani sulit memasarkan, terpaksa mereka menjual kepada tengkulak dengan harga jauh di bawah standar.

Harapannya, bank petani ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan persyaratan administrasi yang tidak merepotkan, memberatkan dan berbelit-belit. Jika memang ingin membantu, mudahkanlah dalam proses pelaksanaannya agar para petani antusias memanfaatkan bank petani, jika tidak, justru akan terjadi antipati.

Selain itu, melihat program Jokowi untuk menjaga tersedianya pupuk, yang paling penting adalah melaksanakan pengawasan yang ketat dan benar-benar orang yang anti suap. Selama ini, meski dilakukan pengawasan, tetap saja pelaku pengawasan menjadi mafia dalam aliran pupuk bersubsidi ini untuk mengisi kantong pribadi.

Untuk itu, wahai presiden terpilih, besar harapan warga dalam ketersediaan pupuk murah ini, jangan sampai masyarakat yang sangat semangat dalam bertani berkurang dan menjadi tidak mandiri. Mereka yang sangat bersemangat dalam usaha sendiri, gara-gara sulitnya pupuk, menjadi pekerja di perusahaan. Lebih menyedihkan lagi mereka menjadi pekerja di perusahaan asing di negara sendiri. Jangan biarkan hal ini terjadi secara permanen.

Problem pupuk harus lebih diutamakan, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat. Andai semua program dari Jokowi terlaksana, khususnya dalam bidang pertanian, maka kedaulatan pangan akan tercapai. Ekonomi masyarakat akan semakin baik, karena sumber kehidupan letaknya pada sektor pertanian. Jika para petani menderita, itulah gambaran masyarakat kecil yang ada di

Indonesia. Sebaliknya jika petani Indonesia sejahtera, masyarakat pun terbilang makmur.

Program lain untuk pertanian adalah menyediakan 1 juta hektar lahan pertanian baru di luar Jawa. Tentu saja sasaran utama adalah daerah perbatasan. Mereka kekurangan lahan dalam bertani. Tapi jika mencetak lahan saja tanpa ada airnya itu juga percuma.

Saya mendengar saat debat kandidat di televisi, Jokowi-JK mengatakan, “Tidak ada guna mencetak sawah tanpa ada airnya dulu. Tapi sediakan dulu airnya baru cetak lahannya.” Bisa jadi ini hasil dari blusukan Jokowi ke daerah-daerah tertinggal.

Salah satu warga Desa Pengadang, Pak Toyus (60) mengatakan, “Pemerintah memang telah memberikan lahan untuk bertani terutama mencetak sawah, tetapi tidak ada sumber air untuk bertani. Yang sangat menyedihkan lagi para petani hanya bisa menerima apa adanya tanpa mengomentari. Penyuluh di sini pun sangat kurang. Minat warga untuk bertani semakin berkurang.”

Melihat keadaan daerah tertinggal, mereka membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Menyiapkan SDM yang berkualitas memang butuh waktu, tapi ini akan menghasilkan dan berkelanjutan bagi setiap daerah. Jika ingin daerah maju memang harus berinvestasi dalam hal SDM.

Saat SDM telah ada dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan daerah, masalah selanjutnya terletak pada mental SDM-nya. Jika mental belum bisa diperbaiki, SDM memiliki kualitas tapi mental ingin kaya sendiri, tetap saja sulit untuk memajukan daerah.

Pemerintah baru yang mengusung Revolusi Mental, diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah masyarakat. Jangan sampai untuk memberantas mafia-mafia yang ada di Indonesia harus dibunuh dahulu sampai keturunan paling kecil, baru perbaikan akan terjadi pada generasi baru yang diciptakan. Benar, mental Indonesia harus direvolusi mengingat keadaan bangsa yang begitu memprihatinkan.

Jika ingin menjadi negara yang makmur dan sehat, semuanya harus berimbang. Mulai dari pertanian, kesehatan, ekonomi dan bidang lainnya. Negara yang berdaulat dan mandiri akan tercapai,

layaknya tubuh manusia yang harus memenuhi gizi seimbang bagi kesehatan tubuhnya untuk menunjang aktivitas kehidupan.[]

# NASIB PETANI DI BALIK PESTA DEMOKRASI

*Zulaika*

Beberapa bulan terakhir, Indonesia disibukkan dengan pesta demokrasi yang memasuki fase penuntasan. Menariknya, kali ini hanya ada dua pasang calon, tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Layaknya sebuah pertandingan, akan ada yang kalah dan ada yang menang. Namun esensinya, apakah yang menang adalah menang dan yang kalah adalah kalah, jika dilihat dari proses pertandingan tersebut. Hakim MK sepakat memutuskan bahawa presiden terpilih adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah yang sangat rumit.

Mentari pagi pasca pesta demokrasi kembali mengurai semburat cahaya yang menggelora, seolah tidak terjadi apa-apa di negeri Indonesia ini. Tetap tersenyum apapun kondisinya, kembali kepada kondisi semula, kota tetap ramai oleh para pencari nafkah, ibu-ibu tetap ke pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan anak-anak mendatangi sekolah dengan harapan masa depan yang lebih cerah. Petani sang pejuang kedaulatan pangan di Indonesia kembali menyapa sang mentari. Bermain dengan tanah dan merawat tanamannya dengan penuh cinta.

Namun kita perlu melihat dan mengawal nasib bangsa ini ke depan hingga sampai pada kata sejahtera. Janji mesra yang dilontarkan akan menjadi perhatian utama masyarakat setelah kemenangannya yang melewati berbagai kontroversi. Kita tunggu

saja bagaimana presiden mulai bekerja merealisasikan janji-janjinya. Hal ini tentu harus sesuai dengan isi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terlebih lagi terkait jalannya suatu pemerintahan maka rakyat berhak mengawal sampai janji-janji itu terealisasi.

Sebagai negara agraris, sistem kebijakan pertanian sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Satu keputusan terkait kebijakan pertanian akan menentukan nasib 40% masyarakat Indonesia yang notabene bekerja di sektor pertanian. Visi yang terekam dari Jokowi ini adalah, "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Misinya tercermin pada sistem pertanian kerakyatan yang menjamin hak kesejahteraan petani. Bukan pada para pemilik modal atau sang pemesan kekuasaan dan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Dalam desain pertanian masa depan yang diusung oleh Jokowi-JK sedikit banyak telah tertuang dalam visi-misi yang telah dirumuskan yaitu kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan melalui hal berikut.

Pertama, penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap 'mafia' impor yang sekedar mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan pangan nasional. Pengembangan ekspor pertanian berbasis pengolahan pertanian dalam negeri

Kedua, penanggulangan kemiskinan pertanian dan dukungan re-generasi petani melalui; a) pencanangan 1000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019; b) peningkatan kemampuan petani, organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama melibatkan aktif perempuan petani/ pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan; c) pembangunan irigasi, bendungan, sarana jalan dan transportasi, serta pasar dan kelembagaan pasar secara merata. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak terhadap 3 juta ha pertanian dan 25 bendungan hingga tahun 2019; d) peningkatan pembangaunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 25% tahun dan merata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda;

Ketiga, komitmen untuk implementasi reforma agrarian melalui akses dan *asset reform* perindustrian, aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; a) menyerahkan lahan sebesar 9 juta ha; b) meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2 hektar per KK tani, dan pembukaan 1 juta lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

Keempat, pembangunan agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM dan koperasi. Meningkatkan jenjang pendidikan anak-anak petani sebagai pewaris langsung, memfasilitasi petani untuk menjadi petani kreatif.

Pembangunan bidang ekonomi mendapat prioritas utama dalam era Soeharto. Pertanian merupakan salah satu unsur pembangunan pekonomi yang sangat krusial di Indonesia. Bidang pertanian yang mayoritas dilaksanakan di daerah pedesaan, cenderung menyangkut kepentingan kebanyakan lapisan masyarakat kalangan bawah.

Kami ingin pemerintah kali ini memperhatikan sistem pertanian. Carut marut dunia pertanian ini telah merenggut hampir 40% masyarakat negeri ini. Ketidakadilan terus menggerus petani tanpa pandang bulu. Kami ingin pembangunan pertanian terus diusahakan. Sektor pertanian menjadi sektor utama kebangkitan ekonomi di Indonesia. Pembangunan pertanian yang ingin kami usulkan meliputi pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan.

Pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia banyak mengadopsi pemikirannya AT Moshier (1965), yakni keberhasilan pembangunan pertanian perlu syarat-syarat mutlak dan sarana pelancar. Syarat mutlak itu diantaranya adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani, teknologi yang senantiasa berkembang, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal, adanya perangsang produksi bagi petani, dan tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Adapun sarana pelancar meliputi pendidikan pembangunan, kredit produksi, kegiatan gotong royong petani, perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Keberhasilan pembangunan pertanian di era Soeharto didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kegiatan penyuluhan pertanian begitu dominannya dengan mengaktifkan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang membimbing berbagai kelompok-kelompok tani, maupun media massa, baik koran, radio, maupun televisi.

Evaluasi dari masalah-masalah pertanian di Indonesia saat ini di antaranya masalah urusan pangan dan kebutuhan pokok yang merupakan prioritas paling utama yang harus disediakan. *Pertama*, mekanisme pasar yang merupakan saran dari lembaga resmi dunia merupakan jebakan yang menyesatkan, karena negara yang katanya berbasis kepada pasar bebas masih melindungi sektor pertanian, termasuk pangan dan kebutuhan pokok dengan kebijakan subsidi dan proteksinya.

*Kedua*, pembangunan industri sudah seharusnya memakai sumber daya lokal, termasuk pertanian di dalamnya. Agroindustri pedesaan yang berbasis kerakyatan merupakan pilihan utama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

*Ketiga*, ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan lahan memerlukan kebijakan penataan lahan (*land reform*). Kebijakan itu termasuk di dalamnya menyangkut penetapan lahan abadi untuk pertanian, mengikutsertakan pemilik lahan dalam saham pembangunan suatu industri, maupun kebijakan penataan luas lahan lainnya.

*Keempat*, struktur pasar bidang pertanian yang bukan persaingan sempurna perlu penataan dengan peraturan yang ketat. Penegakan hukum untuk perilaku yang mengarah kepada persaingan sehat dan pemberantasan perburuan rante ekonomi merupakan hal yang mutlak dilakukan.

*Kelima*, pembangunan sarana dan prasarana seperti penyediaan irigasi, jalan, pasar, pupuk, perkreditan, dan penyuluhan, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kediaan dana untuk melakukan penelitian dalam bidang pertanian harus disediakan secara memadai.

Ketika janji manis terlontar, tidak boleh berhenti hanya di atas kertas. Di bahu Anda ada amanat 250 juta rakyat Indonesia.

Kita tunggu saja realitas janji-janji terhadap pertanian negeri ini masihkah adil dengan para misionaris modal yang punya sejuta rayuan untuk para pelaku pasar di negeri ini. Masihkah rakyat menjadi korban janji para pemimpin. Jangan lagi ada konversi lahan pertanian untuk industri.

Masihkah penyunatan subsidi pupuk bagi para petani? Masihkah praktik busuk para tengkulak yang terus menerus memaras keringat petani? Masihkah impor besar-besaran saat panen raya tiba, yang mencekik leher petani? Harga menduduki kursi kekuasaan nomor satu di negeri ini harus dibayar dengan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa tapi, tanpa basa basi.  
[]

# EKONOMI KERAKYATAN NEGERI PARADOKSIAL

*Dadan Hudaunhah*

**B**aru beberapa bulan kemarin, saya merasakan panasnya suasana rivalitas dalam eskalasi pilpres 2014. Wajar saja muncul perasaan itu, karena pilpres kemarin hanya diikuti dua pasang capres-cawapres. Indonesia seperti terkutubkan menjadi dua kelompok besar, satu kelompok mendukung pasangan Prabowo-Hatta dan kelompok lainnya mendukung Jokowi-JK. Tentu, ada kelompok golput, hanya keberadaannya tidak terlalu memberikan warna berbeda.

Beruntungnya, rivalitas ini tidak menimbulkan konfrontasi menjurus anarki di akar rumput pendukung. Barangkali ini salah satu indikator perilaku demokrasi di Indonesia semakin dewasa dan matang dalam berdemokrasi. Semoga saja kondisi tenang, aman, dan damai selama perhelatan pilpres 2014, bukan karena rakyat lebih disibukkan dengan mencari sesuap nasi untuk perutnya sendiri, dan lupa bahwa di saat yang bersamaan sedang berlangsung penulisan takdir perutnya 5 tahun ke depan.

Pada dasarnya, kita sepakat bahwa segala usaha untuk memilih pemimpin negeri didorong oleh harapan akan membaiknya kondisi negeri. Bukan maksud saya menyatakan saat ini Indonesia sedang terpuruk. Sebenarnya, tidak sedikit prestasi-prestasi yang ditorehkan Indonesia di kancah kompetisi dunia. Hanya, saya terinspirasi hadits yang menyatakan, ketika kondisi hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka itulah kecelakaan. Jika kondisi saat ini sama dengan hari kemarin maka itu kerugian, dan jika kondisi saat ini lebih baik dari hari kemarin, maka itulah keberuntungan.

Apa pun kondisi Indonesia saat ini, kita berharap yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Dalam konteks pemilihan presiden, berarti kita berharap presiden yang terpilih bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik, maju, dan sejahtera. Kita semua berharap paradoks yang selama ini terpampang di depan mata, bisa perlahan terhapus tergantikan oleh kondisi yang lebih ideal.

### **Paradoks Negara Kaya Rakyat Miskin**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, 'paradoks' adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya memang mengandung kebenaran. Misal ketika kita mendengar sebuah pepatah yang berbunyi, "tikus mati di lumbung padi." Kalimat ini adalah kalimat paradoksial karena pendapat umum akan meyakini bahwa mustahil tikus mati di lumbung padi, karena di lumbung padi seharusnya tikus bisa memperoleh makanan dengan mudah. Pepatah itu malah menggambarkan hal sebaliknya, maka inilah paradoks.

Banyak sekali contoh paradoks terpampang di depan mata kita di Indonesia ini. Idealnya, ketika ada sebuah paradoks di depan mata dan berlangsung dalam waktu yang lama, orang waras segera memperbaiki paradoks itu dan merubahnya menuju kondisi ideal. Faktanya, banyak paradoks di Indonesia yang sejak lama terjadi tetapi usaha memperbaikinya terlupakan.

Contoh yang paling mudah paradoks di negeri ini adalah kenyataan bahwa masih banyaknya orang miskin padahal mereka tinggal di Indonesia yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Data BPS 2012 menunjukkan, jumlah kemiskinan di Indonesia mencapai angka 28,59 juta jiwa atau sebesar 11,66 % dari total penduduk Indonesia. Walaupun angka ini menunjukkan tren menurun dari tahun sebelumnya tetapi masih jauh di atas jumlah kemiskinan di negara tetangga, misalnya Malaysia yang orang miskinnya hanya 1,9 % (Departement of Statistics Malaysia) atau sekitar 570.000 orang saja.

Di lain pihak, di tahun yang sama Indonesia berhasil memperoleh emas dari buminya sebanyak 69.291 kilogram dan

466 juta ton batu bara (BPS 2012). Jumlah ini setara dengan Rp 43 triliun dan Rp 373 triliun sehingga totalnya Rp 416 triliun. Andai saja pendapatan ini didistribusikan merata kepada penduduk miskin di Indonesia maka setiap orang miskin akan mendapatkan kurang lebih 14 juta rupiah per tahun. Ini jumlah uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu orang penduduk dan mengangkatnya dari jurang kemiskinan. Tentu saja pendistribusian pendapatan ini tidak sesederhana hitungan di atas, tetapi dari hal ini, saya rasa sudah cukup untuk memberikan gambaran bahwa paradoks tentang “negara kaya dengan rakyat yang miskin” memang terjadi di negeri ini.

Konvensi Montevideo pada tahun 1933 mengamanatkan bahwa salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu negara adalah adanya rakyat dan kedaulatannya. Artinya eksistensi rakyat dalam suatu negara adalah penentu ada atau tidaknya suatu negara. Apalagi Indonesia adalah negara demokrasi yang memiliki pandangan bahwa rakyat adalah satu-satunya pemegang kedaulatan negara. Seharusnya jika memang seperti ini semua kekayaan yang diklaim oleh Indonesia adalah milik rakyat dan segala aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kekayaan alam itu memberikan benefit bagi semua rakyat Indonesia.

Mari kita ibaratkan negara ini sebagai sebuah rumah termasuk halaman, ruang tidur, ruang tengah, dan dapur. Rakyat kita ibaratkan keluarga pemilik rumah. Keluarga pemilik rumah misalnya ada 5 orang: ayah, ibu, dan 3 orang anak. Ketika di halaman rumah itu ada berbagai macam tanaman palawija, di ruang tengah itu ada televisi, dan di ruang tidur ada tempat tidur seharusnya semua anggota rumah tersebut bisa memakai segala fasilitas yang ada di rumah itu dengan gratis. Ketika fasilitas-fasilitas itu dirasa lebih dari cukup, pemilik rumah boleh saja menyewakan fasilitas itu kepada pihak lain dan semua anggota keluarga bisa menikmati tambahan pendapatan dari sana.

Sebuah paradoks akan terjadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang diminta bayaran ketika tidur di ruang tidurnya sendiri. Harus membeli tanaman palawija yang dia tanam dan tumbuh di halaman rumahnya, ataupun ditagih uang sewa televisi karena dia menonton televisi di rumahnya sendiri. Di lain pihak,

ada anggota keluarga yang menguasai semua fasilitas di rumah tersebut. Paradoks seperti inilah yang juga terjadi di Indonesia. Kekayaan alam yang ada di negeri ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil, sedangkan sebagian besar yang lain masih terpuruk dalam kemiskinan.

Paradoks negara kaya-rakyat miskin di Indonesia terjadi karena sistem ekonomi Indonesia yang dipakai hanya melibatkan sekelompok kecil rakyat. Industri-industri yang tumbuh hanya dikuasai oleh beberapa orang, bahkan pemiliknya bisa jadi bukan Warga Negara Indonesia (WNI). Dilihat dari teori pertumbuhan memang ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang baik. Hanya saja, apa artinya pertumbuhan ini jika ternyata yang menikmati hanya beberapa orang saja

Tentu saja dengan adanya industri, lapangan kerja akan semakin banyak dan pengangguran bisa ditekan. Tetapi apakah sebagai bagian dari negara ini, rakyat hanya mendapatkan upah saja dari aktivitas ekonomi di negerinya sendiri. Bukankah kekayaan alam ini milik semua rakyat tanpa membedakan dia kaum elit atau kaum jelata? Ketika kekayaan itu diperjualbelikan dan mendatangkan keuntungan, mengapa sebagian kecil rakyat saja yang mendapatkan bagian keuntungannya sedangkan yang lain hanya mendapatkan upah dari aktivitas ekonomi?

Paradoks negara kaya-rakyat miskin ini sudah terjadi lama bahkan sejak awal berdirinya bangsa. Saya berani berkata karena kenyataannya dari awal kemerdekaan sampai sekarang tingkat kemiskinan masih tinggi. Bahkan, paradoks negara kaya-rakyat miskin ini sudah menjadi paradoks yang paradoks karena pembiaran terhadap paradoks ini sudah sangat keterlaluan padahal terpampang di depan mata kita. Atau mungkin karena paradoks sudah terlalu lama ada dan mengakar dalam kehidupan Indonesia sebagai bangsa dan negara, para pengambil keputusan kebingungan mau memulai darimana usaha perbaikannya.

Harapan rakyat Indonesia kepada pemimpin negeri ini sangat besar. Pilpres 2014 sudah lewat dan harapan rakyat sekarang tertuju kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Apalagi pasangan ini memang menjanjikan visi dan misi penghilangan paradoks negara kaya-rakyat miskin ini.

## Ekonomi Kerakyatan

*File* visi dan misi dua pasangan calon presiden 2014 masih tersimpan dengan rapi dalam *hard disk* laptop saya. Dulu, ketika pencoblosan presiden belum dilaksanakan saya membuka kedua *file* visi dan misi untuk membandingkan manak yang lebih dibutuhkan Indonesia saat ini. Saat ini saya fokus pada satu *file* saja milik Jokowi-JK dan membandingkannya dengan kerja-kerja pasangan ini di lapangan. Apakah kerja-kerja ke depan sesuai dengan yang dijanjikan ketika kampanye? Adakah visi dan misi yang terlewat dalam pelaksanaannya? Jika ada yang terlewat maka tugas kita sebagai rakyat untuk menagih dan mengingatkannya.

Sistem ekonomi kerakyatan adalah lawan yang tepat untuk paradoks negara kaya-rakyat miskin. Paradoks perlahan-lahan terhapuskan jika sistem ekonomi kerakyatan benar-benar diterapkan. Menurut ahli ekonomi kerakyatan, Prof. Mubyarto dari UGM dan Adi Sasono, mantan Menteri UMKM masa BJ Habibie, ekonomi kerakyatan berarti upaya memberdayakan (kelompok/satuan) ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk sekelompok masyarakat banyak (rakyat). Ekonomi kerakyatan di sini bukan hanya difahami sebagai ekonomi yang merakyat tetapi lebih dari itu, Pancasila menjelaskan bahwa kerakyatan yang dimaksud adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam arti lain ekonomi kerakyatan seharusnya difahami sebagai ekonomi demokratis yang semua aktivitasnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebenarnya konsep negara ini tidak asing lagi dengan ekonomi kerakyatan atau ekonomi demokratis, bahkan pengertiannya tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting

bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketika semua aktivitas ekonomi dijalankan oleh sebanyak-banyaknya rakyat dan keuntungannya juga kembali kepada sebanyak-banyaknya rakyat, maka paradoks negara kaya-rakyat miskin akan terhapus. Kepemilikan rakyat terhadap aset-aset negara tidak hanya sebatas klaim kosong. Sehingga rakyat tidak hanya mendapatkan upah dari jerih payah tetapi juga mendapatkan deviden dari aset-aset negara yang diperdagangkan di pasar internaional.

Hanya, kita tahu konsep hanya sekedar konsep jika hanya ada dalam tulisan tanpa ada implementasi berkelanjutan. Sejak awal, founding father bangsa sudah tahu bahwa sistem ekonomi yang tepat untuk bangsa ini adalah sistem ekonomi kerakyatan, bukan kapitalis, komunis, neolib, atau sistem lainnya. Semoga pemimpin Indonesia saat ini ingat dengan petuah dan ide-ide pendahulu. Konsep ekonomi kerakyatan harus diikuti dengan langkah-langkah nyata berikut.

1. Optimalisasi koperasi di Indonesia.
2. Kepemilikan saham-saham BUMN oleh ceruk-ceruk rakyat misal: serikat buruh, koperasi.
3. Pembatasan kepemilikan tanah.
4. Peningkatan kualitas SDM sehingga mampu berisnisiatif untuk menggabungkan dirinya ke dalam kegiatan-kegiatan ekonomi Indonesia, artinya berwirausaha.
5. Menciptakan UKM-UKM baru dan keberpihakan kepadanya.

Tertulis jelas dalam visi dan misi Jokowi-JK, “terwujudnya Indonesia yang berdulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Saya sangat tertarik kepada kata “mandiri” dan “gotong royong”. Kata “mandiri” mencerminkan keinginan untuk

membangun sistem ekonomi yang pelaku-pelakunya adalah rakyat kita sendiri. Ketika ada investasi dari luar, yang menggunakan dan meraup keuntungan adalah rakyat sendiri bukan warga asing.

Selanjutnya kata “gotong royong” saya fahami sebagai keinginan kuat untuk membangun sistem ekonomi yang melibatkan sebanyak-banyaknya rakyat sehingga keuntungannya pun terdistribusi dengan baik kepada rakyat. Jika kerja-kerja presiden dan wakil presiden terpilih konsisten dan konsekuen dengan visi misi di awal, tidak menutup kemungkinan paradoks yang sejak lama menjadi virus mematikan bagi Indonesia secara perlahan-lahan terhapuskan.

Lebih detailnya lagi, Jokowi-JK menjanjikan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik seperti yang tertulis dalam 9 agenda prioritasnya. Kata “kemandirian” kembali berulang bahkan ditambah dengan kata “ekonomi domestik.” Semoga ini merupakan penegasan bahwa kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Akhirnya, saya hanya bisa mengingatkan: kami hanya perlu bukti bukan sekedar janji.

# TIADA JERA PERJUANGAN UNTUK BERDAULAT

*Mohammad Ivan Riansa*

**B**agi saya, kalimat tiada kata jera dalam perjuangan menyimpan banyak makna. Kita sadari mahasiswa adalah agent of change, iron stock dan *moral force*. Posisi sebagai mahasiswa sangat strategis karena dalam kelas masyarakat, kita berada di tengah, sebagai rakyat terdidik. Kita harus menjamin pemerintah menjalankan fungsi menyejahterakan rakyat seadil-adilnya. Sudah seharusnya, mahasiswa tidak menjadi status biasa yang hanya bisa membanggakan nama besar kampus, bukan dari apa yang kita lakukan bagi kampus dan rakyat.

Tahun 2014 begitu berharga bagi saya, karena saya diamanahi oleh warga UI menjadi Ketua BEM UI 2014. Sebuah amanah yang besar, karena tahun ini begitu substansial bagi mahasiswa. Seperti saya jelaskan sebelumnya, mahasiswa memiliki tanggungjawab besar karena memiliki status 'maha' di depan kata 'siswa'. Seperti kita ketahui, 2014 ini terjadi pergantian kepemimpinan nasional di Republik Indonesia pada tataran legislatif dan eksekutif. Tentunya, penting bagi mahasiswa memiliki peran dalam pergantian kepemimpinan tersebut.

Sejarah mahasiswa memiliki peran besar yakni menumbangkan rezim bernama Orde Baru. Jika kita lihat, tahun 2014 ini momentumnya sama yakni ada pergantian rezim, namun menggunakan metode berbeda. Pasca Orde Baru runtuh Indonesia memasuki era Reformasi yang menjamin kebebasan setiap individu untuk berpendapat dan berkumpul. Tidak hanya itu, kita juga secara langsung dapat memilih pemimpin di tataran eksekutif

dan legislatif. Maka, mahasiswa memiliki peran untuk mengawal proses demokrasi agar tidak keluar dari jalurnya. Pengawasan saja tidak cukup, karena sebagai mahasiswa harus menggunakan ilmu dan daya pikir untuk memberikan ide membangun Indonesia. Perlu kita pahami pemimpin tidak bisa sendiri, harus bergerak bersama rakyat untuk membangun Indonesia.

Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan sebuah gagasan seorang negarawan muda dalam bidang ketahanan pangan dan energi yang harus menjadi perhatian bangsa ini 5 tahun mendatang. Kita memahami bahwa energi adalah kebutuhan utama umat manusia untuk bisa menjalankan segala macam aktivitas.

Negarawan muda dalam kacamata saya adalah ia yang tergerakkan hatinya untuk melawan kesewenang-wenangan di hadapan kezaliman, ini sesuai Pembukaan UUD 1945. Sekarang Indonesia butuh pemimpin yang memiliki visi serta peduli terhadap rakyatnya. Perlu kita refleksi diri sendiri, sudah memberikan apa bagi Indonesia kita?. Jangan sampai kita hanya menuntut kepada pemerintah namun lupa membangun dan menyejahterakan bangsa. Sejatinya, kunci membangun bangsa tidak hanya di pemimpin saja, namun ada di dalam diri kita masing-masing, apakah kita ingin bergerak atau tergerakkan.

### **Bersiap Hadapi Pasar Bebas**

Indonesia adalah negara majemuk. Keberagaman Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Ini patut kita syukuri sebagai berkah dari Allah SWT. Atas keberagaman itulah sosok pemimpin Indonesia harus sesuai dengan jati diri bangsa ini, yakni falsafah Pancasila. Konsepsi paska reformasi mengedepankan sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Maka, pemimpin bangsa baik di ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memahami dan sesuai dengan prinsip Pancasila dan demokrasi.

Dewasa ini tantangan global menjadi hal penting yang harus diperhitungkan. Pada akhir 2015, Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, diterapkan pasar bebas yang harapannya dapat meningkatkan perkonomian Indonesia. Hal ini

harus menjadi fokus pemimpin bangsa, pada pundak merekalah yang akan membawa rakyat menuju kesejahteraan atau kehancuran. Apalagi kita lihat persaingan bebas ini bisa menjadi bumerang. Apabila pemerintah sejak sekarang tidak mulai meningkatkan daya saing masyarakat agar bisa bertahan di pasar ASEAN. Karena dampaknya apakah Asean Economic Community (AEC) ini dapat mewujudkan cita-cita bangsa ini yang terdapat di Pembukaan UUD 1945 atau malah menciptakan ketimpangan sosial yang berlawanan dengan sila ke-5.

Pemimpin dari, oleh, untuk rakyat ialah pemimpin yang mengedepankan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pribadi. Dia mau berkorban, memiliki integritas serta istiqamah memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Perlu dari sekarang, para negarawan muda memiliki visi untuk menjadi pemimpin yang hadir bagi rakyat, dipilih dari rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan membangun bangsa 10 hingga 20 tahun mendatang.

### **Analisis Visi-Misi**

Sekarang, mari kita kritisi visi dan misi Prabowo Subianto-M. Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Visi Prabowo-Hatta Rajasa adalah, “Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat.” Dengan penguatan misi pada: 1) Perwujudan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. 2) Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri, serta 3) Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudi luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif, dan terampil.

Sedangkan visi, Jokowi-Kalla, adalah, “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Dengan Misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu jaga kedaulatan wilayah dan kemandirian ekonomi. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum. 3) Mewujudkan

politik luar negeri bebas-aktif. 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia. 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Jika kita lihat visi misi kedua calon tersebut cukup komprehensif. Mereka pernah berkecimpung pada pemerintahan nasional, Hatta sebagai Menteri Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI 2004-2009. Secara pengalaman memimpin level nasional keduanya memiliki pengetahuan yang bisa saling melengkapi para calon presiden. Harapannya ini bisa menjadi modal utama untuk yang terpilih bisa langsung memberikan kerja nyata.

Dapat kita lihat, visi misi calon presiden dan wakil presiden tersebut ingin mewujudkan amanah Pancasila dan UUD 1945 demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jika kita mengambil fokus bahasan untuk ketahanan energi dan pangan dari visi misi tersebut terlihat jelas diferensiasi keduanya. Pasangan Prabowo-Hatta menekankan untuk mengembalikan pengelolaan energi dan pangan ke Pancasila dan UUD 1945. Bagi penulis, pasangan nomer 1 berfokus untuk mewujudkan sila ke-5 Pancasila dan pasal 33 ayat 2 di UUD 1945 yakni, "bumi dan kekayaan alam digunakan sepenuhnya oleh kemakmuran rakyat." Sedangkan Jokowi menekankan untuk fokus mandiri secara perekonomian juga ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri.

Hal menarik di sini adalah titik tekan menjadikan Indonesia negara maritim. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih 14.000 pulau yang terbentang. Hal tersebut memperlihatkan, potensi kelautan harus kita kembangkan. Transportasi laut, jalan tol laut harus menjadi prioritas untuk memperlancar transportasi Indonesia. Tidak hanya itu, kekayaan hayati laut haruslah menjadi sebuah anugrah yang dioptimalkan bagi kepentingan rakyat. Seperti yang kita ketahui, nelayan yang melaut di Indonesia bukan dari nelayan pribumi, banyak nelayan asing yang menerobos zona ZEE untuk mengeruk kekayaan bawah laut kita. Hal ini bisa menjadi fokus untuk mengembangkan sektor perekonomian baru dengan harapan dapat menopang dan meningkatkan daya saing bangsa menghadapi AEC pada akhir 2015.

Dari sisi kedaulatan energi, kedua calon ingin mengurangi dominasi asing yang sekarang mengeruk kekayaan alam bangsa kita dengan sangat tidak wajar. Blok-blok migas kita pun sekarang sudah perlu kita tandai karena cadangan minyak kita mulai menipis. Jika Indonesia masih bertumpu pada energi fosil tanpa menyiapkan penggunaan energi alternatif seperti gas dan *solar cell*, bisa dipastikan negara kita tidak akan pernah mandiri dalam bidang energi.

Kini energi adalah masalah utama bagi kemajuan bangsa, pasalnya energi menjadi motor penggerak utama untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari terutama bidang transportasi. Jika kita lihat, salah satu yang menyebabkan Indonesia masih bergantung pada energi fosil adalah budaya konsumtif yang lebih nyaman menggunakan transportasi pribadi dibanding umum. Faktor kenyamanan yang menjadi alasan karena jika menggunakan bus kita harus berjejal di dalam dan menanti bus yang tidak pernah jelas kapan waktu kedatangannya. Lain cerita jika menggunakan transportasi pribadi yang nyaman dan bisa mengatur sendiri kapan waktu berangkat.

Hal ini harus menjadi fokus pemerintah bagaimana membuat transportasi umum lebih friendly user agar masyarakat bisa mengurangi penggunaan mobil atau motor pribadi. Dapat kita lihat, kini PT KAI telah berhasil menyulap kereta api Indonesia menjadi sangat baik. Dulu kita lihat pengguna kereta banyak di atap kereta, ketepatan waktu kereta tidak dapat dipastikan dan kenyamanan di dalamnya dulu panas. Kini itu tidak terjadi lagi, kereta sudah ditertibkan dari penumpang yang naik di atap, waktu lebih terjadwal dan penggunaan pendingin elektronik sudah dimaksimalkan. Hal ini perlu dicontoh pada sektor transportasi darat lainnya seperti bus umum, karena sekarang baru Transjakarta saja yang bisa dianggap nyaman bagi warga Jakarta meskipun kondisi armada belum memadai.

## **Indonesia Berdaulat**

Salah satu kunci bangsa agar dapat maju adalah kesejahteraan rakyatnya. Karena dengan rakyat yang sejahtera, negara dapat mengoptimalkan seluruh potensi kekayaan alamnya untuk

kemajuan negeri. Kini 69 tahun sudah usia negara ini, momentum pemilihan pemimpin bangsa juga telah usai. Tanggungjawab kita bersama adalah melupakan perbedaan ketika pemilihan presiden untuk kemudian membangun bangsa ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat.

Tata kelola energi kita harus menjadi perhatian utama pemerintah, karena dengan pengelolaan yang baik dapat membawa bangsa ini menjadi lebih makmur dan sejahtera. *National Oil Company* harus lebih diberi peran dibanding pihak swasta asing yang sekarang hampir sebagian besar menguasai sumur sumur minyak Indonesia. Pihak asing yang kontraknya sudah habis dan akan habis harus diberi persiapan untuk transisi pengalihan kepada *National Oil Company* serta yang masih lama kontraknya harus direnegosiasi. Pengoptimalan sektor energi alternatif juga harus sesegera mungkin untuk menjadi alternatif, seperti sektor gas yang mana proses konversi BBM ke BBG seperti yang diwacanakan sejak 2009 harus dipersiapkan oleh pemerintah yang akan datang.

Tidak hanya itu, Indonesia terletak pada lempeng tektonik yang mengakibatkan banyak gunung merapi yang masih aktif. Hal ini merupakan potensi energi panas bumi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah yang dapat membangun pembangkit listrik tenaga uap 10.000 Mwatt.

Ketahanan pangan juga menjadi salah satu fokus utama karena merupakan kebutuhan primer bangsa Indonesia. Pengembangan dan pengoptimalan di sektor teknologi pertanian harus menjadi concern bangsa ini ke depan. Penggunaan bibit unggul serta pestisida yang ramah lingkungan harus digalakan agar petani dapat melakukan tugasnya dengan hasil yang baik. Pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses distribusi dari desa ke kota juga harus dioptimalkan. Tidak hanya itu, ke depan UU Desa akan diimplementasikan yang mana harapannya otonomi desa dapat lebih mandiri dan dapat menopang perekonomian nasional.

Pada sektor kelautan, Indonesia harus kembali ke jati diri bangsa. Sebagai negara maritim, yang luas laut lebih dari luas daratan, pengoptimalan transportasi laut harus menjadi fokus pemerintah. Pembangunan pelabuhan dan penambahan jumlah kapal angkut harus dilakukan karena sekarang biaya transportasi

laut untuk melakukan kegiatan ekspor impor dinilai sangat mahal dibanding dengan negara tetangga kita, Singapura. Salah satu yang menyebabkan adalah infrastuktur laut kita yang masih belum memadai.

Tidak hanya itu, kita harus banyak belajar dari kehilangan Pulau Sipadan Ligitan yang diambil oleh Malaysia. Hal ini menunjukkan, banyaknya pulau yang Indonesia miliki menjadi tanggung jawab negara untuk mengurusnya dan memakmurkan pulau terdepan Indonesia. Karena ke depan akan dipertanyakan NKRI kita, jika perlahan berkurang karena pemerintah tidak peduli.

Sebuah tantangan bagi pemimpin bangsa, akankah presiden terpilih benar-benar akan merealisasikan janji, yang akan mendahulukan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi dan partai pengusungnya. Bagi penulis, juga harus belajar menjadi rakyat yang baik. Tanpa kita, pemimpin sehebat apa pun tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa rakyat yang juga hebat. Semoga Allah memberikan keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia ini.[]



# **JANJI BERKEPRIBADIAN**

# REVOLUSI BUDAYA INDONESIA

*Ahsan Ramadhan*

**G**eliat modernisasi kini masuk dalam kondisi akut. Betapa tidak? Bukan hanya etika dan norma keindonesiaan yang perlahan punah, budaya barbar pun mulai marak. Sebagai contoh, kasus sodomi anak di bawah umur yang terjadi di salah satu sekolah internasional di Jakarta adalah potret buram yang mesti menjadi perhatian dalam-dalam. Belum lagi tawuran antarpelajar di ibukota serta kriminalitas yang semakin tinggi.

Mari renungkan data ini. Kriminalitas di tahun 2013 mencapai angka 305.708 kasus. Sementara itu, dalam kasus kejahatan transnasional seperti kejahatan narkoba, kejahatan siber dan terorisme mengalami peningkatan hingga 29 persen. Selama 2013 tindak pidana transnasional yang terjadi sebanyak 34.513 kasus; naik sebesar 10,011 kasus dibandingkan tahun 2012 sebanyak 24.502 kasus (*Republika Online*, 2014).

Ini belum ditambah dengan budaya-budaya negatif yang tidak perlu diperdebatkan dan disebutkan dalam statistik. Misalnya, merokok tidak pada tempatnya, tidak memberikan tempat duduk bagi ibu hamil, mencontek saat ujian, UN yang dikoordinir untuk membeli kunci jawaban, bagi-bagi uang saat pemilu, memaki orangtua, seks bebas, pornoaksi-pornografi, dukungan pelegalan tempat prostitusi, bahkan baru-baru ini pemangku kebijakan yang seyogyanya menghakimi korupsi justru melaukan korupsi.

Hal miris ini tentu saja tidak bisa disalahkan satu atau dua orang saja. Gejala yang hampir terjadi di semua lapisan umur dan daerah Indonesia ini sangat sistemik. Solusi budaya yang diangkat dalam tulisan ini memang penting untuk dilakukan secara

berjamaah. Tidak hanya oleh pemangku kebijakan, melainkan *grass root* dalam semua elemen.

Meskipun demikian, penting dikemukakan bahwa pemimpin bangsa hari ini menjadi *center point* dalam menjawab ini. Bukan berarti mengedepankan logika bahwa *the only one* kesalahan atas semua potret ini adalah pemimpin. Paling tidak, ada tiga alasan sederhana. Pertama karena bangsa ini sedang dan akan menghadapi era baru kepemimpinan. Kedua karena perubahan paling efektif adalah logika sistem. Pepatah Inggris mengatakan, "*Politic, it's not about rule, but about system*". Ini pula yang mendasari banyak manusia berlomba mengejar kekuasaan. Sebab di sistem dan di politiklah, semua mendapat legitimasi terkuatnya.

Ketiga karena pemimpin sosok utama dalam kehidupan bernegara. Maka menjadi penting, pemimpin memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakatnya. Dalam konteks budaya, saat presiden terpilih merealisasikan janjinya, inklusif dengan semua golongan dan tidak melakukan praktik korupsi saja, sebetulnya ia sudah selesai dengan dirinya. Dalam hal ini ia sudah "berbudaya" dalam *principle value*. Dan semua hal ini tentu tak lepas dengan peran seorang bernama mahasiswa yang berelasi kuat dengan budaya. Selain pemuda adalah postur tertinggi populasi penduduk Indonesia dalam sepak terjang bernarasi apik: revolusi budaya.

Membaca sejarah mahasiswa, tak bisa dilepaskan dengan karakter asasi yang mereka miliki. Di belahan daerah Indonesia manapun, mahasiswa tampil memukau sebagai ruh pembaharu dan memainkan narasi istimewa sejarah bangsa dari waktu ke waktu. Mahasiswa sejak kemunculannya, senantiasa memberi respon terhadap problematika yang hadir di tengah masyarakat.

Tentu peristiwa 16 tahun lalu dimana jutaan manusia hiruk-pikuk membanjiri "istana rakyat" berbentuk gedung hijau setengah lingkaran, masih kita ingat. Reformasi yang kita kenal menandai lahirnya demokratisasi yang dielu-elukan oleh rakyat. Saat itu, almamaternya memang warna-warni. Tapi mereka sama, sama-sama mahasiswa yang muak dengan era panjang Orde Baru yang bergelimang darah.

Enam belas tahun lalu itu, bahkan jauh pada masa sebelumnya, mahasiswa menjadi harapan dan tumpuan bangsa, yang karenanya

mendapat tempat dalam hati rakyat Indonesia. Selain guliran Reformasi, kita juga mengenal cerita panjang penurunan Soekarno oleh mahasiswa '66, demonstrasi “kolosal” Malari '74, dan beberapa kelahiran macam Dewan Mahasiswa hingga kelompok studi mahasiswa yang menjamur di berbagai daerah.

Hal itulah yang kemudian memberangkatkan pada sebuah perenungan penting, betapa kondisi mahasiswa dan budaya yang ia pengaruhi hari ini kepada Indonesia, patut kita refleksikan dalam-dalam. Benarkah bentuk komitmen kepedulian terhadap negara dan mempertahankan tradisi intelektual mahasiswa perlahan padam? Benarkah jiwa kenegarawanan masih hadir? Pertanyaan itu wajar mengingat kondisi dominan mahasiswa hari ini berkuat pada: *study oriented*, budaya hedonisme, ruang dialektika yang melemah, hingga konflik antar-golongan.

Sebuah studi kasus, yaitu program Indonesia Mengajar yang diprakarsai oleh Anies Baswedan. Program itu mendapat apresiasi positif dari khalayak, rahim aslinya adalah dari program Prof. Koesnadi Hardjosoematri, mantan Rektor UGM yang di masa mudanya sempat menjadi Ketua Dewan Mahasiswa UGM dan mensponsori proyek pengerahan tenaga mahasiswa (PPTM), cikal bakal KKN (Kuliah Kerja Nyata) UGM sekarang.

Penulis memahami bahwa publikasi terkait bagaimana kondisi mahasiswa dan relasi kuat dengan budaya—dan kebudayaan—hari ini, mesti disuarakan dari awal. Minimal dengan hal itu akan memunculkan kesamaan perasaan, serta apa yang harus dilakukan. Apalagi agenda besar bangsa yaitu pemilihan presiden baru Indonesia baru saja kita rasakan. Itu artinya, mahasiswa tidak bisa diam dan secara moral-historis mesti terlibat dalam ini semua.

Masyarakat berharap kedaulatan budaya yang segera dicapai oleh pemerintah. Itulah yang menyebabkan janji presiden terpilih periode 2014-2019 menjadi penting. Sebagai salah satu poin, ia tidak hanya menyatukan suku bangsa di bumi Indonesia yang majemuk dan nyatanya sulit terintegrasi. Tapi juga soal bagaimana budaya dimaknai sebagai upaya memberikan bentuk terbaik pada dirinya, yang ditransfer kepada publik, dan nantinya akan mengubah setahap demi setahap budaya Indonesia kini. *Micro problem* ini yang mesti digalakkan dalam hari-hari pertama kepresidenan.

Di sisi makro, perlu segera ditangani proses integrasi wilayah konflik, dan perdamaian terkhusus di Aceh, Papua dan Maluku. Selain itu, penyelamatan produk bangsa seperti lagu daerah yang diklaim bangsa lain, pelestarian dan pengangkatan budaya bangsa, penyikapan serius RUU Kebudayaan, rekonsiliasi lintas agama, dan isu lainnya menjadi isu strategis.

Budaya yang sepertinya terjerumus dalam kubang *sub-human* diperparah dengan tidak hadirnya negara dalam masalah ini. Setiap pelanggaran tidak ditindak dengan baik. Fungsi penjagaan dan pengawasan menjadi abai, terlihat pada banyak kasus. Dalam hal ini, sebenarnya pelanggaran masyarakat tidaklah menjadi masalah besar, jika saja supremasi budaya ditegakkan. Namun yang hadir, kumandang penegakan kedaulatan budaya sampai hari ini tidak sesuai dengan yang nyatanya di masyarakat.

Akhirnya, sebagaimana telah disinggung di atas, seiring mobilitas negara yang tengah bersiap menyongsong fase baru melalui presiden baru, adalah satu keniscayaan untuk semakin mengokohkan “iklim peduli” kepada masyarakat Indonesia. Serta secara sederhana, penulis berharap ruh mahasiswa Indonesia mampu menjadi referensi gerakan bangsa ini, apalagi presiden terpilih.

Sebagai sebuah langkah kongkrit, janji-janji presiden terpilih dalam hal budaya seperti: membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; melakukan revolusi karakter bangsa; memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, mesti kita kawal.[]

# MENAGIH JANJI DARI TAPAL BATAS

*Triana Rahmawati*

*“Pendidikan adalah senjata paling mematikan, karena dengan itu Anda dapat mengubah dunia”*

—Nelson Mandela

*“Jika Anda mendidik seorang pria, maka seorang pria akan menjadi terdidik. Jika Anda mendidik seorang wanita, maka sebuah generasi akan terdidik”*

—Brigham Young

**M**ari menutup mata sejenak, tarik nafas, lalu hembuskan di tangan. Terasa ada udara hangat yang keluar kemudian perlahan hilang. Begitulah gambaran situasi Indonesia hari ini. Demi berlangsungnya sistem penyelenggaraan negara yang baik, harus ada sirkulasi layaknya udara. Sirkulasi itu terjadi di tahun ini, terjadi transisi pemangku jabatan secara besar-besaran.

Pemenang pemilu sudah ditentukan, suara rakyat telah disahkan, negarawan yang diamanahi untuk memimpin bangsa ini tinggal menunggu pengesahan, mereka adalah Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Kini saatnya menagih janji-janji yang ditebarkan. Menagih janji negarawan!

Masalah itu hadir ketika ada jarak antara *das sein* dan *das sollen* di dalam kehidupan ini. Masalah-masalah yang hadir melahirkan negarawan yang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Negarawan adalah mereka yang mendedikasikan hidup untuk kepentingan negaranya dengan mengkesampingkan kepentingan pribadinya. Mereka yang berjuang untuk mewujudkan negara ideal, negara

yang menyediakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyatnya.

Mereka rangkum semua cita-cita besarnya berbentuk visi dan misi yang mereka janjikan untuk diperjuangkan selama amanah itu dipercayakan pada pundak mereka. Janji itu muncul karena adanya ketidakpuasan hingga ketidakpercayaan dari publik kepada pemimpinnya. Sebagai rakyat yang baik, kita harus melawan lupa, kawal, tagih dan mari bersama-sama mewujudkannya untuk Indonesia.

Masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat adalah orang yang lebih dekat dengan negara tetangga ketimbang pemerintahnya sendiri. Mereka adalah masyarakat yang menempati beranda terdepan dari suatu bangsa. Bertatap muka dan bersentuhan langsung dengan Malaysia sudah menjadi keseharian. Namun sayang kepalang malang, alangkah bahagianya negara tetangga. Tanah-tanah dipoles aspal yang hitam legam, kemakmuran terhubung di sana-sini. Besar wilayahnya tak seberapa jika dibandingkan dengan pulau Kalimantan, namun jangan bandingkan kemajuan dan kesejahteraan kehidupan masyarakatnya dengan rakyat kita di perbatasan.

Masyarakat di tapal batas hadir menjadi garda terdepan dalam usaha mempertahankan wilayah suatu bangsa. Jalan-jalan di wilayah perbatasan Entikong, Kalimantan Barat adalah jalur sutera yang menjadi jalur transportasi internasional tiga negara, Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam. Rakyat yang terpaut jarak dari pemerintahan namun cintanya terhadap Tanah Air bersaut beriringan, sekali pun negara tetangga mengiming-imingi kesejahteraan.

Mereka tetap mengatakan, Indonesia adalah tempat tinggal. Seorang-dua orang terlepas dari NKRI karena himpitan ekonomi, namun banyak yang tetap bertahan walau Indonesia masih menyuguhkan keterbatasan. Kini, di pemerintahan baru yang menjajikan revolusi mental, dari tapal batas masyarakat menagih janji sang negarawan.

Sekali melepas pandangan ke Bumi Borneo, sontak semua mata terperanjat dengan hamparan permadani hijau yang menjanjikan kemakmuran atas nasib bangsa. Hutan, perkebunan, dan ladang

terhampar subur menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat. Tapi inilah problem suatu bangsa kaya Sumber Daya Alam (SDA), namun minim kualitas pendidikan.

Masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia hidup dalam kemewahan alam, namun miskin belanja ilmu pengetahuan. Empat sekolah dasar di desa Kelompu, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang halaman rumahnya menjadi mobilitas masyarakat antarnegara terheran-heran. Mengapa wilayahnya menjadi jalur sutera namun pendidikan anak-anak mereka merana.

Jangan bicara soal kualitas guru, kuantitas guru saja tidak memadai, guru honorer dengan kemampuan dan gaji yang tidak memadai menjadi jawaban. Guru-guru di perbatasan merasa kesulitan mengikuti sistem pendidikan yang disepakati oleh negeri ini. Jujur, mereka tak mengerti sistem kurikulum 2013 yang akan diterapkan. Jika suatu sistem tak dipahami, bagaimana *output* sistem itu dapat tercapai. Buku-buku yang dikirim ke perbatasan pun tak memadai. Perbandingan ketersediaan buku dan siswa melahirkan ketimpangan.

Negarawan hadir dengan janjinya yang tertuang dalam misi pencapaian peningkatan kualitas hidup, dijabarkan secara konkrit dalam poin kelima, “Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar”.....dan seterusnya.

Inilah hal yang paling ditagih oleh masyarakat perbatasan. Mereka tidak lagi berharap mendapat pasokan sembako murah dari Tanah Airnya. Kebutuhan sehari-hari mereka dapatkan dari negara tetangga, Malaysia. Gula, daging, beras dan kebutuhan hidup sehari-hari mereka peroleh dengan mudah dan murah dari negara tetangga sebelah. Namun mereka menagih penuh janji negarawan yang akan menduduki kursi politik nomor satu di negeri ini soal pendidikan dan kesehatan.

Anak-anak sekolah dasar di Badat, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat harus hidup dengan dua guru saja untuk mengajar enam kelas. Potret mereka bahkan diangkat dalam film layar lebar Tanah Surga Katanya, dan ini masih berlangsung hingga sekarang. Itu bukan satu-satunya sekolah yang merindukan guru,

ada puluhan sekolah dasar di perbatasan Kalimantan Barat yang membutuhkan perhatian soal tenaga pengajar. Bagaimana negara besar bisa maju jika pendidikan dasarnya sudah keropos, pondasi patriotismenya tergerus terus-menerus, tak menutup kemungkinan nasionalisme dan NKRI hanya jargon belaka jika negarawan lalai akan janjinya.

Kokohnya ekonomi akan hancur berantakan jika benteng pendidikan tidak ditegakkan. Janji-janji itu mereka nantikan. Sungguh! Mereka merindukan kemajuan pendidikan seperti yang ditonton dari negeri seberang, di negari jiran.

Semua permasalahan di perbatasan sejatinya sudah rahasia umum. Banyak penelitian yang dilakukan, namun belum ada hasil signifikan. Jokowi-JK sebagai negarawan yang memenangkan suara rakyat telah menyadari permasalahan di perbatasan, tercermin dari visi misi yang dijanjikan. Jokowi mengupayakan terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong akan ditempuh dengan adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Tentunya bukan hal yang mudah untuk mewujudkan semua itu. Indonesia ini terlalu luas untuk diselesaikan sendiri, kita butuh kesadaran gotong royong dalam membangun bangsa ini.

Janji-janji itu berkebar, memupuk sebuah harapan, merangkum cita merangkai asa dalam kebangsaan. Janji negarawan dituangkan dalam Nawa Cita, ditegaskan dalam poin ketiga yang berbunyi, "Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan memadai dalam memberikan pelayanan publik..." Rakyat mana yang tak berharap janji-janji ini menjadi realita yang mereka miliki.

Janji negarawan adalah cita-cita besar yang di dalamnya tertuang harapan suatu bangsa. Janji itu ada dan menjelma menjadi

impian yang rohnya adalah semangat melakukan pemerataan pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang banyak mengalami ketertinggalan dibanding pulau-pulau lainnya, khususnya Jawa. Ketersediaan listrik pun satu narasi pilu di tapal batas ini. Tercatat masih ada daerah-daerah terluar di perbatasan Indonesia-Malaysia seperti di Badat Baru dan Badat Lama yang masih berkawan dengan cahaya lilin setiap malam.

Bagaimana tercipta masyarakat berkualitas dan berdaya saing tinggi jika masyarakat gagap teknologi? Bagaimana bisa mengenal teknologi, jika listrik saja masih menjadi mimpi di tempat ini? Sekalinya ada listrik, mati lampu hampir setiap hari dalam durasi panjang bahkan bertahan sepanjang malam. Itulah yang dialami masyarakat perbatasan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Anak-anak menggantungkan ilmunya dari pancaran cahaya lilin. Sedangkan masyarakat perkotaan hidup dalam kemubaziran listrik dan teknologi tinggi. Dengan kelapangan hati, mereka tetap mencintai bangsa ini.

Sekali lagi, bicara perbatasan bukan bicara patok atau palang yang memisahkan negeri ini dengan jiran. Tapi bicara soal daerah-daerah pedalaman yang masih sulit terakses atau terhubung karena buruknya infrastruktur pembangunan khususnya listrik dan jalan. Bagaimana kemajuan ekonomi bisa ditingkatkan jika denyut perekonomian itu masih terhalang oleh tanah liat yang memutus jalur perdagangan?

Masyarakat perbatasan adalah orang yang seharusnya maju dalam bidang persaingan ekonomi internasional, karena berbatasan darat dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Harapan itu kini ada dan dituangkan oleh Jokowi dalam poin keenam “Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Untuk itu kami akan membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua...”

Memotret kisah masyarakat perbatasan, khususnya Dusun Badat Baru, sebuah contoh dusun terluar pertama dari Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Dusun yang menjadi perbatasan

Indonesia-Malaysia. Karena letak geografisnya yang jauh dari letak pemerintahan adalah miniatur problem dari luasnya Indonesia dan perbatasan wilayah dengan masalah pendidikan, kesehatan dan akhirnya kesejahteraan masyarakat seperti terbuang. Jauh dari akses penunjang kehidupan tak membuat mereka diam dalam kebisuan untuk berjuang dan terus bertahan di perbatasan sebagai warga negara Indonesia. Dari tapal batas, masyarakat menagih janji negarawan![]

# GURU NEGARAWAN, KUNCI MERAWAT INDONESIA

*Alvian Novia Arvianto*

**T**an Malaka menulis, “Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan.” Konsep itu menjadi awal kontemplasi tentang makna kenegarawanan dari pahlawan tanpa tanda jasa.

Ketika berbicara mengenai pendidikan, akan ada kompleksitas isu dari berbagai ranah yang sering kali diangkat dan dikaitkankan dengan pendidikan itu sendiri. Padahal visi dari elaborasi pendidikan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusianya, yaitu dengan tujuan untuk membentuk manusia yang berkarakter kuat dan cerdas, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Kenyataannya, pendidikan yang digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain justru jauh dari kata memadai. Banyak kalangan menilai lemahnya pendidikan Indonesia dikarenakan sistem ataupun kurikulum yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik. Kurikulum selalu diperbaharui dan dianggap memiliki kemajuan yang signifikan. Padahal, sejauh ini sistem hanya melahirkan sistem lanjutan, belum bisa mengubah manusianya menjadi lebih baik. Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif, bukan hanya sistem yang terus di-*upgrade*, namun tidak merevolusi mental generasi penerus.

Tentunya kita tahu bahwa pemimpin akan melahirkan generasi pemimpin selanjutnya. Di sini terlihat jelas bahwa untuk

membentuk pemimpin yang memiliki kecakapan, dibutuhkan bimbingan dan arahan dari pemimpin yang baik pula, bukan hanya sistem. Begitu pula sebuah bangsa, untuk melahirkan generasi yang baik maka diperlukan pendidik atau guru yang baik. Karena dengan adanya guru yang baik, penerus bangsa akan memiliki figur untuk diteladani serta menjadi panutan dalam menuntut ilmu maupun berperilaku. Karena tidak ada istilah, “sebuah sistem menjadi panutan manusia”.

Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan kita masih jauh dari harapan. Ada beberapa parameter yang bisa dijadikan ukuran tingkat kemapanan dari penyelenggaraan pendidikan suatu bangsa. Mulai dari ketersediaan guru, fasilitas dan infrastruktur, dan prestasi akademis, yang tak boleh luput diperhatikan, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban kita bersama.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, pemerintah telah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 368,899 triliun atau sebesar 20 persen dari total anggaran belanja Negara. Anggaran belanja pendidikan tersebut terdiri atas anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 130,279 triliun yang tersebar di Kemendikbud Rp 80,661 triliun dan 16 Kementerian/Lembaga Rp 7,051 triliun.

Sedangkan anggaran melalui transfer ke daerah sebesar Rp 238,619 triliun yang tersebar ke dalam anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 982,4822 miliar. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Rp 10,041 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 135,644 triliun, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNS Daerah Rp 1,853 triliun. Selanjutnya, tunjangan profesi Guru Rp 60,540 triliun, Bagian Anggaran dalam Otonomi Khusus Rp 4,094 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 1,387 triliun, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 24,074 triliun.

Namun sayangnya, pencapaian pendidikan Indonesia saat ini sungguh menyayat hati. Pada tahun 2013 yang lalu, media nasional dihebohkan dengan hasil riset berskala internasional dari PISA (*Program for International Student Assessment*) yang merupakan salah satu program kerjasama di beberapa negara yang tergabung dengan OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*)

untuk melihat perbandingan kemampuan akademis siswa di berbagai negara dalam bidang matematika, sains, dan membaca. Penelitian tersebut telah berhasil menempatkan Indonesia di peringkat kedua paling bawah dari total 65 negara.

Hal ini menjadi sebuah ironi ketika perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah tidak menghasilkan perubahan yang signifikan pada pencapaian target dari sebuah sistem pendidikan yang ada. Padahal kita tahu bahwa peserta didik tidak terlalu dipusingkan pada sistem pendidikan yang selalu berubah. Justru mereka membutuhkan teladan di dalam kelas untuk dijadikan contoh dalam berperilaku, bertingkah laku, dan berpretasi.

Hal itu tidak muluk-muluk, dengan adanya pemimpin di dalam kelas maka tujuan perbaikan ataupun peningkatan kemampuan tiap individu agar dapat bersaing di era global bisa terpenuhi. Tak bisa dipungkiri, di era persaingan global yang semakin kompetitif ini membutuhkan kemampuan yang baik agar bisa bersaing serta mempertahankan idealisme sebagai bangsa Indonesia.

### **Makna Kemerdekaan**

Melihat betapa suburnya tanah Indonesia, betapa ramahnya penduduk bangsa ini, dan sungguh makmurnya negeri ini, orang tidak akan percaya bahwa masih ada ratusan atau bahkan ribuan generasi penerus bangsa kehilangan haknya untuk belajar dan menggapai cita-cita. Mungkin juga tidak akan ada lagi siswa yang putus sekolah, daerah pelosok dan perbatasan yang kekurangan guru, dan juga tidak ada lagi generasi muda yang hari-harinya dihabiskan tinggal di daerah pemukiman yang kumuh. Hari-hari mereka seolah sudah terbiasa dengan mental yang serba pasrah dengan keadaan, tak ada harapan akan perubahan dan tak mampu lagi untuk bercita-cita ataupun bahkan untuk sekedar bermimpi demi kehidupan yang lebih baik.

Puluhan tahun bangsa Indonesia telah memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka. Namun, makna kemerdekaan itu seolah hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Bahkan pendidikan yang menjadi kebutuhan dasar setiap warga negara pun ikut-ikutan tidak bisa dinikmati dan dirasakan sebagai hasil kemerdekaan. Maka di sinilah peran seorang guru negarawan

untuk terus berbagi dan mengajar sampai ke pelosok-pelosok perbatasan, mewariskan pengetahuan kepada generasi penerus. Melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan demi meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena merevolusi mental bangsa Indonesia tidak hanya dibutuhkan sistem yang baik, tetapi juga membutuhkan tenaga pendidik yang mampu menciptakan inovasi serta memiliki nasionalisme sebagai seorang negarawan.

Sudah sangat jelas, untuk memerdekakan Indonesia, kita tidak perlu lagi mengangkat senjata. Tetapi memerdekakan bangsa Indonesia dari kebodohan dan penindasan pendidikan menjadi tanggung jawab seorang guru negarawan, sebagai usaha untuk membebaskan generasi muda dari kemungkinan masa depan suram dan menyiapkan mental menjadi seorang pemimpin negarawan. Karena dasar merawat bangsa sama halnya dengan merawat manusianya. Kalau manusianya memiliki kepribadian, mental, sikap, dan kemampuan yang baik maka bangsa tersebut akan terawat dengan potensi-potensi manusianya.

### **Belajar Menjadi Guru Negarawan**

Pada tahun 1945, Jepang hancur lebur oleh bom atom yang dijatuhkan sekutu kota Hiroshima dan Nagasaki. Ketika itu Kaisar Jepang, Hirohito, mengemukakan sebuah pertanyaan yang lebih mengguncang dari sekedar ledakan bom atom kala itu. Kaisar Hirohito bertanya kepada para pembantu dan menteri yang menghadap untuk melaporkan kondisi rakyat Jepang yang sekarat dan mati karena terkena radiasi ledakan bom atom, pertanyaan yang diajukan oleh Hirohito, "Berapakah guru yang masih hidup?"

Secara tidak langsung, pertanyaan itu membuat para pembantu dan menteri tercengang. Mungkin dalam benak pembantu dan menteri bertanya kenapa yang ditanyakan tidak prajurit atau sisa amunisi yang ada untuk membangun kekuatan kembali. Namun, Kaisar Hirohito beranggapan, kekalahan Jepang sudah sangat telak. Hancurnya infrastruktur, sistem yang tidak berjalan, dan kondisi yang semakin carut marut membuat keadaan semakin sulit.

Maka sang kaisar pun berpikir bahwa untuk membangun sebuah bangsa yang kuat dan maju, hanya melalui peran gurulah negerinya akan bisa bangkit kembali. Kaisar Hirohito mengatakan, “Mari kita benahi pendidikan melalui guru-guru yang kita punyai dan masih hidup. Melalui kerja keras kita, terutama guru-guru, saya yakin negeri ini akan bangkit kembali, bahkan akan lebih hebat dari kemampuan kita sebelum perang terjadi.”

Hal tersebut bukanlah sekedar wacana atau angin surga saja, nyatanya Jepang mampu menunjukkan kebangkitannya sebagai negara terpuruk menjadi maju, modern, dan disegani bangsa-bangsa lain seperti yang kita saksikan saat ini. Inilah yang harus kita pelajari dari peran guru dalam membangun peradaban bangsa yang maju. Bukan melulu membenahi sistem, tapi malah lupa untuk meningkatkan kompetensi para guru.

Keyakinan bangsa Jepang terhadap peran guru mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan bangsanya. Ini sebenarnya juga menjadi cambuk bagi bangsa Indonesia sendiri, di tengah permasalahan yang begitu banyak, kepercayaan diri harus dibangun melalui dukungan-dukungan kepada guru untuk menjalankan perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mungkin saja kita terhanyut oleh perubahan-perubahan kurikulum yang membuat kita berpikir bahwa pendidikan hanya ditentukan oleh sistem saja. Padahal kualitas tenaga pendidik juga harus menjadi perhatian agar kualitas pendidikan Indonesia saat ini semakin meningkat. Kita telah mengetahui dan memahami bahwa perubahan kurikulum mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), KTSP, hingga yang paling anyar yaitu Kurikulum 2013 seolah menjadi senjata yang paling mutakhir untuk dikedepankan. Padahal kurikulum tersebut seolah belum memiliki pengaruh terhadap kualitas pendidikan Indonesia.

Apalagi dengan tingkat kompetensi guru untuk terus menyesuaikan dengan kurikulum yang selalu diperbaharui. Seolah pemerintah lupa kalau guru adalah sosok di balik keberhasilan lahirnya pemimpin-pemimpin generasi masa depan. Padahal untuk membangun sebuah bangsa diperlukan guru yang berkualitas. Guru yang memiliki kecakapan sebagai seorang negarawan. Dari

guru inilah akan lahir seorang pemimpin-pemimpin penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia ke depan. Maka, ketika ada keinginan untuk membentuk negara yang kuat dan disegani, siapkan guru-guru terbaik.

Merdeka! Kata ini santer terdengar dan akrab di telinga bangsa Indonesia. Setiap kali upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia kata-kata itu tak luput untuk disematkan ke telinga seluruh warga Indonesia. Namun benarkah dengan kemerdekaan ini kita sudah benar-benar bisa merawat Indonesia? Rasa-rasanya masih belum. Kita masih membutuhkan usaha yang lebih kuat untuk merawat Indonesia sebagaimana mestinya.

Guru, keberadaannya menjadi harapan bangsa untuk menjadi pemantik dalam melahirkan generasi yang mampu membawa Indonesia benar-benar ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Karena dari seorang gurulah generasi telah dilahirkan. Namun, sayangnya belum semua guru memiliki semangat kenegarawanan yang memang seharusnya dan sudah sepatutnya dimiliki. Maka di sinilah tanggung jawab seorang pemimpin untuk memperbaiki mental setiap warga negaranya melalui pendidikan dengan mengawalinya dari kualitas guru itu sendiri.

Sudah selayaknya pemimpin terpilih memperhatikan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan guru. Sehingga tak perlu diperlihatkan lagi bahwa beberapa guru yang ada saat ini memang belum mencapai standar yang diinginkan. Masih terdapat perilaku yang tidak mencerminkan sikap semestinya seorang guru. Maka dari itu, dalam proses pendidikan guru harus menjadi perhatian semua pihak. Mampukah presiden terpilih memberikan bukti dalam merealisasikan janji merevolusi mental bangsa Indonesia melalui peran guru negarawan?[]

# SEKOLAH BHINEKA TUNGGAL IKA

*Amelia Sakinah*

Negara terkadang memperkecil pengetahuan rakyatnya dengan hanya 'seragam' sekolah formal. Coba kau lihat ada jutaan pengetahuan lokal di sekolah kehidupan rakyatnya dengan beragam suku, bahasa, dan kearifan lokalnya. Karena pendidikan bukan lagi sebatas bukti ijazah bagi mereka. Demikian kata Bambang Rudito dalam Lokakarya Ekspedisi Pelita Muda 2014.

Pesan ini menggelitik dan menimbulkan beragam pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan seragam pendidikan selama ini? Adakah yang terusik dan terabaikan oleh sistem pendidikan selama ini? Apa yang sesungguhnya terjadi di pelosok dan di pinggiran negeri sana? Suatu pesan implisit dari guru yang menjadi pemantik kontemplasi pemikiran mengenai pendidikan di Indonesia.

Semenjak saya kecil, sudah dikenalkan dengan fakta kebesaran bangsa Indonesia, atau Nusantara. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah total mencapai 13.466 pulau. Terdiri dari 350 etnis suku dengan 483 bahasa dan budaya. Konon katanya, keragaman dan kekayaan budayanya tersebut dapat hidup berdampingan secara harmonis. Ibarat kita punya satu pintu ke mana saja dan setiap hari menjelajah satu tempat ke tempat lainnya, satu tahun pun belum cukup untuk mengenal utuh semua yang dimiliki Indonesia.

"Budaya merupakan hasil karya hidup manusia," demikian kata guru SMP saya. Itu berarti Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya, dan sejarah telah mencatat ratusan etnis itu sudah

mencetak ribuan, bahkan mungkin jutaan budaya yang harusnya dapat didokumentasikan. Proses berbudaya ini menjadi suatu khazanah ilmu dan pembelajaran tersendiri bagi masyarakat di lingkungannya. Sangat menarik ketika saya berbincang dengan beberapa dosen, kawan, menonton televisi maupun pengalaman pribadi tentang bagaimana masyarakat kita bisa belajar dan mendalami kearifan lokalnya.

Ketika kuliah kebencanaan, dosen saya bercerita bagaimana masyarakat Simeuleu, Aceh mengajarkan tanggap bencana Tsunami terhadap anak cucunya. *“Engel mon sau surito. Inang maso semon manoknop sao fano Unen ne alek linon, fesang bakat ne mali. Manoknop sao hampung tibo-tibo maawi. Ede smong kahane, turiang da nenekta.”*

Melalui penggalan lirik itu, mereka menyebutnya Smong, para tetua menyanyikan kejadian Tsunami yang terjadi di Simeuleu pada 1883. Smong menceritakan bagaimana ciri Tsunami seperti air laut surut dan sebagainya, lagu itu yang menjadi penyelamat warga Simeuleu ketika Tsunami 2004.

Cerita lain adalah tentang persinggahan saya di Kampung Naga, yang terletak di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Suatu kampung tradisional yang sangat selaras dengan alam. Perkampungan ini hanya memiliki 40 rumah sejenis, dengan arsitektur unik dan dihuni menetap dengan populasi yang tetap. Setiap ada pertambahan jumlah keluarga atau pun ada pernikahan, maka salah satu dari keluarga harus ada yang siap merantau. Itu bukan pengusiran. Secara alamiah mereka belajar mengenai daya dukung lingkungan.

Lingkungan hunian yang mereka miliki telah diatur sedemikian rupa untuk hunian, ladang, dan hutan yang dilindungi maupun sungai dan air yang mengalir kehidupan, dapat digunakan secara seimbang untuk komposisi kegiatan dan pola hidup yang mereka lakukan. Maka tak heran jika Anda memasuki kampung ini, listrik, pencemaran barang kimia, dan ketidakharmonisan dengan alam merupakan barang langka. Semuanya telah diatur dan diajarkan oleh ajaran turun temurun adat istiadat.

Mereka belajar dari perjumpaan dengan alam, budaya, seni, dan kepercayaan. Cukup dengan tutur tinular, perilaku, dan

teladan sudah melekatlah ilmu-ilmu yang mungkin kita sendiri belum temukan dalam kehidupan serba modern ini. Sekolah mereka tidak hanya dibatasi oleh meja kursi, layar proyektor dan seorang dosen atau guru bergelar untuk berpidato. Dimana bumi mereka masih berpijak, dimana indra masih bisa merasa, di situlah proses pembelajaran dilakukan. Maka benarliah bagi mereka, ijazah bukan lagi ikatan pembuktian bagi seseorang untuk terdidik.

Pendidikan, sejatinya upaya memanusiakan manusia. Maka seharusnya orang yang telah menempuh pendidikan mampu memanusiakan dirinya dan orang lain. Sayangnya, fakta ini belum bisa dijawab jika kita melihat bagaimana para profesor bertitel di negeri ini belum mampu memanusiakan dirinya untuk menghargai kebaikan di dalam dirinya dengan tidak korupsi.

Coba kita kembali pada kutipan di awal tulisan ini, “negara terkadang memperkecil pengetahuan rakyatnya dengan hanya ‘seragam’ sekolah formal.” Ada fakta yang tersimpan dalam kata ‘seragam’ jika disandingkan dengan ragam kearifan lokal yang telah saya bahas sebelumnya. Indonesia identik dengan konformitas yang tinggi atau bisa disebut dengan keseragaman. Begitu pula dengan kasus di dunia pendidikan, banyak standar serta aturan yang diberlakukan untuk mengejar keseragaman. Untuk mengejar ketimpangan ataupun mengejar ketertinggalan dan kesamaan kewajiban, beberapa dalih tersebut akan diangkat.

Dari subyektifitas saya, itu semua akan ideal jika titik mula penyeragaman adalah sama, ibarat dari titik nol kita mendidik. Akan beragam ceritanya jika ada yang mulai dari titik 100, dan ada yang mulai dari titik minus 100, apakah akan sepadan hak dan kewajibannya?

Saya menyebutnya sebagai sistem sentralisasi pendidikan Jawa. Kenapa? Jawa merupakan daerah pusat birokrasi, dan kuat secara politis. Setiap kebijakan strategis akan lahir dari tanah ini, khususnya Jakarta. Memang bukan suatu kesalahan negara memiliki kepala yang menjadi pusatnya. Namun bukan berarti makna dari keterpusatan meniadakan sudut pandang daerah-daerah lain, khususnya daerah terpencil. Jawa sentris ini melahirkan ironi, jika kita tidak tahu penanggulangannya apalagi untuk pendidikan yang saya sebut sebagai hak dasar masyarakat

Indonesia. Jakarta sudah terlalu pongah mengeluarkan kebijakan yang menggunakan *framework* “kota” dan “Jawa” yang bisa jadi tidak sesuai dengan daerah lainnya di luar Jawa. Perlu contoh untuk hal ini?

Saya mendapat cerita dari teman sesama pengajar yang sudah pengalaman melanglangbuana lebih jauh dari saya. Pengalaman ini sungguh menggelikan, yaitu ketika anak didiknya mendapat soal ujian penyeragaman. Di soal itu, sang murid diharuskan menjelaskan bagaimana tahap menyalakan komputer. Jika menggunakan jendela “kota” sudah barang tentu, itu kurang satu menit murid mampu menjawabnya. Namun bagaimana jika kita ada di posisi murid yang kelasnya saja harus berbagi dengan ayam dan ternak, *boro-boro* mengenal barang bernama komputer.

Begitu pula pengalaman adik-adik mentor KKN saya yang saat itu menjaga ujian tulis di sebuah SD, asumsinya jika ujian tulis, murid sudah bisa menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia. Namun sayangnya, asumsi itu gagal. Setengah dari kelas itu belum mampu melakukannya. Alhasil ujian berubah menjadi ujian mencongkak dengan translator bahasa setempat.

Kata Iwan Fals, Indonesia bukan hanya Jakarta, selain Pulau Jawa kita punya Rote, Sabang, Nias, dan 17.000 pulau lainnya. Lantas mereka bagaimana, terlupakan? Atau sengaja dilupakan? Tidak ada yang salah dengan kelahiran anak-anak bangsa di sana, mereka pun punya hak pendidikan sama untuk terlahir di tanah surga yang hilang ini. Seperti yang saya bahas sebelumnya, pendidikan menjadi manusia bagi mereka pun sudah jauh ditanamkan oleh lingkungan, jauh sebelum guru mampir ke pulau itu.

Mereka istimewa, mereka orang-orang terpilih yang mampu bertahan di tengah segala keterbatasan fasilitas yang mereka miliki. Kearifan lokal dan keragaman budaya mereka yang menguatkan untuk tumbuh dan dewasa lalu berkarya. Namun apa jadinya jika konformitas mulai memapar kehidupan mereka—orang-orang istimewa ini? Mereka terpinggirkan oleh kata status dan ijazah formal pendidikan. Salah? Tidak. Karena sejatinya mereka tidak membutuhkan ijazah untuk hidup bahagia dan sejahtera di rumah mereka. Ijazah hanya berlaku di kota.

Bagaimana jika kita menerawang jauh ke depan ketika pembangunan mulai masuk ke pulau mereka. Lalu pembangunan dibuka, agen-agen siapakah yang terseleksi untuk menjadi aktornya? Sepertinya kita semua sudah mafhum jawabannya. Kita tidak ada bedanya dengan kolonial yang kita kutuk di masa lampau. Kita lebih suram karena menjajah rakyat sendiri. Tak ayal jika gerakan separatis, konflik dan urbanisasi akan selalu menjadi rantai duri menyelipit di roda gigi pembangunan negeri ini.

“Orang Indonesia lebih mengenal Barat ketimbang mengenal masyarakat Indonesia sendiri,” kata Tubagus Furqon pada Lokakarya Ekspedisi Pelita Muda 2014. Karena itu, mari mengenali Indonesia yang tak kunjung surut untuk didefinisikan. Jika kita melihat pita merah putih dicengkeram Garuda pasti masih tertulis Bhineka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Sungguh keberagaman ini adalah kekayaan, tapi bukan yang menidurpulaskan. Dia adalah cambuk rotan tantangan kita bagaimana setiap kekayaan tersebut harmoni dalam satu pendayagunaan. Bagaimana kita mampu belajar dan menghargai kearifan lokalnya, bukan menghamba pada generasi Barat. Boleh jadi pemikiran terasah oleh kecerdasan Barat, namun pijakan budi luhur dan kepribadian mengakar pada bangsanya.

Presiden terpilih Jokowi-JK sudah banyak mengangkat isu kebhinekaan. Tercatat dalam rumusan isu strategis, salah satunya adalah mengenai intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Disebut, politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang. Hingga diturunkan dalam misi ketujuh, yaitu mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Janji Jokowi itu dimasukkan dalam prioritas utama ke 8 dan ke 9, yaitu “Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa,” dan “Kami akan memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.”

Saya salut jika pemimpin kita mengerti urgensi dan definisi kebhinekaan yang dipaparkan dalam janji politisnya. Namun sekali lagi ini bukan hanya ranah definisi dan teori, tapi implementasi. Perlu ada rintisan besar untuk merestorasi sosial yang dimaksud. Hal ini satu padu baik dari birokrat, teknokrat, ilmuwan dan rakyat. Sebenarnya yang paling mampu memerdekakan dan

mendidik komunitasnya adalah rakyat sendiri, dengan stimulus fasilitas dan kebijakan yang lebih memberi ruang bagi rakyat kita yang istimewa. Sepertinya rakyat sudah sangat cukup dengan intro manis yang ditawarkan selama ini oleh para pemimpinnya, ibarat di dalam gamelan Jawa, sudah harus ada gong! Yang menandakan akhir dan awal baru bagi gending negeri ini.

Pramoedya Ananta Toer dalam tetralogi Bumi Manusia menulis, "Gamelan, semua nada bercucuh rancak menuju dan menunggu bunyi gong. Begitu dalam musik Jawa. Tetapi, tidak dalam kehidupan nyata, karena bangsa yang mengibakan ini, dalam kehidupan yang menyedihkan ini, dalam kehidupannya tak juga memiliki gongnya, seorang pemimpin, pemikir yang bisa memberikan kata putus."

Apakah gong itu sudah terdengar di masa ini? Laksana gamelan, gong itu harus terdengar di seluruh niyaga (orang yang menabuh gamelan). Begitu pula gong seorang pemimpin harus terdengar dari Sabang hingga Merauke. Memerdekakan jiwa yang lelah terbius dalam kelembaman makna kemerdekaan. Merdeka, menjadi manusia pribumi yang berdiri tegap di atas buminya sendiri, menghargai seutuhnya kepemilikannya, berjuang untuk penghidupan rakyat, bumi dan masa depannya.[]

# KELUARGA BASIS REVOLUSI KARAKTER

*Amroyanu Habib*

*"Kami akan melakukan revolusi karakter bangsa."*

Kalimat ini adalah salah satu dari sembilan agenda prioritas pasangan Jokowi-JK. Upaya yang akan dilakukan oleh pasangan ini adalah dengan menata kembali kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional juga akan dievaluasi, termasuk penyelenggaraan Ujian Nasional. Kurikulum ke depan diharapkan dapat mencetak pelajar yang mengerti akan nilai-nilai lokal (budaya) dan aspek nasional. Menurut pasangan Jokowi-JK, harus ada penekanan aspek di setiap jejang pendidikan. Pendidikan dasar lebih ditekankan pada aspek budi pekerti dan pembangunan karakter (70%). Sedangkan untuk pendidikan tinggi, 60% lebih ke politeknik dan 40% sains.

Selain itu, mereka juga berjanji akan memberikan jaminan hidup untuk para guru yang mengajar di daerah terpencil. Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh pelosok negeri juga menjadi prioritas utama. Program yang lain adalah wajib belajar tanpa dipungut biaya sampai tingkat SLTP. Dengan program ini, sudah tidak ada anak Indonesia yang tidak bisa sekolah.

Peningkatan subsidi untuk perguruan tinggi juga akan dilakukan guna memperbesar akses pendidikan kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pasangan Jokowi-JK juga akan mewajibkan aparat pemerintah untuk menganut *techno-ideology*. Pendidikan penguasaan teknologi harus bangkit dari 'amnesia sejarah' dan 'amnesia ideologi'.

### **Hilangnya Ruh Pendidikan**

Pendidikan memang menjadi ruh suatu bangsa. Bangsa besar selalu lahir dari insan-insan yang terdidik. Kita bisa melihat Jepang saat ini, yang menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Jepang saat kalah pada Perang Dunia II, ketika Hiroshima Nagasaki diluluhlantakkan oleh Sekutu, yang terpikir pertama kali adalah menyelamatkan para guru yang masih tersisa. Mereka sadar betul bahwa pendidikan menjadi bahan baku utama bangsanya. Kita juga bisa melihat perkembangan India. Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia ini terus melaju cepat dalam perkembangannya. Lulusan perguruan tinggi mereka tersebar di seluruh dunia. Ini menunjukkan kualitas pendidikan yang sangat baik.

Ada fenomena dalam dunia pendidikan di negeri ini, selembarnya ijazah diyakini bisa merubah nasib seseorang. Doktrin ini sangat melekat pada pelajar Indonesia. Selembarnya ijazah ini memang menjadi tiket masuk ke jenjang selanjutnya. Namun, secarik kertas ini juga banyak menjadikan pelajar bangsa ini 'buta'. Mereka menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Tidak jarang kita mendengar kasus jual beli soal ujian, atau pelajar menyontek saat ujian. Ada juga yang rela membayar joki untuk menggantikan mengerjakan ujian. Yang lebih mencengangkan, beberapa oknum sekolah merestui itu dan mendorongnya. Lalu, dimanakah pelajaran moral yang selama ini diajarkan di sudut kelas-kelas itu?

Doktrin ini sangat membahayakan bagi bangsa Indonesia. Namun ada yang lebih membahayakan, yaitu hilangnya makna dan ruh pendidikan di hati para pelajar dan pengajar. Budaya belajar sudah hilang. Mereka belajar bukan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, tapi hanya untuk lulus ujian. Sehingga sering kita jumpai, para siswa menomorduakan mata pelajaran yang tidak masuk UN, termasuk menomorduakan gurunya.

Hilangnya budaya belajar ini sangat berbahaya. Pelajar tidak punya keinginan kuat untuk mengeksplorasi ilmu yang ada. Pelajar hanya konsen kepada bagaimana cara dia lulus dengan predikat sempurna. Mereka tidak belajar ketika tidak dituntut dengan nilai. Bahkan mereka tidak tahu untuk apa ilmu yang mereka pelajari. Sehingga, sekolah-sekolah kita melahirkan jiwa-jiwa yang kerdil. Lulusan yang bukan menjadi solusi bagi bangsa, tapi menjadi masalah baru. Mempersempit lapangan kerja dan bukan memperluasnya.

Sekolah jadi terasa kering. Sekolah yang dulunya menjadi ruangan untuk mendidik akhlak dan kompetensi, sekarang berubah menjadi instansi yang berburu angka-angka. Instansi yang berburu predikat A, B, C sampai Z. Maka kita tidak heran, banyak siswa yang memilih keluar dari kelas diam-diam. Mereka memilih balapan motor di jalan raya, memilih jalan-jalan ke alun-alun menikmati suasana santai.

Pertemuan dengan guru menjadi hal yang tidak dirindukan lagi. Sudah jarang kita temui, siswa yang menyampaikan masalah hidupnya kepada guru. Hubungan guru dengan siswa seakan-akan menjadi hubungan kerja. Guru mengajar untuk mendapatkan gaji dan sertifikasi. Siswa belajar untuk mendapatkan ijazah. Kelas selesai, selesailah hubungan itu. Bahkan bagi sebagian siswa dan mahasiswa, menjadi tidak penting kenal dengan guru atau dosennya, yang penting keluar nilai bagus dan selesai.

Potret buruk ini, untungnya tidak terjadi pada semua instansi pendidikan kita. Masih banyak sekolah-sekolah yang baik. Masih banyak guru-guru yang dengan tulus ikhlas mendidik siswanya. Namun potret ini harus menjadi evaluasi besar untuk perbaikan bangsa ke depan. Revolusi pendidikan harus dilakukan dalam lima tahun mendatang.

### **Tiang Bernama Keluarga**

Manusia hidup dalam ruang dan waktu. Pola pikir mereka sangat dipengaruhi oleh ruang yang mereka huni dan seberapa intensnya mereka di ruang itu. Pola pikir inilah yang akan membentuk karakter seseorang. Anak kecil yang terbiasa melihat orang tuanya berbohong, kemungkinan besar dia akan menjadi

pembohong. Rakyat Indonesia yang setiap hari dicekoki dengan berita korupsi akan berpikir bahwa korupsi itu biasa. Remaja Belanda yang dibekali kondom orang tuanya akan berpikir bahwa hubungan seksual di luar nikah itu budaya.

Sejalan dengan proses revolusi pendidikan, Jokowi harus melakukan pembenahan pranata kehidupan yang lain. Jika kita perhatikan, pembentukan karakter pertama seseorang itu dilakukan oleh keluarga. Keluarga menjadi sekolah atau madrasah pertama bagi seorang anak bangsa. Orang tua menjadi guru pertama bagi anaknya. Lima tahun pertama sebelum anak menginjak usia sekolah, orang tua yang akan menanamkan karakter-karakter dasar sebagai manusia. Sekolah hanya pagi sampai siang atau sore, setelah itu murid akan pulang dan pendidikan keluarga mengambil peran. Sehingga, perbaikan struktur keluarga secara umum itu perlu dilakukan dalam proses revolusi karakter yang menjadi agenda Jokowi.

Sekarang, kita akan membicarakan sosok yang melahirkan anak bangsa. Karena peletak dasar karakter seseorang adalah ibu yang selalu menggendongnya waktu kecil. Jika kita melihat kembali negeri kita, ada fenomena menarik, yaitu jutaan wanita menjadi tenaga kerja di luar negeri. Menurut BNP2TKI, jumlah TKI pada akhir November 2013 sebesar 6,5 juta yang tersebar di 114 negara di dunia. Sebagian besar dari mereka adalah tenaga kerja wanita dan ibu rumah tangga.

Perempuan ini meninggalkan anak dan suaminya. Anak yang masih butuh kasih sayang seorang ibu, dan suami yang butuh dengan pelayanan istri. Kondisi seperti ini akan melahirkan keluarga-keluarga yang tidak sehat. Anak mulai mencari kebahagiaan di luar rumah, keluarga bukan lagi menjadi tempat yang hangat untuknya. Suami yang normal pasti juga membutuhkan pelayanan sang istri. Maka tidak jarang kasus perselingkuhan terjadi, yang akhirnya menambah daftar kasus *broken home*. Jiwa seorang anak akan sangat tergoncang dan keluarga akan hancur.

Belum lagi kita mendengar, banyak TKI diperlakukan semena-mena di negeri orang. Mereka menjadi budak. Kita bisa mengingat sederetan kasus, mulai dari Ruyati yang harus dipancung karena membunuh majikannya, sampai Ceriyati yang turun dari

apartemen lantai 15 dengan tali karena tidak tahan dengan siksaan majikannya. Juga kasus pungutan liar di KBRI dan pemotongan gaji ilegal yang sistematis. Maka, langkah nyata yang bisa dilakukan untuk revolusi karakter adalah berhenti menyalurkan TKI ke luar negeri.

## Revolusi Media

Dewasa ini, kita mengenal pranata sosial yang baru yakni media. Setiap hari, orang menonton televisi. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula. Bahkan, anak usia satu tahun sering digendong di depan TV. Televisi sudah masuk ke rumah-rumah, bahkan ke kamar. Rumah yang tidak ada TV disebut rumah langka. Perkembangan yang pesat terjadi pula pada media cetak. Jutaan lembar koran setiap hari dicetak. Informasi mulai dari dunia bola, gaya hidup, politik, isu terkini sampai pada lowongan kerja.

Kemudian, manusia menemukan teknologi internet. Teknologi yang melipat dunia menjadi area yang sempit. Jarak dan waktu menjadi tidak relevan. Kita bisa berhubungan dengan komunitas dunia dengan sangat mudah. Sekarang adalah eranya media sosial, ada facebook, twitter, flickr dan masih banyak lagi. Media siaran, TV, koran, bisa ditampilkan lewat internet. Lebih canggih lagi, semua media tersebut sekarang bisa diakses lewat *mobile phone*. Di era 80-an, TV dalam satu desa hanya ada satu, sekarang TV sudah masuk ke saku baju dengan suara dan gambarnya.

Sekarang muncul pranata sosial yang membentuk karakter manusia lebih dahsyat dari pada sekolah dan keluarga, yaitu media. Anak belajar di sekolah hanya tujuh jam setiap hari. Tapi, anak bisa mengakses media 24 jam *full* tanpa jeda. Bangsa ini bisa mengakses media dari sejak bangun tidur hingga malam hari.

Media membawa dampak yang massif di masyarakat. Ketika TV menayangkan Piala Dunia, semua orang membicarakan bola. Media juga membawa gaya hidup bangsa ini. Dulu, wanita menggunakan celana ketat itu sangat aneh, namun sekarang model celana pensil sudah menjadi tren. Mobil di Indonesia tidak akan sebanyak ini kalau tidak ada iklan mobil di TV. Secara tidak sadar, TV sudah menjadi 'guru besar' bangsa Indonesia. Tidak hanya golongan mampu saja yang menjadi peserta didiknya, tapi semua

golongan. Bahkan golongan mahasiswa, dosen, profesor, dan guru besar menjadi peserta didiknya.

Setiap hari, kita disuguhi berita, mulai dari kasus kriminal, korupsi, bencana, kemiskinan, kisah perceraian para artis, sampai harga sepatu pemain sepak bola. Media setiap hari mengaduk-aduk emosi orang yang melihat atau membacanya. Emosi satu orang bergabung dengan emosi orang lain akan membentuk perasaan yang dominan di masyarakat (*public mood*). *Public mood* ini yang lama-kelamaan akan membentuk karakter suatu bangsa.

*Public mood* orang Indonesia cenderung negatif. Perasaan dominan yang berkembang di masyarakat adalah pesimis. Pikiran bangsa Indonesia terlalu banyak diserang dengan berita-berita negatif. Mereka mengenal Indonesia sebagai bangsa yang sudah bobrok. Bangsa Indonesia sudah tidak percaya dengan pemerintah karena setiap hari yang mereka lihat adalah berita korupsi.

Dunia maya sekarang menjadi dunia baru yang kita kenal. Dunia yang sangat luas tapi sempit. Segala informasi bisa kita dapatkan, dari hal baik dan tidak baik. Semua orang bisa mengaksesnya, termasuk anak-anak. Kita melihat, anak-anak berjajar di warnet siang hari bahkan sampai larut malam atau pagi. Mereka sudah kecanduan dengan internet, mulai dari *game online* sampai situs porno. Maka kita tidak heran, anak SD sekarang sudah mengerti tentang hubungan seksual. Berdasarkan survey BKKBN tahun 2008, 4.726 responden, sebanyak 97 persen mengatakan pernah menonton pornografi, dan 93,7 persen mengaku sudah tidak perawan. Bahkan 21,26 persen sudah pernah melakukan aborsi.

Bapak Jokowi dan Jusuf Kalla, media bergerak dengan sangat cepat membentuk karakter anak bangsa. Media bisa jadi sahabat baik, tapi juga bisa menghancurkan negara. Pemerintah harus mengambil perannya untuk betul-betul konsen pada revolusi media. Pemerintah harus konsen dalam mengurangi hingga menutup situs-situs pornografi. Pemerintah harus punya saluran TV yang canggih, populer, dan menarik guna menyebarkan good news untuk Indonesia. Pemerintah harus berani menggelontorkan dana untuk ini. Kalau tidak, media akan menghancurkan negeri ini dan Anda berdua.[]

# CATATAN UNTUK REFORMASI PENDIDIKAN

*Ismi Nurillah*

**K**emampuan maju atau mundurnya suatu negara terletak pada manusia-manusia yang mendiami negara itu. Roda kemajuan negara terletak pada bagaimana manusia membawa laju arah ke mana negara akan menepikan diri. Mengingat peran penting manusia dalam sebuah negara, maka potensi manusia dapat dijadikan tolak ukur maju mundurnya negara. Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu hal terpenting guna meningkatkan taraf kehidupan. SDM merupakan kunci pokok dalam kemajuan negara di samping sumber daya alam.

Meningkatkan SDM menjadi berkualitas tentu berdampak positif bagi suatu negara. Peningkatan taraf hidup dan pendapatan harus didukung SDM yang berkualitas, untuk menciptakan hal itu, tingkat pendidikan harus baik agar negara maju. Saat ini diperlukan reformasi pendidikan secara besar-besaran, karena sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia belum sesuai dengan kondisi bangsa ini. Ini dapat kita lihat dari carut marutnya sistem pendidikan dan belum menemukan titik terang.

Jangan sampai menutup mata dengan apa yang terjadi dalam sektor pendidikan. Banyaknya penyimpangan, kecurangan, bahkan pelanggaran di bidang pendidikan tentu menjadi tugas rumah yang harus segera dibereskan. Contohnya, carut marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN), juga Kurikulum 2013 yang

pelaksanaannya dikritik pakar pendidikan karena belum sesuai dengan kondisi bangsa.

Jika kita berbicara carut marutnya pelaksanaan UN, akan semakin membuka mata kita bahwa para pejabat kita terlalu tergesa-gesa menerapkan sistem, tanpa melakukan evaluasi mendalam terhadap penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan UN. Lalu yang menjadi pertanyaan besar terhadap pelaksanaan UN adalah, apakah semua siswa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat menarik manfaat dari pelaksanaan ujian ini?

Dari penelitian penulis dalam rangka lomba Karya Ilmiah MPR RI, didapat kesimpulan, hanya 2 dari 10 siswa yang menarik manfaat dari pelaksanaan UN. Lalu apa kesalahan dalam pelaksanaan ujian ini? Jawaban masih sulit ditemukan, yang terlihat adalah pelaksanaan UN setiap tahun semakin memberatkan siswa, bahkan menekan psikologi siswa. Bahkan ada siswa yang melakukan bunuh diri karena tertekan. Penulis melihat fenomena ini didasarkan pada ketidaksiapan pemerintah dalam mengeksekusi sistem UN yang justru membuat siswa jauh dari nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa.

Pendapat penulis bukan berdasarkan opini tanpa fakta, tapi didasarkan pada penelitian. Mestinya, ini membangunkan sistem pendidikan. Melihat tingkat kecurangan UN yang semakin massif dan terorganisir, kecurangan guru serta kecurangan PNS yang ikut andil dalam kebocoran soal, bahkan korupsi dalam percetakan soal ujian, serta permainan monopoli tingkat atas, semakin memperlihatkan bahwa Indonesia masih memaksakan diri dan tidak mengevaluasi secara baik dan benar. Jika ini dilakukan terus-menerus, dapat dipastikan cita-cita menjadi bangsa besar dengan SDM yang berkualitas hanya impian kosong dan terus jauh tertinggal.

Berikutnya, mencuat kasus pemberlakuan Kurikulum 2013 yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Demikian halnya dengan tidak meratanya akses pendidikan bagi masyarakat, serta transportasi pendidikan yang tidak seimbang antara perkotaan dan perdesaan. Ditambah kenyataan pendapatan guru yang jauh dari sejahtera, maka ini adalah potret kecil dari situasi pendidikan bangsa saat ini.

Tugas rumah pemerintahan baru adalah bagaimana cara meningkatkan pendidikan rakyat agar meningkatkan mutu SDM, sehingga rakyat pribumilah yang akan mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) negara ini. Bukankah hakikat berdirinya negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya?

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka fungsi dan peran negara sangat diperlukan. Ini juga berkorelasi dengan siapa yang akan memimpin bangsa selama lima tahun ke depan. Kita harus mengapresiasi kedua calon presiden, karena mereka berniat tulus untuk memajukan bangsa. Sebagai pengontrol pemerintah, rakyat seharusnya mengambil bagian mengawasi kinerja pemerintah agar tingkat kepercayaan terhadap pemerintah semakin besar dan pemerintah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan rasa tanggung jawab.

Sembilan langkah Jokowi dalam reformasi pendidikan cukup menarik perhatian penulis. Pertama, memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.

Menurut penulis, kepribadian Pancasila dan menjunjung nilai-nilai bangsa ini semakin tergerus oleh zaman dan pemikiran yang liberal sehingga nilai-nilai tersebut sulit ditemukan. Karena itu melalui pendidikan dini yang ditanamkan kepada generasi muda akan membentengi agar nilai-nilai Pancasila terpahat dalam mental anak negeri.

Kedua, melakukan realokasi dan peningkatan efisiensi terhadap pos-pos belanja pendidikan dalam APBN yang dipandang tidak efektif. Menurut saya, realokasi adalah salah satu cara untuk mengefektifkan APBN sehingga belanja negara yang kurang efektif dapat diminimalisir. Dana itu dapat dialokasikan ke bidang lain guna pemajuan dan pengefektifan APBN.

Ketiga, melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan jaminan biaya ditanggung oleh negara, serta mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama di daerah yang sulit terjangkau. Langkah ini menarik sekali. Wajib belajar 12 tahun dapat menjawab persoalan kebodohan, setidaknya siswa dibekali keterampilan dan *skill*

meskipun tidak secara mendalam. Dengan wajib belajar 12 tahun, para siswa telah siap untuk terjun dalam dunia pekerjaan. Selain itu, pengembangan akses pendidikan jarak jauh untuk daerah yang sulit dijangkau merupakan hal yang mutlak dilakukan. Sesuai amanat konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak, maka cara itu dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Apabila dilakukan secara baik dan benar maka pelaksanaan UN dapat dikatakan seimbang, karena daerah terpencil memiliki akses pendidikan walaupun UN bertaraf nasional.

Keempat, meningkatkan kesejahteraan guru dan pengajar. Kesejahteraan guru dan pendidik adalah hal yang penting dalam pengembangan pendidikan. Mereka yang akan mencetak generasi masa depan, di tangan guru, masa depan bangsa ini dipertaruhkan. Sangat wajar kesejahteraan guru menjadi penting, agar para pendidik dapat dengan tenang melaksanakan tugasnya dan tidak direpotkan dengan biaya hidup sehingga dari tangan mereka tercipta bibit-bibit unggul bangsa. Apabila kita bandingkan, pendapatan guru di Malaysia lebih tinggi karena mereka menyadari peran dan fungsi seorang pendidik dan pengajar sangat strategis.

Kelima, merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam mendobrak pendidikan di negeri ini adalah dengan merevisi kurikulum yang sesuai dengan budaya dan kemampuan bangsa Indonesia. Ia juga harus menjunjung tinggi kearifan lokal serta meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena ini akan berdampak pada masa depan bangsa.

Keenam, meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan. Kualitas dan fasilitas merupakan pendukung dari proses pembelajaran. Ini akan memudahkan siswa dalam memahami dan berkreasi guna pengembangan fikiran, sehingga lebih kompetitif dan berfikir kritis. Memajukan sebuah pendidikan, maka fasilitas sekolah harus terpenuhi terlebih dahulu.

Ketujuh, mengembangkan fasilitas pengembangan sekolah. Fasilitas pengembangan sekolah seperti komputer merupakan hal yang patut diapresiasi. Ini memudahkan siswa dalam mempelajari hal baru. Di era internet saat ini, tidak dapat terelakan karena

dunia sudah menggunakan jaringan internasional sehingga koneksi IPTEK sangat diperlukan. Selagi diawasi dan dibimbing, pemberian komputer tentu sangat baik. Selain itu, pemberian beasiswa bagi yang berprestasi dan kurang mampu merupakan bentuk apresiasi kita dan merupakan satu cara untuk mendukung aktivitas belajar siswa. Diharapkan, dengan beasiswa tepat sasaran dan tepat manfaat, murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan yang perlu diperhatikan adalah agar pemberian beasiswa ini.

Kedelapan, memberikan insentif kepada perusahaan/lembaga swasta yang menjalankan program magang bagi lulusan baru dengan persetujuan dari pemerintah. Kesembilan, mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri termasuk Balai Latihan Kerja (BLK). Sekolah kejuruan harus mendapat perhatian yang lebih, karena sekolah kejuruan berkomitmen menciptakan lulusan yang siap kerja.

Untuk meningkatkan sumber daya manusia, reformasi pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Hubungan yang erat antara pendidikan dan SDM berkualitas sangat mutlak, sehingga tidak bisa dipisahkan.[]

# JANGAN BERI HARAPAN PALSU

*Rian Mantasa Salve Prastica*

Potret mirisnya dunia anak-anak untuk meraih pendidikan layak banyak kita baca di media massa. Kejamnya lingkungan sebagai anak jalanan membuat mereka sulit bertahan untuk mengejar cita-cita. Hasilnya, mereka menjadi produk gagal pendidikan kita. Seperti virus menular, produk-produk gagal ini akan cepat menularkan pengaruh buruk bagi anak-anak jalanan lain untuk tidak sekolah.

Hujan deras yang mengguyur Solo pada 2013 lalu meninggalkan bekas kenangan tersendiri bagi relawan Solo Mengajar di Taman Cerdas (TC) Gandekan, Solo. Malam itu, TC Gandekan ramai dengan hiruk-pikuk anak yang akan belajar dengan sejumlah volunteer Solo Mengajar. Namun, tiba-tiba hujan deras. Terpaksa kegiatan belajar di TC Gandekan diliburkan.

Saat itu, masih ada beberapa relawan yang menunggu hujan reda sebelum beranjak pulang. Tak lama kemudian, seorang anak datang tergopoh. Bajunya basah, dia memegang bukunya yang lusuh. Tapak kakinya jelas membelah genangan air. Para relawan terperanjak dengan suara itu. Sedikit terengah-engah, ia berkata, "Mas, Mbak, ayo belajar. Kami punya PR banyak, enggak bisa ngerjain. Ajarin ya."

Di bagian Indonesia yang lain, ketika rakyat Indonesia hiruk pikuk dengan konflik horizontal mengenai pemenangan kursi RI 1 antara Prabowo dan Jokowi, pada 21 Agustus 2014 lalu, anak-anak dari Sumba Timur dan Banjarmasin rela berdesakan antre di jembatan yang kondisinya kritis untuk bertemu guru-guru.

Kami harus berhati-hati, karena jika terpeleset dan jatuh, tubuh akan terseret derasnya arus sungai di bawah. Kami tidak peduli konflik tentang pilpres kemarin. Karena kami yakin, siapapun yang menang, mereka berdua akan memperjuangkan nasib kami. Iya, kan? Bapak Presiden, jangan sia-siakan semangat kami untuk belajar. Perjuangkan reformasi pendidikan di negara kami, Indonesia, agar nantinya, kami bukanlah kumpulan orang-orang marginal yang tidak bisa turut serta berkontribusi memajukan bangsanya.

### **Kami Penerima Harapan Palsu**

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu janji kemerdekaan yang tertuang pada Pembukaan UUD 1945. Maka tak heran, visi dan misi seorang calon pemimpin di negeri ini pasti mencakup sektor pendidikan. Mulai dari membebaskan biaya SPP siswa miskin, gratis seragam sekolah, gratis buku pendidikan, dan serba gratis lainnya untuk memikat hati khalayak ramai. Berdasarkan kondisi di lapangan sekarang, janji calon pemimpin yang dulu digaungkan saat kampanye ke masyarakat banyak yang tak terealisasikan. Janji jaminan siswa miskin untuk mengenyam pendidikan berkualitas di sekolah bagus hanya wacana. Siswa miskin tetap sekolah di tempat orang-orang miskin. Harapan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas di sekolah top, terhambat karena biaya. Lagi-lagi, nasib siswa miskin dipertaruhkan, sehingga mereka tidak bisa menikmati pendidikan berkualitas di sekolah, yang katanya, mahal.

Berdasarkan realita itu, omong kosong ketika calon-calon pemimpin itu akan memperjuangkan hidup kami, rakyat miskin, melalui pendidikan. Sudah banyak yang pernah menjanjikan, dan sudah banyak pula mereka hanya memberikan harapan palsu kepada kami untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Habis manis sepah dibuang. Ketika kualitas pendidikan dijadikan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi kami, bisa jadi itu benar. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat kami. Ekonomi masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan yang kami dapat.

Sia-sia mengharap janji peningkatan ekonomi melalui pendidikan berkualitas bagi rakyat tak berpunya. Hari ini, kualitas pendidikan yang baik terdapat pada sekolah yang berkualitas pula. Misalnya, sekolah yang berakreditasi A, sekolah bertaraf internasional, *bilingual school*, dan sebagainya. Jangan tanyakan lagi biaya yang dihabiskan seorang siswa untuk mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah tersebut. Lagi-lagi, biaya mahal pada sekolah berkualitas unggul menjadi hambatan rakyat tak berpunya untuk mengenyam pendidikan berkualitas. Akibatnya, siklus kemiskinan yang diharapkan dapat berubah melalui pendidikan berkualitas tidak dapat tercapai karena sulitnya rakyat tak berpunya untuk mengenyam pendidikan mahal. Dampak besarnya lagi, kemiskinan akan terus berputar-putar pada rakyat tak berpunya karena tak bisa menikmati kualitas pendidikan yang bagus karena biaya mahal.

### **Telanjangi Kami, Guru**

Perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan kurikulum seperti KBK, KTSP, K-13, dan entah apa lagi, pada akhirnya hanya perubahan nama sistem semata tanpa mengubah kualitas sistem pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: "The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education" yang dikeluarkan UNESCO yang diluncurkan di New York, Senin (1/3/2011), indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80. Berdasarkan data tersebut, Indonesia memiliki EDI kategori medium.

Kami tidak bisa menyalahkan pemerintah. Triliunan anggaran pendidikan setiap tahunnya untuk bidang pendidikan sudah cukup membuat kami mempercayai mereka untuk mengurus dan merawat sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Tidak hanya mahalnya biaya pendidikan yang menjadi masalah saat ini. Sistem pendidikan untuk menghasilkan generasi berkualitaslah yang perlu diperbaiki. Jika sistemnya sudah baik, kami pikir,

bukan di sekolah elit pun masyarakat menengah ke bawah bisa mengenyam pendidikan bagus.

Guru-guru Indonesia sekarang terlalu sibuk memikirkan kurikulum atau cara mengajar yang sudah ditetapkan pemerintah. Mereka membuat silabus, RPP, dan sebagainya. Jarang guru-guru kita yang menawarkan cara mengajar yang menyenangkan. Kebanyakan, mereka mengajar dengan sistem satu arah, seperti ceramah yang membosankan. Hasilnya, siswa banyak yang tidak berminat belajar. Siswa-siswa kita sekarang, membutuhkan cara belajar yang berbeda, yang sesuai dengan kondisi di era globalisasi sekarang.

Satu lagi, ketika kurikulum K-13 mulai diterapkan, banyak sekolah-sekolah yang belum mendapatkan buku yang menganut sistem kurikulum yang baru. Hasilnya, banyak guru mengajar seadanya, bahkan ada yang puasa mengajar. Menunggu kepastian buku-buku baru datang. Guru-guru kami tidak memiliki alternatif untuk mengajar. Pelatihan-pelatihan kemarin sepertinya hanya angin lalu, seperti ajang numpang numpang, menggugurkan kewajiban mereka sebagai guru.

Sekarang, kami mulai meragukan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengurus ini. Indonesia membutuhkan reformasi pendidikan. Indonesia membutuhkan kurikulum ideal di setiap jenjang pendidikan. Indonesia membutuhkan orang-orang yang masih rela merawat pendidikan kita tanpa pamrih, tanpa memikirkan penghargaan sebagai guru berprestasi atau guru dengan saldo tabungan yang tebal.

Indonesia memiliki banyak permasalahan kompleks yang harus diselesaikan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Dia akan bertanggungjawab dengan amanah yang diembannya. Dia tidak akan lari, dia tidak akan lepas tanggungjawab, dan dia memegang teguh idealisme yang baik demi tercapainya solusi permasalahan yang ada.

“Banyak guru, dokter, hakim, insinyur, banyak orang yang bukunya satu gudang dan diplomasnya segulung besar, tiba dalam masyarakat menjadi ‘mati’, sebab dia bukan orang masyarakat,” demikian kata Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau HAMKA. Hidupnya hanya mementingkan dirinya, diplomasnya hanya untuk

mencari harta, hatinya sudah seperti batu, tidak mempunyai cita-cita, lain dari pada kesenangan dirinya. Pribadinya tidak kuat. Dia bergerak bukan karena dorongan jiwa dan akal. Kepandaiannya yang banyak itu kerap kali menimbulkan takutnya. Bukan menimbulkan keberaniannya memasuki lapangan hidup.

Berawal dari bapak bangsa, mengajar adalah tugas mulia seorang pemimpin. Soekarno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Hamka, dan negarawan lainnya telah membangun kualitas manusia di Indonesia dengan mengajar, melalui pendidikan.

Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dia tidak rapuh ketika hanya seorang diri yang harus menanggung masalah sosial tersebut. Dia tidak akan pergi ketika yang lain menjauh. Dia berani dan tega membunuh egonya, karena dia tahu hal tersebutlah yang menyebabkan dirinya mencapai kepuasan terbaik dengan melibatkan dirinya bekerja untuk masyarakat.

Sekarang, Indonesia mempercayai Jokowi untuk memimpin, membuat kesejahteraan yang selalu didambakan sejak Indonesia merdeka. Salah satu visi dan misi Jokowi untuk mengembangkan kepribadian dalam kebudayaan adalah, “Kami berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa,” dengan penekanan pada sepuluh (10) prioritas utama, mencakup masalah kurikulum, fasilitas pendidikan, dan biaya sekolah yang menjadi permasalahan di dunia pendidikan Indonesia sekarang.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang saya lakukan pada Juli 2014 lalu memberikan banyak gambaran mengenai satu lagi potret dunia pendidikan Indonesia di pelosok. Fasilitas pendidikan di Desa Sambirejo, yang terletak di kaki Gunung Lawu, bisa dikatakan kurang layak untuk dijadikan tempat belajar. Bukan hanya satu sekolah saja, semua gedung sekolah memiliki kondisi yang sama.

Terlepas anggapan semua siswa yang begitu menikmati keadaan sekolah mereka, jika kita berpikir sebagai seorang aktivis, sebagai seorang mahasiswa, ketika melihat kondisi seperti itu, hati kita pasti akan tergerak untuk membuat perbaikan. Namun, dengan segala keterbatasan, kita masih bisa menggerakkan hati pemimpin-pemimpin negeri ini untuk memperhatikan kondisi mereka.

Komitmen Jokowi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia harus kita pegang erat. Pengalaman Jokowi di kancah politik pemerintahan, dari Solo sebagai walikota, kemudian bergulir menjadi Gubernur DKI Jakarta, membuat masyarakat terpicat untuk menjadikan Jokowi sebagai sosok nomor satu di Indonesia. Sekarang, mari kita doakan bersama, semoga amanah berat itu tidak salah memilih pundak yang akan mengemban jutaan aduan di negeri penuh masalah ini. Bisa jadi, di kemudian hari, Jokowi bertindak melenceng dari visi misi awal kampanye.

Sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat, yang selalu menggaungkan nasib rakyat di jalanan bersama spanduk-spanduk berslogan, mari kawal bersama-sama program-program Jokowi, terutama di bidang pendidikan, agar Indonesia dapat melahirkan manusia-manusia berkualitas yang mampu berkontribusi memajukan bangsa Indonesia. Siapa lagi jika bukan mahasiswa? Seorang Soeharto mendeklarasikan turun jabatan dari kursi RI 1 karena mahasiswa. Gerakan serentak di seluruh Indonesia saat itu membuat hati Soeharto gentar. Hasilnya, rakyat Indonesia memasuki era reformasi. Jangan sampai, mahasiswa saat ini adalah bibit-bibit pemimpin yang hanya memberikan mimpi indah kepada masyarakat. Katanya, selalu memperjuangkan nasib rakyat Indonesia, penderitaan rakyat Indonesia. Namun, saat dihadapkan dengan masalah rumit di hadapan mereka, mereka tutup mata. Jangan sampai!

Untuk mendukung Jokowi, kita tidak perlu imbalan apapun, bukan? Jokowi kenal kita pun tidak. Tidak perlu berharap dia akan datang, mengetuk pintu kita, mengucapkan terimakasih telah mendukung selama ini. Kita tidak memikirkan diri kita, kita sedang memikirkan nasib orang banyak. Nasib jutaan rakyat Indonesia, nasib ribuan siswa-siswa yang menunggu program-program pendidikan terbaik. Kita hanya bisa menunggu. Menagih semua janji yang telah Jokowi tuliskan di kertas-kertas visi dan misi saat kampanye. Kita akan bersama-sama menagih janji seorang negarawan baru, Jokowi, Presiden terpilih. Selamat berjuang melunasi semua hutang janji-janji kemerdekaan, Bapak Presiden.[]

# REVOLUSI INOVASI

*Rafi Putra Arriyan*

**S**aya tidak akan berbicara tentang strategi politik, main belakang dan lain-lainnya. Karena saya tidak terlalu mengerti dan mendalami itu. Saya hanya akan bercerita tentang pengalaman yang saya rasakan jika berinteraksi dengan hal yang berafiliasi dengan lembaga pemerintah.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin bisa lepas dari interaksi dengan lembaga pemerintah. Dimulai dari perjalanan menuju kampus, tiap harinya saya selalu melewati jalan yang membutuhkan kemampuan menyeberang dan kesabaran tingkat tinggi, karena lampu- lampu lalu lintas yang diletakkan di jalan itu tidak terlalu diperhatikan oleh para pengendara kendaraan bermotor. Kenapa tidak diperhatikan? Mungkin ilustrasi yang saya buat bisa membantu.

Tidak seperti lampu lalu lintas kebanyakan, lampu lalu lintas ini diletakkan di jalan yang lurus, dengan pengaturan, saat pagi sampai sore hari lampu lalu lintas akan memunculkan warna merah kuning hijau seperti lampu kebanyakan. Setiap 60 detik lampu akan menjadi merah selama 15 detik. Saat malam tiba lampu akan berkedip dengan warna kuning. Sehingga pejalan kaki harus berusaha sendiri agar tidak tertabrak saat menyeberang jalan.

Menurut saya, kehadiran lampu merah ini tidak terlalu berguna. Saat lampu berwarna merah pun para pengendara motor tetap meneruskan lajunya. Apalagi saat malam tiba, lampu lalu lintas yang berkedip mengeluarkan cahaya kuning menjadi hiasan jalan semata.

Saat bertanya kepada teman, yang juga tiap harinya melewati jalan yang sama untuk ke kampus, ia mengatakan bahwa menunggu lampu penyeberangan menyala sering berbuah sakit hati. Waktu yang disediakan untuk penyeberang sangatlah singkat, hanya 15 detik. Dengan waktu sesingkat itu biasanya kita hanya bisa mencapai setengah dari lebar jalan.

Saya pernah melakukan beberapa percobaan. Pertama pada jalan yang benar-benar lengang, saat itu pukul 04.30 pagi, saya sedang mencari makan untuk sahur. Dengan menggunakan *stop watch* saya mencoba menyeberangi jalan dengan berjalan kaki normal, waktu yang dihabiskan kurang lebih 13 detik. Kedua, pada jam berangkat kuliah pagi, di mana lampu lalu lintas masih memunculkan warna merah dan ada Bapak Polisi di sana. Karena terlalu sibuk menjaga nyawa, saya tidak sempat menyalakan *stop watch* dan saat melihat ke belakang ketika berhasil menyeberang, lampu lalu lintas sudah berwarna hijau kembali.

Asumsi saya perjalanan menyeberang tadi lebih dari 15 detik. Yang terakhir saat malam hari, dengan kondisi Jalan Margonda Depok dipenuhi oleh kendaraan bermacam rupa. Penyeberangan di malam hari selalu penuh kejutan. Jika yang menyeberang ramai, tentu akan terasa tenang. Namun jika sedikit yang menyeberang akan sangat menegangkan. Dan ini selalu kami rasakan setiap malam.

Sudah bertahun-tahun pengalaman menyeberang seperti ini kami, warga Kober, rasakan. Jika ditanya bagaimana rasanya? Tentu sangat tidak menyenangkan. Dahulu pernah diwacanakan akan ada jembatan penyeberangan untuk memberikan kenyamanan kepada warga, namun sampai sekarang hanya lampu lalu lintas tidak berguna. Padahal jika kita lihat dari dampaknya, setiap orang yang menyeberang akan menambah kemacetan di Kota Depok tercinta yang kata walikotanya, “Nikmati saja macetnya.”

Saya juga ingin bercerita tentang pengalaman seseorang yang saya baca saat membuat Kartu Tanda Penduduk. Sebut saja sang pembuat KTP ini bernama Andi. Andi adalah seorang remaja yang lahir di tahun 1993, karena sudah cukup umur, ia pergi membuat KTP. Setelah mengurus berkas-berkas yang menghabiskan waktu, sampailah pada tahap mengumpulkan berkas. Namun sayang

sekali, Andi membawa pas foto dengan warna background yang salah. Walhasil tertundalah pembuatan KTP Andi di hari itu. Ia harus mengambil foto kembali, mencetaknya, ke kantor pemerintahan dan berharap tidak ada lagi kesalahan yang ia lakukan karena konsekuensinya sangat memotong waktunya yang berharga.

Rakyat Indonesia sudah hidup dalam kondisi yang sulit. Idealnya pemerintah memberikan sedikit kebahagiaan kepada kita, agar sejenak saja kita melupakan kesulitan hidup. Namun sayangnya pemerintah seolah-olah ingin ikut meramaikan kesulitan yang kita rasakan. Banyak sekali interaksi kita dengan pemerintah yang seolah-olah dirancang untuk menyulitkan kita.

Berkaca pada pengalaman menyeberang di Jalan Margonda. Pemerintah sepertinya ingin membuat pejalan kaki dan pembawa kendaraan bermotor mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Dan parahnya, kita diminta untuk menikmatinya. Dengan menyeberang tanpa jembatan penyeberangan, para pejalan kaki akan berjalan melalui ketidakpastian, dan apa yang paling menakutkan bagi manusia? Ketidakpastianlah jawabannya.

Para pembawa kendaraan bermotor akan merasakan kemacetan yang tak berkesudahan. Saat seorang pejalan kaki lewat, otomatis pembawa kendaraan bermotor akan berhenti sejenak. Jika satu kendaraan berhenti, maka kendaraan yang ada di belakangnya juga ikut berhenti. Bayangkan jika tiap kendaraan harus berhenti minimal satu kali untuk membuat pejalan kaki bisa menyeberang, tentu dampaknya ada kemacetan yang sangat panjang. Begitu pula pada kisah Andi. Waktu yang seharusnya bisa Andi pakai untuk meningkatkan kapasitas dirinya, yang tentu saja akan berdampak pada perkembangan bangsa Indonesia, harus direlakan untuk mengganti background dari pas foto.

Dari fenomena tersebut, terang saja Indonesia terlihat tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga. Karena masyarakat Indonesia dikondisikan untuk tidak berkarya. Banyak waktu kita habiskan menjalani hidup sehari-hari berada di bawah bayang-bayang dari pemerintah yang tidak menyenangkan. Kisah lampu merah yang kurang berguna dan warna pas foto yang salah hanyalah sebagian kecil dari kontribusi pemerintah dalam

pengondisian masyarakatnya untuk tidak berkarya. Internet lambat di dunia saya rasa juga membuat Indonesia menjadi kurang produktif, dan kejadian matinya listrik yang cukup sering juga berandil banyak dalam berkurangnya produktivitas masyarakat Indonesia untuk berkarya.

Kenapa sih lebih banyak masyarakat Indonesia yang membicarakan orang dari pada membicarakan gagasan? Mungkin jawabannya karena membicarakan gagasan memerlukan waktu yang lebih banyak dibandingkan membicarakan orang. Dan di Indonesia, waktu yang tersedia untuk membicarakan gagasan menjadi sangat sedikit, karena banyak sekali hal-hal yang seharusnya sederhana namun membuat kita mengalokasikan waktu yang banyak untuk menyelesaikannya, seperti mengganti warna background pas foto.

John Maeda dalam bukunya *Law of Simplicity* mengatakan, semakin singkat waktu yang kita gunakan dalam menyelesaikan sesuatu, penyelesaian sesuatu itu akan terasa lebih sederhana. Namun karena waktu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya sederhana itu sangat lama, menjadi terasa kompleks. Sehingga kita akan merasa hidup dalam dunia yang kompleks, dan kita tidak punya waktu dalam membicarakan gagasan untuk bangsa.

Oleh karena itu Pak Jokowi, tentu kita ingin rakyat Indonesia dapat membuat karya yang produktif untuk bangsanya. Namun jika pengalaman hidup yang kita rasakan masih seperti sekarang, maka kapan kita akan mempunyai waktu untuk berkarya?

Bapak selalu mendengungkan revolusi mental untuk Indonesia. Saya rasa selain mental kita juga perlu melakukan revolusi pengalaman berinteraksi dengan lembaga pemerintah. Kembali mengungkit cerita lampu lalu lintas kurang berguna dan *background* salah pas foto dan interaksi lainnya yang masyarakat lakukan, saat ditanya gimana sih pengalamannya saat berinteraksi dengan sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah? Hampir semua orang akan menjawab, "Pengalaman yang tidak menyenangkan."

Pemerintah sepertinya terlalu nyaman dengan pelayanan yang mereka berikan. Terlebih lagi mereka tidak memiliki kompetitor

dalam menjalankan pelayanan mereka. Pelayanan? Menurut saya segala yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya bertujuan untuk melayani warga negaranya, namun ironisnya sebutan untuk instansi yang melayani warga negara tersebut sangat bertolakbelakang, pemerintah=tukang perintah.

Mari kita kesampingkan dulu masalah bahasa. Pemerintah terlalu nyaman dengan pelayanan mereka. Di lapangan, mereka tidak memiliki saingan. Mana ada instansi swasta yang punya wewenang untuk membuat KTP atau Akta Keluarga? Dan dampaknya, masyarakat tidak memiliki pilihan dan terpaksa untuk menjalani pengalaman tak menyenangkan itu selamanya.

Oleh karena itu Pak Jokowi, tentu Bapak ingin masyarakat Indonesia menghasilkan karya yang luar biasa untuk memajukan bangsa kita. Namun yang selama ini kami rasa pemerintah hanya memerintah dan berharap saja agar karya-karya itu hadir ke dunia, sama sekali tidak memberikan pelayanan yang dapat membantu kami mewujudkannya. Saat ini kita masuk ke era teknologi menjadi bagian dari kebutuhan primer, dan pada era ini start up sangatlah menjamur.

Dari tren-tren yang ada di dunia, inovasi teknologi yang besar dimulai dari start up, lihat saja Facebook dan Whatsapp. Di luar Indonesia, pemerintah negara sangatlah menjaga *start up-start up* ini dan mendukung perkembangan mereka, bahkan pemerintahan Obama sampai membuat undang-undang untuk mendukung perkembangan *start up* di negaranya. Sayangnya di Indonesia, pemerintah kita masih santai-santai. Hanya mengadakan even secara berkala dan kemudian melepaskan mereka.

Karena kondisi ini, banyak perusahaan teknologi berbasis *start up* di Indonesia mencari dukungan ke luar negeri. Baru-baru ini ada perusahaan *game* asal Bandung yang berhasil mengumpulkan Rp 600 juta dari masyarakat Amerika. Kemudian mereka ditanya, kenapa mencari dukungan di luar negeri? Jawabannya sangat membuat sedih hati. "Kami sudah berusaha untuk mencari dukungan dari pemerintah, sayangnya kami tidak mendapatkannya, jadi kami perluas jaringan dan memasukkannya ke pendanaan gotong royong masyarakat (*crowdfunding*) di luar negeri, dan syukurlah kami mendapat dukungan yang lebih besar daripada yang kami bayangkan," ujar mereka.

Banyak potensi-potensi Indonesia yang beralih ke luar negeri, karena menurut mereka interaksi dari pemerintah tidak sederhana dan cenderung menyulitkan. Karena itulah Pak, tolong sederhanakan interaksi warga dengan pemerintah Indonesia. Sebab kesederhanaan dari interaksi dengan pemerintah dapat membuat kami bisa lebih fokus dalam berkarya, bukannya menghabiskan waktu untuk berpikir akan berfoto menggunakan background warna apa.[]

# JANJI MENCERDASKAN NEGERI

*Shoim Mardiyah*

**S**enin pagi, upacara bendera berlangsung tidak jauh berbeda dengan yang dulu saya alami. Bisik-bisik di kerumunan siswi kelas VI, adu injak kaki di barisan kelas IV putra, serta bapak-ibu guru yang khidmat melafalkan sila demi sila Pancasila.

SDN Baratan bukanlah sekolah bonafit. Tidak genap 130 siswa dari total enam kelas. Berdasarkan pengakuan kepala sekolah, mayoritas siswa di sana adalah mereka yang kurang mampu secara ekonomi, atau tidak lolos seleksi masuk SD lain. Sebanyak 60 % siswa berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dengan keadaan demikian, pemerataan beasiswa menjadi salah satu masalah yang dialami oleh kepala sekolah.

Ketika bel tanda jam pelajaran dimulai, tak lantas seluruh siswa duduk di kelas dan mendapatkan materi belajar dari wali kelas masing-masing. Mereka masih bermain kejar-kejaran, bekel, maupun berlari keluar pagar untuk membeli jajanan. Menurut mereka, guru belum memberikan jadwal pelajaran harian, sehingga kegiatan belajar-mengajar belum dimulai hari itu. Mulanya kami menganggap hal ini sebagai sebuah kewajaran, sebab memang hari sekolah pertama di tahun ajaran baru. Namun ketika hari-hari berikutnya tetap saja demikian keadaannya, tentu timbul perasaan janggal atas kondisi tersebut.

Ternyata, pada minggu awal sekolah, guru di sekolah itu bukan hanya masih berkuat pada penyusunan jam belajar siswa, tetapi juga mengalami kesulitan melaksanakan tuntutan kurikulum baru yang masih hangat menjadi perdebatan. Permasalahan yang

timbul dalam hal teknis juga ditemui, seperti belum adanya buku pegangan bagi guru maupun siswa. Dalam hal kemampuan mengajar, beberapa guru mengaku kesulitan untuk memenuhi tuntutan kurikulum. Mereka menganggap para pembuat kurikulum tersebut semena-mena tanpa mempertimbangkan kondisi kemampuan akademis dan intelektual para guru.

Memang tidak salah apabila orangtua mengharapkan kualitas pendidikan dari sekolah yang terpercaya bagi anaknya. Meskipun status atau standarisasi sekolah telah dihapuskan, tetap saja masyarakat memiliki penilaian mana sekolah unggulan dan mana yang bukan. Hal ini menjadi cerminan betapa belum meratanya kualitas pendidikan, pun di Yogyakarta yang disebut sebagai 'kota pelajar' ini. Namun, setidaknya keluhan akan kurikulum baru yang belum jelas di mata guru ini tidak hanya dialami oleh sekolah non-unggulan ini, bahkan sekolah yang dulunya memiliki embel-embel RSBI juga mengalami kasus yang sama.

Konon, kurikulum baru yang diberikan kepada siswa memiliki basis pengembangan kepribadian. Ketika mencermati beberapa poin dalam visi misi dan rencana strategis yang akan ditempuh oleh pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK, memang terdapat wacana demikian. Dalam 9 Langkah Strategis yang akan mereka tempuh bagi perbaikan Indonesia, pada poin ke-8 juga disebutkan akan diadakannya revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Memang terdapat kesesuaian antara apa yang direncanakan oleh Jokowi-JK dengan kurikulum pendidikan 2013 yang lebih dahulu disahkan. Saya sependapat apabila pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang fundamental dalam kehidupan manusia. Tingkat pendidikan memang akan menentukan kemampuan intelektual seorang siswa di dunia persaingan kerja nantinya. Bahkan, hanya mereka yang bergelar pendidikan tinggi yang mampu menjabat di sebuah posisi strategis. Jalan pendidikan juga menjadi jalan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Perbaikan perekonomian bangsa juga dapat dilalui dengan jalan meningkatkan kualitas SDM meskipun tidak melulu melalui pendidikan formal.

Dalam kebijakan pendidikan berkarakter, terdapat sembilan penekanan yang menjadi prioritas utama Jokowi-JK. *Pertama*, penataan kembali kurikulum dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dengan menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti; pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Memberikan pendidikan kewarganegaraan memang sebuah gagasan luhur, tetapi perlu perumusan lebih jelas dan strategi pembelajaran yang baru, supaya tumbuh minat dan ketertarikan siswa dalam mempelajarinya. Selama ini rasanya masih sama saja model belajar sejarah dengan sekedar memahami dan menghafal. Aplikasi pendidikan kewarganegaraan dan model evaluasinya juga perlu dirombak. Penilaian tidak cukup dari keaktifan, kesopanan dan kerapian perfoma siswa di kelas, tetapi juga bagaimana dia dapat mengamalkan ilmu yang diperolehnya pada kehidupan sehari-hari.

*Kedua*, janji untuk memperjuangkan biaya pendidikan terjangkau. Kiranya dari periode pemimpin tahun lalu pun demikian. Jika tahun sebelumnya terdapat subsidi pendidikan BOS (Biaya Operasional Sekolah) bagi sekolah dasar dan Bidik Misi bagi pendidikan di perguruan tinggi, maka masih akan adakah subsidi pendidikan yang demikian?

*Tiga*, tidak akan diberlakukannya lagi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional-termasuk di dalamnya UAN (Ujian Akhir Nasional). Padahal, hanya dalam waktu 8 bulan lagi, masa UAN akan menyambut siswa di tiga jenjang pendidikan. Apakah hal ini benar-benar dapat diwujudkan?

*Empat*, memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap ke-Bhineka-an yang Tunggal Ika. Dalam hal ini, pendidikan multikulturalisme juga perlu untuk diperkenalkan dan diajarkan kepada siswa. Sebagaimana yang kita sadari, akhir-akhir ini isu berbau SARA semakin meluas. Bahkan di daerah yang dinilai memiliki tingkat toleransi tinggi dan juga berbudaya,

yaitu Yogyakarta, ternyata menampakkan gejala aksi anarkis pada pertengahan 2014 lalu.

Degradasi moral terjadi di semua usia, termasuk anak sekolah. Entah mereka yang menjadi korban ataupun pelaku dari tindakan asusila dan amoral. Saya tertarik dengan kata 'revolusi mental' yang disinggung dalam visi misi Jokowi-JK, bahwa 70% substansi pendidikan dasar adalah berisi tentang aspek budi pekerti dan pembangunan karakter peserta didik.

*Lima*, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses transfer pengetahuan dan pendidikan. Jika siswa menjadi objek dari sebuah kurikulum yang berlaku, maka guru sesungguhnya berperan sebagai mediator. Alangkah baiknya jika kemampuan memediasi para guru ini juga ditingkatkan sehingga bukan hanya siswa saja yang makin cerdas, namun guru juga diimbangi oleh tenaga pengajar yang profesional.

*Enam*, rekrut dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah seperti apa guru yang berkualitas itu? Adakah standar maupun ukuran yang menjadi patokan seorang guru dikatakan berkualitas? Apakah karena ketulusannya mengabdikan diri pada dunia pendidikan? Atau karena kemampuannya membangkitkan kemauan belajar peserta didik? Selain pertanyaan yang perlu dijawab tersebut, sekiranya kita tidak lupa pada kasus-kasus terkait norma dan moral yang melibatkan para guru seperti KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) maupun kode etik keguruan.

*Tujuh*, pemberian jaminan hidup yang memadahi para guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional yang memadahi, pemberian asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas memadahi dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepegkataan dan karir.

*Delapan*, mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah dalam hal transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai.

*Sembilan*, memberikan perhatian tinggi terhadap pendidikan yang berbasiskan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam hal ini diperlukan adanya pengawasan ekstra dan sebisa mungkin dihindari timbulnya penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan akses teknologi. Realitas yang kita temui saat ini adalah masyarakat terbelenggu oleh kecanduan teknologi, sementara itu kalangan pelajar masih kurang arif dalam penggunaan teknologi.

Dari beberapa siswa yang mengaku memiliki laptop di rumahnya, mengatakan, ketika ia tidak bisa mengerjakan PR, ibunya kemudian mencarikan jawaban di internet. Ya, internet memang membawa banyak kemudahan meskipun rawan penyalahgunaan. Di tempat saya menjalani program KKN (Kuliah Kerja Nyata), seorang pemuda Karang Taruna yang terbiasa *ngemong* atau mendampingi belajar dan bermain anak-anak Dusun Baratan berpesan supaya jangan sampai mereka dipinjami HP atau *gadget*. Alasannya, ia tidak rela jika anak-anak kecanduan alat-alat elektronik canggih tersebut.

Bambang Indriyanto, seorang peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemdikbud, menjelaskan bahwa kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Ia menyebutkan bahwa guru dan kepala sekolah adalah faktor pendukung utama keberhasilan kurikulum. Dalam pandangan saya pribadi, selayaknya kurikulum 2013 dikenalkan terlebih dahulu seluas-luasnya sebelum disahkan, bahkan jika memungkinkan diadakan semacam uji coba bagi guru untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam mengimplementasikan kurikulum baru tersebut. Jika guru dianggap berhasil menerima kurikulum baru dengan baik, barulah siswa berhak menerimanya kemudian. Yang tidak kalah perlunya mendapatkan perhatian adalah mengenai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya dalam kurikulum 2013 yang diberikan untuk jenjang sekolah dasar, materi pramuka diberikan tidak lagi pada jam ekstrakurikuler melainkan pada intrakurikuler.

Sementara itu, penguatan karakter bangsa pastilah beriringan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Meskipun hingga saat ini, aplikasi dari nilai-nilai Pancasila yang diamalkan oleh siswa belum dapat diukur sebagai sebuah penilaian atau sebuah bahan evaluasi belajar. Jika para siswa tidak membedakan pertemanan berdasarkan agama, belum dapat sepenuhnya dikatakan telah

mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan multikulturalisme. Maka, timbullah pertanyaan dari kalangan akademisi, pendidikan Pancasila yang aplikatif itu seperti apa?

Terlebih pada sekolah-sekolah yang terdapat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) nilai-nilai nasionalisme benar-benar perlu ditanamkan. Berdasarkan kesaksian seorang kawan sepulang dari program KKN di daerah Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, bukan hanya infrastruktur sekolah yang minim, mengikuti perkembangan kurikulum pun sulit. Buku sebagai bahan ajar ketersediaannya terbatas dan sama sekali tidak *up to date*. Cerita lain dari kawan yang melaksanakan program KKN di Bengkayang, Kalbar, sarasehan nilai-nilai Pancasila yang diadakan oleh timnya menjadi program favorit masyarakat setempat. Masyarakat mengaku telah menunggu-nunggu adanya sebuah forum yang demikian dapat menumbuhkan pemahaman akan isi arti dan nilai-nilai Pancasila.

'Revolusi mental' yang direncanakan oleh Jokowi-JK selayaknya tidak hanya mengarah pada jenjang bangku sekolah. Para pemimpin negeri yang mungkin sudah puas mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan bangku kuliah patut menjadi sasaran dari revolusi ini. Lebih masuk ke dalam ranah kehidupan bermasyarakat, seluruh elemennya harus memiliki kesadaran penuh untuk mendorong dan mengontrol putra-putri bangsa giat belajar dan bersekolah demi keberlangsungan hidup bangsa.[]

**JANJI  
INDONESIA SEHAT**

# BERHARAP (DARI) KARTU INDONESIA SEHAT

*Dede Rohimah*

*Health is a state of complete physical, mental and social well-being,  
and not merely the absence of disease or afirmity.*

---WHO, 1981

**T**unai sudah amanah undang-undang kepada bangsa Indonesia untuk menjalankan proses demokrasi di negara ini. Pada tanggal 21 Agustus 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Republik Indonesia 2014. Kurang lebih satu bulan setelah dilaksanakannya pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, akhirnya dinyatakan dengan resmi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. Muhamad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2014-2019. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden H. Prabowo Subianto - Ir. H. Hatta Radjasa terhadap hasil Pilpres 2014 tersebut.

Putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2014 tentu telah memberikan kepastian dan menumbuhkan harapan baru rakyat Indonesia terhadap pemimpin yang akan memimpin negara Indonesia lima tahun mendatang. Muncul pertanyaan di benak saya. Akan seperti apakah Indonesia lima tahun mendatang? Kondisi seperti apakah yang akan diciptakan Jokowi-JK lima tahun

mendatang? Ke manakah biduk Indonesia akan Jokowi-JK bawa lima tahun mendatang?

Secara tidak langsung hal ini telah memaksa rakyat *flash back* ke masa kampanye capres dan cawapres terpilih. Seperti apakah janji-janji manis akan Indonesia di masa depan yang dulu pernah mereka lontarkan? Program-program kerja seperti apa yang dulu pernah mereka usung? Tentunya rakyat ingin tahu apakah mandat yang mereka berikan kepada Jokowi-JK benar-benar dilaksanakan dengan baik atau tidak. Apakah janji-janji manis terdahulu saat kampanye hanya alat untuk menggaet simpati rakyat saja atau tidak.

Menilik kembali pada masa-masa penyampaian visi dan misi capres dan cawapres, Jokowi-JK menggambarkan rencana program-program yang akan mereka laksanakan lima tahun mendatang pada Indonesia dalam Sembilan Agenda Prioritas atau disebut juga NAWA CITA. Salah satu yang membuat tertarik adalah NAWA CITA nomor 5.

“Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu “Indonesia Sehat”; Serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar; program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi, serta Jaminan Sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.”

Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi Kartu Indonesia Sehat bisa menjadi harapan sekaligus tantangan untuk Jokowi-JK nantinya. Masalah-masalah dalam pelayanan kesehatan di Indonesia masih berderet menunggu untuk segera dipecahkan. Masyarakat pun masih menunggu untuk bisa menikmati pelayanan kesehatan yang baik.

Seperti apa Kartu Indonesia Sehat ini, dinilai masih abstrak dan memerlukan kajian dan analisa yang lebih mendalam. Akan seperti Kartu Jakarta Sehat ala Jokowi ketika menjadi gubernur Jakarta, atau seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ada namun dengan sebutan yang berbeda?

Jika yang dimaksudkan Jokowi-JK kartu ini seperti Kartu Jakarta Sehat ala Jokowi ketika menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, dirasa masih kurang relevan penerapannya jika sistem yang digunakan masih sama. Luasnya wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.000 pulau dan juga beban jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta jiwa akan menjadi kendala utama. Penerapan sistem baru dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Belum lagi jika dikaitkan dengan sarana pelayanan kesehatan Indonesia yang selama ini masih banyak mengalami permasalahan. SDM yang minim, peralatan kesehatan yang terbatas, kurangnya pemerataan fasilitas kesehatan, harus segera dibenahi sebagai prasyarat untuk melaksanakan program yang digagas Jokowi-JK ini. Jika prasyarat tersebut tidak dipenuhi dengan baik, maka permasalahan-permasalahan yang timbul pada kasus implementasi Kartu Jakarta Sehat, seperti berkurangnya kualitas pelayanan kesehatan oleh tenaga medis, membludaknya pasien sehingga tidak tertampung oleh fasilitas kesehatan, tunggakan biaya kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan, dan permasalahan lainnya, dapat diprediksikan akan terjadi pula pada implementasi Kartu Indonesia Sehat nanti.

Berbeda lagi jika Kartu Indonesia Sehat yang dimaksud Jokowi-JK adalah sama dengan implementasi BPJS. Kondisi akan sedikit lebih menguntungkan jika program Kartu Indonesia Sehat sejalan dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, terhitung sejak 1 Januari 2014 di seluruh wilayah Indonesia telah berlaku jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh BPJS. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berlangsung. Konsep penerapannya pun sudah jelas. Jangkauan program BPJS pun semakin meluas dengan bergabungnya penyelenggara-penyelenggara asuransi-asuransi lainnya seperti PT Askes, PT Jamsostek, dan perusahaan asuransi lainnya.

Namun, masih ada permasalahan tersisa, yaitu membenahi pekerjaan-pekerjaan rumah pelayanan kesehatan. Meski sistem

ini masih banyak kekurangan seperti tingkat partisipasi rakyat Indonesia yang masih belum sepenuhnya terlibat dan terdaftar sebagai peserta BPJS, sistem BPJS dan kesejahteraan tenaga medis yang masih tumpang tindih, dan kurang siapnya fasilitas kesehatan menyelenggarakan BPJS. Tapi hal itu masih selangkah lebih maju dibandingkan dengan menerapkan program baru yang berarti melangkah kembali dari titik nol. Setidaknya biaya dan tenaga yang besar tak usah lagi dikeluarkan karena penerapan program baru yang masih belum jelas arahnya sistemnya dari mana dan mau dibawa ke mana, hanya akan menambah daftar panjang deretan pekerjaan rumah yang harus pemerintah selesaikan.

Tapi kalau sudah ada BPJS mengapa harus ada Kartu Indonesia Sehat? Mengapa ketika sudah ada satu kebijakan mengenai jaminan kesehatan yang mencakup nasional harus ada kebijakan baru yang menyerupai itu? Seperti apa urgensinya?

Presiden dan pemerintahan yang baru sudah selayaknya menggunakan haknya untuk menentukan program-program apa saja yang akan mereka laksanakan selama lima tahun memerintah. Namun sudah menjadi kewajiban pula, program-program yang diusung berpihak kepada rakyat dan mempunyai nilai kebermanfaatannya yang maksimal untuk rakyat. Tidak semata-mata untuk membentuk citra inovatif saja dengan menciptakan tren baru yang masih memerlukan kajian dan analisa yang mendalam. Jika memang program yang telah berjalan dinilai tidak sesuai dengan keadaan Indonesia ini, tidak menjadi masalah jika pemerintahan yang baru menerapkan kebijakan-kebijakan yang baru pula. Tak masalah itu kebijakan atau program lama yang diadopsi dan dikembangkan atau kebijakan baru yang akan diterapkan nanti oleh Jokowi-JK dan pemerintahannya yang baru.

Poin utama yang harus digarisbawahi adalah meningkatnya derajat kesehatan rakyat Indonesia dengan sistem pelayanan kesehatan yang baik, transparan, sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan, adil, murni dari campur tangan asing, serta menjunjung tinggi martabat bangsa. Indonesia menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang kuat, dan bangsa yang sejahtera. Sesuai dengan definisi sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan

(jasmani), jiwa (rohani) dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Atau sehat menurut WHO (1981), *“health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity.”* Karena kesehatan adalah penyokong utama suatu bangsa untuk berprestasi dan dapat berdiri sejajar dengan bangsa lainnya.

Akankah Indonesia sehat lima tahun mendatang? Biarlah menjadi pekerjaan rumah Jokowi-JK dan pemerintahannya yang akan bersama kita kawal. Cukup bijak atau masih abstrakkah program yang mereka usung? Biarlah waktu yang menunjukkan dan mari kita kawal bersama-sama pelaksanaannya. Salam sehat untuk segenap rakyat Indonesia![]

# MERABA KONSEP KARTU INDONESIA SEHAT

*Gisca Ajeng Widya Ninggar*

**K**esehatan merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa yang memainkan peranan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga negara tetapi juga barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.

Tidak dipungkiri, terjaminnya kesehatan seluruh penduduk menjadi impian setiap bangsa. Namun permasalahan klasik selalu timbul. Meskipun layanan dan fasilitas kesehatan terus ditingkatkan, kendala biaya membuat tidak semua orang mampu menikmatinya. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal.

## **Transisi Menuju Universal Health Coverage**

*Universal Health Coverage* merupakan isu yang telah lama diusung oleh WHO, di mana setiap warga di dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dengan biaya yang terjangkau. *Universal Health Coverage* bukan berarti pelayanan kesehatan yang gratis, akan tetapi memberikan akses pelayanan kesehatan yang adil menggunakan prinsip keadilan vertikal.

Prinsip keadilan vertikal menegaskan, kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan

kemampuan membayar (*ability to pay*), bukan berdasarkan kondisi kesehatan/kesakitan seseorang. Dengan keadilan vertikal, orang berpendapatan lebih rendah membayar biaya yang lebih rendah daripada orang berpendapatan lebih tinggi untuk pelayanan kesehatan dengan kualitas yang sama. Dengan kata lain, biaya tidak boleh menjadi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Jika ditilik ke belakang, ternyata jauh sebelum WHO mencetuskan konsep *Universal Health Coverage* pada 2005, *founding father* kita sebenarnya sudah menuangkan gagasan mengenai jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh”. Sebenarnya konsep *Universal Health Coverage* sudah dikenal di Indonesia sejak 69 tahun yang lalu. Namun, selama ini sistem kesehatan di negara kita masih terkotak-kotak dengan banyaknya jaminan kesehatan yang ada.

Hak akses kesehatan seolah-olah disesuaikan dengan strata kehidupan yang dimiliki. Pegawai negeri mendapat perlindungan dari PT. ASKES, pensiunan mendapat jaminan dari PT. Taspen, sedangkan veteran, anggota TNI dan keluarganya mendapat perlindungan pembiayaan yang dikelola oleh PT. ASABRI. Pekerja di perusahaan swasta ditanggung oleh PT. Jamsostek. Masyarakat miskin ditanggung oleh Jamkesmas dan Jamkesda. Lalu bagaimana dengan warga Indonesia yang tidak miskin dan tidak kaya, mereka tidak terasuransi karena tidak memenuhi kategori miskin. Padahal jumlah warga yang berada dalam golongan tersebut cukup banyak. Hal tersebut menimbulkan potensi kesenjangan tersendiri. Untuk itulah dibutuhkan suatu jaminan kesehatan nasional dengan konsep *Universal Health Coverage*.

Baru pada 2004, disusunlah suatu undang-undang sebagai pengejawantahan dari UUD 1945 pasal 28H ayat 1. Undang-undang itu yang kita kenal sebagai UU No 40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjadi landasan diwujudkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Berawal dari mimpi agar seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan sehingga tidak perlu bingung mencari biaya ketika sakit, *Universal Health Coverage* yang diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir sebagai jawaban. Tanggal 1 Januari 2014 menjadi tonggak bersejarah bagi layanan kesehatan di Indonesia, ditandai dengan pembukaan secara resmi sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan penyatuan dari beberapa BUMN yang ditunjuk, yaitu PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen, dan PT. Asabri. Pemerintah menargetkan, setidaknya 121,6 juta jiwa dijamin pada 2014. Dan seluruh penduduk Indonesia yang diperkirakan berjumlah 257,5 juta jiwa diharapkan terjamin pada akhir 2019.

### **Konsep Kabur Kartu Indonesia Sehat**

Belum genap satu tahun pelaksanaan SJSN, muncul wacana baru yang dilontarkan oleh pasangan capres dan cawapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengenai jaminan kesehatan nasional, yang diberi nama Kartu Indonesia Sehat (KIS). Padahal, saat ini pun program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk JKN masih belum stabil. Masih banyak pro-kontra. Program Kartu Indonesia Sehat yang notabene menjadi salah satu program unggulan Jokowi-JK menjadi angin segar yang berembus di tengah keluh kesah masyarakat terhadap pelaksanaan SJSN yang masih belum stabil. Meskipun masyarakat belum memahami apakah ada perbedaan antara SJSN dan Kartu Indonesia Sehat, masyarakat tak urung bersuka ria. Tapi apakah KIS akan memberikan solusi lebih baik bagi permasalahan kesehatan di Indonesia ketimbang SJSN yang saat ini sedang berjalan?

Jika boleh dikata, konsep Kartu Indonesia Sehat masih kabur. Belum ada pernyataan yang menyinggung mengenai detail konsep yang ditawarkan dan payung hukum yang akan digunakan. Namun, kemungkinan besar konsep Kartu Indonesia Sehat yang ditawarkan tidak akan jauh dari implementasi Kartu Jakarta Sehat, yang diusung oleh orang yang sama yakni Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mari kita sedikit menguraikan konsep dari Kartu Jakarta Sehat.

Kartu Jakarta Sehat merupakan suatu program jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah DKI melalui UP Jamkesda Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat dalam bentuk bantuan pengobatan. Kartu Jakarta Sehat (KJS) pertama kali diluncurkan pada 10 November 2012. Lewat program ini, biaya pengobatan bagi warga Jakarta di Puskesmas dan rawat inap kelas tiga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) maupun rumah sakit swasta ditiadakan alias digratiskan.

Selain tanpa biaya, pasien rawat inap juga akan dirujuk ke RSUD kelas dua apabila ruang di kelas tiga sudah tak lagi tersedia. Sasaran dari program ini adalah seluruh warga Jakarta yang memiliki KTP atau KK DKI Jakarta. Program ini menawarkan prosedur pengurusan yang sederhana dan sistem komputerisasi canggih, dimana terdapat *barcode* di bagian belakang kartu untuk menyimpan data riwayat penyakit, riwayat rawat inap, dan rumah sakit yang pernah menjadi rujukan.

Kita membaca, implementasi Kartu Jakarta Sehat yang berjalan selama kurun waktu dua tahun terakhir ternyata masih menimbulkan banyak polemik. Program Kartu Jakarta Sehat dinilai tidak sejalan dengan peraturan yang berlaku. Sebab dalam Perda Nomor 4 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah, menegaskan hanya mengatur pemberian bantuan biaya kesehatan kepada masyarakat tidak mampu. Sedangkan Pemprov DKI menggunakan Pergub Nomor 187 tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagai payung hukum Kartu Jakarta Sehat dimana dalam Pasal 6 disebutkan bahwa masyarakat yang dapat menerima pembebasan biaya pelayanan kesehatan adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan sasaran antara payung hukum KJS dengan perda yang berlaku. Padahal sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan gubernur yang stratanya berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah yang berada di atasnya.

Lalu bagaimana dengan Kartu Indonesia Sehat? Ini masalah pertama, payung hukum mana yang akan digunakan? Padahal dengan jelas tertera pada UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menegaskan dan mengatur, bahwa semua

program jaminan sejenis harus sejalan dengan JKN. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa Kartu Indonesia Sehat harusnya tidak boleh *overlap* dengan pelaksanaan JKN yang sudah ada.

Problem kedua, salah satu fitur unggulan KJS yang ditawarkan adalah sistem *online* untuk melacak rumah sakit yang memiliki rawat inap yang kosong. Padahal sistem informasi rumah sakit di Jakarta belum mampu menjembatani proses rujukan tersebut. Apalagi jika sistem *online* juga ditawarkan menjadi keunggulan KIS. Sistem informasi antar RS di perkotaan saja belum mampu, bagaimana menjembatani seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia? Nyatanya, sekarang ini tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas internet dan teknologi informasi yang memadai. Persebaran listrik saja belum merata, apalagi internet. Selain itu, fasilitas pelayanan gratis yang ditanggung KJS adalah untuk rawat inap kelas tiga. Sedangkan kuota fasilitas kelas tiga masih sangat terbatas dan tidak berimbang dengan jumlah pasien yang ada.

Ketiga, pada awal pelaksanaannya KJS Pemprov DKI memiliki total 92 rumah sakit mitra (20 Rumah Sakit Pemerintah dan 72 Rumah Sakit Swasta). Namun, belum genap dua tahun berjalan, 16 rumah sakit menyatakan mundur sebagai mitra dari KJS. Mundurnya beberapa rumah sakit itu karena implementasi KJS yang masih amburadul. Banyak rumah sakit yang mengeluh rugi karena kebijakan Kartu Jakarta Sehat, premi Rp 23.000,00 per orang dinilai tidak mencukupi. Alasan lain yang dilontarkan adalah adanya perubahan pola pembayaran tagihan kepada rumah sakit mitra, yang semula berdasarkan layanan yang diberikan menjadi berdasarkan *Indonesia Case Basis Groups* (INA CBGs). Selain membuat beberapa RS merugi, tentunya implementasi yang masih amburadul juga akan berakibat terhambatnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Masalah keempat, mewahnya fasilitas yang ditawarkan kepada masyarakat, tidak dibarengi dengan pemberian fasilitas bagi penyedia layanan kesehatan. Untuk menunjang pelaksanaan KJS dibutuhkan mesin pemindai atau *scanner* karena memang KJS dilengkapi dengan *chip* dan *barcode*, akan tetapi tiap Puskesmas hanya diberikan satu mesin *scanner*, padahal terdapat ratusan pasien KJS yang harus dilayani.

Terakhir adalah dengan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional sejak 1 Januari 2014, pelaksanaan KJS menjadi *overlapping* dan membingungkan masyarakat. Faktanya, para pemegang KJS harus mendaftar kembali ke BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana nanti dengan Kartu Indonesia Sehat? Entahlah.

### **Sistem Jaminan Kesehatan Idaman**

Sejatinya, memiliki jaminan kesehatan merupakan dambaan setiap orang. Banyak program yang telah dibuat untuk mewujudkannya, tetapi seringkali belum ditimbang matang. Kartu Indonesia Sehat mungkin memang menjadi hembusan angin segar di tengah keluh kesah JKN. Akan tetapi percuma ada program baru kalau pada akhirnya *overlapping* dengan SJSN yang tengah berjalan. Padahal telah jelas ditegaskan dalam UU No.40 Tahun 2004 bahwa semua jaminan kesehatan sejenis harus sejalan dengan JKN. Dengan alasan apapun dan dengan istilah apapun, semua jaminan kesehatan lain masuk ke JKN tidak terkecuali Kartu Indonesia Sehat, karena hanya ada satu jaminan kesehatan nasional.

Bukankah untuk mewujudkan program baru membutuhkan sarana dan prasarana baru pula. Belum lagi membutuhkan program sosialisasi yang massif yang juga membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit? Walaupun hanya sebuah kartu, pastilah untuk mewujudkannya membutuhkan biaya yang sangat banyak, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa. Bayangkan jika untuk sebuah kartu menghabiskan Rp 100.000, maka untuk mengakomodasi seluruh penduduk Indonesia dibutuhkan 25 triliun rupiah. Alangkah bijaknya jika negarawan yang terpilih untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan kembali mengevaluasi program yang ditawarkan, jangan hanya memberikan euforia semata. Dan alangkah lebih bijaknya, jika alokasi dana tersebut bisa dialihkan untuk memperbaiki sistem yang tengah berjalan daripada harus membuat program baru dengan konsep yang belum jelas detailnya.

Setiap kebijakan seyogyanya telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik pengguna maupun penyedia layanan kesehatan. Kesenambungan program serta ketersediaan sumber daya juga tidak boleh luput dari perhitungan. Sesungguhnya

konsep jaminan kesehatan yang tengah berjalan saat ini sudah sangat bagus dimana memberikan perlindungan kepada warganya akan akses kesehatan yang adil tanpa memandang golongan pekerjaan yang dimiliki. Terlepas masih banyak pro kontra yang mewarnai.

Berkaca dari pengalaman negara lain yang berhasil menerapkan *universal health coverage*, proses menuju ke sana memang tidaklah mudah. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan hingga beberapa dekade untuk membuat sistem yang matang dan berjalan baik. Sebagai contoh, cakupan universal di AS diperkirakan baru akan tercapai tahun 2014, yaitu empat tahun sejak disahkan Undang-Undang Proteksi Pasien dan Pelayanan yang Terjangkau pada tahun 2010. Jepang membutuhkan 36 tahun sejak disahkan Undang-undang Asuransi Kesehatan hingga terlaksananya cakupan universal. Sri Lanka yang masih tergolong negara miskin, dengan pendapatan per kapita yang jauh di bawah Indonesia bahkan telah berhasil menerapkan *universal coverage* sejak 60 tahun yang lalu.

Indonesia tentu tidak perlu berkecil hati, karena jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi kita akan menuju *universal health coverage*. Mari kita perbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia sehat dan sejahtera![]

# JANJI MENGOBATI INDONESIA

Lisa N

*“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”*

—QS. Al-Isra: 34

*“A Healthy Man Has A Hundred Wishes, A Sick Man Has Only One”*

—Berger R

**B**anyak orang mengabaikan kesehatan. Masalah kesehatan ibarat masalah belakang. Bahkan orang seringkali kalap ketika sehat, semua makanan yang enak di lidah masuk ke dalam mulut, tapi enggan untuk olahraga. Masalah yang dianggap cuek oleh sebagian orang, tetapi saat sakitnya datang barulah mulai terasa penderitaannya. Mulai menyadari adanya masalah yang datang. Ibarat bisul di pantat yang menunggu waktu pecah, tidak terlihat tapi susah untuk duduk, terasa hangat namun perih, bahkan tidak enak untuk tidur.

Di saat sakit, masyarakat kita harus mengeluarkan uang sendiri untuk membayar pengobatan. Sistem ini disebut pembayaran *out of pocket*. Dari laporan World Health Organization tahun 2006, 70% masyarakat Indonesia masih bergantung pada tradisi sistem *Out of Pocket*, dan hanya 8,4% yang dapat mengikuti sistem pembayaran prabayar/asuransi (WHO: 2009).

Tidak ada yang salah dengan sistem ini, selama si sakit sanggup membayar untuk biayanya, dan dokter mau jujur juga kompeten

memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu, sering sekali pihak pasien, yang dalam hal ini adalah kurang tahu tentang permasalahannya sendiri, tidak tahu sakitnya apa, bagaimana pengobatannya, butuh biaya berapa dan sebagainya. Sehingga pengeluaran menjadi membengkak. Beda dokter beda diagnosis, beda pula obatnya. Lempar sana lempar sini, menjadikan pasien sebagai pihak yang dirugikan.

Terhitung 2014, ada biaya gratis bagi si miskin melalui BPJS. Sudah menjadi tradisi dalam sistem kesehatan kita, banyak warga yang menjelma dirinya miskin saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Padahal mereka memiliki barang mewah di rumah bahkan ada yang mampu memiliki motor atau mobil tetapi mengaku dirinya miskin saat berobat ke RS.

Tidak sedikit masyarakat kita awalnya cukup mampu untuk menghidupi diri dan keluarganya dari pekerjaan serabutan, akhirnya jatuh sakit dan menjadi miskin karena seluruh hartanya habis untuk biaya berobat. Sakitnya tidak kunjung sembuh, malah bertambah parah, utang sana sini, tidak bisa bekerja, dan terus sengsara. Jika si miskin sakit itu, artinya semua keluarga sakit. Satu keluarga menunggu pasien sakit di rumah sakit. Keluarga pun ikutan sakit ekonomi dan kehidupannya. Sudah jatuh tertimpa tangga, tangganya pun rusak padahal milik tetangga. Dan harus mengganti rugi pula.

Dari paparan di atas, ada masalah besar yang tengah menghantui masyarakat. Pertama, paradigma masyarakat akan kesadaran hidup sehat. Jumlah penduduk yang sehat di Indonesia jauh lebih besar dibanding orang yang sakit. Namun sampai saat ini belum ada program-program pemerintah yang khusus memikirkan agar orang yang sehat ini tidak menjadi sakit. Padahal orang sehat adalah aset menjalankan perputaran negara. Program-program yang berjalan saat ini dan yang akan ditawarkan belum mampu memfokuskan preventif atau pemahaman kesadaran.

Waktu emas pertumbuhan adalah 1.000 hari selepas ovum bertemu dengan sperma. Di sinilah peran nutrisi dibutuhkan. Tetapi sayangnya, bagaimana memikirkan nutrisi jika untuk menghidupkan tungku-tungku rumah saja mereka tidak mampu.

Mereka tidak sehat jika si balita selalu diberi makan mie instan setiap hari.

Untuk menjaga kesehatan, olahraga sangat diwajibkan. Tetapi, bagaimana orang mau bermain bola, jika lahan saja sudah tidak ada, dan sekarang harus bayar sewa pula setiap jamnya. Bagaimana orang bisa berolahraga jika si pejalan kaki selalu kalah dengan motor. Jika trotoar kini menjadi lapak para pedagang bahkan dijadikan lahan parkir dan jalan motor. Bagaimana bisa bersepeda jika ulah pengendara motor selalu egois salip sana-salip sini dan tidak peduli pejalan hendak menyeberang. Untuk bernapas saja kami masih harus diracuni asap rokok di mana pun, angkot, bus kota bahkan musola dan tempat-tempat umum.

Saat ini banyak masyarakat kita yang berperilaku konsumif. Mengabaikan kesehatan demi kenikmatan sesaat. Tidak bisa disalahkan, setiap waktu masyarakat kita dibanjiri iklan-iklan akan nikmatnya segala hal yang serba instan. Di saat makanan siap saji tidak bernutrisi dan hanya mendatangkan rugi membanjiri jalan-jalan kota dan pusat perbelanjaan. Rokok kini mulai dibatasi kehadirannya, meskipun belum ada regulasi untuk si siap saji. Padahal makanan ini adalah *silent killer* penyebab meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit degeneratif. Perilaku ini sudah menjadi tradisi.

Sistem pra bayar kesehatan, dalam hal ini BPJS, menggratiskan kesehatan saat sakit mulai diberlakukan secara total. Bukan hal yang tidak mungkin masyarakat menganggap remeh perkara sakit dan terlena dengan kesehatan jika usaha-usaha preventif dan kesadaran akan kesehatan tidak digalakkan oleh pemerintah.

Kedua, mengenai kompetensi dokter. Masyarakat mudah sekali menyalahkan dokter atau pihak rumah sakit jika mereka tidak puas dengan jasanya. Tidak bisa disalahkan dan dibenarkan sepenuhnya. Di Inggris, setiap pasien berhak mendapat pelayanan dokter minimal 15 menit. Saat ini dokter Puskesmas bahkan melakukan pemeriksaan hanya sekitar lima menit atau kurang.

Apakah ini kesalahan dokter? Tidak juga, karena pasien lain sudah mengantre bahkan membludak. Sangat jauh dari kata ideal. Ditambah lagi dengan sistem BPJS di mana jika ada orang sakit wajib berkunjung ke Puskesmas sebagai pelayanan primer. Tentu

menambah membludaknya angka kunjungan pasien ke Puskesmas. Sarana boleh ditingkatkan tetapi sumber daya manusianya tetap segitu. Tidak dipungkiri masih butuh banyak dokter yang merata persebarannya di negeri ini. Tapi kita lihat betapa masyarakat saat ini sudah sangat antipati dengan dokter. Salah sedikit menuntut.

Setiap tahun, Fakultas Kedokteran di seluruh perguruan tinggi di Indonesia melahirkan ribuan dokter baru. Akan tetapi, 35% dari mahasiswa kedokteran belum lulus mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia. Mengapa banyak dokter yang tidak kompeten? Karena ternyata akreditasi untuk kedokteran hanya ada 32 dari 72 Fakultas Kedokteran yang terakreditasi di atas standar. Masih ada 40 Fakultas Kedokteran yang terakreditasi C (di bawah standar). Ironisnya, ada 8 Fakultas Kedokteran yang belum terakreditasi (BAN-PT, Kemdiknas).

Ketiga adalah masalah mental sakit orang Indonesia. Perilaku konsumtif dan merasa miskin kini menjadi watak masyarakat kita. Berapa banyak masyarakat yang sehari-harinya bergelimang harta tetapi mengaku miskin seketika saat sakit. Padahal masih banyak masyarakat yang benar-benar miskin tetapi belum mendapat bantuan. Masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya kesehatan kini dalam hidup serba keterbatasan, semua dibatasi. Ingin sedikit berkualitas tetapi pemerintah tidak menanggung.

Sistem jaminan memang membuat biaya kesehatan murah, tetapi jadi murahan pada akhirnya jika tidak ada persiapan matang dan sumber daya yang belum siap. Mudahnya akses untuk mendapatkan kesehatan ternyata tidak sejalan dengan naluri seorang dokter. Betapa para tenaga medis ini ternyata harus ekstra berhemat untuk melayani pasien. Harga satu penyakit sudah dipatok. Bagaimana jika pasien mengalami keluhan lain dan membutuhkan obat yang berbeda jika biaya dari pemerintah ternyata tidak mencukupi?

Aturan yang berlaku, pasien tidak boleh melakukan kunjungan dua kali dalam sehari kepada dokter spesialis. Bagaimana dengan pasien yang memiliki komplikasi penyakit dan membutuhkan konsultasi spesialis lain. Butuh waktu dua hari untuk berkonsultasi. Tentu memakan biaya, waktu dan tenaga yang dua kali lipat bagi sang pasien yang tergolek sakit.

Masih banyak obat yang tidak ditanggung atau peralatan-peralatan untuk bedah yang disediakan hanya kualitas pas-pasan. Karena dana yang dicakup tidak memenuhi sesuai kaidah kedokteran pada umumnya.

Belum lagi beban perawat dan dokter yang harus ekstra tenaga melayaninya. Jumlah pasien membludak, tenaga medis tetap jumlahnya. Semua ingin segera dilayani. Tanggung jawab semakin bertambah, tapi dokter masih terus disalahkan atau dianggap sebelah mata. Jika pasien tidak mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Siapa yang disalahkan? Dokter dan pihak rumah sakit.

Sebenarnya dunia kesehatan kita masih menganut ketidakadilan. Adanya sistem kelas atau membedakan kualitas pelayanan berdasarkan kesanggupan untuk membayar yang masih diberlakukan di setiap rumah sakit sampai saat ini. Sesungguhnya ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya setiap orang yang sakit mendapat layanan yang sama, tidak dibedakan. Tetapi nyatanya ada pembagian kelas-kelas. Si kaya bisa mendapatkan pelayanan kelas mewah dengan tempat tidur yang tenang, bersih, perawat yang siaga karena punya banyak uang dan si miskin dapat seadanya.

Inilah sekelumit masalah yang dihadapi dunia kesehatan Indonesia. Pergantian wajah baru akan dihadapi masyarakat Indonesia di penghujung 2014. Akan ada banyak perubahan di dunia kesehatan mendatang. Masih hangat dalam ingatan salah satu janji presiden terpilih untuk dunia kesehatan, yakni menyediakan layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat dan akan membangun 6.000 Puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta 50.000 rumah sehat secara bertahap dengan tahap awal 10.000 rumah sehat setiap tahun dengan anggaran Rp 5 triliun, dan 1 miliar untuk satu puskesmas. Jadi tahun pertama butuh Rp 6 triliun untuk meningkatkan 6.000 puskesmas.

Saat ini pemerintah baru mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar tiga persen (Rp 46,459 triliun) dari total anggaran belanja pemerintah (Rp 1.249,943 triliun). Ternyata anggaran ini kalah dengan negara-negara berkategori penghasilan rendah di Afrika, seperti Rwanda, Tanzania, dan Liberia, yang berani mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan hingga 15% dari APBN-nya. WHO

sendiri mematok alokasi anggaran kesehatan setiap negara minimal 15% dari total APBN. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tegas mengamanatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN (WHO, 2010). Inilah salah satu upaya janji kabinet Jokowi mendatang dengan meningkatkan anggaran kesehatan menjadi lima persen sehingga akan membutuhkan penambahan anggaran sebanyak Rp 40 triliun.

Kalau sudah begini, siapa yang salah? Dalam konteks ini tidak ada yang salah, karena sistem ini kita sendiri yang membuatnya. Yang salah adalah ketika kita tidak mau merubahnya menjadi lebih baik. Indonesia baru saja melakukan penggantian pemain-pemain Senayan untuk menempati singgasana. Hanya menunggu pembuktian apakah mereka sosok negarawan seperti yang diucapkan atau politisi yang berlindung di balik kosmetik pencitraan.

Indonesia hari ini mengalami krisis negarawan, di antara berkilaunya politisi instan. Pemimpin politisi menyelesaikan masalah bangsa ini berorientasi jangka pendek, mempertimbangkan keuntungan untuk para pemilik modal dan kelompoknya, khususnya partai ketimbang masyarakat.

Plato pernah mengingatkan kita, masalah suatu negara tidak akan pernah berdamai dengan masyarakatnya hingga kekuasaan politik ada pada negarawan sejati. Meskipun kita masih memiliki sosok seorang tokoh yang memiliki jiwa negarawan, namun sistem politik hari ini belum berpihak sepenuhnya dengan mereka. Sampai kapan pun republik ini tetap akan terperangkap dalam lingkaran masalah yang tiada berujung, sepanjang partai politik di negara ini masih gagal menghasilkan negarawan sejati untuk memimpin.

Perbedaan mendasar antara negarawan dengan politisi adalah jika negarawan hidup untuk negara, maka bagi politisi, negara untuk hidupnya. Janji sudah terlanjur diucapkan. Entah dengan atau tanpa perhitungan. Jangan lagi rakyat yang harus menanggung penderitaan. Lantaran janji yang akan diabaikan. Jika benar begitu apa bedanya kepemimpinan dengan pengkhianatan?

*“Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata*

*dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”*  
(Al-Imran [3:77])

Para wakil rakyat ini bak supir bus kota yang kita pilih untuk membawa kita ke arah yang kita tuju. Setiap penumpang pasti ingin mencapai tujuan yang diinginkan dengan kondisi selamat dan ongkos yang semestinya sehingga menjadi hak kita untuk menegur sang supir supaya memilih jalan yang lebih bijak.

Indonesia terbentang dari barat ke tenggara

Katanya kita bersaudara

Tapi kenapa masih ada dusta di antara pejabat kita

69 tahun kita telah mengibarkan bendera

Tapi kenapa kita masih sengsara

Akses pendidikan dan kesehatan sulitnya seperti di penjara

Kita mampu berdiri di atas sumber daya kita

Tapi tidak mampu mendongakkan kepala

karna kita di bawah kuasa adidaya.[]

# SISTEM KESEHATAN YANG TAK SEHAT

*M. Syukri Kurnia Rahman*

Semua penulis dalam buku ini sepakat untuk mengusung dua tema besar dalam tulisannya. Pertama berupa saran konstruktif atau yang kedua, kritik intelektual. Di antara dua tema tersebut, saya memilih yang pertama. Saya selaku orang yang berkecimpung di dunia kesehatan prihatin dengan sistem kesehatan yang berlaku di negeri ini.

Nampaknya kita tidak bisa lagi menutupi kelemahan kita dalam urusan buat-membuat sistem. Semua orang juga tahu bahwa negeri ini akan selalu dinamis dalam penerapan sistem, lebih tepatnya tidak konsisten. Pergantian menteri berarti pergantian sistem. Dengan alasan revisi lah, hasil evaluasi lah, atau apapun itu alasannya. Pertanyaannya, rakyat peduli apa? Kami yang di bawah-bawah ini yang akhirnya menjadi korban atas ketidakmatangan sistem yang selalu bergonta-ganti.

Masih teringat bagaimana gembar-gemornya KBK (kurikulum berbasis kompetensi) di tanah air. Inilah sistem yang dirasa paling tepat diberlakukan di Indonesia. Belum genap dua tahun usianya, lahirlah kurikulum baru dengan format KTSP. Bahkan masyarakat telah mempunyai julukan sendiri untuk sistem baru ini. Kurikulum tidak siap pakai. Hebat, bukan?

Belum selesai KTSP dengan segala evaluasinya, berganti lagi dengan Kurikulum 2013. Informasi terakhir yang saya dapatkan dari wawancara saya dengan para guru SLTP, buku ajar yang seharusnya dipakai untuk kurikulum ini tidak jadi diberikan ke sekolah-sekolah karena ada masalah tender. Padahal pihak sekolah tidak diizinkan memberikan buku ajar sebelum ada instruksi

dari pusat. Akhirnya sampai saat ini, para guru itu kebingungan memberikan buku ajar kepada anak didiknya.

Di satu sisi buku yang dijanjikan tidak segera turun, di sisi lain mereka tidak berani memberikan buku yang tidak sesuai dengan petunjuk dari pusat. Jelas mereka takut salah. Apa tidak kasihan itu? Masih mending sekolah-sekolah yang bonafit, yang isinya anak-anak konglomerat, bisa dengan mudah membeli buku-buku dengan harga mahal. Lantas bagaimana dengan sekolah pelosok yang bahkan untuk bertahan saja mereka kesusahan?

Sama juga, nasib sistem kesehatan di negeri ini jauh api dari panggang. Hanya saja, masalah pendidikan dan kemiskinan selalu memicu api yang lebih besar daripada kesehatan. Masalah kesehatan hanya akan membesar jika ada wabah yang mematikan. Alhamdulillah, negeri ini tidak lagi diserang wabah penyakit, namun mungkin dampak buruknya, kita merasa tenang dengan ketidakberesan ini. Seolah jika tidak ada wabah, kita telah punya sistem kesehatan yang mumpuni. Padahal bukan hanya dari sana tolak ukurnya.

Saya memahami tabiat dasar manusia: tidak memperhatikan yang dekat dan terlalu merisaukan yang jauh. Kesehatan itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan manusia. Orang kaya, orang miskin, mereka semua perlu kesehatan. Pengangguran sekalipun, mereka perlu kesehatan untuk tetap menikmati hidupnya. Apalagi orang kaya. Sekaya apapun mereka, tak ada gunanya jika mereka hidup di tengah rasa sakit yang mendera. Sepakat? Namun berapa banyak yang merisaukan masalah kesehatan serisau mereka terhadap masalah kemiskinan? Saya rasa tidak banyak.

Kita lihat Obama. Pamornya merosot karena kesehatan. Prioritas yang pertama kali dia canangkan untuk satu periode kepemimpinannya adalah perbaikan sistem kesehatan. Yang jadi masalah, kesehatan bukanlah isu populer. Itu program jangka panjang yang hanya bisa dinikmati hasilnya beberapa tahun mendatang. Berbeda dengan isu pengangguran dan masalah sosial lainnya. Itu lebih mengena di mata warga Amerika. Mungkin, berkaca dari negara adidaya itu pula, di negeri kita tercinta ini, para penggagas pemerintahannya tidak terlalu peduli dengan kesehatan rakyatnya.

Kemiskinan memang seharusnya menjadi prioritas. Tapi coba kita bayangkan. Saat orang-orang kelas bawah dengan susah payah mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk pendidikan anak-anaknya, tiba-tiba harus rela menguras simpanannya karena biaya kesehatan yang teramat mahal. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain pasrah meratapi keadaan?

### **Sistem yang Tidak Menyehatkan**

Sistem kesehatan yang berlaku di negeri ini adalah kuratif. Anda sakit, silakan berobat. Alhamdulillah dengan sistem yang ada sekarang ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat semakin mudah untuk berobat. Tapi perlu diingat, sistem ini sama saja dengan sistem yang berlaku sebelumnya. Ia hanya akan membuat masyarakat berbondong-bondong melaporkan keadaan sakitnya. Masyarakat hanya akan mempedulikan kesehatannya setelah rasa sakit meyerang mereka.

Maka sebenarnya, sebuah kesalahan jika kita mengatakan bahwa sistem ini dibuat untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia. Salah. Sistem ini bukan untuk menyadarkan kita tentang kesehatan, tapi menyadarkan kita tentang kesakitan. Masyarakat kita tidak peduli dengan kesehatannya, tapi peduli dengan rasa sakitnya. Mereka hanya akan bergerak saat mereka sakit. Mereka hanya akan mengunjungi tenaga-tenaga kesehatan itu saat tingkat produktivitas mereka telah benar-benar turun. Saat mereka tidak sanggup lagi bekerja, saat dapur mereka harus rela tidak mengepul beberapa hari, mereka baru menyadari bahwa mereka harus sehat.

Sekarang coba kita lihat JKN. Ada dua golongan besar yang tercatat sebagai peserta JKN. Pertama adalah golongan non-penerima bantuan iuran (non-PBI), dan yang kedua adalah golongan penerima bantuan iuran (PBI). Sebagai contoh, yang termasuk golongan pertama adalah pekerja penerima upah yang terdiri dari PNS, anggota TNI/POLRI, dan pegawai pemerintah. Mereka akan mendapat pelayanan di kelas I dan II. Pembayaran JKN mereka akan diambilkan dari uang gaji mereka setiap bulan.

Lalu yang kedua, yang masih termasuk dalam golongan non-PBI adalah pekerja bukan penerima upah, termasuk di dalamnya karyawan swasta. Mereka akan mendapatkan pelayanan kelas I, II

dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih. Lalu yang terakhir adalah bukan pekerja, termasuk dalam golongan ini adalah investor, pemberi kerja, wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang dan lain sebagainya yang akan mendapatkan layanan kesehatan kelas I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang mereka pilih.

Golongan kedua adalah penerima bantuan iuran atau PBI. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah fakir miskin yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sehingga premi mereka dibayarkan oleh pemerintah dan mendapat fasilitas tempat ketiga.

Selain masalah teknis lain yang memang telah menyerbu sistem baru ini sejak pertama kali dia diterbitkan, ada dua masalah utama yang harus menjadi fokus perhatian kita. Pertama, seperti yang saya bahas di atas, sistem ini adalah sistem untuk orang sakit. Sistem ini bukan untuk meningkatkan kesehatan, tapi untuk menyembuhkan orang sakit. Maka kalau dalam waktu satu bulan mereka tidak sakit, lalu uang itu lari kemana? Pasti masyarakat akan bertanya seperti itu. Atau minimal, mengapa saya harus membayar sedangkan saya tidak sakit? Kesimpulan sederhananya, agar sistem ini bisa dipakai, masyarakat Indonesia harus sakit.

Masalah kedua. Seolah benar-benar ada sekat antara si kaya dan si miskin dalam hal pelayanan kesehatan. Mau fasilitas lengkap dan bagus, pelayanan cepat dan tepat? Anda harus kaya. Kalau miskin, ya Anda harus siap dengan pelayanan kelas tiga, mau tidak mau, bisa tidak bisa. Salah sendiri miskin. Mungkin tidak seperti itu, tapi pasti akan menimbulkan kesan seperti itu.

### **Solusi Sederhana: Dokter Keluarga**

Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab? Mungkin ada yang mengatakan, mereka sendiri dong, 'kan mereka yang butuh kesehatan. Lalu apa gunanya orang-orang terdidik di pemereintahan itu? Apa guna rakyat memandatkan jabatan itu kepada mereka? Sampai kapan pun, mandat rakyat tidak akan pernah gratis. Harus ada yang dibayarkan untuk sebuah kepercayaan. Dan dari rakyat, kepercayaan telah mereka sematkan kepada orang-orang yang mengurus sistem kesehatan di negeri ini. Maka mau tidak mau, rakyat akan menagih janji-janji mereka.

Sebenarnya rakyat tidak meminta bayaran mahal. Bayaran atas mandat yang mereka berikan itu hanyalah kesejahteraan. Minimal ada sistem yang baik dan rapi yang bisa menjanjikan kesejahteraan untuk kesehatan mereka.

Lalu bagaimana solusinya? Preventif, itu jawabannya. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya janjikan sebuah saran kosruktif untuk negeri yang kita cintai bersama ini. Cara terbaik untuk merawat kesehatan adalah dengan mencegah datangnya penyakit. Omong kosong jika kita terus menerus mengobati penyakit sedangkan kita tidak pernah berusaha untuk mencegahnya datang kepada kita.

Masih dengan format iuran seperti JKN, saya pikir masyarakat tidak keberatan membayar iuran, asal iuran itu benar-benar kembali untuk kepentingan mereka. Dengan iuran bulanan itu, kita kirim dokter-dokter untuk memantau kesehatan mereka secara rutin dan terjadwal. Jadi setiap keluarga mempunyai dokter rumah mereka masing-masing.

Dokter ini yang akan memantau secara rutin kondisi kesehatan dan memberikan edukasi kepada keluarga tersebut. Mulai dari kebersihan rumah, pola makan, pola tidur, hingga penanganan jika memang ditemukan anggota keluarga yang sakit. Pelayanan dokter keluarga inilah yang nantinya akan meminimalkan angka kesakitan penduduk Indonesia, karena kita telah mencegah datangnya penyakit sebelum dia menyerang kita. Kita akan menyehatkan warga Indonesia mulai dari akar rumputnya.

Agar dokter-dokter itu mau melakukan hal ini, kita gaji mereka dengan gaji tinggi. Toh apa yang mereka laukan juga pekerjaan berat. Jadi wajar saja jika mereka menerima gaji tinggi. Melihat pendapatan pemerintah dari dana JKN selama ini, dana itu sudah cukup untuk menggaji tinggi dokter-dokter tesebut,

Opsinya sederhana. Daripada kita keluar uang banyak untuk menyembuhkan yang telanjur sakit, lebih baik keluar uang banyak untuk membuat mereka tetap sehat. Sepakat?[]

# OPSI PEMBATALAN KARTU INDONESIA SEHAT

*Dwi Rendra Hadi*

Pembangunan Indonesia harus terus berlanjut untuk memenuhi tujuan dari negara ini. Negara ini dibangun dari berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain; ekonomi, pendidikan, kesehatan, sumber daya, energi, dan banyak lagi. Kesehatan, sebagai salah satu unsur pembangun negara, menjadi salah satu dasar penting. Dari tubuh yang sehat, hadirilah karya-karya terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia. Namun, sayang entah kenapa seringkali kesehatan masih dilihat sebelah mata oleh para negarawan Indonesia.

Pemahaman tentang arti sehat bahkan kadang tidak dipahami oleh para pemegang kebijakan tentang kesehatan. Sehat kerap diartikan secara sempit terbatas pada fisik, padahal menurut WHO kesehatan diartikan sebagai kondisi sehat fisik, mental dan sosial, dan bukan terbatas terbebas dari penyakit. Perawatan terhadap kesehatan juga sering hanya dipandang kuratif, dan kuratif yang mengacu pada aspek fisik. Padahal ada aspek promotif dan preventif yang juga sama penting untuk dikelola. Pemahaman yang baik terhadap arti sehat membuat sudut pandang yang lebih luas tentang bagaimana menjaga kesehatan, yakni dengan melihat faktor-faktor psikologis dan sosial terlepas dari biologis.

Permasalahan kesehatan Indonesia cukup banyak dan rumit. Mulai dari belum terjangkaunya akses kesehatan bagi setiap lapisan masyarakat, buruknya fasilitas kesehatan di beberapa tempat, tidak tercukupinya fasilitas dan SDM sehingga terjadinya pembudakan pasien di beberapa tempat. Ditambah kurang harmonisnya hubungan antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

Kesehatan di satu sisi dipandang sebagai komoditas yang menarik untuk dijual ke masyarakat. Hal ini tergambar dari seringnya janji-janji tentang kesehatan mewarnai berbagai kampanye calon pemimpin bangsa. Ada yang terwujud, ada yang kosong, ada yang relevan dan ada juga yang tidak berkaitan sama sekali dengan kondisi kesehatan masyarakatnya. Program-program yang dilemparkan kadang terkesan utopis dan hanya manis di lisan, tetapi dalam penerapannya sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dan tidak selaras dengan paradigma pembangunan kesehatan.

Seringnya janji pengobatan gratis menjadi bahan kampanye para negarawan – negarawan Indonesia secara tidak langsung memberikan kita gambaran bahwa paradigma kuratif masih menjadi primadona di negeri ini. Entah karena para negarawan kita yang kurang memahami pentingnya melihat kesehatan secara holistik, atau karena mereka menyesuaikan dengan selera masyarakat kita. Padahal, dengan meningkatkan usaha promotif dan preventif, yang saat ini masih kurang digarap di Indonesia, lebih sedikit beban penyakit yang ditanggung masyarakat, anggaran pengobatan pun bisa lebih dihemat. Mengingat biaya pengobatan jauh lebih mahal, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif yang kini semakin banyak di Indonesia.

Masalah kesehatan sebenarnya tidak bisa terlepas dari masalah-masalah di bidang lain, karena kesehatan juga dipengaruhi faktor-faktor sosial dan lingkungan. Minimnya kesadaran akan perilaku bersih dan sehat membuat penyakit infeksi menjadi lebih mudah tumbuh dan menyebar. Pola makan yang tidak seimbang, olahraga yang kurang mendorong penyakit-penyakit degeneratif muncul lebih cepat. Pembangunan dan tata ruang tentunya juga perlu mendukung pola hidup yang bersih dan sehat, seperti banyaknya ruang dan taman publik, trotoar yang nyaman untuk berjalan kaki serta udara yang bersih dan segar.

Contoh lain masalah kesehatan yang sangat terkait dengan unsur-unsur lain adalah pemerataan akses kesehatan serta tenaga kesehatan. Masalah ini jika dilihat lebih jauh, masih sangat terkait dengan pemerataan pembangunan, baik secara fisik maupun sosial. Sulitnya akses ke puskesmas dan fasilitas primer lain, biasanya

karena jalan dan transportasi yang rusak di daerah. Ketiadaan fasilitas kesehatan biasanya diikuti dengan ketiadaan dari fasilitas publik lainnya.

Maka menjadi penting bagi presiden kita untuk memahami dan menyusun program kesehatan yang tepat untuk Indonesia. Ada beberapa hal yang dijanjikan presiden terpilih, yang terkait langsung dengan kesehatan, yaitu layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, serta air bersih untuk seluruh rakyat. Menarik untuk melihat realisasi janji-janji ini, serta relevansinya dengan kondisi sekarang di masyarakat.

Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan tentunya perlu disambut dengan baik, mengingat sekarang masih banyak kekurangan fasilitas kesehatan di Indonesia. Namun perlu diingat juga bahwa penambahan fasilitas perlu juga diimbangi dengan penambahan tenaga kesehatan. Untuk dokter saja, saat ini Indonesia baru memiliki sekitar 33 dokter per 100.000 penduduk, masih kurang dari standar WHO yang mensyaratkan 40 dokter per 100.000 penduduk. Angka ini juga belum berbicara mengenai persebaran tenaga kesehatan yang selama ini masih terpusat di kota-kota besar di Indonesia.

Air bersih serta kebutuhan dasar lainnya, seperti perumahan yang baik, pangan yang cukup tentu sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Sangat sulit untuk menjaga kesehatan jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena kesehatan sangat terpengaruh dengan kondisi biologis, psikologi dan sosial dari seseorang. Karena itu perlu juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman serta nyaman sehingga beban sosial dari tiap individu bisa ditekan

Pemerataan akses kesehatan mulai 2014 mulai didorong menggunakan sistem jaminan kesehatan nasional (JKN). Ke depan, setiap rakyat Indonesia bisa berobat dengan gratis selama mengikuti prosedur pengobatan secara berjenjang. Harapannya dengan JKN dana pembangunan kesehatan bisa semakin besar sehingga fasilitas kesehatan jadi lebih baik. Tetapi masih perlu bantuan serta dukungan dari pemerintah, mengingat ketimpangan yang sangat besar dari akses kesehatan. Luasnya wilayah Indonesia

dan beragamnya tantangan dari tiap daerah hingga sekarang anggaran kesehatan masih di bawah dari ketentuan perundangan sebesar 5%.

Penerapan sistem baru berupa Kartu Indonesia Sehat tentu perlu kajian yang matang dan mendalam. Jika kita kembali pada awal penerapan dari Jaminan Kesehatan Nasional, tentu kita tidak bisa melupakan panjangnya jalan advokasi menuju ke sana. Terlepas dari kajiannya, regulasi dasarnya memerlukan waktu hampir 7 tahun untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Tentunya, muncul kekhawatiran jika sistem baru seperti Kartu Indonesia Sehat ini diterapkan, akan memerlukan waktu yang lama serta perlu pengkajian baru bagaimana mengintegrasikan dengan sistem yang ada. Bisa dibayangkan betapa sulitnya jika perlu ada penyesuaian perundangan lagi.

Kita tentu tidak ingin terus berkuat dalam wacana dan perencanaan. Perlu ada eksekusi yang baik pula. Begitu juga dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang kini masih terus mengembangkan dirinya sesuai dengan roadmap pelaksanaan di Indonesia. Di roadmap yang tersusun sampai 2019 itu tidak ada perencanaan untuk Kartu Indonesia Sehat. Tentunya akan sangat besar tantangan untuk mengaplikasikan Kartu Indonesia Sehat.

Kita tentunya tidak boleh lupa dengan masih banyaknya tantangan yang dihadapi Jaminan Kesehatan Nasional. Proses pembiayaan yang perlu pendataan dan mekanisme pembiayaan yang baik, juga proses pendataan warga negara Indonesia sehingga semua warga bisa terlibat. Saat ini sistem jaminan sosial baru ditahap awal melalui BPJS Kesehatan. Tahun depan, 2015 saat BPJS Ketenagakerjaan dimulai, tantangan-tantangan baru akan bermunculan.

Tahun 2015, saat presiden baru memulai tahun awalnya, Indonesia juga akan menghadapi tantangan baru melalui dimulainya Asean Economic Community. Semakin terbukanya hubungan antara negara-negara di ASEAN akan mempengaruhi hubungan di berbagai bidang, termasuk kesehatan. Terbukanya arus sumber daya manusia di bidang kesehatan bisa menjadi suatu potensi yang menjanjikan, namun jika tidak dikelola dengan baik

dan kesiapan yang kurang dapat berbalik menjadi beban dan masalah baru

Pada akhirnya, kita berharap janji-janji calon presiden tidak sekedar retorika politik yang dilemparkan untuk menunjang perolehan suara saat kampanye, begitu juga dengan janji di bidang kesehatan. Evaluasi dan perbaikan juga harus terus berjalan, aksi-aksi nyata perlu terus ditingkatkan mengingat semakin besarnya tantangan serta masih banyaknya pekerjaan rumah.

Kritik dan masukan harapannya bisa diterima dengan lapang oleh pemerintah. Penyesuaian atau bahkan pembatalan dari Kartu Indonesia Sehat harapannya bisa terbuka sebagai opsi yang bisa dipilih oleh para pemimpi. Tentunya kita tidak ingin usaha-usaha pembangunan kesehatan yang sudah berjalan, kini terpaksa memilih jalan memutar karena terbentur hal-hal baru yang mungkin sebenarnya kurang relevan.[]

# TELAAH PROGRAM KESEHATAN JOKOWI-JK

*Sischa Ramadhani*

Sehat merupakan kebutuhan primer, sehingga ia tak terpisahkan dari pribadi seorang manusia. Hal itu yang membuat sektor kesehatan tak pernah mati, tak pernah sepi, dan bukan hanya jadi konsumsi kalangan atas dan berpendidikan. Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berbicara kesehatan dan program-programnya, tentu tak pernah habis. Memastikan setiap orang tercukupi hak sehatnya bukanlah hal yang mudah, karena definisi sehat itu relatif, karena kesehatan bukan hanya terletak pada tampilan jasmani, karena kesehatan bukan hanya perkara kuratif dan rehabilitatif.

Dalam suatu pemerintahan, ada bagian yang khusus mengurus program-program kesehatan, di Indonesia bagian dari pemerintahan tersebut adalah Kementerian Kesehatan. Aksi dari Kementerian Kesehatan tidak lepas dari visi dan misi dari kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah menuangkan pemikiran mengenai sistem kesehatan pada visi dan misi. Adapun program-program kesehatan yang diprioritaskan oleh Jokowi-JK sebagai berikut.

1. Kartu Indonesia Sehat dan implementasi sistem jaminan sosial nasional secara merata di seluruh Indonesia.
2. Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika.
3. Meningkatkan perhatian terhadap AKI, angka kematian bayi dan balita, pengendalian HIV dan AIDS, penyakit menular dan kronis.

4. Peningkatan berbagai fasilitas kesehatan di pedesaan, daerah terpencil, dan tertinggal.
5. Perlindungan Anak dan Perempuan.
6. Ketersediaan air bersih dan subsidi pangan.
7. Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa.

Berikut ini adalah analisis saya terhadap visi dan misi Jokowi-JK. Pertama, Kartu Indonesia Sehat dan implementasi sistem jaminan sosial nasional secara merata di seluruh Indonesia. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program unggulan Jokowi-JK di bidang kesehatan. Program ini sebenarnya tak jauh berbeda dari program BPJS yang memang telah ada dalam sistem pembiayaan berobat. Hanya saja, KIS dianggap menutupi kelemahan yang ada pada sistem BPJS, di antaranya dapat digunakan di seluruh tempat di Indonesia karena menggunakan database e-KTP (Kompas : 2014).

Program KIS sendiri masih membingungkan karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS. Jika yang dimaksud adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka akan dilaksanakan program KIS dengan menutupi kekurangan-kekurangan dari program BPJS sebelumnya, maka hal ini tentu saja sangat patut untuk diapresiasi. Namun jika yang dimaksud adalah membuat sistem yang sama sekali berbeda dengan memisahkan antara BPJS dan KIS, maka penulis merasa hal ini kurang efektif, terkhusus mengenai biaya yang bakal digelontorkan untuk membuat sebuah program baru.

Mengenai program BPJS, saya pernah merasakan sendiri manfaatnya—saat itu layanan yang didapatkan adalah melalui program Askes. Tidak ada kesulitan dalam mengurus pembiayaan kesehatan, termasuk ketika ada keluarga dekat saya yang menderita suatu penyakit dan harus dirujuk dari rumah sakit daerah ke rumah sakit pusat nasional. Kemudahan ini didapatkan bahkan hingga berbulan-bulan selama masa pengobatan.

Tanpa mengurangi apresiasi terhadap program KIS maka penulis lebih setuju jika pemerintah tetap menjalankan program BPJS

dengan pemutakhiran yang diusung oleh KIS. Dengan kata lain, ada penggabungan antara program BPJS dengan KIS. Mengenai implementasi sistem jaminan sosial nasional secara merata di seluruh Indonesia, hal ini tentu saja harus dilakukan. Terutama pada masyarakat yang masih termarjinalkan serta berasal dari kalangan tidak mampu yang memerlukan pelayanan-pelayanan sosial. Salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan penambahan iuran BPJS yang berasal dari APBD dan APBN seperti yang terangkum dalam visi-misi Jokowi-JK

Kedua, Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika. “Kami akan mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu lebih memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika, terutama pada sumber-sumber, pada produsen, dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional. Kami berkomitmen untuk mendukung upaya program percepatan misi Indonesia bebas narkoba dengan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum harus dilakukan secara terus-menerus dan perlu dimasukkan dalam kurikulum pengetahuan siswa sejak SD sampai dengan mahasiswa. Kami akan menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.” Demikian tertulis di dokumen Jokowi.

Program pemberantasan narkoba dan psikotropika dalam visi-misi Jokowi-JK, bersifat komprehensif. Pemberantasan melalui jalur hukum ditegakkan kepada siapapun yang bersinggungan dengan barang haram itu, dari tingkat terkecil hingga pada transaksi-transaksi lintasnegara. Penanaman nilai-nilai akan bahaya narkoba dan psikotropika di sini juga dilakukan pada masyarakat umum dan akan dilakukan secara berkesinambungan. Yang terpenting usaha untuk kembali menjadikan para pengguna narkoba dan psikotropika menjadi bagian dari masyarakat yang normal harus betul-betul diperhatikan melalui sistem rehabilitasi yang mumpuni, orang-orang yang terjun untuk merehabilitasi hendaknya mereka yang bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan dan selalu memberi dukungan kepada para penderita untuk kembali ke kehidupan yang semestinya.

Ketiga, Meningkatkan Perhatian terhadap Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi dan Balita, Pengendalian HIV

dan AIDS, Penyakit Menular dan Kronis. Angka kematian Ibu saat melahirkan masih menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI/100.000 kelahian hidup menurun secara bertahap dari 390 (1991), menjadi 334 (1997), 307 (2003), 228 (2007) dan pada tahun 2012 melonjak menjadi 359.

Perbincangan penulis dengan salah seorang Kepala Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, yang pernah melakukan analisis mengenai masih tingginya AKI di wilayah kerjanya, menyebutkan bahwa para ibu yang mengalami kematian saat melahirkan cenderung menderita anemia saat kehamilan. Anemia ini salah satunya disebabkan kurangnya pemenuhan gizi ibu saat kehamilan dan hal tersebut lagi-lagi karena ketidakmampuan keluarga untuk mengusahakan makanan bergizi.

AKI, Angka Kematian Bayi dan Balita, Pengendalian HIV dan AIDS serta Penyakit menular dan kronis akan berhasil dilakukan jika aspek promotif dan preventif gencar dilakukan, karena penulis merasa bahwa penanganan masalah kesehatan di Indonesia masih terkonsentrasi hanya pada pada aspek kuratif dan rehabilitatif. Menunggu datangnya penyakit, baru akan dilakukan tindakan.

Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam program-program kesehatan. Penyuluhan berulang-ulang tanpa ada upaya perubahan perilaku dari masyarakat pun tak akan efektif. Karena sesuatu yang paling sulit dalam upaya penyadaran adalah membuat seseorang mengubah perilakunya dengan kesadaran sendiri karena mengerti akan pentingnya makna hal tersebut, termasuk dalam berperilaku hidup sehat.

Masih menurut Kepala Puskesmas tersebut, bahwa pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang jelas dan konkrit akan jalannya program-program kesehatan, terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dan para tenaga kesehatan belum merasa terbebani bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan upaya perubahan perilaku pada masyarakat. Sayang sekali jika dana 5% dari anggaran negara yang dikeluarkan untuk masalah dalam subjudul ini habis sia-sia tanpa adanya kemajuan yang berarti.

Keempat, Peningkatan Berbagai Fasilitas Kesehatan di Pedesaan, Daerah Terpencil, dan Tertinggal. Salah satu hal yang masih menjadi hambatan dalam pengelolaan kesehatan adalah masih belum adanya fasilitas kesehatan yang memadai khususnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Adanya pembangunan 50.000 rumah sehat dan penambahan 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut serta perlu terus dilakukan penambahan, pemeliharaan, dan pemutakhiran akan fasilitas-fasilitas tersebut. Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan program-program kesehatan pun perlu dimobilisasi ke daerah-daerah tersebut.

Kelima, Perlindungan Perempuan dan Anak. Maraknya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak harus mendapatkan penanganan intensif. Perlu adanya kekuatan hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, melakukan rehabilitasi terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu pemerintah juga harus memberikan informasi akan kejahatan seksual terhadap anak sedini mungkin. Perlindungan kejahatan seksual terhadap anak bisa diberikan terhadap para orangtua, pada saat posyandu misalnya. Atau dengan menciptakan program khusus untuk mensosialisasikan hal tersebut. Informasi untuk melindungi anak juga harus diberikan di sekolah-sekolah yang diharapkan mampu meminimalisir angka kejahatan terhadap anak.

Keenam, Ketersediaan Air Bersih dan Subsidi Pangan. Dengan terjadinya krisis air bersih di Indonesia, menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan pasokan air bersih. Subsidi pangan pun perlu dilakukan terutama untuk pemenuhan gizi pada masyarakat yang masih mengalami krisis pangan.

Ketujuh, Meningkatkan Akses dan Partisipasi Masyarakat Secara Lebih Luas dan Merata untuk Meningkatkan Kesehatan dan Kebugaran Jasmani Serta Membentuk Watak Bangsa. Penanganan masalah kesehatan tentu saja membutuhkan peran serta masyarakat karena sebenarnya merekalah yang menjadi sasaran utama dari program-program kesehatan seperti yang telah saya uraikan pada poin tiga.

Demikianlah rangkuman dari visi-misi Jokowi-JK di bidang kesehatan. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian Jokowi. (1) Regulasi rokok. (2) Perlindungan akan Hak-hak Dokter. (3) Kesehatan Lingkungan (di luar pembangunan rumah sehat). (4) Aspek Promosi Kesehatan. Semoga dengan berjalannya program-program kesehatan, keempat hal itu mendapat perhatian dari pemerintah.

Melalui program-program kesehatan yang dicanangkan oleh Jokowi-JK, kita berharap hal-hal yang disampaikan bukan hanya pemanis di musim pemilu atau angin segar di masa perebutan suara rakyat, tetapi menjadi kunci untuk perbaikan kehidupan rakyat di masa mendatang. Kita berharap kata-kata yang telah dituliskan bukan hanya bersifat normatif, tapi merupakan gebrakan untuk kesejahteraan rakyat di masa-masa mendatang. Kami percaya bahwa para pemimpin negeri ini adalah negarawan yang bisa dipegang janjinya.[]



**JANJI  
DARI PINGGIRAN**

# POROS MARITIM DUNIA; ANTARA SOLUSI DAN ILUSI

*Aa Habib Baihaqi*

**K**edua negarawan itu berjalan dengan kesederhanaan dan percaya diri. Mereka melambaikan tangan dan melempar senyum kepada masyarakat yang hadir. Berbeda dengan pendahulunya, Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi tempat bersejarah yang dipilih. Di atas Kapal Layar Mesin (KLM) Hati Buana Setia di Dermaga IX, Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyampaikan pidato kemenangan dalam pemilihan presiden ke-7 Republik Indonesia. Tempat itu dipilih sebagai bentuk kesadaran dan komitmen atas misinya dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Berbicara negara maritim, tidak bisa lepas dari sejarah kejayaan beberapa kerajaan di Indonesia. Dari abad ke-7 sampai ke-13 berdiri Majapahit dan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar di dunia. Kedua kerajaan itu memiliki pengaruh yang besar dan menguasai wilayah serta perekonomian di nusantara maupun beberapa negara tetangga. Dengan konsep *sea power*, Majapahit dan Sriwijaya mampu mendayagunakan kekuatan laut menjadi aset strategis dalam mengawal arah perdagangan dunia. Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan kerajaan tersebut adalah selain faktor geografis yang terletak di antara dua samudera dan dua benua, juga memiliki kekuatan dan armada perang yang handal serta sumber daya laut yang melimpah.

Indonesia adalah negara besar yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Dengan luas perairan tiga per empat dibanding luas daratannya (75%) serta didukung sekitar 17.504

pulau yang tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke, dari ujung Miangas sampai Rote, menjadikan Indonesia menjadi negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (95.181 km), 30 persen geothermal dunia, keanekaragaman dan endemisme kedua di dunia serta memiliki ekosistem terumbu karang terkaya dan terindah di dunia.

Melihat potensi di atas seharusnya bangsa ini sudah mampu memimpin dunia dan menjadi negara yang maju. Namun, kenyataannya tidak demikian. Hingga hari ini Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber daya alamnya dengan baik, garam kita masih impor, terjadi *illegal fishing*, pertambangan dan energi kita dikuasai asing serta terjadi kemuduran dan kerusakan ekosistem. Belum lagi hingga akhir tahun 2014, hampir seluruh nelayan di Indonesia masih tergolong tidak sejahtera dengan pendapatan rata-rata Rp 30.000/hari, sedangkan nelayan sendiri menjadi elemen terdepan di setiap garis pantai yang ada di Indonesia.

Kasus lain untuk tahun ini, Indonesia menempati posisi kedua produsen ikan tertinggi di dunia setelah China. Namun dalam kenyataannya kualitas ikan Indonesia belum terlalu diminati pasar dunia, sehingga meskipun berada di peringkat kedua tapi untuk masalah ekspor ikan, Indonesia masih kalah dan tertinggal jauh oleh negara-negara lain. Kondisi sektor kelautan Indonesia yang timpang ini terjadi akibat kualitas sumber daya manusia yang ketinggalan jauh dibanding sumber daya manusia negara-negara tetangga yang mampu mengelola sumber daya alamnya dengan cukup baik dan mumpuni untuk menghadapi persaingan global. Kondisi semacam ini diperparah dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak tepat sasaran sehingga nasib rakyat kecil malah terninabobokan dan berada dalam jurang keterpurukan.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Ir. H. Djoeanda Perdana Menteri memperoleh amanah dari Ir. Soekarno untuk mendeklarasikan kepada dunia tentang batas-batas tanah dan lautnya. Isi deklarasi ini terus diperjuangkan hingga akhirnya diterima oleh masyarakat dunia melalui ketetapan Konvensi Hukum Laut PBB (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) 1982.

Komitmen Ir. Soekarno tersebut kembali dihadirkan saat Munas Maritim 1963 dengan menyatakan, "Kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu." Melalui penunjukan Ali Sadikin sebagai Menteri Koordinator Maritim, Soekarno menjadikan laut Nusantara sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional.

Rotasi kepemimpinan pun silih berganti mulai dari Orde Baru, Orde Lama dan Orde Reformasi. Dari setiap periode, terlihat adanya pergeseran dari orientasi maritim menuju orientasi darat. Hal-hal tersebut disadari karena banyak faktor yang membuat bangsa ini lupa akan aset yang dimilikinya. Baru setelah banyaknya pencurian ikan, perebutan pulau-pulau terluar semisal Pulau Sipadan-Ligitan, dan pencemaran ekosistem laut, kita semua sadar jikalau bangsa ini sudah lama tertidur lelap di bawah penjajahan semu yang membuat enggan untuk berbenah dan menjadi bangsa pemimpin. Agaknya, melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo terdapat udara baru yang menyegarkan kembali ingatan kita tentang pentingnya industri maritim dalam membangun Indonesia yang hebat dan kuat.

Dengan visi "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong," presiden mengusung tujuh misi yang tiga di antaranya menguatkan sektor maritim. Ketiga misi tersebut tercantum dengan jelas pada poin satu, tiga dan enam, yaitu; (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Dari misi-misi tersebut dijabarkan kembali menjadi sembilan agenda prioritas yang di antaranya tidak melepaskan maritim sebagian bagian terpenting dalam memperkuat jati diri bangsa. Sebagai contoh dalam bidang ekonomi, pemerintahan Jokowi berkomitmen melakukan pembangunan di bidang maritim, hal ini dapat dilihat dari sembilan agenda yang akan dilakukan

diantaranya melalui; (1) Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal (melalui bank pertanian), sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (2) Pembangunan 100 sentral perikanan sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu, (3) Pemberantasan illegal, *unregulated* dan *unreported fishing* (IUU), (4) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan *overfishing* dan meningkatkan intensitas penangkapan di kawasan *underfishing* sesuai batas kelestarian, (5) Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan, (6) Peningkatan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Kawasan konservasi perairan dalam lima tahun mendatang dikelola secara berkelanjutan menjadi 17 juta hektar dan penambahan kawasan konservasi seluas 700 hektar, (7) Penerapan *best aqua-culture practices* untuk komoditas-komoditas unggulan, (8) Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yang mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan, (9) Meningkatkan produksi perikanan dua kali lipat, menjadi sekitar 40-50 juta ton per tahun pada 2019.

Kalaulah industrialisasi maritim di atas berjalan dengan seimbang, menggunakan strategi *blue economy* dan didukung oleh setiap elemen masyarakat, menurut hemat saya, Indonesia sebagai poros maritim dunia bukan sebatas wacana namun akan segera terealisasikan. Adapun salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi-misi tersebut adalah perlunya komitmen yang kuat dan langkah yang tegas dalam menghadapi beberapa tantangan berikut ini.

## 1. Kesadaran dan Keselarasan Elemen Bangsa

Sudah bertahun-tahun bangsa ini melupakan sejarahnya sebagai bangsa yang pernah jaya di lautan. Hal ini bermula dari *mindset* masyarakat yang lebih berorientasi darat dari pada lautan, begitupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang melupakan sumber daya lautnya sehingga tidak heran laut kita hanya dinikmati oleh bangsa asing yang tidak bertanggung jawab.

Hal pertama dan utama pemerintah jelas harus mampu menyadarkan setiap elemen masyarakat untuk kembali beralih mengedepankan sektor laut dalam pembangunan ekonomi ke depan. Sebagai contoh ketika hari ini Maluku sudah menjadi

lambung ikan nasional maka perlu ditambah lumbung-lumbung baru sebagai salah satu strategi dalam mencerdaskan masyarakat akan besarnya potensi negara maritim.

Begitupun dengan bidang perikanan tangkap, wisata bahari, transportasi laut dan konservasi bahari yang harus terus dibenahi dan ditingkatkan. Selain itu keselarasan mulai dari presiden sebagai pemegang kebijakan utama, para menteri, gubernur, bupati dan walikota serta setiap elemen masyarakatan harus memiliki satu *frame* yang sama akan wawasan kemaritiman Indonesia. Sehingga dengan adanya kesadaran dan keselarasan ini tugas-tugas yang cukup banyak bisa dilakukan secara bertahap dan terukur secara optimal.

## 2. Pembenahan Infrastruktur Maritim

Infrastruktur ini mulai dari kapal, pelabuhan dan setiap hal yang menyangkut bidang maritim baik secara ekonomi maupun pengawasan dan keamanan. Seperti yang diketahui menurut data KKP (2011) dan data BPK (2012) dijelaskan bahwa setiap tahunnya potensi pendapatan negara dari sektor perikanan laut hanya berkisar Rp65 triliun dengan kerugian akibat *illegal fishing* sebesar Rp300 triliun sehingga seandainya *illegal fishing* ini bisa dihilangkan maka pemasukan bisa mencapai Rp365 triliun, dana yang tidak kecil.

Adapun solusi yang direncanakan oleh pemerintahan presiden baru kita sesuai dengan agenda “Restorasi Maritim Indonesia” yaitu dengan penambahan kapal patroli dan memperkuat pengamanan laut. Selanjutnya rencana pembuatan tol laut yang pada akhirnya tol bisa menyambungkan pulau-pulau di Indonesia dari barat sampai timur sehingga proses distribusi lebih efektif dan efisien.

Selain itu untuk peningkatan daya saing pasar internasional, pemerintah juga berencana untuk membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Masih banyak agenda perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dan rakyat sekarang sudah dewasa, rakyat perlu bukti sehingga agenda pembangunan ini harus disikapi serius oleh pemerintah dan diagendakan dengan matang melalui perencanaan yang mengikutsertakan para ahli yang bersih dan profesional.

### **3. Konflik Perbatasan dan Regional**

Sebagai anggota dari ASEAN, Indonesia memiliki wilayah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Perbatasan ini menjadi bagian yang sangat penting bagi setiap negara karena ini menjadi patokan atas luas suatu negara termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Sampai saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum teridentifikasi dengan jelas kepemilikannya terutama sengketa landasan kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antarnegara.

Ketidaksiwaan pemerintah ini pernah berdampak fatal sehingga lepasnya pulau-pulau terluar Sipadan-Ligitan, belum lagi pengerukan pasir laut di banyak wilayah Riau sehingga memperluas wilayah daratan Singapura dan sampai pada kasus Blok Ambalat. Itu adalah serangkaian sejarah masa lalu yang tidak boleh terulang kembali. Apalagi ke depan bangsa ini dihadapkan dengan konflik Laut China Selatan dan akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan yang baru.

### **4. Pendanaan Poros Maritim**

Untuk mewujudkan semua arah kebijakan di atas diperlukan anggaran yang cukup besar. Anggaran ini harus dipikirkan jauh hari oleh pemerintah, transparansi jelas harus dikedepankan. Pendanaan ini bisa diandalkan melalui APBN ataupun dengan mengoptimalkan sektor mineral dan sumberdaya alam lain yang belum terjamah dengan baik. Pada akhirnya kalaulah pemanfaatan potensi maritim Indonesia ini sudah berjalan maka secara material bisa mencapai USD 1,2 triliun per tahun, lebih besar dari APBN yang dimiliki negara kita, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk 40 juta orang.

### **5. Evaluasi dan Komunikasi**

Tahap terakhir yang harus dilakukan pemerintah ke depan adalah mengevaluasi setiap kebijakan yang sudah diambil dan mengkomunikasikannya secara jujur kepada seluruh elemen bangsa demi keberlanjutan dan perbaikan bangsa Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, sejahtera, bermartabat dan berdaulat.

Itulah beberapa tantangan pemerintahan ke depan, perlu kerja keras dan berbagai inovasi untuk membangun negara maritim sebagai bangsa besar seutuhnya. Presiden Soekarno kita pernah berucap, “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya....., bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal....bukan! Tetapi bangsa pelaut dalam arti cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”.

Seperti itulah target kita sekarang, dengan niat yang kuat dan semangat yang baru, kita wujudkan sebuah peradaban maritim dunia yang bukan sebatas ilusi tetapi benar-benar menjadi solusi. Semoga. Merdeka![]

# DAERAH PERBATASAN YANG TERLUPA

*Ariyanto Pamungkas*

Setiap setengah dasawarsa, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah ini melaksanakan pergantian kepemimpinan, biasa disebut dengan istilah pesta rakyat atau pesta demokrasi. Angin musim perubahan telah berhembus semenjak pemilihan umum legislatif digelar, dan menandakan akan datangnya pergantian *the number one* di negeri demokrasi ini.

Bendera-bendera partai mulai ramai dikibarkan di setiap sudut jalan dan fasilitas umum. Semua partai bergerilya melakukan penokohan kader partainya masing-masing. Dari mulai memasang iklan di stasiun televisi, iklan media sosial, blusukan ke penjuru kota, sampai melakukan kegiatan sosial sebagai bentuk pencitraan untuk mencuri perhatian bangsa yang memiliki kedaulatan rakyat ini. Semua *stakeholder* pun memiliki cara masing-masing dalam menyambut musim tersebut.

Indonesia menggelontorkan anggaran rumah tangganya puluhan miliar rupiah hanya untuk melaksanakan pemilihan umum yang pelaksanaannya tak lebih dari lima menit dirasakan oleh rakyat saat mencoblos. Padahal jika anggaran itu digunakan untuk hal lain akan setara dengan membangun 17.000 gedung sekolah dasar yang baru karena masih banyak desa-desa yang belum ada SD. Atau membangun 125 gelanggang olahraga baru, yang bisa menetaskan atlet-atlet profesional di masa depan. Bahkan setara dengan membangun 85 pembangkit listrik tenaga surya yang baru untuk menerangi daerah-daerah yang belum tersentuh cahaya lampu listrik pada malam hari. Bayangkan betapa

kerennya jika semua itu diberikan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Tapi mengapa Indonesia lebih memilih untuk tetap melaksanakan pemilu yang super mahal itu. Apakah ada maksud lain dari pelaksanaan pemilu itu? Apakah kepentingan pemilu hanya untuk kaum elit politik saja? Apakah hanya sekedar sebagai syarat agar diakui sebagai negara demokrasi? Ternyata jawabannya adalah Indonesia membeli sebuah harapan, yaitu harapan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.

Pemilihan Presiden RI dengan cara Pemilihan Umum merupakan suatu bentuk konsekuensi dari negara yang menganut sistem demokrasi. Namun, makna dilaksanakannya pemilihan umum tidak semata-mata hanya karena Indonesia menganut sistem demokrasi, Pemilu memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia, karena Pemilu membawa harapan baru untuk kemajuan bangsa, ketika rakyat sipil, nelayan, petani, mahasiswa, dan seluruh elemen-elemen masyarakat menaruh harapan pada seorang pemimpin baru menggantikan pemimpin sebelumnya.

Pemimpin baru harus mampu meneruskan perjuangan pemimpin sebelumnya bahkan harus mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan sebelumnya. Dengan demikian, anggaran dana yang digelontorkan dalam pelaksanaan pemilu, kemungkinan bisa terbayar dengan hadirnya pemimpin baru, jika mampu menciptakan kemajuan ekonomi yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Seluruh rakyat Indonesia biasanya akan menyambut niat baik para calon pemimpin yang memiliki keinginan mulia untuk menjadi calon Presiden Indonesia yang mampu menjawab tantangan bangsa. Calon pemimpin dengan *track record* yang baik, berkarisma, berwibawa, dan menarik hati akan mendapat perhatian dan sorotan banyak kalangan. Awalnya setiap calon pemimpin akan menunjukkan itikad baiknya untuk mendapat sambutan baik oleh rakyat. Rakyat pun akan berbunga-bunga diguyuri banjir perhatian dari para calon pemimpin.

Mengumbar janji ibarat berjalan di pinggir jurang yang licin, sangat berbahaya karena kapan pun bisa tergelincir masuk ke dalam jurang. Perbuatan itu sering dilakukan oleh calon

pemimpin. Menjadi dilema bagi calon pemimpin karena suka atau tidak suka harus mengumbar janji di depan rakyat, terlepas janji itu adalah benar akan diwujudkan atau tidak. Semakin tinggi krisis kepercayaan maka semakin lantang janji itu terngiang.

Ide-ide besar tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa seketika muncul, keluar dari mulut para calon pemimpin, terlepas ide itu akan berhasil menjawab permasalahan bangsa atau tidak. Semua calon pemimpin harus melakukan itu semua, karena rakyat ingin tahu bahwa apa yang bisa dilakukan mereka jika nanti terpilih. Rakyat pun mau tidak mau harus mendengar janji-janji, karena rakyat yang nanti akan memilih siapa pemimpinnya kelak, dan menjadi tanggung jawab untuk kritis dengan mengawal proses tersebut dari hulu ke hilir karena menginginkan perubahan. Jangan sampai rakyat mencibir pemimpinnya tanpa dasar, padahal mereka tidak melakukan hal tersebut pada saat pemilu dan ketika pemimpin itu menjabat.

Janji telah didengar dan hak pilih pun telah digunakan serta hasil sudah ditetapkan. Harapan besar boleh digantungkan di tangan pemimpin terpilih, dukungan serta doa harus senantiasa diberikan untuk Indonesia yang lebih baik. Ketika kampanye dan pemilu, pilihan boleh berbeda-beda, tapi ketika pemimpin telah terpilih dari hasil pemilu, kita harus berkumpul dalam suatu lapangan besar, dan biarlah di lapangan besar itu kita memakai baju masing-masing dengan warna berbeda-beda. Tetapi tetap hanya satu kata yang kita teriakkan dengan lantang, yaitu Indonesia. Setelah pemilu berlalu, setelah itu tugas kita adalah menagih janji negarawan.

Perwujudan yang paling nyata untuk bisa membayar senyum rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah digantungkan di tangan pemimpin terpilih adalah dengan membangkitkan perekonomian yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur. Sehingga diharapkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat Indonesia. Kemandirian ekonomi mampu meningkatkan otonomi sehingga mampu merebut kedaulatan politik.

Rakyat telah mendengar janji pemimpin. Pemimpin berseru, bahwa ekonomi yang kuat bisa dibangun dengan berkomitmen

untuk penguasaan sumberdaya alam melalui pertama, meningkatkan jumlah pengusaha tambang nasional. Sumber daya alam Indonesia kini dikuasai dan dieksploitasi oleh asing, mestinya rakyat geram dengan hal itu apalagi pemimpinnya. Contoh nyatanya adalah tambang perusahaan asing Freeport yang telah mengeruk gunung yang kaya menjadi cekungan palung yang sangat dalam.

Negara asing mendapatkan keuntungan besar dari hasil tambang negeri ini sementara rakyatnya hanya terhempas debu dan limbah tambangnya, bahkan Indonesia pun mendapatkan keuntungan tidak lebih dari 1% atas hasil tambang tersebut, miris memang. Oleh karena itu, menjadi suntikan harapan segar jika pemimpin yang baru akan membuat perubahan, dengan merebut kembali penguasaan kekayaan sumber daya alam negeri yang indah ini untuk bisa dikelola dan dinikmati serta dikuasai oleh anak bangsa.

Janji kedua adalah tentang mimpi menguatkan infrastruktrur melalui, (1) Pengembangan sistem transportasi umum masal terintegrasi yang berimbang, baik di lautan, udara maupun darat, (2) Pemerintah membangun bank infrastruktur dan meningkatkan kapasitas anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur, (3) Kebijakan transportasi yang berpihak pada transportasi massal yang aman, nyaman, dan efisien.

Poin demi poin mulai dari 1 sampai 40 merupakan janji yang disampaikan oleh Jokowi pada masa kampanyenya. Seakan hari-hari ke depan semakin cerah. Masuk akal memang, karena infrastruktur bagaikan darah yang mengalirkan sumber-sumber kehidupan perekonomian bangsa ini. Jika infrastrukturnya buruk, sehebat apapun pembangunan yang dicanangkan di setiap daerah maka perekonomian akan terhambat. Seperti darah di dalam tubuh yang tidak bisa mengantarkan protein, vitamin, karbohidrat dan lainnya ke seluruh tubuh. Tentu, seluruh bangsa Indonesia berharap bahwa janji-janji manis itu tidak hanya sekedar terlanjur terucap, tetapi bisa diwujudkan dengan kerja-kerja nyata pemimpin beserta jajarannya.

Kami mendengar cerita tentang anak perbatasan, kondisi di sana sangat memprihatinkan. Di daerah perbatasan itu,

pemerintah tetangga lebih perhatian dengan penduduk perbatasan dibandingkan pemerintah Indonesia. Sumbangan bantuan, kesejahteraan dan pembangunan hampir semua dipenuhi oleh negara tetangga tetapi tidak sedikit pun pemerintah Indonesia memberi perhatian terhadap daerah perbatasan. Mata uang yang banyak beredar pun bukanlah mata uang Indonesia. Sehingga harga barang dan jasa di daerah perbatasan sangat mahal, akibatnya masyarakat di daerah perbatasan lebih memilih melakukan perniagaan di negeri jiran dan memakai mata uang yang berlaku di tetangga itu.

Lebih dari itu, banyak cerita tentang pulau yang sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah dalam negeri, sedangkan pulau-pulau tersebut banyak diperebutkan dan diberdayakan oleh negara asing. Kita masih ingat kejadian heroik ketika dahulu para pahlawan rela mengorbankan jiwa raganya agar tidak sejengkal pun tanah air yang indah ini direbut oleh negara asing, tapi Sipadan-Ligitan terpaksa harus kita relakan untuk diserahkan kepada Malaysia. Hal itu disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah Indonesia.

Tentu kita tidak berharap hal tersebut terulang lagi. Sehingga pemimpin baru berjanji memberikan perhatian lebih terhadap daerah perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melakukan pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Tentu hal tersebut sangat didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia. Maka tepatilah janji-janjimu wahai pemimpin baru.

Mewujudkan kemandirian ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan papan. Tetapi juga pemenuhan pelayanan-pelayanan dasar, berupa pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat vital.

Di negara kita, kesehatan maupun pendidikan sangat memprihatinkan. Ribuan gedung sekolah banyak yang tidak layak pakai. Pendidikan sangat mahal di negeri yang kaya, banyak anak bangsa yang putus sekolah. Akibatnya anak bangsa yang tak mampu melanjutkan pendidikan terkurung dalam lingkaran kemiskinan.

Muncul pula kalimat ini, orang miskin tidak boleh sakit. Klausa itu secara implisit melekat pada rakyat miskin, disebabkan karena rakyat miskin tidak mampu menjangkau biaya rumah sakit yang sangat mahal. Seperti itu kondisi nyata bangsa Indonesia. Sehingga kesehatan dan pendidikan sangat diharapkan oleh rakyat kepada pemimpin bangsa agar segera membenahi pelayanan-pelayanan dasar.

Demikianlah sepenggal janji-janji yang sudah disampaikan oleh pemimpin baru Indonesia. Rakyat hanya bisa mendengar dan terkesima dengan ide-ide yang disampaikan pada masa kampanye. Begitu manis memang janji-janjinya, rakyat kecil mungkin tidak mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkannya. Tapi pastinya rakyat tidak berharap janji-janji tersebut tidak dijadikan alat hanya untuk mengelabui rakyat kecil. Harapannya janji-janji tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dan harus ada di antara rakyat yang mengambil peran sebagai agen perubahan yang kritis untuk menagih janji para pemegang kekuasaan di negeri ini.

[]

# (BUKAN) DESA OBRALAN

*Nabella Rizki Al Fitri*

Tere Liye dalam novel *Negeri Para Bedebah* telah berhasil mengangkat potret sebuah negara yang dipenuhi oleh para cukong kebijakan. Prosa yang menukik kesadaran setiap pembacanya. Pertengahan tahun 2014 ini, masyarakat Indonesia pun berhasil dibuai oleh para calon presiden, bukan dengan liukan prosa tapi dengan janji-janji besar mereka tentang masa depan Indonesia.

Dari bejibun janji yang tak terhitung, ada satu janji yang menjadi *trending* dan memegang kunci utama kantong suara mereka, yakni janji agung tentang serba-serbi pembangunan desa. Janji itu mereka tulis besar-besar di baliho yang terpasang gagah di bawah pohon rindang setiap sudut desa. Menariknya, dua calon juga saling perang nominal uang yang akan digelontorkan, pun entah Rp1 miliar ataupun Rp 1,3 miliar tidak akan berarti jika presiden kelak tetap memandang desa sebagai komoditas dan menjauhkannya dari nilai filosofis dan sosiologis yang telah lama melekat.

Narasi besar tentang pembangunan Indonesia akan habis menjadi angan-angan saja jika tidak dimulai dari pemberdayaan desa. Tidak ada yang menafikan, bahwa desa adalah entitas pemerintahan yang strategis dan langsung berhubungan dengan masyarakat (Lala M. Kolopaking, 2011: 35). Sensus penduduk terakhir mencatat bahwa 60% penduduk Indonesia masih bertempat tinggal di kawasan pedesaan. Sehingga wajar dan memang seharusnya jika calon presiden menaruh perhatian yang amat besar terhadap pembangunan kawasan pedesaan.

Menjadi tidak wajar jika calon presiden yang merupakan generasi terbaik bangsa ini menggunakan nafsu politiknya dengan melihat problematika desa secara sederhana, yang kemudian berujung pada perang nominal dana desa.

Permasalahan desa benar-benar tidak sesederhana bualan janji para calon presiden, karena desa menjadi hulu dari berbagai permasalahan kemiskinan, lingkungan, dan degradasi moral. Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 menggambarkan desa layaknya laboratorium kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin dua kali lipat dari angka kemiskinan di kawasan perkotaan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) membuat masyarakat terkaget dengan temuannya yang menulis bahwa terjadi peningkatan bencana ekologis hingga 239% di kawasan pedesaan sepanjang tahun 2013. Belum lagi gagap teknologi yang dialami penduduk desa yang kemudian memberi efek kejut yang berujung pada degradasi moral, sosial, agama dan budaya.

Secara ringkas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah dijelaskan berbagai permasalahan internal dan eksternal kawasan pedesaan, antara lain berikut.

1. Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas di laur sektor primer;
2. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan pedesaan;
3. Meningkatnya konservasi lahan pertanian;
4. Tingginya resiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di pedesaan;
5. Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat pedesaan;
6. Rendahnya tingkat prasarana dan pelayanan;
7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di pedesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah;
8. Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; dan
9. Meningkatnya degradasi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.

Kusutnya permasalahan tersebut harus segera dipertemukan dengan solusi yang komprehensif dan efektif. Sebagian kalangan bersorak riuh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dipikir sebagai bagian dari solusi.

Sebagian kaum oportunistis mencaci tak ada habisnya tentang desa yang akan dibangun kosmopolitan dan lari dari nilai nenek moyang. Atau sebagian lain yang menamakan dirinya kaum intelektual mengkritik dengan paradigma integratif demi kebaikan bangsa ataupun demi uang-uang penelitian.

Sebagian dari kalangan yang bersorak itu adalah presiden terpilih, Ir. Joko Widodo yang telah melewati jalan terjal pelegitimasi diri di Mahkamah Konstitusi. Empat puluh dua lembar visi misi yang penuh dengan cita-cita hebat Indonesia dirangkai dengan tidak melupakan satu janji tentang uang satu koma tiga untuk desa yang didapat dari logika UU ini. Tidak main-main dalam sembilan agenda prioritas yang dikenal dengan Nawa Cita, Jokowi menempatkan janji pembangunan desa pada poin ketiga yang berbunyi “Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Janji ini dijabarkan dalam satu paragraf bahwa pemerintah kelak berkomitmen untuk “Mengawal UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi dan pendampingan.”

Bisa jadi, uang Rp 1,3 miliar ataupun seluruh deretan pasal dalam UU Desa bukanlah solusi. Penulis meyakini sumber dari permasalahan di kawasan pedesaan salah satunya adalah lemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan desa. Diibaratkan tubuh, kepala desa adalah hati dari pemerintahan desa. Jika hati baik, maka seluruh tubuh menjadi baik, begitulah Rasulullah menggambarkan. Tidak akan lagi terdengar berita kelaparan, kekeringan, banjir ataupun budaya yang dicuri, jika ada sosok pemimpin yang berintegritas dan dicintai masyarakatnya. Lemahnya kepemimpinan itu sendiri adalah produk dari

rendahnya kualitas SDM dan sistem pemilihan pemimpin yang ada (Aida V, 2011: 205 ).

Lemahnya kepemimpinan dalam pemerintahan desa bukan asumsi semata. Selama satu tahun terakhir termasuk pada kesempatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di berbagai pelosok desa di Indonesia, penulis melihat bagaimana tragisnya sistem kepemimpinan yang teraktualisasi dalam Pemerintahan Desa, utamanya terkait dengan sistem pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala Desa secara langsung telah menjadi ladang bagi para penjudi atau orang desa menyebutnya dengan *botoh*. Contoh saja di Desa Dempet, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang menjadi tempat KKN kami. Daerah itu menghadirkan kisah pilu tentang keinginan orang baik yang tidak bisa maju dalam pemilihan Kepala Desa karena kalah sebelum perang, karena saingan uang dengan para *botoh*. Ataupun cerita menegangkan dari seorang ibu yang diancam belati karena harus memilih seorang Kepala Desa yang tidak didambakan, tapi dijagokan penuh oleh para *botoh* yang dibayar oleh salah satu partai. Maka akan menjadi omong kosong jika cita-cita menghadirkan pemerintahan yang melindungi, anti korupsi dan efektif melayani tidak direformasi dari sudut pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu.

Sayangnya UU Desa telah dirasuki kegenitan intelektual tentang makna demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat maka tidak melulu diartikan sebagai pemerintah yang harus didasarkan pada pemilihan langsung (Jimly Asshiddiqie, 2005: 241). Pasal 31 hingga 47 dalam UU Desa yang mengamanahkan pemilihan desa secara langsung dan serentak adalah bentuk latah demokrasi yang diusung dalam UU tersebut. Seakan-akan UU Desa telah mengabaikan kisah pilu dan menegangkan, demi ego membentuk tatanan desa modern yang diakui masyarakat internasional. Kegagalan pemilihan Kepala Desa yang berkualitas menjadikan Pemerintahan Desa lumpuh dan hanya menjadi boneka bagi pemerintahan hierarkis di atasnya.

Penting untuk menikmati kembali rangkaian sejarah tentang bagaimana sistem pemilihan Kepala Desa di masa lalu yang jauh dari praktik kotor korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ataupun suap menyuap. Pada awal berdirinya, desa hanya dihuni

oleh puluhan keluarga yang masih terikat dengan ikatan tali kekeluargaan. Kepala Desa atau disebut dengan Panepuluh dipilih secara musyawarah mufakat berdasarkan umur, kecakapan, pengalaman dan kesaktian. Seorang Panepuluh harus bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban dari sepuluh kepala keluarga dimaksud.

Dalam lingkup desa yang lebih besar, Kepala Desa disebut sebagai Panewu yang cara pemilihannya masih dengan cara musyawarah dan mufakat. Kriteria seorang Panewu jauh lebih ketat dari pada kriteria Panepuluh dan Penatus, sebab Panewu ketika meninggal dunia akan digantikan oleh anak tertuanya, yang lahir laki-laki untuk melanjutkan estafet kepemimpinan orangtuanya.

Inti dari sistem pemilihan Kepala Desa di masa lalu adalah mengandung nilai kearifan lokal berupa musyawarah. Penelitian menunjukkan bahwa 95% masyarakat Indonesia masih lekat dengan budaya musyawarah dan gotong royong (Ivanovic A, 2011, 164). Hal ini seharusnya menjadi *bargaining position* untuk merumuskan bagaimana idealnya pemilihan Kepala Desa saat ini. Bukan malah mengadopsi demokrasi versi Barat dalam sistem pemerintahan desa, menanggalkan nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah lama hidup sebagai bagian integral dalam masyarakat.

Momen pelantikan Presiden Republik Indonesia 2014-2019, harusnya menjadi titik balik dari pembuktian janji. Deklarasi janji dalam Nawa Cita yang salah satunya bersumpah memperkuat institusi desa harusnya diimplementasikan dalam langkah strategis. Frase “sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitas, supervisi dan pendampingan,” harusnya tidak dibiarkan berdiri sendiri tanpa menambahkan frase dinamis dan evaluatif yang menandakan bahwa UU Desa bukanlah sesuatu yang baku. Meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto, hukum adalah alat perekayasa sosial (*as a tool of social engineering*), maka instrumen hukum harusnya bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan sosial kemasyarakatan (Soetandyo Wignjosoebroto, 2012: 20). Semoga saja frase “dinamis dan evaluatif” ini tidak berbanding terbalik dengan frase “konsisten” yang dari awal dirancang.

Mengadopsi teori Lawrence dalam menerjemahkan problematika sistem hukum, tidak lain disebabkan oleh tiga faktor

yakni, *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* yang dapat menjadi pisau analisis permasalahan ini (Lawrence Friedmen: 1997: 21). *Legal structure* merujuk pada lemahnya institusi pemerintahan desa yang teridentifikasi karena sistem pemilihan yang tidak sesuai nilai budaya masyarakat pedesaan. Sedangkan *legal substance* mengarah pada lemahnya substansi UU Desa terkait sistem pemilihan Kepala Desa secara langsung dan serentak. Terakhir *legal culture* memperlihatkan ogahnya orang-orang baik untuk ikut dalam pemilihan karena trauma penjudi.

Bukan intelektual jika memaparkan persoalan tanpa solusi, maka obat dari segala permasalahan ini adalah solusi yang tepat dan efektif. Tiga hal yang menjadi solusi konstruktif dan substansial adalah sebagai berikut.

Pertama, membenahi sistem pemilihan Kepala Desa yang tidak melulu dilakukan dengan jalan pemilihan secara langsung. Tetapi juga membuka ruang kepada desa baik yang terdaftar sebagai desa adat maupun tidak untuk melakukan pemilihan dengan jalan musyawarah mufakat sebagaimana kearifan lokal masyarakat.

Kedua, mengamandemen UU Desa sebagai bagian dari ikhtiar menjadikan instrumen hukum yang adil dan bermanfaat dengan membuka peluang pemilihan Kepala Desa di luar jalan pemilihan secara langsung.

Ketiga, mendorong para negarawan sejati untuk ikut ambil bagian dalam pencalonan Kepala Desa yang dilandasi oleh semangat mengabdikan kepada tanah yang telah mengajarkan nilai-nilai ideologis seorang negarawan.

Tiga solusi ini diyakini mampu mewujudkan Desa yang berbudaya, berkepribadian dan maju sehingga mampu menghasilkan pemerintahan yang melindungi, antikorupsi dan efektif melayani dan bukan hanya menjadi komoditas pemilihan suara Presiden.

Akhirnya cita-cita kemerdekaan dan reformasi hanya bisa diwujudkan dalam kesatuan ikhtiar pembangunan menyeluruh tanpa saling mengabaikan yang dimulai dari kawasan pedesaan. Menagih janji lahirnya pemerintahan yang melindungi, anti korupsi dan efektif melayani hanya akan menjadi bunga tidur jika tidak

diawali dengan menagih janji pembangunan desa yang berpilar pada kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Jika Kepala Desa adalah hati dari pemerintahan desa, maka Presiden adalah hati dari seluruh rakyat Indonesia. Tidak akan ada bagian tubuh yang saling mengkhianati jika hati telah saling berkasih dengan baik.

Menagih janji negarawan adalah menagih janji Presiden. Menagih janji Presiden adalah menagih janji hati dari tubuhnya sendiri. Mari saling berkolaborasi membangun, karena desa bukan obralan![]

# JANJI PEMANTIK HARAPAN BANGSA

*Novianti Purnama Sari*

Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan. Obrol janji dilontarkan oleh para kandidat. Seluruh elemen masyarakat dari akar rumput sampai darah biru dirangkul untuk mendapatkan dukungan suara. Perbedaan kedudukan melebur, para kandidat blusukan ke pelosok negeri dan merangkul berbagai golongan untuk mendukungnya. Negosiasi politik di kalangan elit dan retorika diumbar seperti menyihir publik yang haus perubahan. Pemberitaan seputar pemilu dari hal yang tidak layak dikonsumsi masyarakat sampai hal yang mengedukasi tidak luput dari tayangan televisi.

Masyarakat menilai kandidat presiden dari berbagai perspektif, mulai dari figuritas, intelektual, ketenaran, atau hanya karena kandidat tersebut dari suatu partai politik tertentu. Sedikit masyarakat yang memandang dari sisi nilai-nilai yang tercantum dalam visi, misi, maupun renstra pembangunan. Itulah potret dinamika pemilihan umum yang terjadi di negeri khatulistiwa. Akan dibahas disini nilai-nilai yang dibawa oleh para calon pemimpin yang akan menggerakkan roda kepemimpinan.

Kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan oleh pemimpin seharusnya untuk kemaslahatan seluruh warga, bukan kepentingan beberapa pihak saja. Pembangunan negeri ini dilakukan dari berbagai aspek yaitu ekonomi, pangan, energi dan sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial, infrastruktur, lingkungan hidup, pemerintahan yang pro rakyat. Aspek-aspek tersebut merupakan sarana yang strategis dalam percepatan pertumbuhan dan pembangunan. Presiden terpilih

sudah sepatutnya dan merupakan kewajibannya untuk mencapai pembangunan tersebut. Namun sejatinya, pemerintahan bergerak bukan hanya dikerjakan oleh sang pemimpin negara saja. Para negarawanlah baik secara struktural maupun non-struktural yang mempunyai semangat yang visioner membangun bangsa Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa Joko Widodo menjadi presiden periode 2014-2019 setelah menjalani serangkaian proses konstitusional dan konflik Pemilu. Kemenangan bukanlah saat seseorang menjadi pemenang dalam suatu kompetisi, namun saat seseorang dapat menerima kemenangan maupun kekalahan dan menuntaskan janji-janji yang sudah diucapkannya. Seorang presiden harus menjadi pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh tim kerjanya untuk merealisasikan visi misi yang sudah dibuat dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemimpin harus mempunyai pengaruh, mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk bersama-sama berkarya untuk negeri bukan memeras negeri. Pemimpin harus mampu menggerakkan massa, bukan digerakkan untuk kepentingan orang-orang tertentu. Pemimpin harus tegas dalam memberikan tindakan dan kebijakan.

Janji-janji Jokowi dalam bidang ekonomi adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Mendirikan Bank Petani dan UMKM, hal ini harus benar-benar diwujudkan karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani dan diharapkan bank dan UMKM ini dapat meningkatkan taraf hidup petani menjadi semakin sejahtera. Pemberantasan mafia impor, mungkin akan sangat berat dilaksanakan namun harus ditegaskan untuk dilaksanakan, jangan sampai orang-orang terdekatlah yang sebenarnya menjadi mafia impor dan mengatur kebijakan ini sehingga sulit diberantas. Mewujudkan kedaulatan keuangan melalui kebijakan inklusi keuangan mencapai 50% penduduk, tax ratio GDP menjadi 16%. Pengurangan utang pemerintah, pengaturan ketat penjualan saham Bank Nasional pada investor asing.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai haruslah membuat perekonomian menjadi kuat, berdaulat, adil, dan makmur dan

berdasarkan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai jangan sampai membuat kesenjangan rakyat, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin atau tetap miskin. Ekonomi kerakyatan haruslah membuat perekonomian rakyat kecil meningkat dan angka kemiskinan menurun sehingga kesejahteraan rakyat meningkat.

Jokowi juga berjanji mewujudkan kedaulatan pangan dengan melakukan perbaikan irigasi, pembangunan jaringan irigasi 3 juta hektar sawah, menyediakan 1 juta hektar lahan sawah baru di luar Jawa, menyelesaikan konflik agraria, dan melaksanakan reforma agraria. Saya sebagai mahasiswa pertanian meyakini bahwa pertanian harus dijadikan landasan pembangunan bangsa karena potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar untuk produk-produk pertanian. Pemerintah harus dapat membantu petani dalam proses produksi pertanian seperti benih, dan pupuk.

Konversi lahan pertanian ke nonpertanian harus ditekan, dan diperhatikan oleh Badan Perencanaan Daerah, karena jangan sampai lahan potensial yang mempunyai tanah yang subur dimanfaatkan bukan untuk pertanian. Petani harus memiliki akses terhadap lahan pertanian, pemerintah harus membantu dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan petani. Selain itu, menanamkan rasa cinta dan peduli pertanian, karena sampai akhir hayat manusia akan tetap membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedaulatan pangan menjadi indikator sejahtera atau tidaknya suatu bangsa.

Kedaulatan energi yang dijanjikan adalah dengan mengurangi subsidi BBM dan penurunan harga energi. Konversi BBM ke gas murah domestik masih belum diketahui masyarakat, padahal penurunan subsidi sudah mulai dilakukan. Selain itu, peningkatan efisiensi usaha BUMN penyedia energi di Indonesia (Pertamina, LPG, PNG), pembangunan pipa gas, dan pengembangan energi terbarukan. Pemerintah harus membuat strategi yang mantap dalam kebijakan energi ini khususnya mengenai BBM, karena masyarakat kalangan menengah sampai menengah ke bawah yang juga menggunakan BBM sehingga harus diperhatikan supaya daya belinya dipenuhi.

Pengembangan energi terbarukan harus dikembangkan dan ditingkatkan, karena tidak dipungkiri bahwa BBM akan habis dan perlu ada energi lain yang dapat menyubstitusi maupun menggantikan BBM yang ramah lingkungan dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, dalam bidang teknologi dijanjikan akan melakukan penguatan melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional khususnya dalam sektor pertanian dan industri, serta riset dan pengembangan dasar yang didukung dana pemerintah yang bekerja sama dengan swasta dan perguruan tinggi. Inovasi yang dilakukan haruslah yang dapat diterapkan dan diaplikasikan bukan hanya menambah koleksi penemuan yang hanya disimpan dalam museum riset.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan yang telah dijanjikan adalah pendidikan 12 tahun bebas pungutan biaya dan kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.

Saya setuju dengan dua poin yang dijanjikan ini. Namun yang menjadi kendala utama adalah akses masyarakat terhadap informasi-informasi tersebut, misalnya, masyarakat miskin yang tidak dapat membiayai anak-anaknya sekolah tidak mengetahui bahwa pemerintah mencanangkan pendidikan bebas pungutan atau gratis sampai sekolah menengah atas. Selain itu, tidak semua setiap sekolah dapat *full* menggratiskan biaya pendidikan, masih ada yang memungut biaya untuk kegiatan operasional siswa.

Penataan kurikulum pendidikan di Indonesia memang seharusnya dilakukan, namun kurikulumnya masih belum berkelanjutan. Pergantian kurikulum yang beberapa kali dilakukan masih belum menghasilkan output yang baik bagi siswa. Apalagi, baru saja diterapkan Kurikulum 2013 dan masih masa penyesuaian penerapan. Kebijakan dalam kurikulum pendidikan harus dipikirkan dengan benar-benar matang dan berkelanjutan. Penerapan kurikulum jangan sampai menjadi program kerja yang berganti setiap pergantian kabinet, sebaiknya dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala pada setiap periode kepemimpinan. Saya mengharapkan diadakannya perpustakaan desa untuk mendukung proses pencerdasan.

Pembangunan sosial yang dijanjikan adalah Kartu Indonesia Sehat yaitu peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, dengan mendukung *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektare, program rumah deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk seluruh rakyat di tahun 2019.

Program-program ini harus dikawal dengan baik, jangan sampai hanya program musiman atau hanya berjalan sekali saja sebagai pemenuhan janji, namun harus berkelanjutan sampai mencapai kesejahteraan. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat dipedesaan haruslah diperhatikan dengan baik, jangan sampai ada lagi anggapan bahwa orang miskin dilarang sakit karena tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan. Perbaikan pelayanan puskesmas harus lebih ditingkatkan lagi supaya penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

Pembangunan infrastruktur yang dijanjikan adalah membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama, membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruhnya. Membangun pasar tradisional sebanyak 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia.

Pembangunan infrastruktur desa, daerah pelosok, dan daerah perbatasan harus lebih diperhatikan karena sangat dibutuhkan untuk akses pendidikan, perdagangan, dan pariwisata. Pembangunan pasar tradisional harus benar-benar diwujudkan dan dioptimalkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat serta dijadikan tempat untuk memasarkan produksi pertanian. Pasar tradisional diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melestarikan budaya bangsa dan mengurangi perilaku konsumtif akibat banyaknya pusat-pusat belanja yang modern dan yang dijual kebanyakan produk impor dibandingkan produk tradisional maupun nasional.

Kelestarian alam dan lingkungan harus diperhatikan dalam pembangunan. Permasalahan sampah dan pencemaran akibat limbah harus ditangani agar air yang dikonsumsi dapat terjaga dan aman. Banjir yang terjadi di Ibu Kota harus cepat ditangani,

apalagi yang menjadi RI 1 paling paham dalam menangani masalah banjir, karena kepemimpinan sebelumnya pun mengatasi permasalahan banjir di Ibu Kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus lebih diperhatikan dan penanaman pohon-pohon di Ibu Kota dan reboisasi hutan. Penataan Kota dan Desa pun seharusnya bisa dilakukan untuk mendapatkan lingkungan yang ekologis, sehat, dan lestari.

Negarawan sudah sepatutnya berlepas dari permasalahan diri sendiri dan sudah mampu mengendalikan egoisme dalam hatinya. Negarawan mengemban tugas mulia karena mengurus negeri untuk menebarkan kemaslahatan dan kebaikan yang bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri maupun golongan akan tetapi sudah merelakan dirinya untuk negeri dan telah dimiliki oleh seluruh rakyat.

Semoga Presiden terpilih dapat menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Janji yang telah diucapkan merupakan hutang yang harus dibayar dan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan seluruh rakyat.

Pemimpin tidak harus selalu menjadi pimpinan. Negarawan tidak harus menjadi pemimpin. Negarawan akan terus bekerja saat kondisi apa pun, dimana pun, dan kapan pun. Hati seorang negarawan selalu bergejolak saat ketidaktepatan, kekacauan, dan ketidakbenaran masih bertahta di negerinya. negarawan selalu mempunyai cara untuk mengabdikan, untuk bekerja, dan untuk mengeluarkan potensi terbaik untuk negeri yang dicintainya. Negarawan tidak pernah putus asa untuk berjuang dan memberikan pelayanan terbaiknya untuk bangsa. Bukanlah sebuah masalah menjadi presiden atau tidak, untuk yang tidak terpilih semoga ini bukanlah pemutus perjuangan untuk mengabdikan kepada negeri. Namun, ini merupakan pemantik untuk bekerja lebih keras.

Janji-janji yang sudah dilontarkan merupakan pemantik harapan, untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tidur panjang ketidakberdayaan, bangkit dari kekalahan dari egoisme diri yang masih serakah untuk mengambil yang bukan haknya. Bangkit itu lahirnya para negarawan yang visioner. Harapan itu masih ada, dalam hati yang ikhlas dan penuh keyakinan diri untuk terlepas dari belunggu ketidakpercayaan akan kebangkitan

Indonesia. Saat ini merekalah pemantik harapan bangsa, sang negarawan yang sigap untuk bekerja, kelak kitalah generasi pembaharu dan generasi penggerak. Negarawan yang siap dan sigap mengemban amanah mulia.

Namun, saat ini marilah kita renungkan dalam hati dan mulailah membantu pemimpin kita, Presiden kita untuk memenuhi janji-janjinya untuk menuntaskan amanahnya. Menjadi *social control*, menjadi kepanjangan tangan sang pemimpin, dengan menjadi pemimpin di sekitar kita. Negarawan muda belajar merawat Indonesia.[]

## **Beasiswa Aktivistis Nusantara (BAKTI NUSA) Dompot Dhuafa**

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk kebangkitan bagi sebuah bangsa dan salah satu elemen kebangkitan yang sangat berperan adalah para pemudanya. Karenanya pendidikan pemuda dan mahasiswa harus memperoleh perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas suatu bangsa.

Beastudi Indonesia Dompot Dhuafa adalah salah satu jejaring Pendidikan di Dompot Dhuafa yang berkhidmat pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan. Berbagai pengalaman dalam mengelola beasiswa investasi sumber daya manusia dan pemberdayaan, mengantarkannya untuk juga memperhatikan para pemuda khususnya aktivis mahasiswa yang penuh dengan semangat, idealisme dan potensi untuk perbaikan suatu bangsa. Padatnya aktivitas akademik dan nonakademik, ditambah dengan rongrongan untuk lebih realistis, membuat aktivis cenderung untuk tidak seimbang dan tergadai idealismenya. Padahal, idealisme itulah yang membuat mereka terus berjuang, berkontribusi dan menebar kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani, cerdas, aktif, dan punya integritas untuk melayani masyarakat, dan para aktivis mahasiswa memiliki semua modalnya. Selanjutnya tinggal

bagaimana sistem dapat mendukungnya. Untuk itulah diperlukan sebuah program yang mampu mendukung dan menguatkan peran aktivis mahasiswa sebagai investasi untuk lahirnya pemimpin masa depan yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan masyarakat dan terus berupaya untuk berkontribusi menjadi solusi bagi kompleksnya problematika bangsa.

## **B. DEFINISI**

Program ini bernama Beasiswa Aktivis Nusantara disingkat BAKTI NUSA. BAKTI NUSA adalah investasi sumber daya manusia yang mengelola biaya untuk pendidikan, pembinaan, dan pelatihan, serta pendampingan bagi aktivis mahasiswa.

## **C. TUJUAN**

Program BAKTI NUSA bertujuan mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta program yang akan mengarahkannya menjadi sumber daya manusia yang berkarakter pemimpin yang bertanggung jawab, prestatif dan mampu berkontribusi dan berperan aktif di tengah masyarakat.

## **D. MISI**

Adapun misi dari program BAKTI NUSA adalah:

1. Pengembangan diri peserta program yang berbasis karakter;
2. Membangun dan mengoptimalkan jaringan;
3. Mengoptimalkan peran penerima manfaat dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat;

## **E. BENTUK PROGRAM**

Pelaksanaan program Beasiswa Aktivis dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu:

1. Pemberian dana dukungan aktivitas;
2. Fasilitas pengembangan diri:
  - a. Training

- **Character Building:** Pelatihan pembentukan karakter mahasiswa yang unggul dan kepemimpinan. Dilaksanakan setiap bulan.
- **Training Value:** Pelatihan kerelawanan sosial yang dilaksanakan setiap bulan.
- **Pelatihan Kepenulisan:** Pelatihan dan pendampingan penulisan yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan program.

#### b. Coaching

- **Coaching Aktivistis:** Pelatihan dan pendampingan kepemimpinan praktis oleh fasilitator yang meliputi aspek agama, leadership, dan managerial skill, akademik, dan sosial. Coaching juga berperan sebagai sarana sharing, monitoring dan evaluasi bagi peserta program oleh fasilitator. Coaching dilaksanakan setiap pekan.
- **Coaching Tokoh:** Kunjungan dan diskusi bersama tokoh nasional sebagai sarana memperkaya wawasan dan gagasan bagi peserta program. Silaturahmi tokoh juga dilaksanakan sebagai sarana memperluas jaringan bagi peserta dan lembaga. Silaturahmi tokoh dilaksanakan setiap bulan.

#### c. Penugasan

Bentuk pembinaan yang lain dari Beasiswa Aktivistis adalah penugasan, baik secara perorangan maupun kelompok. Penugasan dilakukan dalam bentuk:

- Penulisan artikel (bulanan);
- Focus Group Discussion (bulanan);
- Event bersama penerima beasiswa (triwulan);
- Social Project (Tahunan).

#### d. Magang

Peserta BAKTINUSA yang telah memasuki tahun kedua diberikan kesempatan terlibat dalam aktivitas kemanusiaan yang dilakukan di jejaring internal maupun mitra Dompot Dhuafa di Indonesia maupun mancanegara.

e. Delegasi

Program BAKTI NUSA memberikan dukungan dan kesempatan kepada peserta BAKTI NUSA untuk mengikuti kegiatan delegasi baik nasional maupun internasional.

f. Support S-2

Dukungan dan fasilitasi bagi peserta BAKTI NUSA yang merencanakan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-2.

3. Fasilitator

Seluruh rangkaian program dikelola oleh seorang fasilitator pada setiap daerah program. Fasilitator bertindak sebagai manajemen program sekaligus pendamping bagi peserta. Fasilitator adalah aktivis/tokoh lembaga kemahasiswaan di PTN daerah program masing-masing.

## F. PESERTA

Peserta program ini pada tahun pertama terdiri dari 24 aktivis mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tahun kedua, peserta program berjumlah 40 aktivis mahasiswa yang berasal dari 3 kampus program tahun pertama ditambah 3 kampus program baru yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), dan Universitas Sriwijaya (UNSRI). Pada tahun ketiga (2013), asal kampus peserta program bertambah satu, yakni Universitas Padjadjaran. Dengan demikian, ada 7 kampus yang mahasiswanya bergabung dalam program ini. Adapun penerima manfaat pada tahun ketiga berjumlah 47 aktivis mahasiswa.

## G. KONTAK PERSON

Informasi lebih jauh tentang BAKTI NUSA bisa menghubungi:

- Budiyanto 0857.4280.6307
- Edi Nugroho 0812.8004.0982

## TENTANG PENULIS



**M. RIZKI** atau akrab disapa Mores adalah mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (2011). Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Wilayah Dewan Eksekutif Wilayah-1 Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Indonesia (FULDFKI). Selain aktif di kampus, Mores juga tergabung dalam Bulan Sabit Merah Indonesia.

Mores juga memiliki kegemaran membaca dan menggambar. Melalui kreativitasnya, ia pernah menjuarai lomba poster edukasi dan video layanan kesehatan di tingkat nasional.



**AA HABIB BAIHAQI.** Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran. Presiden BEM Kema FPIK Unpad (2014). Menjadi tim penggagas berdirinya Ikatan Mahasiswa Perikanan dan Ilmu Kelautan Indonesia. Finalis Mahasiswa Berprestasi FPIK Unpad (2012) serta aktif sebagai asisten dosen mata kuliah Planktonologi Unpad.



**ADITYA PRATAMA.** Mahasiswa Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Geologi ITB (2011). Pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Kekeluargaan dan MSDM Keluarga Mahasiswa Tasikmalaya ITB (2012-2013). Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Keluarga Mahasiswa Tasikmalaya (KMT) ITB, Sekretaris-Bendahara (Sekben) Seksi Mahasiswa

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (SM-IAGI), Sekretaris Jenderal Al-Jibaa, dan Staff Kementerian ESDM KM-ITB. Pernah mendapatkan penghargaan Dean's Award dari Dekan FITB sebagai peraih Ip >3.5 (2011-2014), Juara II PORSENI Kota Tasikmalaya cabang sepak bola (2010), dan Juara II Volly Ball TPB CUP ITB (2012).



**AHSAN RAMADHAN.** Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah kelahiran Jakarta, 19 maret 1993 ini Menteri Kebijakan Eksternal Badan Keluarga Mahasiswa Sejarah UGM 2012, dan kini menjabat sebagai Presiden LEM FIB UGM dan Kordinator Pusat Ikatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastra Seluruh Indonesia 2014-2015.



**ALVIAN NOVI ARVIANTO.** Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNS Surakarta (2011) sekaligus Alumni Sekolah Penerus Bangsa (SPB) BEM UNS tahun 2011. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi HUMAS SIM UNS periode 2014/2015, Kepala Divisi Administrasi dan Kesekretariatan BEM UNS periode 2014/2015. Alvin pernah terpilih sebagai

Mahasiswa Berprestasi FKIP UNS tahun 2014, Indonesia Minister of Environment dalam G20 Youth Forum 2013 di St. Petersburg Russia, Delegate of Belgium dalam President Model United Nation 2012, Delegasi Indonesia dalam Indonesia Malaysia Youth Forum 2014, dan Delegasi UNS dalam Indonesia Youth Forum 2013.



**AMELIA SAKINAH.** Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (2011). Pernah menjabat sebagai Human Resources and Development Manager di Kementerian Pengabdian Masyarakat Kabinet KM-ITB sekaligus Kepala Bidang Eksternal ITB Mengajar (2013-2014). Saat ini masih menjabat sebagai Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan

Himpunan Mahasiswa Planologi ITB. Hobi menjelajahnya sudah mengantarkannya ke beberapa tempat dari gunung, laut, metropolitan hingga desa terpencil. Karena disanalah dia bertemu dengan harapan serta inspirasi untuk meletakkan kebenaran guna menjodohkan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan.



**AMROYANU HABIB.** Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (2011). Saat ini masih menjalankan amanah sebagai ketua Lembaga Dakwah Kampus Al Hurriyyah IPB dan Koordinator Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus IPB.



**AR. HADERANI,** biasa dipanggil Hade. Mahasiswa Jurusan Fisika 2011 FMIPA Universitas Sriwijaya. Saat ini masih menjabat sebagai Gubernur Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Hade juga aktif di forum yang bergerak di bidang nasionalisasi Energi “AMPERA” (Aliansi Mahasiswa Peduli Energi untuk Rakyat).



**ARIYANTO PAMUNGKAS,** Mahasiswa Matematika Institut Pertanian Bogor Angkatan 2011. Kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB Periode 2013-2014. Selain aktif di organisasi formal kampus, Ari juga aktif di komunitas mahasiswa non-profit yang bergerak di bidang sosial-pertanian, yaitu Gerakan Cinta Anak Tani.

Ia pernah menjadi delegasi IPB di bidang legislatif, Ari juga aktif di lembaga legislatif mahasiswa seluruh Indonesia, yaitu FL2MI (Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia).



**ASYA FATHYA NUR ZAKIAH.** Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (2011). Asya pernah menjabat sebagai Bendahara Pengembangan Sumberdaya Mahasiswa BEM TPB IPB (2011-2012), staff Komunikasi dan Informasi BEM FPIK IPB (2012-2013). Saat ini menjabat sebagai Sekretaris UKM Keilmiah IPB - Forum for Scientific Studies

(Forces). Asya pernah meraih sejumlah penghargaan, diantaranya;

Juara 2 Fishery Marine and Olympiad di Universitas Brawijaya; Juara 3 LKTI Pekanas 2 di Universitas Mataram; penerima dana Pengembangan Kreativitas Mahasiswa (PKM) Penelitian dan Gagasan tertulis dari DIKTI; Presentator Paper The 4th International Conference on Sustainable Future for Human Security di Kyoto, Japan. Selain itu, ia pun aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat seperti Bedah Desa I-Share 2013 dan ikut serta dalam konsorium SUIJI-SLP 2014 di Pulau Shikoku, Jepang dan Indonesia.



**AYU SORAYA.** Mahasiswa Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Aktif di Dewan Mahasiswa UNS (2014), Koordinator Kelompok Studi Pengabdian Masyarakat UKM Studi Ilmiah Mahasiswa UNS (2013), Relawan Rumah Zakat Solo, Delegasi dalam ADIC di University of Malaya, Malaysia (2013), Ketua Pelaksana Program Hibah Bina

Desa UKM SIM UNS dari DIKTI (2013), Volunteer Aksi Cinta Budaya Indonesia (ACBI).



**DEDE ROHIMAH.** Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (2011). Pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Keilmuan Fosikagi FKG Unpad (2012-2013) dan tergabung dalam Kelompok Kegiatan Mahasiswa (KKM) Paduan Suara Mahasiswa (PSM) FKG Unpad. Saat ini masih mengemban amanah sebagai Menteri Apresiasi dan Pelayanan

Mahasiswa BEM Kema Unpad (2013-2014).



**DONNY FAJAR RAMADHAN.** Mahasiswa Sastra Sunda Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran (2010). Mendapat amanah sebagai Presiden Keluarga Mahasiswa Unpad (2014). Pernah menjadi Ketua BEM Gama FIB Unpad (2013) dan di tahun sebelumnya menjadi Menteri Luar Negeri KM Unpad.



**EKAMARA ANANAMI PUTRA.** Mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM 2011. Saat ini diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal BEM KM UGM 2014 dan aktif sebagai pengurus HMI Komisariat Fisipol UGM. Pernah menjuarai berbagai perlombaan seperti Lomba Debat Nasional, LKTI Empat Pilar dan Lomba pidato Kandungan Alquran.



**FADJAR MULYA.** Mahasiswa Jurusan Kimia FMIPA UGM (2011). Pernah diamanahi sebagai Kepala Departemen HI LSis FMIPA UGM (2013) dan Ketua BEM KM FMIPA UGM (2014), selain aktif di organisasi Fajar juga menyibukkan diri di dunia kepenulisan. Puluhan tulisan berupa opini dan hasil penelitian pernah dimuat di media cetak.

Ketertarikan di bidang kepenulisan membuat dia selalu mendapatkan hibah Program Kreativitas Mahasiswa dan beberapa lomba penelitian lainnya. Tahun 2013 Fajar menjadi mahasiswa berprestasi FMIPA UGM, dan pada tahun yang sama menjadi delegasi UGM dalam inisiasi jaringan mahasiswa sains-teknologi se-ASEAN di 4 negara berbeda.



**FARIZ ABDILLAH.** Anak kedua dari empat bersaudara yang menempuh studi konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia,, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2010). Fariz pernah menjadi presentator di 11th UNIW International Youth Gathering di Turki (2014). Kini ia juga aktif di dunia kampus sebagai Ketua Umum Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia (FSI FE UI 2013) dan Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI 17). Ia juga pernah mendapat penghargaan dari BEM FE UI sebagai FE UI Most Inspiring Leader (2013) di ajang ELD Awards.



**GISCA AJENG WIDYA NINGGAR** Merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada angkatan 2011. Sebagai tiga besar Mahasiswa Berprestasi FK UGM, Gisca aktif berkontribusi di ranah fakultas dengan menggeluti beberapa organisasi. Gisca pernah menjabat sebagai Kepala Bidang MSC Corporation dan duduk di Standing Committee on Reproductive Health including HIV AIDS (SCORA) CIMSA FK UGM. Saat ini Gisca masih menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Medical Science Club dan menjadi asisten dosen di Departemen Ketrampilan Klinis FK UGM. Di samping itu, Gisca juga tengah menggeluti bisnis di bidang crafting yang diberi nama “Gendhis Manis Craft and Stuff”. Gisca mencetak beberapa prestasi di antaranya menjadi Inspiring Student FK UGM bidang Research, pernah tergabung dalam kontingen UGM dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke XXVI dan XXVII, menyabet 4th winner dalam ajang kompetisi internasional Indonesia International bio Medical Science Congress.



**HIKMATYAR ABDUL AZIZ.** Mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011). Saat ini menjabat sebagai Menteri Media Informasi BEM UNS periode 2014/2015. Selain di BEM, Hikmatyar juga aktif membantu di Biro Asistensi Agama Islam Fakultas Teknik UNS. Beberapa kali menjadi juara sayembara dan kompetisi desain arsitektur tingkat nasional.



**IBRAHIM WAHID.** Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (2010). Saat ini Menjabat sebagai Menteri Pengabdian Masyarakat di BEM KM Universitas Sriwijaya dan Kepala Rumah Tangga Pramuka Universitas Sriwijaya.



**ISMA NURILLAH.** Mahasiswi Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya. Isma aktif di DPMU (Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas), ALSA LC UNSRI, BO Kerohanian Fakultas, BO Olahraga Fakultas, serta tergabung dalam team debat Fakultas Hukum UNSRI.



**JHANE PEBYANA WILIS** merupakan Mahasiswi Sosiologi FISIP UI Angkatan 2011. Kini menjabat Ketua Umum (Himpunan Pengusaha Muda) HIPMI UI 2014/2015. Bergelut di bisnis retail kurma bernama Juragan Korma Company. Sekarang Jhane sedang membuat skripsi dengan topik seputar society eating habits, foodsystem, dan agribusiness. Membuka diri untuk berkorespondensi di [jhanewilis@gmail.com](mailto:jhanewilis@gmail.com).



**Kgs. M. ADITIA.** Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya (2011). Pernah menjabat sebagai Ketua English Club Fakultas Ilmu Komputer UNSRI (2012-2014). Saat ini masih aktif sebagai anggota English Club.



**MUHAMMAD ISYRAQI EL-HAKIM** atau akrab dengan panggilan Choqy merupakan mahasiswa Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, jurusan biologi, Institut Teknologi Bandung (2010). Pernah menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMAN 4 Bandung (2008-2009), Ketua Materi Kaderisasi LSS ITB (2011), juga menjadi Ketua Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Biologi ITB (2013-2014). Sekarang menjabat sebagai Ketua Angkatan SITH ITB, Ketua Forum Indonesia Muda Angkatan ke-15 (2013-sekarang). Beberapa prestasi yang pernah diraih adalah; Peringkat 1 dalam Lomba Menulis Surat untuk Gubernur Jawa Barat, Peringkat 1 Lomba

Business Plan Asian Pasific Economy Conference 2013. Sempat berpengalaman kerja di berbagai perusahaan sebagai marketing, event organizer, ataupun pengajar. Sekarang sedang diamanahkan menjadi leader class training dari PT. Perusahaan Gas Negara Indonesia



**MUHAMMAD RIFKI ALI** Mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknik UGM (2014). Relawan Bulan Sabit Merah Indonesia Regional Jogja, Departemen Pemberdayaan Masyarakat (2014). Koordinator Cinta Anak Negeri (CAN), Madani, Keluarga Muslim Teknik (2011-2012). Pernah menjadi Juara

Favorit 2nd National Chem-E-Car Competition di ITS (2013).



**M SYUKRI KURNIA RAHMAN.** Mahasiswa Pendidikan Dokter FK UNS angkatan 2011, sekaligus sebagai santri di PESMA Ar-Royyan Surakarta. Saat ini diamanahkan sebagai asisten dosen Fisiologi FK UNS dan ketua umum Sentra Kegiatan Islam (SKI) FK UNS 2013-2014. Prestasi yang pernah diraih; Juara III National Olympiad of Islamic Lesson BPPI UNS. Syukri juga aktif

menulis di [dokterberpeci.blogspot.com](http://dokterberpeci.blogspot.com)



**NABELLA RIZKI AL FITRI.** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2011). Saat ini menjabat Ketua Putri Asistensi Agama Islam Fakultas Hukum dan Ketua Putri Bidang Pembinaan Forum Silaturahmi Mahasiswa Islam (FOSMI) Fakultas Hukum. Prestasi yang pernah diraihnya adalah; sebagai presenter dalam Konferensi Internasional Hukum Ekonomi Islam (ICIJ) di

Malaysia dan prosiding pada DEYS Turkey. Di masa depan, Nabella selalu bermimpi menjadi sorang hakim Konstitusi dan juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum untuk membela hak-hak muslim dan anak. Hal jazaaulihsan ilal ihsan adalah moto hidupnya.



**NOUR MUHAMMAD ADRIANI.** Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran (2011). Pernah menjadi pembicara pada 23rd International Conference of Historians of Asia 2014 di Malaysia dan nominator Mawapres FIB 2014. Beberapa kali diundang sebagai pembicara dalam kegiatan kemahasiswaan bertema Sejarah antara lain di UGM (2012) UNY (2013). Saat ini menjabat sebagai Ketua BEM Gama FIB (2013-2014).



**NOVIANTI PURNAMA SARI.** Mahasiswa Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (2011). Pernah menjabat Sekretaris Umum BEM TPB IPB (2011-2012), Sekretaris Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM Fakultas Pertanian (2012-2013). Saat ini masih menjabat sebagai Senior Resident Asrama Tingkat Persiapan Bersama IPB sebagai manajemen program Humas Asrama TPB IPB dan pendamping Dewan Gedung. Novianti juga aktif dalam komunitas One Day One Thousand yang merupakan komunitas yang peduli kepada kemanusiaan.



**RIAN MANTASA SALVE PRACTICA.** Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Menjabat Ketua BIRO AAI Fakultas Teknik (2014); Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan SKI FT UNS (2014); Dirjen Riset dan IPTEK BEM FT UNS (2014). Kepala Departemen Pengelola Peserta Asistensi dan Kaderisasi BIRO AAI UNS (2014) ini pernah meraih Juara 3 LKTI Nasional Desain Kawasan Navigasi Sungai di Universitas Hasanuddin, Makassar (2014); Juara 2 Mahasiswa Berprestasi Fakultas Teknik (2014); dan masih aktif sebagai relawan Solo Mengajar sejak awal tahun 2013. Saat ini, Rian juga menjadi asisten Laboratorium Hidrolika.



**RIZAL EKO KURNIAWAN.** Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (2010). Pernah menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FKH IPB (2012-2013). Saat ini masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Dakwah Fakultas FKH IPB. Selain aktif di dalam kampus, Rizal juga aktif di luar kampus di Lembaga sosial Yayasan RUBI Bogor yang

bergerak di Bidang Pendidikan karakter dan religi. Penulis pernah meraih penghargaan sebagai peneliti muda terbaik Kedua Youth National Research Competition di Tahun 2012 dan Terbaik Pertama 2013 di Universitas Negeri Padang



**SHOIM MARDIYAH** Mahasiswi Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (2011). Aktif di Unit Kegiatan Teater Kampus-TGM (Teater Gajah Mada) sejak 2012, hingga kini masih menjabat sebagai Sekretaris I TGM. Ia cukup aktif mengikuti kompetisi seperti Festival Teater Jogja dan Pekan Seni Mahasiswa Daerah 2014 dan mendapatkan juara 2 pada cabang lomba

Monolog Teater. Di luar kampus, menjadi anggota aktif di Sanggar Sastra Indonesia-Yogyakarta. Melalui teater, ia belajar mengolah raga dan rasa untuk menjadi manusia yang lebih peka.



**SISCHA RAMADHANI.** Mahasiswa Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (2011). Saat ini masih menjabat sebagai Bendahara Departemen PPSDM UKM Nadwah Unsri dan Dewan Penasihat Pengurus Bidang Ilmiah BSO Diligent PSPDG FK Unsri. Selain aktif di kampus, Sischa juga aktif dalam beberapa organisasi seperti ISBA dan IRMA. Kegemarannya

adalah membaca dan menulis, terutama tulisan-tulisan bergenre fiksi



**TRIANA RAHMAWATI (TRIA).** Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta (2011). Pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Kajian Strategis Kementerian Luar Negeri BEM UNS (2013). Saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Menteri Humas dan Jaringan BEM UNS dan Menteri Luar Negeri BEM FISIP UNS. Selain aktif di dalam

kampus, anggota Forum Indonesia Muda (FIM) ini tercatat aktif di kegiatan sosial seperti Jalan Pemimpin, Griya Schizofren dan ACBI. Gemar menulis dan sering menuangkan gagasan di media sosial dan media massa. Liputannya sebagai citizen journalism sering di tayangkan di wideshot Metro TV.



**ZULAIKA.** Mahasiswa Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (2010). Pernah menjabat sebagai Anggota Badan Pekerja Nasional Wilayah Jawa Barat FSLDK Indonesia. Saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Komisi Ke-LDK-an, Pusat Komunikasi Nasional FSLDK Indonesia. Selain aktif berorganisasi, Gemar travelling dan mengikuti seminar keilmiah.



**DADAN HUDANULHAK.** Mahasiswa Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (2010). Aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan sejak tingkat pertama dan pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sumber daya mahasiswa (PSDM) di Forum Mahasiswa Muslim dan Studi Islam (FORMASI) FEM IPB (2012-2103).

Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum KAMMI Komisariat IPB periode 2014-2015. Pernah mendapatkan penghargaan sebagai Best Staff Of The Year BEM KM IPB Berkarya (2012) dan The Best Margin Trader dalam Stock Day IPB 2012. Selain itu sampai saat ini masih terus belajar menjadi salah satu trainer outbound dan training, Satu Inspirasi (SAINS).



**DITHA INAWATI SAM**, saat ini tercatat sebagai mahasiswa aktif di Departemen Biologi FMIPA UI. Lahir di Jakarta, 22 Juli 1992. Ditha memiliki minat dalam bidang genetika dan konservasi biodiversitas. Di kampus, Ditha pernah tercatat aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Mipa, Himpunan Mahasiswa Departemen Biologi, Badan Semi Otonom KSHL Comata (Kelompok Studi Hidupan Liar Comata), juga Badan Semi Otonom SIGMA B-UI (Special Interest Group in Marine Biology UI). Saat ini ia menjabat sebagai Ketua UKM BSO University of Indonesia Achievement Community 2014. Mendapatkan penghargaan sebagai penerima beasiswa Goodwill International disponsori oleh Australian and New Zealand Association selama 2 tahun, tercatat sebagai penerima Bank of Tokyo UFJ Mitsubishi Scholarship, dan saat ini tercatat sebagai penerima manfaat Beastudi Indonesia BAKTI NUSA (Beasiswa Aktifis Nusantara) UI angkatan 4. Ditha aktif menjadi delegasi dalam berbagai forum diskusi seperti diskusi International mengenai Peran Pemuda dalam Kesehatan dan Lingkungan Global (Youth be Aware : Health and Environment) yang dilaksanakan di Melaka, Malaysia. Diskusi mengenai perdagangan manusia (Human Trafficking on women and children) di Malaysia. Mendapatkan penghargaan untuk mempresentasikan karya, baik oral maupun poster, di beberapa Negara Eropa maupun Asia, serta di Indonesia dalam Konferensi Ilmuwan Muda Indonesia pada tahun 2014.



**DWI RENDRA HADI**. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (2011), sehari – hari aktif di BEM IKM FKUI. Selama dua tahun berada di Departemen Kajian dan Aksi Strategis serta pernah menjabat sebagai Kepala Departemen di tahun 2013. Pada tahun 2014 ini aktif sebagai ketua BEM IKM FKUI 2014. Selain di BEM, ia pernah aktif di Forum Studi Islam FKUI.



**IRMA NOVIKAWATI** Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (2011). Pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Alumni dan Jaringan JMMB tahun 2013. Aktif dalam Komunitas Untuk Jogja, FLAC (Future Leader for Anti-Corruption) Jogja. Terpilih sebagai delegasi Indonesia dalam event Asean Youth Exchange Program (Thailand, 2013). Presenter dalam International Student Conference on Advanced Science and Technology (Jepang, 2013). Tergabung sebagai asisten ekologi dan pencemaran lingkungan di Laboratorium Ekologi dan Konservasi sejak 2013. Pernah mendapatkan hibah DIKTI dalam Program Kreativitas Mahasiswa di bidang penelitian, pengabdian masyarakat maupun gagasan tertulis pada tahun 2011 dan 2012.



**MOHAMAD IVAN RIANSIA.** Ialah anak pertama dari 3 bersaudara. Pria kelahiran Jakarta pada 21 Oktober 1992 ini senang mengikuti kegiatan di luar sejak SMP. Bagi penulis, dapat memberikan manfaat seluas luasnya kepada orang lain adalah sebuah anugerah yang tidak dapat diungkapkan. Kini penulis menjalankan amanah sebagai Ketua Umum BEM UI 2014, sekarang juga sebagai penerima manfaat Beasiswa Aktivistis Nusantara angkatan ke-4. Penulis juga aktif sebagai asisten Laboratorium Kimia Dasar pada Jurusan Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia



**RAFI PUTRA ARRIYAN** biasa disapa dengan panggilan Ari. Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia ini sangat ingin mengetahui rahasia dan potensi terpendam di balik user experience design. Selain aktif di berbagai kegiatan kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, pengagum John Maeda ini juga pernah mewakili Indonesia dalam kompetisi Marching Band tingkat dunia. Ari bermimpi agar dapat memberikan pengalaman terbaik bagi

masyarakat di sekitarnya melalui core-nya sebagai computer scientist.



**MAMAN.** Mahasiswa aktif Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad angkatan 2011. Selain kuliah, ia aktif berorganisasi, baik di himpunan mahasiswa, Lembaga Dakwah Kampus hingga di Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada saat ini ia mengemban amanah sebagai Ketua BEM FISIP Unpad sampai dengan bulan Desember 2014. Sebelumnya ia juga pernah mengemban amanah sebagai ketua DKM FISIP Unpad dan salah satu staf di Kementerian Agama dan Pengabdian Masyarakat Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad.



**SILVIA RANNY WAFIROH** adalah mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Indonesia (2011). Saat ini Silvia aktif sebagai Wakil Ketua I Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Eka Prasetya UI 2014. Kesibukannya berorganisasi tidak membuatnya lengah untuk tetap menyeimbangkan diri dengan berbagai macam prestasi akademik. Baru-baru ini, Silvia berhasil menyabet Juara 1 Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Psikologi UI tahun 2014. Mahasiswa asal “Kampung Idiot”, Ponorogo, Jawa Timur ini dikenal sebagai orang yang pantang menyerah dan bermotivasi tinggi untuk meraih tujuannya.



**LISA N.** Mahasiswa aktif program studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran UGM 2011. Ia pernah menjadi Duta Bahasa Banten, Sekretaris Jenderal BEM FK UGM (2013). Lisa juga diamanahi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bunderan (2013-2014), Ketua Komisi Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM. Selain aktif di dalam kampus, Lisa juga aktif di luar kampus, yaitu Bulan Sabit Merah Indonesia Jogjakarta. Lisa pernah meraih The Best Speaker on The Third International Symposium on Society, Technology, Tourism, Education and Politic. Gemar melakukan penelitian dan sudah 3 kali publikasi ilmiah di ajang internasional, dan salah satu owner bisnis online Ganti jilbab.